

METODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN

Muhtar Haboddin dkk

2016

METODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN

Copyright©Muhtar Haboddin, 2016

Penulis:

Muhtar Haboddin
Tunjung Sulaksono
Yanuardi
Longgina Novadona Bayo
Ahmad Husni Mubarak
Widya Priyahita

Tata Letak:

Rifki Romadhon

Editor:

Muhtar Haboddin

Diterbitkan oleh:

**Pusat Kajian Inovasi Pemerintahan dan Kerjasama
AntarDaerah**

2016

ISBN 978-602-17392-6-6

KATA PENGANTAR

Salah satu alasan yang menggerakkan penulisan buku yang berjudul **METODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN** adalah keterbatasan buku ataupun modul yang berbahasa Indonesia. Keterbatasan ini kemudian disiasati dengan menulis bersama dari berbagai Universitas di Indonesia. Hasilnya sangat memuaskan karena tulisan-tulisan yang terangkum dalam buku ini mampu merekam dinamika dan perkembangan pendekatan ilmu politik dan ilmu pemerintahan.

Dalam tulisan Pratikno secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa perkembangan metodologi ilmu pemerintahan tidak bisa dilepaskan dengan perkembangan metodologi ilmu politik. Dalam konteks pendekatan ilmu pemerintahan yang sangat cepat dalam mengadopsi pendekatan-pendekatan baru yang sedang berkembang dalam ilmu politik. Misalnya 'pendekatan *normative* atau filsafat politik, pendekatan kelembagaan formal negara, pendekatan perilaku, pendekatan teori negara, pendekatan diskursus dan pendekatan feminisme'¹.

Kemampuan dalam mengadaptasi atau mengadopsi pendekatan baru berimplikasi positif dalam perkembangan ilmu pemerintahan itu sendiri. Sebab meminjam bahasa Jack C Plano dkk, '*pengembangan*

¹ Pratikno, 'Melacak Ruang Kajian Pemerintahan dalam Ilmu Politik' Jurnal Transformative, Vol.1. No.1 Tahun 2003. hlm.18

*pendekatan-pendekatan baru untuk penelitian politik dan pemerintahan menjadi bagian dari usaha umum untuk mengembangkan disiplin yang lebih ilmiah, lebih teliti dan lebih sistematis*².

Konsep-Konsep kunci

Metodologi. Metodologi menyangkut pengumpulan, analisa, pengukuran, evaluasi dan pemakaian data. Ilmuwan lain mengatakan metodologi tidak hanya menyangkut teknik tetapi juga menyangkut rancangan penelitian yang lebih luas, pemilihan cara penalaran induktif atau deduktif, kriteria pengenalan variabel-variabel yang relevan, dan standar bukti serta penjelasan yang dapat diterima³. Jika menggunakan penalaran *deduktif*, kita menyusun klaim, atau hipotesa, dari teori yang sudah ada. Atau dengan kata lain, kita mengembangkan gambaran umum dari kehidupan sosial dan kemudian meneliti aspek tertentu dari gambaran umum itu untuk menguji kekuatan teori. Sebaliknya, penalaran *induktif* dimana kita menyusun teori kita berdasarkan hasil temua empirik⁴.

Paradigma. Paradigma adalah kerangka acuan dari ide-ide yang membentuk konteks umum bagi analisa. Pada dasarnya paradigma memadukan berbagai asumsi filosofis dengan kriteria pengetahuan yang sah. **Teori.** Teori adalah pernyataan umum yang meringkas gerakan nyata atau pengandaian dari perangkat variabel⁵. Sedangkan Lisa Harrison mengatakan teori 'membuat fakta jadi berguna dengan cara memberikan kita kerangka untuk menginterpretasikan fakta itu dan memandang hubungan antar-fakta. **Fakta** adalah serangkaian simbol yang

² Jack C Plano dkk, *Kamus Analisa Politik*, Jakarta, Rajawali Press, 1985., hlm.7

³ Jack C Plano dkk, *ibid.*, hlm.127

⁴ Lisa Harrison, *Metodologi Penelitian Politik*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2007. hlm.7

⁵ David Apter, *Pengantar Analisa Politik*, Jakarta, LP3ES, 1988., hlm.31

berkaitan secara logis yang merepresentasikan apa yang kita anggap terjadi dalam dunia riil⁶.

Pendekatan. Suatu pendekatan bisa menentukan metode khusus penelitian politik, memusatkan pada cara-cara tertentu pengevaluasi dan menafsirkan data, atau dalam bentuknya yang paling canggih, mengajukan perangkat teori mengenai kaitan dan ditemukan di dalam data. Lebih lanjut ia mengatakan: suatu pendekatan memberikan kemungkinan untuk dilakukannya penelitian penuntun dan menentukan jenis berbagai gejala politik yang luas dengan mencocokkannya di dalam perangkat konsep yang telah dibatasi⁷.

Metode. Metode adalah cara menyusun teori-teori untuk diaplikasikan pada data. Kadang-kadang ia dinamakan rencana konseptual. Beberapa jenis metode bersifat kompatibel (mempergunakan lebih dari satu kasus), historis (mempergunakan waktu dan ukuran), konfigurasional (mempergunakan satu kajian saja), serta simulatif (memakai tiruan)

Teknik. Teknik menghubungkan metode dengan data yang relevan. Teknik merupakan cara mengamati dan merekam informasi empiris. **Model.** Model adalah cara sederhana untuk menggambarkan hubungan-hubungan. Model dapat dibangun dari paradigma, teori metode, atau teknik. Model dapat bersifat tipologis, deskriptif, metodologis, formal dan seterusnya. **Disain Riset.** Disain Riset mengubah strategi menjadi rencana operasional untuk kerja lapangan atau eksperimen. Ia merupakan propektus atau bagan untuk melakukan riset. Disain Riset merupakan tahap terakhir dalam setiap riset profesional⁸

Tentang Buku ini

⁶ Lisa Harrison, *Metodologi*, *op.cit.* hlm.7

⁷ Jack C Plano dkk, *Kamus Analisa Politik*, Jakarta, Rajawali Press, 1985., hlm.7

⁸ David Apter, *Pengantar Analisa Politik*, Jakarta, LP3ES, 1988., hlm.31

Buku ini merupakan bentuk perhatian kami terhadap pertumbuhan dan perkembangan pendekatan ilmu politik dan ilmu pemerintahan. Buku ini diawali dua tulisan **Widya Priyahita** yakni bab I dan bab II secara berturut-turut mengenai politik ilmu dan perkembangan ilmu politik yang sangat Amerika. Ia mengkaji tentang pergulatan politik ilmu secara kritis dan mendalam. Baginya studi tentang politik ilmu sangat penting untuk dilakukan karena selama ini tema tersebut dibanyak yang menyentuh. Sedangkan pada bab II, **Priyahita** menyodorkan fakta bahwa perkembangan studi ilmu politik sangat berbau Amerika. Dominasi pengaruh Amerika sangat terasa dalam perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Bab III mempersoalkan mengenai pendekatan tradisonal dalam ilmu politik. Sementara Bab IV mengetengahkan pendekatan Tradisionalisme ke Perilaku. Baik bab III maupun Bab IV ditulis **Muhtar Haboddin**.

Sementara Bab V ditulis **Ahmad Husni Mubarak** dengan judul Pendekatan Behavioralisme dan Tradisi '*Scientific*' dalam Ilmu Politik. Mubarak mencoba melacak tradisi pendekatan Behavioralisme secara menyeluruh. Sedangkan Bab VI ditulis **Tunjung Sulaksono** dengan menelaah perkembangan Pendekatan Behavioralisme dan Para Penantangannya. Menurutnya pendekatan Behavioralisme sangat dominan dalam perkembangan ilmu politik di Amerika Serikat. Dominasi pendekatan ini, kemudian merebak dan memiliki pengaruh kesejumlah negara. Bila ditelaah secara kritis tulisan Mubarak dan Laksono memiliki benang merah yang sama yakni sama-sama mempersoalkan dan mengkritisi pendekatan Behavioralisme.

Adalah **Yanuardi** dalam Bab VII memaparkan Pendekatan Postruktural Dalam Studi Ilmu Politik. Tulisan ini mengusung semangat dan pendekatan baru dalam ilmu politik dan pemerintahan. Selanjutnya, pada bab VIII yang berjudul *Rational Choice Theory* Dalam Ilmu Politik: Kritik Dan Perkembangannya ditulis oleh **Longgina Novadona Bayo**. *Rational Choice Theory* sedang banyak digunakan dalam studi kajian

partisipasi politik maupun studi mengenai pemilu. Merebaknya peristiwa pemilukada beberapa tahun terakhir mengharuskan kembali para pemerhati, peneliti maupun ilmuwan untuk memakai *Rational Choice Theory*. Sedangkan bab IX memperkenalkan kepada mahasiswa Ilmu pemerintahan mengenai pentingnya belajar Riset Partisipatoris dalam kajian ilmu pemerintahan. Riset ini sejatinya dipelajari secara seksama agar menambah pemahaman kita bersama.

Penulis ingin mengucapkan kepada mas Tunjung, mas Yanuardi, Mas Husni, Mas Widya, dan Mbak Nova karena telah memperbolehkan tulisan untuk digunakan sebagai bahan bacaan pada mata kuliah **METODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN**. Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan kepada *Mas Aswin* dan *Mbak Restu* atas bantuannya hingga buku ini bisa diterbitkan. Tentu kehadiran buku ini merupakan sangat membantu bagi mahasiswa dalam memahami metodologi ilmu pemerintahan. Kepada Istiku yang tercinta: Firly Noorsanti F, buku kupersembahkan padamu.

Sebagai kata penutup ada baiknya kita merenungkan kalimat novelis sejarah Indonesia, Pramoedya Anta Toer: *orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ini tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian.****.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	vi
BAB I Urgensi Politik Ilmu	
Widya Priyahita	1
BAB II Mempersoalkan ilmu sosial Indonesia yang <i>American-Minded</i>	
Widya Priyahita	51
BAB III Pendekatan Klasik dalam Ilmu Politik	
Muhtar Haboddin	92
BAB IV Dari Tradisionalis Ke Behavioralis	
Muhtar Haboddin	111
BAB V Pendekatan Behavioralisme dan Tradisi ' <i>Scientific</i> ' dalam Ilmu Politik	
Ahmad Husni Mubarak	130
BAB VI Pendekatan Behavioralisme dan Para Penantangannya	
Tunjung Laksono	151

BAB VII	Pendekatan Postruktural Dalam Studi Ilmu Politik	
	Yanuardi	177
BAB VIII	<i>Rational Choice Theory</i> Dalam Ilmu Politik: Kritik Dan Perkembangannya	
	Longgina Novadona Bayo	192
BAB IX	Riset Partisipatoris Dalam Ilmu Pemerintahan	
	Muhtar Haboddin	210
Daftar Pustaka	221

BAB I

URGENSI POLITIK ILMU^{*}

Widya Priyahita[^]

***Exordium*¹: Menggugat Normativitas**

Ilmu² memiliki peran yang sangat besar (vital) dalam perkembangan masyarakat³. Setidaknya ada tiga hal, yakni:

^{*} Tulisan ini merupakan penggalan ide yang tertuang secara lebih utuh dalam laporan penelitian berjudul *Apolitical Politics: Kajian Ilmu dan Kekuasaan* (2012), yang dikerjakan penulis.

[^] Peneliti PPKK, Fisipol, Universitas Gadjah Mada.

¹ *Exordium* berasal dari Bahasa Latin yakni *exordiri* atau permulaan, dalam bahasa Inggris secara spesifik kata ini diartikan sebagai suatu permulaan dari diskursus (Concise Oxford English Dictionary, 2004, dalam Juru, 2012).

² Secara sederhana ilmu merupakan pengetahuan yang didapat melalui proses tertentu yang dinamakan metode keilmuan. Metode inilah yang membedakan ilmu dengan buah pikiran lainnya. Contoh sederhana, kajian “ilmu politik” atau “politik sebagai ilmu” berbeda dengan kajian “pemikiran politik”. Simak: Qadir [ed (1988)], Peursen (1985), Keraf & Dua (2001).

³ Salah satu filsuf sosial besar yang menulis mengenai peran vital ilmu dalam perkembangan masyarakat adalah Bertrand Russerl, berasal dari Inggris, penerima nobel satra tahun 1950. Judul bukunya yaitu *Impact of Science on*

merumuskan idealita-normatifikatif yang menjadi pegangan hidup, menganalisis permasalahan sosial, mencari jalan keluar (solusi) atas permasalahan yang terjadi tersebut, serta melakukan prediksi-prediksi/ramalan (futuristik) atas berbagai kemungkinan yang akan terjadi.⁴ Namun di sisi lain, sifat ilmu yang hegemonik kemudian membuat dirinya menjadi strategis dan menghadirkan peluang-peluang kooptasi sebagai alat pengejaran kepentingan (ekonomi-politik). Pada titik ini tesis 'bekerjanya relasi antara ilmu dan kuasa'⁵ maupun postulat yang dihasilkan Foucault mengenai

Society, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia: *Dampak Ilmu Pengetahuan atas Masyarakat* (Russerl, 1992). Russertl menjelaskan bahwa ilmu telah menyebabkan akselerasi evolusi sosial. Tak selalu menguntungkan namun juga dilematis. Seperti pada kasus perlombaan persenjataan maupun pengembangan nuklir, serta justifikasi ilmiah bagi tindakan anti kemanusiaan yang dilakukan sebuah rezim.

⁴ Pendapat peneliti yang didasar-sarikan dari kumpulan tulisan (bunga rampai) mengenai (hakikat) ilmu dalam buku, Suriasumantri [(ed), 2006]. Versi yang lain, Kleden (1987: xvi) berpandangan bahwa dalam hubungan dengan masyarakat yang hendak dijelaskannya, ilmu-ilmu sosial dapat memainkan tiga jenis peranman utama, yaitu sebagai legitimasi sosial, sebagai rekayasa sosial, dan sebagai kritik sosial.

⁵ Dalam bahasa yang lain, Jurgen Habermas menggunakan terminologi 'kepentingan' untuk menjelaskan maksud terselubung di balik operasi (ilmu) pengetahuan. Ia memperkenalkan epistemologi baru hubungan antara *Erkenntnis und Interesse* (pengetahuan dan kepentingan) dalam tiga karyanya: *Erkenntniss un Interesse* (1973), *Technik und Wissenshacft als 'Ideologie'* (1981), *Theorie und Praxis* (1978). Menurut Kleden (1987: xvi), ada dua tesis dasar yang dikemukakan Habermas, *pertama*, setiap jenis (ilmu) pengetahuan telah lahir dari dorongan jenis kepentingan tertentu. *Kedua*, hubungan dengan jenis kepentingan yang mendorongnya bersifat niscaya. Pembicaraan menyangkut keterkaitan 'ilmu' dengan 'kuasa', dan 'kepentingan', karenanya kemudian tak dapat dilepaskan pula dari perdebatan soal 'nilai' (*value/werte*) di dalamnya. Apakah ilmu bebas nilai (*wertfreiheit*) atau justru sebaliknya? Dirk Huelst, sebagaimana diringkas

‘kuasa ilmu’⁶ perlu kita pahami untuk dapat melihat dua wajah ilmu secara jernih –yakni wajah politisnya.

Walaupun disadari urgensinya yang tinggi, hingga kini kajian yang mengupas (pengembangan) ilmu sebagai objek kaji masih jarang dilakukan terlebih dengan kaca mata ilmu politik. Kalau *toh* ada, pembedahan ilmu condong dilakukan pada dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang bercorak filsafati dalam kerangka filsafat ilmu. Di luar itu ada pula sosiologi pengetahuan [*wissenssoziologi (ala Manheim, 1936)*] maupun sejarah perkembangan ilmu. Yang disebut belakangan relative dominan. Sejauh pelacakan penulis, kajian terpublikasi kebanyakan dilangsungkan pada pertengahan era Orde Baru. Atau pada tahun 1980an. Setelah itu kontinuitas kajian serupa bisa dikatakan tersendat. Sejumlah karya yang dimaksud di antaranya: Alfian (1979), Taufik (1979), Budiarjo dan Rauf (1983), Priyono [(ed), 1984], Alfian dan Mukmin [(ed), 1985], serta Soeroso (1986), , Kleden (1987), Malo [(ed), 1989], Nordholt dan Visser [(ed), 1997], Hadiz dan Dhakidae [(ed), 2006], Samuel (2010), Alatas (2010),

Kleden (1987: xvii), menulis dalam bukunya, *Kritischer Rationalismus: Eine Zeitgemaeesse Philosophie?* (1977), kalau masalah nilai dalam ilmu pengetahuan umumnya, dan dalam ilmu sosial khususnya, secara sederhana terdiri dari tiga lapis persoalan berbeda, yaitu: nilai sebagai basis bagi asumsi dan teori ilmu, implikasi nilai dari penerapan ilmu, dan penilaian sebagai tindakan ilmiah. Pun, ada erat kaitannya pula dengan ketegangan dua kubu pembela ‘objektivitas’ di satu sisi dengan ‘subjektivitas’ di sisi lain. Diantara kerumunan ilmuan yang melibatkan diri dalam konflik ilmiah itu, berikut adalah beberapa yang menonjol (tanpa mengecilkan yang lain): Fritjof Capra, Jurgen Habermas, Karl Mannheim, Karl R Popper, Paul Ricoeur, Thomas Khun.

⁶ Merupakan poin penting dalam, Foucault (1979); ____ (1997); ____ (2002); ____ (2002).

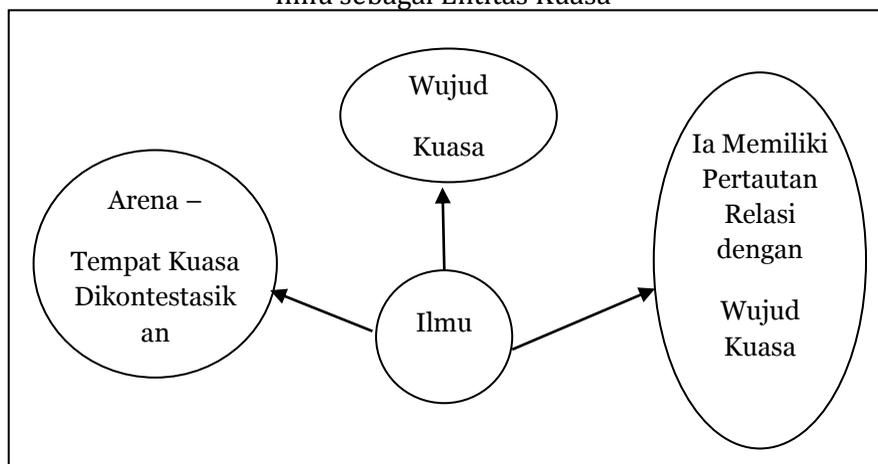
juga Santoso (2012)⁷. Objek kajinya kebanyakan adalah kurikulum, publikasi ilmiah, dan kegiatan-kegiatan penelitian. Karakteristiknya lebih bersifat deskriptif, dengan bobot analitik yang cenderung rendah –sebatas kumpulan data lainnya tulisan sejarah naratif. Perkembangan ilmu disampaikan tanpa kata tanya “mengapa” dan “bagaimana”. Ia lebih mengurai detil informasi atas rentetan kejadian menyangkut “apa”, “siapa”, “kapan”, dan “dimana” pengembangan ilmu dilakukan. Antara kajian yang satu dengan kajian yang lain bersifat saling melengkapi dan mengakumulasi. Sehingga kemudian teks-teks yang berkembang relatif seragam dalam hal perspektif. Ia lebih berperan sebagai peneguh wacana daripada kritik. Hal tersebut menjadi *lumrah* dipahami, bila kita menautkannya dengan corak rezim orde baru yang otoritarian-monolitik.⁸

⁷ Kajian yang terkait relasi ilmu dan kuasa kebanyakan dilakukan dengan fokus kaji cendekiawan atau kaum intelektual. Beberapa diantara yang terpenting adalah sebagai berikut: Hartoko (1981), Mahasin dan Nashir [(ed), 1984], Rahardjo (1993), Ali-Fauzi [(ed), 1995], Priyono [(ed), 1996], Sparingga (1997), Federspiel (1997), Malarangeng (2002), Dhakidae (2003), Sunardi (2005), Latif (2005), Burhanudin (2012), dan Nugroho (2012). Tulisan-tulisan mengenai ekonomi-politik pendidikan tinggi (universitas) hampir seluruhnya berupa artikel, makalah, *chapter*/sub-bab dalam buku atau kompilasi bunga rampai –misalnya Irianto (2012). Belum ada yang utuh dan sistematis. Perlu disampaikan pula, kajian yang dimaksud peneliti juga tidaklah mencakup kajian ‘pemikiran’ seperti, Feith and Castles [(eds), 1970], Bouchier (1996), atau model yang lain misalnya Ibrahim (2004); pun bukan kajian biografi, menyebut beberapa diantaranya Adams (1966), Poeze (1988), pun Noor (1990).

⁸ Pada era tersebut “stabilitas” menjadi salah satu kata keramat. Jika muncul ide-buah pikiran yang menyempal, maka eufemisasi adalah strategi praktis pengemasannya. Simak bahasan soal ‘kritik’ serta ‘bahasa dan kekuasaan’, dalam buku MD, dkk [(ed), 1999]; pun, Latif dan Ibrahim [(ed), 1996].

Filsafat ilmu, sosiologi pengetahuan, maupun sejarah perkembangan ilmu sendiri bila kita bedah memiliki satu kemiripan, yakni: mengeksplorasi ilmu cenderung dari satu dimensi; ilmu sebagai teks *an sich*. Pendekatan yang mengelaborasi subjek/objek, teks, dan konteks secara holistic untuk membaca ilmu belum banyak dijumpai. Di sinilah letak pentingnya membaca ilmu dengan kaca mata politik (*politics of knowledge*). Hal ini tergolong baru. Ilmu politik tidak dibaca secara normatif: netral, nir kepentingan, non-ideologis, bebas nilai, serta lepas dari konstelasi kuasa yang mengitari. Ia bukanlah satu persoalan yang *per se* keilmuan. Politik bukan objek kaji namun alat menganalisis. Politik adalah segala hal yang terkait dengan kuasa (*power*). Politik sebagai pisau analisis berarti memandang segala sesuatu dikaitkan dengan kuasa. Baik itu teknologi kuasa, operasi kuasa, relasi kuasa, atau pun yang lain. Dengan begitu membaca ilmu dalam kaitannya pada kuasa, setidaknya bisa kita jabarkan ke dalam tiga bahasan. *Pertama*, ilmu sebagai arena tempat kuasa dikontestasikan. *Kedua*, ilmu sebagai wujud kuasa. Serta *ketiga*, sebagai wujud kuasa, ilmu memiliki pertautan relasi dengan wujud kuasa yang lain.

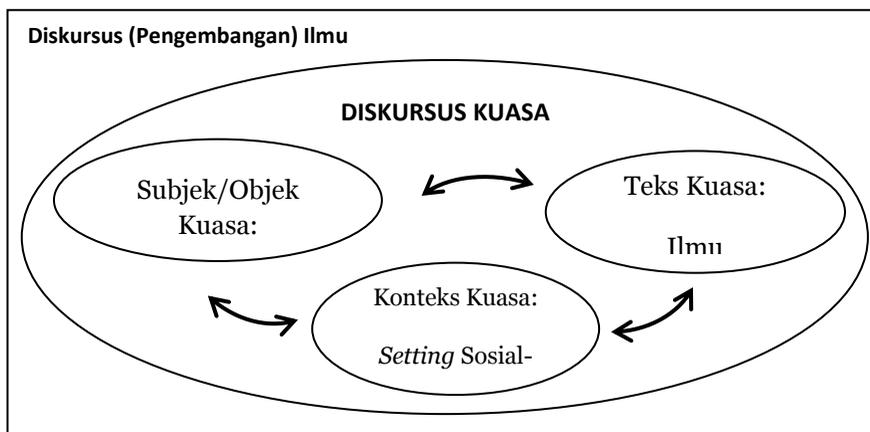
Bagan.1.1
Ilmu sebagai Entitas Kuasa



Jika dihubungkan dengan pendekatan sebelumnya, maka ilmuwan diposisikan sebagai subjek/objek kuasa, ilmu politik sebagai teks kuasa, dan setting sosial-politik yang melingkupi sebagai konteks kuasa. Pertautan ketiganya dibaca sebagai diskursus kuasa yang tidak berkesudahan *-ad invinitum*.

Bagan.1.2.

Pembilahan Objek Analisis (*a la Critical Discourse Analysis*)⁹



⁹ Hal ini sejalar dengan apa yang pernah disampaikan Philpott (2003: 10-11), bahwa ilmu pengetahuan pada dasarnya muncul dari interaksi yang kompleks antara otoritas individual, otoritas institusional, dan diskursus ilmiah. Dalam cara pandang demikian, kemudian pertanyaan “apakah yang dianggap sebagai “ilmu” (tertentu) dan bagaimana ia bisa dianggap sebagai “ilmu” (tertentu)?”, menjadi menarik untuk dicari jawabannya. Bagaimana pernyataan, ide, dan teori tertentu dapat diterima dan diperlakukan sebagai sebuah kebenaran (yang dapat digugat) atau mengantongi status ilmu pengetahuan, sementara ide-ide lain tidak pernah menjadi seperti itu?

Satu hal lain, kendati berkapasitas menerangkan dan memprediksi segala sesuatu, ilmu (baca: sosial) selama ini juga cenderung bersifat instrumental ketimbang kritis. Ilmu “gagal” mengkritik dirinya sendiri. Refleksi merupakan hal yang asing bagi perangkat metodologi yang dimilikinya. Itulah mengapa spirit kritis, reflektif, bahkan emansipatorik kemudian semakin masif disuarakan.

Tulisan ini ingin mengulas lebih lanjut mengenai urgensi pengembangan kajian politik ilmu bahkan turut mendorong pengarusutamaan politisasi ilmu: mengapa penting, apa justifikasinya, dan bagaimana gambaran operasionalitasnya. Dekonvensionalisasi cara pandang seperti ini perlu diajukan sebagai alternative mencegah monoton dan jumudnya pengembangan ilmu yang kini demikian positivistik (apolitis). Sebab, meminjam bahasa Lord Acton, “Paradigma yang berkuasa cenderung koruptif terhadap ilmu; dan semakin absolut kuasa paradigma, semakin absolut pula korupsi ilmu yang terjadi”. Melalui kerja-kerja seperti ini, diharapkan pengembangan ilmu dapat berjalan dinamis karena oleh para peminatnya keamanan terus dikorek, digugat, disangkal, diafirmasi, dan dibongkar-pasang secara kontinum.

Politisasi Ilmu: Upaya Menumbuhkan *Political Consciousness* Ilmuwan¹⁰

Merujuk laporan penelitian yang dikerjakan penulis berjudul, *Apolitical Politics: Kajian Ilmu dan Kekuasaan (2012)*, ada

¹⁰ Pada beberapa bagian, apa yang disampaikan bersifat pengulangan atas apa yang telah disampaikan di awal –khususnya Bab. VI.D. Selain sebagai penegas, bagian ini juga merupakan rangkuman gagasan yang ingin disampaikan peneliti dari bab-bab terdahulu.

banyak *kejanggalan* dalam pengembangan ilmu sosial di Indonesia. Dalam kurun lima dekade terakhir, ilmu sosial di Indonesia berkembang pesat namun tanpa dibarengi arah yang jelas. Ia tidak memiliki visi; Ia pun relative tidak memiliki jawaban yang jelas, “Untuk apa ilmu sosial dikembangkan?” Dengan demikian yang hadir adalah perkembangan ilmu yang banal dan naif. Baik itu karena efek kolonisasi, hegemoni-patrimoni keilmuan, kooptasi rezim, penetrasi korporasi, maupun yang lain. Peneliti menyebutnya sebagai “efek panoptical” (baca: pendisiplinan) *a la* Foucault. Benang merah yang ditemukan oleh peneliti adalah apa yang disebut “*Political Consciousness*”. Satu konsep yang dimunculkan peneliti untuk menunjukkan lemahnya “kesadaran politik” para ilmuwan. Suatu kesadaran bahwa (sebenarnya) ilmu bersifat politis; ilmuwan merupakan subjek/objek politik (= politikus); serta, karena begitu politisnya ilmu, maka setiap aktivitas keilmuan yang dilakoni ilmuwan sebagai politikus adalah aktivitas politik yang memiliki dampak politik. Meminjam bahasa Kleden (1987: xv), teori ilmu sosial adalah variabel sosial. Hal itulah yang menjadi dasar etik menyematkan beban dan tanggungjawab atas dampak-politik aktivitas keilmuan pada diri ilmuwan. Dalam kesadaran demikian, idealnya strategi politik pengembangan ilmu menjadi *concern* para ilmuwan.

Definisi populer atas politik adalah: “*Politics is who gets what, when, and how?*” –versi Harold Laswell (1935). Sangat nyata bahwa poin dari politik adalah perjuangan kepentingan. Ilmu sosial seharusnya dikembangkan untuk memperjuangkan kepentingan yang dirumuskan secara otonom oleh subjek yang menghidupinya. Seperti sebuah visi/tujuan/kepentingan, Ia adalah muara atas seluruh aktivitas yang dilakoni. Pada kasus pengembangna ilmu, jika dibaca secara politik, maka aktivitas keilmuan seperti: penelitian, pengajaran, pengembangan kurikulum, diskusi, penulisan, penerbitan, atau pun teorisasi, seluruhnya merupakan

aktivitas politik, yang sebagaimana kata Laswell, seharusnya dilakukan dalam rangka mengupayakan suatu kepentingan tertentu. Tidak *science qua science*. Ilmu sosial tidak pula menjadi instrument entitas di luar subyeknya. Ia tidak “tergantung”, “terkooptasi”, atau “tersubordinasi” atas wujud kuasa yang lain. Kata kunci dari otonomi/independensi bukanlah isolasi diri – menjadi menara gading. Subyek yang otonom tidaklah berarti subyek yang *genuine/original*. Namun subyek yang kritis dan reflektif atas dirinya sendiri; pun, otonom dalam hal merumuskan visi dan cara bagaimana memperjuangkannya. Kesadaran itulah yang selama ini absen dan menjadi penyebab corak apolitisnya ilmu sosial di Indonesia (tidak *visioning*).

Sebagai tawaran subjektif, peneliti mengusulkan “politisasi ilmu” sebagai jalan menumbuhkan “kesadaran politik (*political consciousness*)”. Peneliti sadar, bahwa lontaran ini mengandung risiko karena menabrak arus besar. Di satu sisi, secara ‘teknis kebahasaan’, politik dan pada akhirnya politisasi cenderung mengalami peyorasi (setidaknya untuk konteks Indonesia)–yaitu perubahan makna yang mengakibatkan sebuah ungkapan menggambarkan sesuatu yang tidak enak, tidak baik, dan sebagainya (KBBI). Politik, demikian pun dengan kuasa, diasosikan sebagai hal yang profanisitik, *mundane*, kotor, nafsu kebinatangan, sehingga tidak pantas dijadikan orientasi laku-pikir manusia. Politik dan kuasa sebagai terma public terlanjur identik dengan jabatan, kedudukan, atau pun ‘kursi’. Namun hal tersebut tidak sepatutnya dijadikan rujukan (utama) dalam lingkup perdebatan akademik –apalagi dalam disiplin ilmu politik. Politik dan kuasa tidak sesederhana itu. Ia adalah *buzz word* yang deskripsinya menimbulkan perdebatan yang produktif. Di samping itu, arus besar (*mainstream*) yang berkembang selama ini adalah positivisasi ilmu yang begitu jelas anti-politik dengan ide ‘sterilisasi’-nya. Sebagaimana sempat disinggung, kendati

berkapasitas menerangkan dan memprediksi segala sesuatu, ilmu sosial di Indonesia selama ini cenderung bersifat instrumental ketimbang kritis. Ilmu sosial “gagal” mengkritik dirinya sendiri. Analisis politik condong diberlakukan *outward looking* daripada *inward-looking*. Tidak ada yang lepas dari analisis kecuali dirinya sendiri. Hal ini menjadi lumrah dipahami sebab refleksi merupakan sesuatu yang asing bagi perangkat metodologi yang dimilikinya. Sterilisasi diterima, dianggap berlaku, dan diniscayakan begitu saja. Dalam bahasa Santoso (2012), ilmu disampaikan secara “apa adanya” bukan dengan kesadaran “ada apa-apanya”.

Bersepakat dengan Feyerabend (1978), reformasi keilmuan yang menjurus anarki bisa dibenarkan dalam kondisi di mana involusi menyeruak, bahkan semakin menjadi. Jika politik menyangkut kuasa; politis bersifat politik; maka politisasi adalah upaya mempolitikkan sesuatu –yakni pengembangan ilmu (politik).¹¹ Itulah yang dimaksudkan dari “politisasi ilmu”; mendudukan ilmu sebagai entitas politik, lebih spesifik lagi: sebagai entitas kuasa. Ilmu (sosial) tidak lagi dibaca secara normatif: netral, nir kepentingan, non-ideologis, bebas nilai, serta lepas dari konstelasi kuasa yang mengitari. Ia bukanlah lagi satu persoalan yang *per se* keilmuan.

Dalam karya yang menjadi sandaran peneliti, *Les mots et les choses* (1966) Foucault menjelaskan, kekuasaan adalah strategi. Dalam hal ini Foucault tidak memisahkan antara pengetahuan dan kekuasaan. Tidak ada pengetahuan tanpa kekuasaan dan tidak ada kekuasaan tanpa pengetahuan. Foucault percaya bahwa agar kekuasaan dapat beroperasi dibutuhkan adanya “rezim wacana” yang ada di dalam setiap kebudayaan dan masyarakat dan dapat memperlihatkan model “permainan kebenaran” atau *truth-games* seperti yang diperkenalkan oleh Nietzsche. Permainan kebenaran

¹¹ Imbuhan “-isasi” dalam bahasa Indonesia berarti menunjukkan makna proses.

menurut Nietzsche memiliki empat prinsip, yaitu: prinsip eksterioritas, prinsip fiksi, prinsip penyebaran, dan prinsip kejadian. Prinsip *pertama*, eksterioritas percaya bahwa di balik wacana tersimpan sisi tiranik nurani. Di balik ucapan seseorang ada naluri ingin menguasai. Prinsip *kedua*, fiksi menyatakan bahwa kebenaran tidak lain adalah kasus khusus kekeliruan.¹² Prinsip *ketiga* adalah prinsip penyebaran, yang artinya kebenaran tidak tergantung pada salah satu subjek, tetapi tergantung pada sintesa pengetahuan subjek. Sedangkan prinsip *keempat*, adalah prinsip kejadian yang melihat bahwa kebenaran tidak mendefinisikan keseluruhan tetapi merupakan penemuan yang khas suatu jaman. Keempat prinsip permainan kebenaran inilah yang biasanya ada dalam rezim wacana. Ia sangat berperan di dunia ilmiah atau dunia kaum intelektual, karena inti dari rezim wacana adalah rezim kebenaran. Rezim wacana dan kekuasaan simbolik memiliki legitimasi untuk menentukan yang benar dan yang salah, yang tabu dan yang pantas, yang gila dan yang normal. Menurut Foucault, dunia intelektual sebenarnya bukanlah ruang ilmiah yang bertujuan utama pada pengembangan ilmu pengetahuan tetapi dunia ilmiah adalah dunia pertarungan wacana alias pertarungan kebenaran –dengan demikian merupakan ruang pertarungan kuasa. Dalam pemahaman demikian, ilmuwan menempati posisi vital.¹³

¹² Contoh yang sering dipakai adalah bagaimana wacana Galileo dan Copernicus yang menyatakan bahwa bumi itu bulat pada awalnya dianggap sebagai kekeliruan ketika berhadapan dengan wacana dominan waktu itu yang percaya bahwa bumi itu datar.

¹³ Tepat pada posisi itulah “politisasi ilmu” memperoleh tempat pendaratannya. Jika kita dapat menerima ilmu sebagai entitas-politik, maka di saat yang bersamaan seharusnya kita juga dapat menerima “politisasi ilmu”. Sebab, “politisasi” tak lain hanya merupakan upaya/ cara lanjut untuk memahami karakter ilmu sebagai entitas-politik. Analoginya adalah

Kesadaran dan pemahaman atas hal tersebut memaksa ilmuwan untuk bersikap hati-hati yang mengarah *skeptic* pada dirinya sendiri. *Self-critic and self-reflection*¹⁴ kemudian menjadi

jika kita menerima/ menghargai adanya keberbedaan/ keberagaman/ pluralitas sebagai fitrah manusia, maka menjadi aneh jika di saat bersamaan kita menolak pluralisme, yakni paham yang mengakui dan berusaha menyikapi pluralitas tersebut secara baik. Bagi peneliti, pluralisme pada analogi ini menjadi suatu keniscayaan; sama halnya politisasi ilmu.

¹⁴ Perihal kesadaran dan reflektivitas menarik untuk menyampaikan pikiran Giddens di sini. Giddens membedakan tiga dimensi internal pelaku, yaitu: 1) Motivasi tak sadar (*unconscious motives*); 2) Kesadaran praktis (*practical consciousness*); dan, 3) Kesadaran diskursif (*discursive consciousness*). Mengenai tiga pembedaan tersebut, Priyono (2003: 28-31) menerangkan, ‘motivasi tak sadar’ menyangkut keinginan atau kebutuhan yang berpotensi mengarah tindakan, tapi bukan tindakan itu sendiri. Misalnya, sangat jarang ‘tindakan kita pergi ke tempat kerja digerakkan oleh motif mencari uang, kecuali mungkin pada hari gajian. Begitu pula sangat jarang pegawai negeri memakai seragam KORPRI karena digerakkan oleh motivasi memperkuat korporatisme Orde Baru. Lain dengan motivasi tak sadar, ‘kesadaran diskursif’ mengacu pada kapasitas kita merefleksikan dan memberikan penjelasan rinci serta eksplisit atas tindakan kita. Misalnya, mengapa saya bekerja lembur? Karena saya membutuhkan uang tambahan untuk membayar biaya anak saya yang dirawat di rumah sakit. Sedangkan ‘kesadaran praktis’ menunjuk pada gugus pengetahuan praktis yang tidak selalu bisa diurai. Contohnya diam/tenang saat kita masuk tempat ibadah, adalah bentuk kesadaran praktis seperti itu. Dalam fenomenologi, inilah wilayah kepribadian yang berisi gugus pengetahuan yang sudah diandaikan (*taken for granted knowledge*). Gugus pengetahuan yang sudah diandaikan ini merupakan sumber ‘rasa aman ontologis’ (*ontological security*).

Melalui gugus pengetahuan praktis ini, kita tahu bagaimana melangsungkan hidup sehari-hari tanpa harus mempertanyakan terus-menerus apa yang terjadi atau yang mesti dilakukan. Kesadaran praktis ini merupakan kunci untuk memahami proses berbagai tindakan dan praktik sosial kita lambat laun menjadi struktur, dan bagaimana struktur itu mengekang serta

tuntutan yang relevan, sebab dampak-politik aktivitas keilmuan bukanlah perkara remeh. Penelitian, pengajaran, pengembangan kurikulum, diskusi, penulisan, penerbitan, atau pun teorisasi, seluruhnya merupakan momen-momen diskursif kuasa. Kleden (*Ibid.*) menyebut teori sebagai variabel sosial-politik baik independen maupun dependen karena sifatnya yang siklis dan dialektik. Determinasi inilah yang membuat teori ilmu sosial tidak selalu bisa menghindari dari bahaya untuk menjadi *self-fulfilling* atau *self-destroying* (Hebermehl, 1980 dalam *Ibid.*). Dalam kedudukannya sebagai variabel independen, suatu teori ilmu sosial mempunyai kekuatan konstitutif dan dapat memainkan peranan besar dalam rekayasa sosial untuk transformasi sosial, sedangkan dalam kedudukannya sebagai variabel dependen dia mempunyai kekuatan reflektif dan dengan itu dapat berperan besar dalam

memampukan tindakan/praktik sosial kita. Reproduksi sosial berlangsung lewat keterulangan praktik sosial yang jarang kita pertanyakan lagi. Namun itu bukan berarti bahwa yang terjadi hanyalah reproduksi sosial tanpa ada perubahan. Dalam refleksi Giddens, Priyono menambahkan, perubahan selalu terlibat dalam proses strukturasi ('struktur-agensi' –pen), betapapun kecilnya perubahan itu. Batas antara kesadaran praktis dan kesadaran diskursif sangatlah lentur dan tipis... tidak seperti kesadaran diskursif dan motivasi tak sadar. Dengan meminjam Erving Goffman, Giddens mengajukan argument bahwa sebagai pelaku, kita punya kemampuan untuk introspeksi dan mawas diri (*reflexive monitoring of conduct*). Kapasitas semacam inilah yang dimaksud *self-reflection* oleh peneliti. Perubahan terjadi ketika kapasitas memonitor (mengambil jarak ini) meluas sehingga berlangsung 'de-rutinisasi'. Derutinisasi menyangkut gejala dimana schemata yang selama ini menjadi aturan dan sumberdaya tindakan serta praktik sosial kita tidak lagi memadai untuk dipakai sebagai prinsip pemaknaan dan pengorganisasian berbagai praktik sosial yang sedang berlangsung, atau pun yang sedang diperjuangkan agar menjadi praktik sosial baru. Politisasi ilmu dalam benak peneliti adalah bagian dari upaya masifikasi atas derutinisasi yang cukup efektif dalam rangka rekonstruksi ilmu politik di Indonesia.

melakukan legitimasi atau pun kritik sosial. Oleh sebab itu kehidupan sosial-politik selain menjadi laboratorium keilmuan yang produktif dan menantang, eventuali juga “rentan” dan “bahaya”. Ia memiliki sifat dan karakteristik yang sangat berbeda dengan laboratorium eksakta. Objek kajiannya adalah publik. Uji coba dan eksperimentasi langsung diterapkan pada publik, dimana hasil dari kajian tersebut belum tentu tepat.

Pada titik ini, orientasi aktivitas keilmuan jelas bukanlah ilmu itu sendiri. Atau yang lebih moderat bukan hanya ilmu saja. Peneliti kembali dengan tegas menolak *science qua science*. Tak harus selalu mengejar relevansi ilmiah, aktivitas pengembangan ilmu justru perlu mempertimbangkan relevansi sosial, bahkan juga relevansi politik. Yang utama bukan persoalan ‘benar-salah’ (*‘right or wrong/correct or incorrect’*) semata, tetapi juga terkait ‘kompatibilitas atau kecocokan’ (*‘compatibility/suitability’*), lebih jauh lagi mengenai ‘kegunaan atau ketunagunaan’ (*‘usefulness or useless’*), ‘mewakili atau tidak mewakili’ (*‘representative or not’*), bahkan dengan atau tanpa kesadaran politik (*‘with or without political consciousness’*).

Perdebatan menyangkut keutamaan relevansi ilmiah dengan relevansi sosial pernah diurai secara detil oleh Kleden¹⁵. Baginya hal tersebut merupakan ekspresi atas konflik epistemologi pengetahuan dengan sosiologi pengetahuan. Yang pertama menguji validitas suatu sistem pengetahuan berdasarkan ukuran-ukuran rasional, sedangkan yang lain ingin menyelidiki asal-usul sosial, penerimaan, dan pengaruh sosial dari suatu sistem pengetahuan. Peneliti bermaksud menambahkan satu poin lagi, yakni relevansi politik muara dari politik pengembangan ilmu. Tepat pada titik ini, *standing position* peneliti relatif jelas. Bagi peneliti pengejaran

¹⁵ Dalam bukunya tersebut, Kleden menggunakan istilah ‘relevansi intelektual’ untuk menggantikan ‘relevansi ilmiah’.

relevansi ilmiah jika pengukurannya disandarkan pada netralitas, obyektivitas, validitas, dan kemampuan melakukan generalisasi, dalam kaca mata politik pengembangan ilmu selain merupakan hal yang tidak penting (*urgent*) juga merupakan cita-cita utopis (*impossible project*). Ia merupakan cara pandang normatif yang menguntungkan posisi pihak-pihak dominan dan superior untuk melanggengkan kemapanan (*status quo*). Sebaliknya bagi peneliti, ilmu yang subjektif, berpihak, dilandasi nilai dan kepentingan, justru perlu dikedepankan. Pengembangan ilmu perlu memiliki visi dan jawaban yang jelas, "Untuk tujuan apa ilmu politik dikembangkan?" Aktivitas pengembangan ilmu tidak dapat dilepaskan dari konteks *setting* sosial-politik yang melingkupi. Ia dipengaruhi dan sekaligus mempengaruhi. Latar adalah titik berangkat sekaligus titik kembali pengembangan keilmuan. Oleh sejumlah ilmuwan, ilmu dengan corak seperti ini dinamai ilmu (sosial) transformatif (Santoso, 2011).

Apa yang peneliti idealkan tersebut dapat terjadi dengan prasyarat utama, yaitu: adanya kesadaran (*political consciousness*) dalam diri para ilmuwan menyangkut aktivitas keilmuan yang dilakoninya. Ilmu sosial tidak menjadi instrument entitas di luar subyeknya. Ia tidak tergantung, terkooptasi, atau ter-sub-ordinasi, atas wujud kuasa yang lain. Kata kunci dari otonomi/independensi bukanlah isolasi diri –menjadi menara gading. Subyek yang otonom tidaklah berarti subyek yang *genuine/original*. Namun subyek yang kritis dan reflektif atas dirinya sendiri. Otonom dalam hal merumuskan visi dan cara bagaimana memperjuangkannya.

Cara menumbuhkan *political consciousness* ini salah satunya adalah dengan jalan politisasi ilmu. Jika kita bersepakat dengan hal ini, maka pemahaman atas politik pengembangan ilmu menjadi prioritas agenda di atas yang lain; ia menjadi fondasi vital. Dalam proses belajar-mengajar yang merupakan salah satu

aktivitas keilmuan, politik pengembangan ilmu menjadi mukadimah dari *tumpukan* materi ajar. Di sana tak sekadar dibahas poin-poin filsafat ilmu tentang apa hakikat (ontologi), bagaimana cara memperoleh (epistemologi), dan untuk apa (aksiologi) ilmu dikembangkan. Di sana pembahasan juga tidak semata menjangkau sejarah naratif maupun genealogi pemikiran suatu disiplin, namun yang lebih utama adalah pemahaman bahwa aktivitas keilmuan merupakan permainan kuasa (*power-game*). Adanya penekanan bahwa ilmu tidaklah steril; netral, nir kepentingan, non-ideologis, bebas nilai, serta lepas dari konstelasi kuasa yang mengitari.

Goal dari bahasan mengenai politik pengembangan ilmu adalah munculnya daya kritis dan reflektif yang bermuara pada kesadaran politik menyangkut aktivitas keilmuan yang akan dilakukannya ke depan. Penelitian, pengajaran, pengembangan kurikulum, diskusi, penulisan, penerbitan, atau pun teorisasi, seluruhnya merupakan aktivitas politik yang memiliki dampak politik. Karenanya kemudian setiap aktivitas harus memiliki tujuan, visi, dan dilandasi oleh nilai yang jelas. Pada titik ini transformasi menjadi orientasinya. Sebaik-baik ilmu kemudian tak hanya yang berhasil memberikan analisis memadai, namun lebih jauh dari itu, adalah yang mampu men-transformasi keadaan.

Untuk menuju ke sana, pada bahasan selanjutnya penulis akan menguraikan justifikasi akademik terkait beberapa hal. *Pertama*, mengeksplor lebih jauh relasi ilmu dan kuasa –ilmu sebagai instrument kekuasaan (antara historisitas dan normativitas). Penulis coba membahas jalinan mesra antara ilmu, ideology, dan kuasa; sekaligus pertautan erat antara ilmu, nilai, dan kepentingan. *Kedua*, karena penulis berseberang pendapat dengan pandangan *science qua science*, maka kaidah-kaidah keilmuan bukanlah hal yang utama harus dipatuhi. Apalagi jika kaidah-kaidah tersebut menghambat transformasi keilmuan. Penulis

setuju dengan Feyerebaned bahwa anarkisitas dibenarkan pada kondisi tertentu. Penulis akan mengulas pemikirannya sebagai *breakthrough* dari sisi epistemologis. *Ketiga*, salah satu faktor penyebab *political unconsciouness* adalah kuatnya paradigma positivisme yang “anti-politik”. Positivisasi pada batas batas tertentu bisa disama-artikan dengan depolitisasi. Penulis akan coba menyuguhkan sejumlah kritik yang menjangkitinya sebagai bagian demasifikasi. Dengan begitu ide ‘politisasi ilmu’ ini tak sekadar bersifat jargon/sloganistik namun juga relative substansial. *Keempat*, bahasan ditutup dengan eksposisi singkat paradigma kritis dan ilmu sosial transformative sebagaimana diidealkan oleh penulis.

Memahami Relasi Ilmu dan Kuasa –Ilmu sebagai Instrumen Kekuasaan: Antara Historisitas dan Normativitas

Ada dua pandangan kuat yang hingga kini sukar didamaikan, yang satu berupaya untuk memutus relasi nilai, kepentingan, ideologi dan kuasa dengan ilmu pengetahuan (normatif¹⁶), serta, yang lain menilai hal tersebut sebagai sebuah keniscayaan (historis-kritis). Berikut ini akan dibahas perbincangan yang menyeruak di sekitar problem keilmuan tersebut.

- “Jalinan Mesra” Ilmu, Ideologi, dan Kuasa Dalam Kacamata Postrukturalisme Foucauldian

Dalam diskursus politik, selama ini kata ideologi (begitu juga kuasa) umumnya dikesankan peyoratif, irasional, mengerikan dan negatif.¹⁷ Namun dewasa ini kesan tersebut tidak lagi relevan.

¹⁶ Karl Manheim menyebutnya sebagai *utopia* (lihat: Manheim).

¹⁷ Pandangan peyoratif tentang konsep ideologi ini sebenarnya bisa ditelusuri dari sejarah istilah ideologi sendiri. Istilah ini adalah derivasi dari

Perkembangan pesat pemikiran sosial dan kebudayaan yang disumbangkan oleh para pemikir dalam tradisi pos-strukturalisme (seperti Louis Althusser dan Michel Foucault) mengubah cara pandang demikian ke arah pemahaman yang luas dan lebih kaya. Tradisi ini telah mewariskan pemahaman utuh bahwa manusia sesungguhnya tidak bisa hidup tanpa ideologi karena justru ideologilah yang memberikan orientasi bagi sikap, tindakan dan arah hidup manusia. Ideologi dalam konteks ini justru menjadi praktek keseharian yang memberikan orientasi dan identitas suatu

iedologues yang muncul pasca Revolusi Perancis. Napoleon Bonaparte menggunakan istilah ideologi untuk menyerang lawan-lawan politiknya yang memiliki ide-ide yang tidak realistis berkaitan dengan kepentingan negara Perancis baru saat itu. Selanjutnya Marx dan Engels memberikan elaborasi yang sistematis tentang ideologi. Istilah ideologi digunakan Marx untuk menyerang dan menyingkap distorsi, ilusi, dan inversi yang membetuk idealisme filosofis pada tradisi Hegelian Jerman. Dengan mendasarkan diri pada metode materialisme historis, Marx mengkritik para ideolog Jerman ini bahwa pikiran-pikiran mereka teralienasi dari kehidupan. Marx berpendirian, kapitalisme telah melahirkan pemahaman atau pengetahuan yang tidak mencerminkan realitas sebenarnya, yaitu realitas pertentangan kelas antara kaum borjuis dan proletar dalam masyarakat industrial-kapitalistik. Pengetahuan yang tidak mencerminkan realitas atau kesadaran yang teralienasi dari praksis inilah yang disebut dengan ideologi. Ideologi merupakan representasi yang keliru tentang manusia dan dunia karena menganggap situasi yang ada sebagai sesuatu yang alami, a-historis, dan memistifikasikan tatanan sosial. Berkaitan dengan masyarakat, ideologi adalah bagian dari struktur-struktur-atas yang melayani kekuatan struktur-struktur-dasar ekonomi. Ideologi melegitimasi relasi sosial dan ekonomi, sekaligus senjata kelas berkuasa. Pada titik inilah ilmu pengetahuan sering dianggap sebagai “alat idelogisasi” yang efektif. Pandangan klasik tentang ideologi ini telah menuai kritik tajam. Pandangan tersebut dianggap telah menaburkan fakta, bahwa ideologi sebenarnya beroperasi dalam ranah keseharian, bahkan lebih dominan dalam suatu tatanan sosial tertentu. (*Ibid.*)

kelompok. Ideologi tersebar sebagaimana kekuasaan yang tersebar dalam bermacam praktek diskursif kehidupan. Jadi ideologi sesungguhnya menjadi bagian dari praktek kebudayaan yang memproduksi makna dan kepentingan bagi penerima (*recipient*) budaya tersebut. Bahkan bisa dikatakan ideologi sesungguhnya menyatu dan bertahan dalam praktek kebudayaan, sehingga kebudayaan sendiri tidak pernah netral. [Huda, M Nurul, dalam Driyarkara (2004)]

Di sisi yang lain, kebudayaan adalah arena di mana bermacam makna dipertukarkan, diproduksi, direproduksi oleh anggota partisipasi budaya. Karena itu, dikatakan bahwa kebudayaan tidak pernah netral. Sebagaimana ditegaskan Roland Barthes, penanda-penanda itu arbitrer (*sewenang-wenang*), sehingga watak dasar kebudayaan sendiri adalah relasi arbitrer. Tidak ada satu gejala pun yang alamiah. Segala bentuk ritual dan hidup keseharian hasil dari konvensi sosial merupakan sasaran sistematis untuk dibuat seolah-olah alamiah. Ia lalu dimitoskan. Dengan kata lain, kebudayaan adalah *locus* di mana bermacam makna dipertaruhkan dan diperebutkan. Ia menjadi arena pertarungan kelas untuk memainkannya kuasanya. Kelas yang dimaksud (bukan *a la* Marx), melainkan pertarungan antara wacana yang berbeda, definisi yang berbeda serta bermacam makna yang berbeda, yang melibatkan dan berlangsung antar kelompok sosial yang menghegemoni dan digehemoni. Adapun makna dalam ideologi sendiri pada saat yang sama juga merupakan perjuangan dalam praktek penandaan. Dengan begitu relasi antara kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan ideologi yang segaris dengan kuasa¹⁸, adalah sesuatu yang integratif; sebuah arena kontestasi

¹⁸ Foucault (1980: 198), berpendapat: “*Kekuasaan dalam arti substantif, ‘le’ pouvoir, tidak ada. Apa yang saya maksudkan adalah ini. Ide bahwa pada suatu titik tertentu terlelat –atau dari (sana) mengalir– “kekuasaan” bagi Metodologi Ilmu Pemerintahan | 19*

tanda, nilai, dan kepentingan (baca: wacana/*discourse*¹⁹) (*Ibid.*) – bukan semata-mata “alat/instrumen” atas sesuatu. Karena itu membongkar aturan-aturan atau kode-kode di balik mitos inilah misi utama di balik berbagai agenda studi ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

- Ilmu, Nilai, dan Kepentingan:
Pertautan Erat di Antara Ketiganya (Tafsir Habermasian)²⁰

Salah satu kriteria untuk menentukan ilmiah tidaknya suatu kajian dapat dinilai dari kemampuan kajian itu memaparkan informasi secara objektif. Objektivitas itu kerap kali dikaitkan dengan status ilmu pengetahuan yang “bebas nilai (*value/werte*)”. Namun kita akan segera masuk dalam kesulitan, ketika ilmu

saya hanya berpijak apada analisis yang salah arah, sesuatu yang sama sekali tidak berhasil mempertimbangkan sejumlah besar fenomena. Dalam kenyataan kekuasaan berarti relasi, sesuatu yang kurang lebih terorganisasikan, hierarkis, sekumpulan relasi yang dikoordinasikan.” Dalam arti itu, Dhakidae (2003: 62) menilai, (kekuasaan sebagai relasi) maka kekuasaan berada di mana pun di seujur tubuh sosial, *co-extensive with the social body*, sedemikian rupa sehingga tidak ada ruang tersisa bagi suatu kebebasan azali, *primal liberty*, di antara titik-titik sambung antar-jaringan kekuasaan itu. Dalam arti inilah kekuasaan itu tidak total, tidak utuh-bulat, namun hadir di mana-mana (*omniprasanens*).

¹⁹ *Discourse* adalah konsep sentral dalam pemikiran Foucault. Ia bisa dipahami sebagai bahasa dan praktek, atau semacam *regulated ways of speaking* yang mendefinisikan, mengonstruksi, dan memproduksi obyek pengetahuan.

²⁰ Rujukan tulisan bagian ini adalah sebagai berikut: Kleden (1987: xvi-xvii); Leahy, Louis (dalam Driyarkara, 1996); Sitomurang, Joseph MMT (dalam Driyarkara, 1996); Kuntjoro, A Puspo (dalam Driyarkara, 1996); Hernawan, J Budi (dalam driyarkara 1996); dan Afifi, Irfan (2004).

pengetahuan kita sadari merupakan hasil proses subjektif dan personal dengan beragam nilai yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan sendiri mengandung nilai-nilai dan bahkan bertujuan untuk membuat penilaian.

Rentetan pertanyaan yang kemudian hadir memancing debat tak-berkesudahan adalah: “Apakah ilmu sosial hanya berupa suatu sistem pengetahuan atau sekaligus juga suatu sistem nilai? Apakah ilmu-ilmu sosial telah lahir dari dorongan hasrat ingin tahu semata atau malah telah dirangsang oleh jenis kepentingan dan dorongan pamrih tertentu? Mungkinkah suatu ilmu pengetahuan benar-benar bebas nilai? Apa makna bebas nilai dalam suatu proses keilmuan sehingga patut diupayakan? Atau justru, apakah ilmu pengetahuan memang harus bebas nilai?” Dirk Huelst, menulis dalam bukunya, *Kritischer Rationalismus: Eine Zeitgemaesse Philosophie?* (1977), setidaknya jika dipetakan masalah nilai dalam ilmu pengetahuan umumnya dan dalam ilmu sosial khususnya terdiri atas tiga lapis persoalan yang berbeda, yaitu: 1) nilai sebagai basis bagi asumsi dan teori ilmu; 2) implikasi nilai dari penerapan ilmu; dan, 3) penilaian sebagai tindakan ilmiah.

Eksposisi berikut coba secara sekilas menelaah problem tersebut sehingga tidak menimbulkan kerancuan pada operasionalitas kajian ini ke depan; sekaligus menjadi semacam *standing position* peneliti.

Positivisme adalah puncak paham yang mengasumsikan bahwa pengetahuan yang sah hanyalah pengetahuan tentang fakta objektif –bersih dari kepentingan (*disinterested knowledge*). Positivisme seperti itulah yang lalu disebut “saintisme”. Premis yang mereka pegang menganggap pengetahuan merupakan usaha mengejar kebenaran dan mengkomunikasikannya secara murni. Dengan begitu berarti ilmu pengetahuan memiliki nilai intrinsik. Mengejar kebenaran adalah suatu nilai, bahkan akhirnya menjadi

tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Dengan demikian hubungan antara nilai dengan objektivitas dapat dikata saling menentukan. Nilai bisa mempengaruhi pemahaman seseorang bahkan mendistorsikannya. Suatu fenomena bisa dibaca lain karena orang terokupasi oleh suatu nilai. Karena itu kerap kali diandaikan, agar suatu ilmu obyektif, ia harus bebas nilai. Membuat derajat peratuatan diantara keduanya ke titik yang paling rendah.

Namun sebagian kalangan yang kontra berpendapat hal tersebut tidak berarti bahwa kemudian unsur subjektivitas dibuang. Sebab menurut mereka manusia selalu terlibat sebagai subjek ilmu sehingga tidak luput dari pertimbangan etis.²¹ Faktor subjektivitas ini diharapkan berkembang menjadi intersubjektivitas. Bagaimana pun juga, keterlibatan manusia (subjek) selalu membawa preferensi subyektif yang mengandung pertimbangan nilai secara intrinsik.

Kalau kemudian norma bebas nilai masih ingin dipertahankan, seringkali dimaksudkan sebagai tuntutan agar setiap kegiatan ilmiah terhindar dari “campur tangan” faktor eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu pengetahuan. Itu berarti, *pertama*, ilmu pengetahuan harus bebas dari pengandaian-pengandaian (baik pengandaian “prinsip konstitutif” maupun “prinsip yang menyangkut isi”). *Kedua*, agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin, perlulah adanya kebebasan usaha ilmiah. Pada titik ini, obyektivitas tidak selalu berarti netral atau

²¹ Hal ini sering menimbulkan keraguan, dengan alasan bahwa pertimbangan etis bisa menghambat kemajuan ilmu pengetahuan –mengingat nilai etis itu bersifat absolut. Sebenarnya Hal itu bisa didamaikan dengan mengajukan bahwa konflik yang terjadi bukan antara nilai ilmiah dan nilai etis. Pertentangannya justru terletak antara nilai etis kegiatan ilmiah yang mau meneliti dan menguasai realitas dengan nilai etis lainnya. Jadi permasalahannya adalah hirarki nilai etis.

indifferent. Objektivitas hanya menuntut bahwa orang berhasrat mengkonfrontasikan keyakinannya pada pengalaman dan logika serta memperbaharuihnya. Orang harus terbuka pada kritik dan tidak memegang keyakinan secara “subjektif”, melainkan mencari keterlibatan pihak luar untuk mengkoreksi nilai-nilai yang ia yakini. Dialog nilai semacam itulah yang mendewasakan proses ilmiah. Semakin besar kemampuan dialog suatu ilmu, semakin tinggi pula tingkat objektivitasnya²².

Adalah filsuf Jürgen Habermas, salah seorang tokoh Mazhab Frankfurt, yang relatif berhasil mencairkan kebekuan

²² Peneliti bersepakat bila dalam lanskap akademis, asumsi netralitas dan obyektifitas sudah dinilai usang dengan dihujani banyak kritik. Misalnya Karl Manheim dalam disiplin sosiologi pengetahuan —sebagai cabang sosiologi baru— telah cukup lama membongkar baju obyektifitas ilmu. Pendapatnya, pikiran atau pengetahuan manusia tidak lahir dari kontemplasi individu-individu yang terisolasi dengan masyarakat(nya), melainkan lahir dalam situasi sosial-historis tertentu dalam latar belakang yang konkret. Manusia harus dibaca utuh sebagai kesatuan dalam masyarakat. Sehingga bukan individulah yang berfikir dan berpengetahuan, melainkan manusia dalam kelompok-kelompok tertentu dan situasi historis tertentu yang menghasilkan pengetahuan. Atau tepatnya individulah yang mengambil bagian dalam pemikiran lebih lanjut yang telah dipikirkan orang lain sebelumnya. Ia mewarisi pola-pola pemikiran yang sesuai untuk situasinya dan berusaha menjelaskan cara-cara lain supaya dapat menghadapi tantangan-tantangan baru yang muncul dari peralihan-peralihan dan perubahan-perubahan situasinya secara memadai. Sehingga pengetahuan atau ilmu, berbeda dengan pandangan diatas, tidak netral. Pengetahuan selalu terkait erat dengan dan cara hidup masyarakat dalam kurun sejarah tertentu. Sehingga ilmu pengetahuan bersifat sosial, politis dan historis. Ilmu dengan demikian terdeterminasi secara sosial, sewaktu, dan menyenjarah (dalam Afifi, 2004).

perdebatan tersebut²³. Menurutnya ilmu pengetahuan tidak lepas dari kepentingan yang menguntitnya. Ia memperkenalkan epistemologi baru tentang hubungan antara *erkenntnis und interesse* (pengetahuan dan kepentingan) dalam tiga karyanya: *Erkenntniss un Interesse* (1973), *Technik und Wissenshacft als 'Ideologie'* (1981), *Theorie und Praxis* (1978). Ada dua tesis dasar yang dikemukakannya –sebagai respon balik terhadap saintisme Husserl. *Pertama*, setiap jenis pengetahuan (dan juga ilmu pengetahuan) telah lahir dari dorongan jenis kepentingan tertentu. *Kedua*, hubungan dengan jenis kepentingan yang mendorongnya adalah hubungan yang bersifat niscaya.

Habermas selanjutnya membagi ilmu pengetahuan menjadi tiga bentuk: 1) kepentingan teknis telah mendorong kelahiran *kelompok ilmu-ilmu empiris-positif* yang dimaksudkan untuk menunjang proses produksi²⁴; 2) kepentingan praktis (yaitu dorongan untuk hidup dengan benar) telah melahirkan *kelompok*

²³ Diantara kerumunan ilmuwan lain yang melibatkan diri dalam konflik ilmiah pembela ‘objektivitas’ di satu sisi dengan ‘subyektivitas’ di sisi seberang yaitu: Fritjof Capra, Karl Mannheim, Karl Popper, Paul Ricoeur, Thomas Khun, dan Michel Foucault.

²⁴ Memakai kacamata pragmatis Ala Charles Sanders Pierce, Habermas coba mengungkap dibalik kepentingan ilmu empiris-analistis tersembunyi kepentingan ‘teknis’. Menurutnya penelitian ilmiah tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari. Manusia senantiasa ditantang untuk mengatasi rintangan-rintangan alam yang mengganggu. Kearah situlah proses penelitian ilmiah dijalankan. Penelitian harus memiliki manfaat praktis untuk menghadapi rintangan-rintangan alam yang menghadang tersebut. Sehingga secara operasional kemajuan ilmu alam, atau teknologi, dimaksudkan untuk menundukkan alam. Dengan demikian jelas pengembangan teknologi tidak terlepas dari kepentingan (teknis), yaitu untuk memenuhi kebutuhan.

ilmu-ilmu humaniora yang menunjang proses komunikasi²⁵; sedangkan, 3) kepentingan politis telah mendorong lahirnya *kelompok ilmu-ilmu sosial kritis* yang kemudian menunjang proses emansipasi²⁶. Habermas sampai pada kesimpulan bahwa ilmu pengetahuan wajib terlibat (masuk-menyelami) dalam dunia sehari-hari di tengah masyarakat –dengan beragam nilai dan kepentingan yang inheren.

Benang merah yang di dapat kemudian, adalah: sealur relasi ilmu pengetahuan dengan ideologi dan kuasa sebagaimana telah dibahas di atas, pertautan ilmu pengetahuan dengan nilai dan kepentingan adalah baur/inheren. Ilmu pengetahuan merupakan sebuah *discourse* yang *ad infinitum*. Suatu arena kontestasi nilai dan kepentingan dari berbagai subjek yang terkait saling-sengkarut.

²⁵ Dalam kaitan kepentingan praktis ilmu historis, Habermas menggunakan teori Hermeneutika Dilthey. Hermeneutika, menurutnya berfungsi menghindari bahaya-bahaya dominasi penafsiran dan komunikasi. Pemahaman hermeneutis menjembatani berbagai variasi tradisi dan kebudayaan yang berbeda. Sebuah teks yang tidak tersentuh penafsiran akan mengarah pada absolutisasi. Pada posisi inilah hermeneutika punya peran. Dalam operasionalnya, pemahaman hermeneutis mengindikasikan adanya penggiringan pada suatu kepentingan tertentu seperti halnya yang terjadi pada ilmu alam. Sebuah tafsir tidak mungkin berjalan tanpa ada unsur kepentingan yang mengikutinya. Ia tidak mungkin lepas lepas dari *interest* penafsir.

²⁶ Ilmu kritis, yang digaungkan Madzab Frakfurt –termasuk Habermas– juga tidak terlepas dari kepentingan. Ini sesuai dengan semangat teori kritis yang mengampanyekan pentingnya sikap kritis terhadap setiap kemapanan dan penolakan terhadap setiap dogmatisme. Dalam rangka mewujudkan humanitas sejati dalam koridor komunikasi tanpa distorsi, Habermas mengusulkan *interest* emansipatoris. Kepentingan emansipatoris adalah muara dari refleksinya terhadap kepentingan teknis dan praktis.

- *Mempersoalkan Kekuasaan, Mencari Titik Temu “Teori Kritis Mazhab Frankfurt (=Habermas)” dengan “Foucault”*²⁷

Baik Mazhab Frankfurt (*die Frankfurter Schule*)²⁸, dalam hal ini Habermas, maupun Foucault adalah dua pemikir kontemporer yang sangat berpengaruh dalam ranah ilmu sosial. Keduanya berangkat dari dua landas pikir dan metode yang berbeda²⁹

²⁷ Merujuk: Setyadi, Wawan (dalam driyarkara, 2007); Lanur, Alex (dalam Driyarkara 1997); Purwanto, A (dalam Driyarkara 1997); dan terutama, Kristanto, L Deddy (dalam Driyarkara 1997).

²⁸ Mazhab Franksurt merupakan sekelompok pemikir yang muncul di tahun 1930-an dari lingkungan *Institut fur Sozialforschung* Universitas Frankfurt. Para pemikir itu, ingin membuat suatu refleksi kritis mengenai masyarakat pasca-industri dan konsep tentang rasio yang ikut membentuk menciptakan masyarakat itu. Tokoh-tokoh yang tergabung dalam aliran ini adalah Max Horkheimer sebagai pemimpin institut, Theodor W Adorno, serta Herbert Marcuse. Ketiganya dapat dianggap sebagai generasi pertama Mazhab Frankfurt. Sedangkan Jurgen Habermas masuk dalam generasi kedua.

²⁹ Foucault mengikuti Nietzsche yaitu dengan menganalisis praksis sosial dengan melontarkan kritik lewat alam pemahaman bahasa, baik dalam etimologi atau pun penafsirannya. Yang dibongkar oleh foucault adalah istilah-istilah yang mempunyai hubungan erat dengan munculnya rasionalisme. Sedangkan Teori Kritis-Mazhab Frankfurt lebih condong untuk membuka tabir gelap yang ada di balik segala bentuk determinasi teori dan kategori-kategori ilmu pengetahuan, agar rasionalitas yang ada dalam masyarakat dapat berjalan seimbang kembali. Kemudian dalam memandang subjek, Foucault berpendapat bahwa konsep subjek yang elama ini dikembangkan oleh filsafat Barat modern dengan menempatkan subjek sebagai pusat supremasi cara berpikir satu-satunya justru menghabisi subjek itu sendiri “*the end of man*”. Oleh karenanya dia berusaha mengembangkan suatu dekonstruksi atas konsep dunia subjek. Kebalikannya dengan dekonstruksi atas subjek, Teori Kritis mengembangkan suatu usaha rekonstruksi atas dunia subjek. Dia berusaha mengembalikan konsistensi dunia subjek agar dapat berdialog dengan

sehingga pada beberapa poin mereka berselisih paham sedangkan di banyak titik yang lain sebaliknya. Apa yang mereka lakukan adalah usaha untuk membuka tabir kegelapan dari supremasi rasio murni yang telah dicangkan oleh Kant. Mereka juga sama-sama mengkritik secara keras terhadap metode Kartesian yang berpusat pada subjek. Mereka dengan jenius menggambarkan bahwa eksistensi rasio manusia tidak hanya diperoleh dengan upaya transedental seperti yang dilakukan oleh metafisika dan epistemologi, tetapi rasio manusia juga ditentukan oleh realitas sosial, ilmu pengetahuan dan kekuasaan dalam dunia objektif – yaitu dunia manusia dan masyarakatnya. Di sanalah kritik rasio tak murni mendapatkan pendaratannya secara konkret dan jelas. Rasio tak murni ditemukan dalam diskursus kebenaran yang berelasi dengan realitas sosial dan paham kekuasaan. Kebenaran tidak lagi bersifat transedental dan otonom dalam perkembangan historis masyarakat. Sedangkan perbedaan pokok di antara keduanya terletak dalam bidang kritik terhadap masyarakat. Foucault melihat masyarakat sebagai objek kontemplasi sedangkan Mazhab Frankfurt melihat sebagai rekan dialog. Dalam lapangan ilmu pengetahuan Foucault itu *anti-science*, sedangkan Mazhab Frankfurt menghargai riset ilmu pengetahuan untuk meluruskan kembali teori sosial. Berikut ini *highlight* perdebatan di antara keduanya dalam persoalan kekuasaan.

Tabel.1.1 Diskursus Konsep Kekuasaan [Kristanto, L Deddy (Ibid.)]

- | |
|--|
| ▪ Foucault melihat bahwa pertautan ‘kebenaran-pengetahuan’ |
|--|

dimensi sosialnya dan mempunyai identitas kembali sebagai individu dalam tindakan-tindakan sosialnya.

dan 'kekuasaan' menghasilkan 'paham kekuasaan' yang dimengerti secara ritual saja. Dalam beberapa segi, paham kekuasaan semacam itu telah memarginalkan realitas sosial yang sesungguhnya dan mengangkat secara fanatik unsur-unsur partikular dalam realitas sosial yang sifatnya universal. Kondisi ini bagi Foucault telah memampatkan proses interaksi subjek dengan dunia objektifnya. Yang menjadi problem utama adalah telah sedemikian rupa mengakar dalam masyarakat. Oleh karenanya hal itu harus dibongkar dan dibangun kembali secara sadar dan murni. Konsep Foucault inilah yang kemudian dikenal sebagai suatu pendekatan kekuasaan dengan berdasarkan karakter sosial yang ontologis. Foucault bermaksud membangun ontologi kekuasaan kembali (dekonstruksi) –kekuasaan yang tidak dipengaruhi oleh kebenaran-kebenaran yang sifatnya universal namun sangat tergantung dalam kesadaran personal dari anggota masyarakat. Maka dari itu, Foucault menempatkan kekuasaan pada sistem kehidupan yang lebih strategis, yaitu dalam lingkup dunia subjektif.

- Lain halnya dengan Teori Kritis (Habermasian). Ia lebih cenderung mendekati kekuasaan dari mekanisme-mekanisme teori sosial yang telah berjalan dalam masyarakat. Teori Kritis sangat mengandalkan bahwa wewenang kebenaran dalam masyarakat tidak dapat berlaku jika seandainya relasi-relasi sosial yang terbangun atas struktur dan aturan main dari teori itu tidak ada. Maka unsur fundamental yang menentukan lahirnya kebenaran kekuasaan itu sebagai akibat dari dialektika realitas sosial itu sendiri. Konsep kekuasaan akan berjalan seimbang ketika subjek kembali berelasi secara damai dengan objek realitasnya di luar dirinya. Maka

pendekatan kekuasaan akan lebih tepat jika tidak menolak faktor-faktor teori yang sudah tersistematisasi dalam masyarakat itu sendiri. Pada titik ini kata kuncinya kemudian adalah komunikasi (dialog) antar subjek.

- Jika Foucault melihat kekuasaan dari unsur strateginya, maka teori kritis lebih mendekati diri dengan kekuasaan “berkomunikasi” dengan realitas sosial. Individu tidak didiskreditkan sebagai unsur luar dari kekuasaan melainkan diusahakan untuk berkomunikasi dengan kekuasaan tersebut. Bukan suatu dekonstruksi total –rekonstruksi untuk menempatkan relasi sosial dan relasi kekuasaan berjalan seiring dan menemukan keseimbangannya. Yang paling penting adalah menempatkan kekuasaan dan relasi sosial sebagai tindakan komunikatif yang dapat saling melengkapi dalam menciptakan kesadaran-kesadaran baru baik dalam dunia subjek atau pun dunia objektif dari perkembangan historis masyarakat.

- Namun gagasan Habermas itu pun juga tak bisa berkelit dari berbagai kritikan. Selain permasalahan artikulasi gagasan (mekanisme di lapangan), terjebak pula dalam isu etnosentrisme ruang publik. Bagaimana Habermas bisa memastikan bahwa isu dan kepentingan dari kelompok yang termarginalkan bakal menjadi isu dan kepentingan umum, ketika secara kuantitas terdapat kelompok yang berkepentingan menguasai ruang publik? Foucault menyanggah bahwa tak mungkin setiap individu melakukan *self-reflexivity* ketika setiap subjek sama sekali tak keluar dari kuasa wacana yang turut mengonstruksi moral subyek-nya.

Pemikiran Foucault kuat dalam hal analisis atas operasi kuasa. Kecenderungan Foucault untuk menolak pengembangan teori, pembahasan epistemologis, upaya-upaya membangun klaim, simpulan, keterkaitan, dan terlebih lagi preskripsi, bagi peneliti meninggalkan dua (kelemahan) lubang spirit, yakni: emansipasi dan transformasi. Di sinilah kekuatan Mazhab Frankfurt dengan teori kritisnya.

Anything Goes a la Feyerabend sebagai Breakthrough

"Is it not possible that my activity as an objective [or critical-rational] observer of nature will weaken my strength as a human being?" I suspect the answer to many of these questions is affirmative and I believe that a reform of the sciences that makes them more anarchic and more subjective (in Kierkegaard's sense) is urgently needed –Feyerabend, Against Method (1978: 154)

Sebagian orang percaya bahwa segala sesuatu harus dipandang secara ilmiah. Hal ini sedikit-sedikitnya dipengaruhi oleh proyek Pencerahan yang banyak memberikan perhatian kepada rasio atau akal. Dalam batas tertentu muncul apa yang kita kenali sekarang sebagai rasionalisme yang secara spontan tidak jarang diposisikan sebagai tolak ukur bagi, tidak hanya kegiatan ilmiah, namun juga kehidupan sehari. Padahal, dalam bukunya *Melawan Fasisme Ilmu* (2009: iv), Abqary menegaskan rasionalisme dalam wacana filsafat ilmu hanya menjadi salah satu paham yang tidak lepas dari kecacatan. Inilah yang menjadi titik berangkat pemikiran Paul Feyerabend dalam mengembangkan konsep *anything goes*.

Paul Feyerabend (1924-1994)³⁰ mempelajari sejarah dan sosiologi sebelum memutuskan untuk mendalami fisika. Tesis doktornya diperoleh dalam filsafat di bawah bimbingan Karl Popper. Karya terbesar Feyerabend adalah *Against Method* yang ditulis pada tahun 1975. Pada awalnya, sebagai murid Popper, Feyerabend mendukung filosofi dan prinsip falsifikasi Popper namun kemudian dia berbalik menjadi salah seorang penentang Popper. Feyerabend berpendapat bahwa prinsip falsifikasi Popper tidak dapat dijalankan sebagai satu-satunya metode ilmiah untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Menurut Popper, setiap teori harus melalui proses falsifikasi untuk menemukan teori yang benar. Bila

³⁰ Paul Karl Feyerabend lahir pada tahun 1924 di Wina, Austria. Tahun 1945 belajar seni suara, teater, dan sejarah teater pada *Institute for Production of Theater, The Methodological Reform The German Theater* di Weimar. Memperoleh gelar Ph.D. dalam bidang fisika dari Wina University dan kemudian mengajar di California University. Tahun 1953 menjadi pengajar di Bristol dan tahun-tahun berikutnya mengajar estetika, sejarah ilmu pengetahuan dan filsafat di Austria, Jerman, Inggris, Selandia Baru dan Amerika Serikat. Tahun 1958 menjadi guru besar di Universitas California di Berkeley hingga wafat pada tahun 1994.

Awalnya ia banyak dikenal sebagai seorang rasionalis. Ia percaya terhadap keunggulan ilmu pengetahuan yang memiliki hukum-hukum universal, berlaku dalam segala tindakan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Keyakinan rasionalitas tersebut tampak dari kiprahnya pada masa itu dalam Himpunan Penyelamatan Fisika Teoritis (*A Club for Salvation of Theoretical Physics*). Keanggotaannya dalam kelompok tersebut melibatkannya dengan eksperimen-eksperimen ilmu alam dan sejarah perkembangan ilmu fisika. Dari sana ia melihat hubungan yang sesungguhnya antara eksperimen dan teori, dimana relasi itu tidak sesederhana apa yang dibayangkan dan dijelaskan. Ia kemudian menyatakan diri sebagai seorang “anarkis” yang menentang penyelidikan terhadap aturan-aturan penggantian teori dan pembangunan kembali pemikiran rasional dari kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan. [dalam TW, Prasetya; Nazhroul (1); Abqary, (2009: 17-18)]

suatu teori dapat ditemukan titik lemahnya maka teori tersebut gugur. Sedangkan menurut Feyerabend tidaklah demikian. Feyerabend berpendapat bahwa untuk menemukan teori yang benar, suatu teori tidaklah harus dicari kesalahannya (falsifikasi) melainkan mengembangkan teori-teori baru. [Jendelapemikiran (1)]

Fokus Feyerabend kemudian berpindah ke pluralisme teoritis, yang mengatakan bahwa untuk memperbesar kemungkinan mem-falsifikasi teori yang berlaku, kita harus mengkonstruksi teori-teori baru sebanyak mungkin dan mempertahankannya. Pluralisme ini penting, karena kalau tidak, akan terjadi keseragaman yang akan membatasi pemikiran kritis. Jika teori baru ini dapat dipertahankan dan lebih baik daripada teori lama maka yang baru akan menggantikan yang lama (yang dinamakan 'perubahan paradigma' oleh Thomas Kuhn). Feyerabend menuturkan hal ini dalam artikel *On a Recent Critique of Complimentary*. Menurut Feyerabend, dalam bukunya *Against Method*, tidak ada satu metode rasional yang dapat diklaim sebagai metode ilmiah yang sempurna. Metode ilmiah yang selama ini diagung-agungkan oleh para ilmuwan hanyalah ilusi semata. Prinsip dasar mengenai tidak adanya metodologi yang berguna dan tanpa kecuali yang mengatur kemajuan sains disebut olehnya sebagai 'epistemologi anarkis'³¹. Penerapan satu metodologi apa

³¹ Secara etimologis, anarkisme berasal dari kata Yunani '*an archos*' yang berarti tanpa pemerintahan. Anarkisme merupakan sebuah aliran dalam filsafat sosial yang menghendaki dihapusnya negara atau pemerintahan termasuk kontrol politik dalam masyarakat. Dalam bidang ilmu pengetahuan, anarkisme diartikan sebagai "*anarchy epistemological*" (kesewenang-wenangan epistemologis) yang digunakan dan dipopulerkan oleh Paul Karl Feyerabend. Dalam wilayah epistemologi, anarkisme berusaha mempertahankan sekaligus menentang kemapanan. Hal itu dilakukan untuk memberikan kebebasan bagi perkembangan metode-

pun, misal metodologi empiris atau Rasionalisme Kritis Popper akan memperlambat atau menghalangi pertumbuhan ilmu pengetahuan. Dia mengatakan *'anything goes'* yang berarti hipotesa apa pun boleh dipergunakan, bahkan yang tidak dapat diterima secara rasional atau berbeda dengan teori yang berlaku atau hasil eksperimen. Sehingga ilmu pengetahuan bisa maju tidak hanya dengan proses induktif sebagaimana halnya sains normal, melainkan juga secara kontrainduktif. (*Ibid.*)

Dalam *Against Method*, dia memaparkan lebih lanjut bahwa pada dasarnya ilmu pengetahuan dan perkembangannya tidak bisa diterangkan ataupun diatur oleh segala macam aturan dan sistem maupun hukum. Ilmu pengetahuan tidak mengenal aturan metodologis yang selalu digunakan para ilmuwan. Aturan metodologis hanya akan membatasi aktivitas para ilmuwan, dan

metode alternatif. Anarkisme tersebut terkadang diartikan sebagai kesewenang-wenangan epistemologi, karena tidak adanya ukuran atau aturan yang pasti untuk menentukan antara yang ilmiah dan non ilmiah. Dalam posisi seperti itu, anarkisme juga tidak bisa disebut skeptisisme. Jika skeptisisme berpendapat bahwa suatu pandangan bisa benar dan bisa salah atau bahkan bisa juga tidak ada penilaian berarti baginya, maka tidak demikian dengan halnya dengan anarkisme epistemologis. Dalam perspektif ini, ilmu pengetahuan secara hakiki merupakan usaha yang anarkistik mutlak. Sejarah ilmu pengetahuan tidak hanya berisi fakta-fakta dan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik dari fakta-fakta tersebut, akan tetapi juga berisi ide-ide, interpretasi terhadap fakta-fakta, masalah-masalah yang timbul dari kesalahan interpretasi, interpretasi yang bertentangan dan sebagainya. Sementara pada umumnya para ilmuwan hanya meninjau fakta ilmu pengetahuan hanya dari dimensi ide, sehingga wajar jika sejarah dan ide-ide ilmu pengetahuan yang berkembang menjadi pelik, rancu dan penuh dengan kesalahan seperti pemikiran dari para penemunya. Terkait hal ini, dalam *Against Method*, Feyerabend berujar, *"...and my thesis is that anarchism helps to achieve progress in any one of the senses one cares to choose"*. [dalam Nazhroul (1)]

dengan demikian akan membatasi kemaju ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan terjadi karena kreativitas individual. Karena itu, satu-satunya prinsip yang tidak menghambat perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan adalah *anything goes*. Dengan begitu, dia menolak adanya keteraturan dalam perkembangan ilmu, dimana keteraturan itu diwujudkan dalam hukum dan sistem. Menurutnya dalam menjalankan riset dan menjelaskannya, ilmuwan sebaiknya tidak dibatasi oleh metode-metode yang ada. Ilmuwan harus bebas. Kegiatan ilmiah dan ilmu pengetahuan adalah suatu upaya yang anarkistik karena tidak mengandalkan satu metode tertentu.

Bagi dia, sains sebagaimana yang kita ketahui selama ini bisa menjadi monster yang mematikan manusia sendiri demi alasan objektivitas. Karena itu, ilmuwan harus dibebaskan dari berbagai belenggu metodologi keilmuan dan dalam kebebasannya berusaha memahami dan menjelaskan berbagai fakta, gejala, kejadian secara lebih subjektif dan anarkis. Bagi dia, sains bukanlah satu-satunya penjelas realitas. Dalam masyarakat masih ada sumber-sumber penjelasan lainnya yang juga memiliki otoritas yang setara, misalnya penjelasan dari mitos, dari agama, dan sebagainya. Bahkan filsafat pun harus ditolak karena tidak mampu memberikan deskripsi yang umum mengenai sains. Sains juga tidak sanggup menemukan sebuah metode keilmuan yang bisa membedakan mana yang merupakan produk sains dan mana yang bukan merupakan produk sains, misalnya mitos-mitos itu tadi. Karenanya, arahan atau bimbingan filosofis sebaiknya diabaikan saja oleh para ilmuwan. Untuk menjelaskan pandangannya bahwa dalam bekerja ilmuwan tidak membutuhkan metodologi keilmuan tertentu, Feyerabend mengambil contoh revolusi Copernican. Dengan revolusi ini semua metodologi keilmuan yang selama ini ada dalam masyarakat (*prescriptive rules*) dengan sendirinya ditolak. Revolusi

Copernican tidak mungkin akan terjadi jika ilmuwan bekerja mengikuti metode-metode keilmuan tertentu.

Walaupun demikian, Abqary (*Ibid.*) mengingatkan poin penting, bahwa *anything goes a la* Feyerabend tidak dapat dipahami secara longgar karena eksistensinya di dalam wacana keilmuan mengandaikan situasi situasi dan kondisi fasis. Dan fasisme ilmu memang tidak sama dengan krisis ilmu seperti yang digagas Kuhn. Namun, fasisme ilmu menyerupai salah satu dari ketiga jenis krisis ilmu *a la* Kuhn dan belum tentu sebaliknya. Abqari membabarkan perbedaan itu dengan mengulas krisis ilmu terlebih dahulu. Ia mengutip Kuhn:

“Semua jenis krisis dimulai dengan pengaburan akan paradigma dan kemudian sebagai konsekuensinya adalah pelanggaran setiap aturan yang berlaku di dalam *normal research*. Dalam pengertian ini riset yang berlangsung selama krisis menyerupai dengan riset yang berlangsung pada masa pra-pradigma, dengan mengecualikan lokus perbedaan di level yang lebih kecil dan yang sudah terdefiniskan dengan jelas. Dan semua jenis krisis akan selalu berakhir dengan tiga cara. (1) Kadangkala normal science secara meyakinkan dapat menyelesaikan masalah yang menyebabkan krisis meskipun muncul keputusan dari mereka yang melihatnya sebagai akhir dari sebuah paradigm. Pada saat yang lain (2) hal yang menjadi masalah tetap tidak dapat diselesaikan bahkan tampil dengan pendekatan yang lebih radikal. Maka kemudian saintis dapat menyimpulkan bahwa tidak ada solusi yang akan diperoleh pada saat ini. Masalah tersebut akan dilabeli dan diwariskan untuk generasi mendatang dengan peralatan yang lebih memadai. Atau, yang terakhir, yang akan menjadi perhatian kita di sini, (3) sebuah krisis akan berakhir dengan kemunculan sebuah kandidat baru untuk menjadi paradigma lengkap dengan pertentangan berikutnya...”

Jika kita mengamati apa yang disampaikan Kuhn, dapat kita tangkap bahwa apa yang menjadi gagasan Feyerabend tercermin pada jenis krisis ilmu yang ketiga. Kehendak untuk mencoba apa pun adalah apa yang disebut Feyerabend sebagai *anything goes* di dalam situasi dan kondisi keilmuan yang fasistik. Menyangkut apa dan bagaimanakah karakter fasisme ilmu, Feyerabend tidak mendeskripsikan secara spesifik, terkecuali dalam kaitannya dengan *anything goes* sebagai rekomendasi yang memadai bagi pengembangan ilmu di situasi dan kondisi yang sedemikian rupa. Feyerabend memberikan contoh yaitu respon saintis, universitas, dan rumah sakit di Amerika Serikat terhadap integrasi obat herbal, akupunktur, dan beberapa jenis pengobatan tradisional lainnya.

Dihubungkan dengan kondisi perkembangan ilmu sosial di Indonesia yang dijumpai banyak kejanggalan dan berjung involusi, ide *anything goes* menjadi terobosan yang produktif. Dengan konsep ini, ilmuwan tidak lagi terjebak dalam kungkungan paradigma *mainstream* positivistik yang selama ini mengakar kuat. Sebaliknya upaya pengarusutamaan diskursus alternative, misalnya ilmu (sosial) indigen, memperoleh justifikasi epistemologi yang relevan. Gagasan peneliti mengenai ilmu ideal yang tidak normative: netral, nir kepentingan, non-ideologis, bebas nilai, serta lepas dari konstelasi kuasa yang mengitari, sejalan dengan gagasan Feyerabend. Kaidah-kadaih keilmuan baku yang selama ini dianut dapat dikesampingkan jika menghambat tujuan pengembangan keilmuan itu sendiri.

Melampaui Positivisme dalam Tafsir Feyerabend

Pada dasarnya pemikiran anarkisme epistemologi adalah suatu kritik terhadap perjalanan dan perkembangan ilmu pengetahuan yang telah didominasi oleh ilmu positivistik..

Hadi dalam bukunya *Third Debate...* (2008: 185), menjelaskan positivisme merupakan suatu bentuk kesadaran ilmu pengetahuan yang secara luas menyangkut bagaimana seseorang memandang kenyataan, dan juga menyangkut bagaimana memproduksi pengetahuan yang didapat dari pandangannya tersebut. Dalam positivisme, kesadaran tentang kenyataan ini berbentuk kesadaran yang positivistik. Suatu kesadaran pengetahuan yang bersal dari ilmu-ilmu berdasarkan fakta-fakta keras yang dapat diukur dan diamati, yaitu ilmu-ilmu positif. Istilah “positif” ini memuat prinsip normative bahwa “pengetahuan kita hendaknya tidak melampaui fakta objektif.” Fakta objektif itu adalah fakta atau realitas yang hadir di depan mata kita (*out-there*), atau kita pernah mengalaminya sendiri. Dengan demikian, alam pikir positivistic yakin bahwa sesuatu yang di luar batas jangkauan kemampuan indrawi adalah mustahil untuk diketahui. Karenanya, secara ekstrem, yang mustahil diketahui itu disebut bukan pengetahuan yang dapat menjadi landasan hidup. Sebagaimana dikatakan Steve Smith (*Ibid.*), positivisme adalah suatu posisi metodologis yang bersandar pada suatu epistemologi empiris yang mendasarkan justifikasi pengetahuan akan dunia pada pengalaman, dan dengan demikian, dengan sendirinya membenarkan metodologi dan ontologinya sejauh ia dijamin secara empiris. Positivisme dengan demikian, secara filosofis mengandung hubungan yang saling terkait satu sama lainnya, antara keinginan dalam rangka membangun komitmen metodologinya (ilmu pengetahuan yang diukur dengan fakta keras), yang terikat pada epistemologi empirisisme (fakta dari kenyataan yang tampak atau pengalaman) dan dalam rangka meneguhkan klaim ontologinya (*the reality is out there as essence*).³²

³² Menurut Smith, setidaknya ada empat prinsip positivisme. Pertama, kesatuan ilmu pengetahuan (*unity of science*); keyakinan bahwa terdapat

Lebih lanjut mengenai apa itu positivisme berulang kali disinggung dalam bab-bab terdahulu. Kali ini peneliti lebih berfokus pada upaya melampaui positivisme dengan tafsir Feyerabend meneruskan bahasan sebelumnya. Satu sumber determinan 'fasisme ilmu' yang dimaksudkan oleh Feyerabend adalah positivisme. Untuk menuju pluralitas teori yang dia perjuangkan, Feyerabend terlebih dahulu memulai proyeknya dengan melakukan dua kritik fondasional. *Pertama*, apa yang dinamakan anti metode (*against method*). Kritik ini berusaha (mendekonstruksi) format metode ilmu pengetahuan yang telah dibuat dan dipahami oleh para kaum positivistik dengan melakukan penyingkapan dan pembongkaran terhadap asumsi-asumsi beserta kesalahan dari teori-teori baku yang selama ini telah dikembangkannya. Ilmu pengetahuan yang oleh para ilmuwan dianggap mempunyai satu metode yang baku dan universal, memiliki resistensi terhadap kritik yang tahan sepanjang masa serta dapat pula membawahi fakta dan penelitian, menurut Feyerabend tidak realistis. Hal ini karena kenyataannya ilmu pengetahuan hanya diambil dari pandangan sederhana atas dasar kemampuan seseorang dari lingkungan tertentu dan berusaha memaksakan hukum-hukum yang menghalangi berkembangnya kausalitas-kausalitas profesional dengan mempertaruhkan sifat kemanusiaan. Baginya, gagasan itu merusak dan menghambat laju perkembangan ilmu pengetahuan, karena mengabaikan adanya kompleksitas situasi fisik dan historis yang memungkinkan perubahan ilmu pengetahuan. Dengan menunjukkan bahwa sejarah ilmu pengetahuan itu selalu dipenuhi dengan pertentangan teori,

cara-cara yang sama yang dapat dilakukan antara ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial dalam tugasnya memproduksi pengetahuan. *Kedua*, distingsi fakta dan nilai; keyakinan akan kesadaran kenyataan yang bersumber data-data indrawi. *Ketiga*, keteraturan dalam dunia sosial. Dan, *keempat*, validitas empiris. (dalam Hadi, 2008: 187-196)

Feyerabend juga menyangkal pandangan saintisme yang menganggap ilmu berada di atas segala aspek budaya lain sehingga menyebabkan ilmu pengetahuan modern menghalangi kebebasan berpikir para ilmuwan itu sendiri.

Kedua, yakni anti ilmu pengetahuan (*against science*). Kritik ini secara lebih mendalam mencoba mengoreksi tentang praktek ilmiah, fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dalam kehidupan masyarakat yang dianggap memiliki standar universal, melampaui batas-batas partikularitas dan relativitasnya. Anti ilmu pengetahuan dalam hal ini tidak berarti anti terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri, melainkan anti terhadap kekuasaan ilmu pengetahuan yang seringkali mengaburkan maksud dan tujuan utamanya. Ilmu pengetahuan menjadi pemikiran tunggal-mutlak karena adanya propaganda dari para ilmuwan dan institusi terkait yang diberi wewenang untuk selalu mempengaruhi kesadaran kolektif masyarakat tentang hakikat ilmu pengetahuan, sehingga ilmu pengetahuan yang dianggap paling benar itu telah menguasai sistem kebenaran dunia ilmiah dan akan menjadi semacam ideologi yang menindas kebudayaan alternatif. Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat dikatakan bahwa ilmu pengetahuan merupakan salah satu gagasan terbuka dan plural dari sekian banyak ideologi yang ada dalam masyarakat. Maka tidak wajar men'dewa-dewa'kan ilmu pengetahuan sebagai satu-satunya pengetahuan yang paling unggul dan bahkan paling menentukan kehidupan masyarakat. Karena masalahnya terletak pada muatan ideologis dari komunitas para ilmuwan dan pihak-pihak yang selalu berusaha menciderai kemurnian citra ilmu pengetahuan dengan kepentingan-kepentingan subyektif individual yang menyebabkan proses idealisasi ilmu pengetahuan yang sebenarnya mengalami stagnasi. [dalam Nazhrul (1)]

Sebagai ganti atas anti-metode (*against method*), terdapat beberapa prosedur yang ditawarkan oleh Feyerabend. Peneliti akan mengutip apa yang disampaikan Nazrou (1) sebagai berikut:

Pertama, Kontra-Induksi (Counterinduction). Dimaksudkan sebagai standar kritik dari luar yang sangat diperlukan demi kemajuan ilmu pengetahuan, karena sulitnya otokritik yang berasal dari dalam tubuh ilmu pengetahuan itu sendiri. Dalam hal ini bukan berarti mengganti seperangkat aturan-aturan dengan peraturan yang lain, tetapi tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa semua metode yang sudah jelas sekalipun mempunyai keterbatasan. Sementara cara terbaik untuk menjelaskan ini adalah dengan menunjukkan batas-batas, irasionalitas dari beberapa aturan yang mungkin dianggap sebagai hal yang paling mendasar. Hal ini berbeda dengan paradigma positivisme yang menganggap induksi sebagai metode yang paling valid. Ketika ditemukan fakta observasi dan eksperimen yang sesuai dengan teori, maka teori atau hukum diperkuat atau dikorborasi. Prinsip induksi berupaya mencari fakta yang mendukung dan menghindari fakta yang tidak sesuai dengan teori. Kontra-induksi yang ditawarkan oleh Feyerabend itu adalah juga untuk mengatasi masalah kekurangan prinsip verifikasi atau falsifikasi yang sama-sama tidak menghendaki adanya fakta yang konsisten dengan teori.

Kedua, Counterrule. Melalui kontra-induksi, dimunculkan juga istilah "*counterrule*," yaitu memberikan hipotesis yang tidak konsisten dengan teori yang mapan atau dengan fakta yang tidak sesuai dan terukur. Hal ini berperan penting untuk menjembatani permasalahan teori dan fakta. Meskipun demikian, hal ini tidak memerlukan pembelaan khusus karena tidak ada satupun teori yang selalu sesuai dengan semua fakta dan selalu dapat diketahui secara pasti dan meyakinkan. Oleh karena itu pertanyaan pokoknya bukan apakah teori-teori yang kontra-induktif ini harus diakui dalam ilmu pengetahuan

atau tidak, tetapi apakah kesenjangan yang ada antara teori dan fakta harus diperbesar atau diperkecil.

Sedangkan sebagai ganti atas anti-ilmu pengetahuan (*against science*), masih mengutip Nazhrour (1), terdapat beberapa prinsip yang ditawarkan oleh Feyerabend, diantaranya:

Pertama, Prinsip Pengembangbiakan (*proliferation*). Secara harfiah berarti membiarkan semua berkembang sendiri. Maksudnya tidak bekerja dengan sistem pemikiran, bentuk-bentuk kehidupan dan kerangka institusional yang tunggal. Ini berarti bahwa prinsip pengembangbiakan juga menafikan adanya sistem otoritarianisme terhadap produk pemikiran manusia yang paling asurd sekalipun. Prinsip pengembangbiakan ini merupakan realisasi kritik dari alternatif pemikiran Feyerabend yang bertujuan untuk mencapai tiga hal utama, yaitu: *Pertama*, memberikan model abstrak tentang kritik terhadap ilmu pengetahuan; *Kedua*, mengembangkan konsekuensi-konsekuensinya dan; *Ketiga*, membandingkan konsekuensi-konsekuensi itu dengan ilmu pengetahuan. Berdasarkan yang ketiga, diharapkan bahwa perbandingan antara fenomena-fenomena sejarah dan pandangan epistemologis mampu memberikan kriteria penilaian yang holistik terhadap struktur aktual ilmu pengetahuan, sehingga akan terbentuk suatu basis bagi kritisisme dan reformasi ilmu pengetahuan. Prinsip pengembangbiakan berusaha menemukan dan mengembangkan teori-teori yang tidak cocok dengan pandangan yang sudah lazim diterima. Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya memungkinkan adanya penemuan-penemuan alternatif baru, tetapi juga membuka peluang bagi tampilnya kembali teori lama yang sudah tidak diakui lagi keberadaannya.

Kedua, Prinsip Apa Saja Boleh (*anything goes*). Secara harfiah berarti membiarkan segala sesuatu berlangsung dan berjalan tanpa dijejali aturan-aturan dan hukum-hukum. Gagasan mengenai adanya keteraturan

metode atau rasionalitas teori ternyata banyak sekali menyisakan pandangan yang naif tentang manusia dan keadaan sosialnya. Prinsip ini mengimplikasikan suatu perlawanan terhadap segala macam aturan atau hukum yang telah baku itu. Prinsip ini tidak dimaksudkan sebagai metode baru, melainkan sekedar upaya agar para ilmuwan yang terbiasa menggunakan standar-standar universal untuk menerima tradisi-tradisi dan praktek-praktek riset alternatif. Hal ini merupakan sebuah upaya menunjukkan bahwa semua metode yang paling jelas sekalipun memiliki keterbatasan. Dan satu-satunya hukum yang akan hidup terus dan dapat bertahan di tengah semua situasi dan dalam tahap perkembangan manusia adalah prinsip ini.

Kembali mengingat Foucault yang digunakan *framework*, konsep *anything goes* memiliki singgungan kuat dengan pemikirannya. Ia menolak upaya membangun teori-teori yang bersifat umum, selain Ia juga menolak membahas persoalan-persoalan epistemologis khususnya terkait analisis-analisisnya terhadap klinik, rumah sakit jiwa, dan penjara. Karena ketidakjelasan protocol-protokol metodologis yang Ia gunakan, ilmuwan kesulitan dan tidak tahu standar apa yang dapat digunakan untuk menilai karyanya. Dan Foucault sendiri, abai dengan pencarian status ilmiah bagi analisisnya. Filsafatnya berakar dalam format cerita lisan (*story-telling*). Foucault dan Feyerabend berangkat dari titik pijak yang sama yaitu pertentangannya pada positivisme dengan segala standarisasinya. Itulah tak mengherankan jika Foucault, menurut Sarup, berusaha menghindari dari persoalan epistemology dan oleh karena itu, kebenaran dalam karyanya tidak memainkan peran apa pun dalam transformasi pengetahuan. Sebagai gantinya, Ia merayakan, seperti Nietzsche, perspektivitas pengetahuan. (Sarup, 2011: 121-128)

Post Scriptum: Pengarusutamaan Paradigma Kritis, Jalan Menuju Ilmu Sosial Transformatif

...teori kritis memiliki tujuan perubahan sosial, namun menghindari terjebak dalam pragmatisme –Martin Jay (dalam Suyanto, 2012)

Di bagian akhir ini, penulis bermaksud turut memprovokasi pengembangan paradigma kritis sebagai agenda ke depan. Dalam konstelasi perkembangan teori sosial, teori kritis hadir dan tumbuh dengan segala daya tarik dan kontroversi yang menyertainya. Teori kritis adalah produk dari para pemikir Neo-Marxis Jerman yang mulai menyadari keterbatasan teori Marxian dalam memahami perubahan realitas sosial yang makin kompleks di era masyarakat modern dan pos-modern. Kendati bertitik-tolak dan memperoleh ilham dari Karl Marx, namun perkembangan teori kritis kemudian justru melampaui dan bahkan meninggalkan Marx karena telaaahnya makin beragam pada seluk-beluk kehidupan masyarakat industrial maju, era kapitalisme akhir, dan bahkan masyarakat pos-industrial. (dalam Suyanto, 2012: 18)

Kelahiran teori kritis sebagai bagian dari pemikiran Neo-Marxis dipengaruhi dan terkait dengan konsep kritik dari Kant³³, Hegel³⁴, Marx³⁵, dan Freud³⁶ (*Ibid.*). Oleh banyak teoretisi, teori Neo-

³³ Kritik dalam arti Kant merupakan kritik terhadap dogmatisme.

³⁴ Hegel menyatakan kritik tak lain adalah refleksi diri atas rintangan-rintangan, tekanan-tekanan dan kontradiksi-kontradiksi yang menghambat proses pembentukan diri dari rasio sejarah.

³⁵ Kritik dalam pengertian Marx adalah usaha untuk mengantisipasi diri manusia dari penindasan dan alienasi yang dihasilkan oleh hubungan-hubungan kekuasaan dalam masyarakat.

³⁶ Kritik adalah refleksi dari individu dan masyarakat atas konflik-konflik psikis yang menghasilkan represi dan ketidakbebasan internal, sehingga

Marxian ini menawarkan cara penjelasan yang lebih lengkap, kritis, dan menawarkan sudut pandang alternative yang sebelumnya tidak banyak dikemukakan teori-teori sosial lain yang tanpa sadar acap terkontaminasi status quo. Seperti dikatakan Douglas Kellner (2003, dalam Suyanto, 2012: 19), teori kritis menawarkan pendekatan multidisipliner –atau lebih tepat disebut pendekatan supradisipliner– untuk teori sosial yang menggabungkan perspektif-perspektif yang bersumber dari ekonomi-politik, sosiologi, teori kebudayaan, filsafat, antropologi, dan sejarah. Teori kritik ini bertujuan mendorong kita melakukan eksplorasi refleksi diri tentang berbagai pengalaman yang kita miliki dan cara di mana kita memandang diri kita, budaya kita, dan dunia.

Martin Jay sebagaimana dikutip Suyanto (*Ibid.*) menjelaskan, dalam memahami realitas sosial, teori kritis tidak ingin terjebak proses pereduksian fakta sosial layaknya yang sering dilakukan aliran positivisme. Teori kritis berbeda dengan teori-teori tradisional dalam beberapa hal. *Pertama*, teori kritis menolak memberhalakan pengetahuan sebagai sesuatu yang terpisah dan lebih penting dari tindakan. *Kedua*, penelitian ilmiah nir-kepentingan tidak mungkin dilakukan dalam suatu masyarakat di mana anggotanya belum otonom. *Ketiga*, teori kritis berkeyakinan bahwa penelitian sosial harus selalu berisi komponen historis, sehingga penelitian sosial selalu bersifat dialektis. *Keempat*, lebih dari sekadar berlogika sebab-akibat, teori kritis memahami fenomena sebagai universal sekaligus particular. *Kelima*, teori kritis memiliki tujuan perubahan sosial, namun menghindari terjebak dalam pragmatism. *Keenam*, teori kritis berniat menyatukan dirinya dengan semua kekuatan progresif yang berkeinginan untuk menyatakan kebenaran. *Ketujuh*, berbeda dengan Marxisme

dengan cara refleksi itu masyarakat atau individu dapat membebaskan dirinya dari kekuatan asing yang mengacaukan kesadarannya.

Ortodoks yang menempatkan superstruktur budaya masyarakat modern dalam posisi sekunder, teori kritis berkonsentrasi pada dua masalah, yaitu: 2) struktur dan perkembangan otoritasnya; serta, 2) kemunculan serta pertumbuhan budaya massa. Implikasi atau *goal* dari paradigma kritis ini adalah berkembangnya ilmu sosial transformatif.

Di Indonesia, gaung ilmu sosial transformatif³⁷ sebenarnya tidak benar-benar baru. Kemunculannya merupakan bagian dari gerbong *alternative discourse* atas ‘pembangunanisme’, yang lambat laun terbukti gagal memenuhi ambisinya. Satu yang menarik, ilmu sosial transformatif awalnya lebih berkembang di ranah gerakan masyarakat sipil, seperti pada komunitas LSM/NGO, daripada di komunitas akademik (kampus). Spiritnya yang kritis, emansipatorik, dan transformatif sering dijadikan sandaran konseptual strategi aksi mereka –selain dalam rangka refleksi sekaligus memperoleh legitimasi ilmiah.³⁸ Di antara teoretisi yang sering dikutip adalah: Habermas³⁹, Paulo Freire⁴⁰, Ivan Illich⁴¹,

³⁷ Ilmu dalam perspektif Aristoteles tak mengabdikan pada pihak lain. Ilmu digeluti umat manusia demi ilmu itu sendiri. Sebagai kritikus tajam kemudian dikenallah ucapan, “*primun vivere, deinde philosophari*” berjuanglah terlebih dahulu, baru boleh berfilsafat. Ilmu hadir untuk kepentingan umat manusia. Sehingga dengan tesis inilah, sebuah ilmu memiliki dasar tujuan.

³⁸ Sebagaimana disampaikan Fakih (2003: 6), berbagai teori sosial, ekonomi, politik, dan budaya lahir tidak saja dalam rangka pertarungan memberi makna terhadap suatu realitas sosial, tetapi juga berimplikasi pada perubahan sosial karena pada dasarnya perubahan sosial dibangun di atas pemahaman teoritik dan suatu teori sangat berpengaruh dalam membentuk suatu program aksi di lapangan. Berangkat dari pemahaman ini, maka tak heran jika teori yang bersifat transformatif, relative cepat berkembang di kalangan aktivis sosial.

³⁹ Habermas secara sederhana membagi ilmu-ilmu sosial menjadi tiga paradigma: *instrumental knowledge* (positivism), paradigma interpretative (dengan dasar filsafatnya fenomenologi dan hermeneutic), serta paradigma

Gustavo Guiterez⁴² (dengan pedagogi emansipatorik dan teologi pembebasannya)⁴³.

Sejumlah ilmuwan Indonesia sendiri terlibat dalam pengarusutamaan penerapan ilmu sosial transformatif ini. Menyebut beberapa nama diantaranya adalah: Muslim abudrrahman, Hidayat Nataatmadja (menggunakan terma “ilmu humanika”); Arief Budiman (“ilmu sosial yang kontekstual”); Francis Wahono (Tahun 80-an, Ia dikenal getol mempopulerkan “teologi pembebasan”); kemudian, Mubyarto (“ilmu sosial yang membumi”); Kuntowijoyo (“ilmu sosial profetik”); dan, Mansour

kritik (*critical/emansipatory knowledge*). Paradigma yang disebutkan terakhir itulah yang memberikan legitimasi terhadap ilmu sosial pembebasan, yang tadinya dianggap ‘tidak ilmiah’ tersebut. (Fakih, 2003: 23-28)

⁴⁰ Tugas teori sosial menurut Freire adalah melakukan apa yang disebutnya sebagai *conscientizacao* atau proses penyadaran terhadap system dan struktur yang menindas, yakni suatu system dan struktur “dehumanisasi” yang membunuh kemanusiaan. Pemikiran Freire sangat dipengaruhi oleh konsep hegemoni Gramsci. Terkiat dnegan penggolongan kesadaran manusia, Freire menyebutny ada tiga: kesadaran magis (*magical consciousness*), kesadaran naïf (*naival consciounees*), dan kesadaran kritis (*critical consciousness*). (Fakih, 2003: 29-31)

⁴¹ Hampir sama dengan Freire sebageian tulisannya mem,bahas problem pendidikan yang sifatnya dehumanisasi. Illich menganggap sekolah adalah candu masyarakat.

⁴² Gustavo Guiterez (1973) merupakan salah satu tokoh teologi pembebasan. Ia mmemberikan deskripsi atas terma tersebut merupakan suatu “refleksi teologi yang lahir dari ungkapan dan pengalaman sert usaha bersama untuk menghapus situasi ketidakadilan dan untuk membangun sutau masyarkat yang berbeda yang lebih bebas dan lebih manusiawi”. (dalam fakih, 2003: 177-178)

⁴³ Tentu di luar nama-nama yang disebutkan masih banyak teoritis lain yang tak kalah memebrikan pengaruh.

Fakih (melalui buku-bukunya yang mengeksplor paradigma kritis). Di luar itu memang ada pula ide mengenai indigenisasi/pribumisasi/kontekstualisasi guna meningkatkan derajat relevansi dan kompatibilitas ilmu sosial. Walaupun memiliki singgungan spirit dalam hal emansipasi, namun ide-ide tersebut penulis posisikan di luar lingkaran ilmu sosial transformatif; penulis memposisikannya lebih sebagai turunan.

Dalam diskursus ilmu sosial terkini (kontemporer), Purwo Santoso, akademisi Universitas Gadjah Mada, turut mengambil peran. Dalam upacara pengukuhan dirinya sebagai Guru Besar Ilmu Politik, Ia menyampaikan pidato berjudul *Ilmu Sosial Transformatif* (2011). Penulis tertarik menggambarkan ilmu sosial transformatif dari cara pandang Purwo melalui pidatonya tersebut. Ilmu sosial yang dimaksudkannya di sini mencakup berbagai disiplin, termasuk sosiologi, ilmu politik, ilmu ekonomi, antropologi, sejarah, ilmu hukum, dan seterusnya. Istilah *transformatif* di sini dipakainya dalam pengertian yang longgar, sekedar untuk menandai cara kerja ilmuwan yang tidak hanya berjuang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya sendiri, namun “peduli”. Dan pada gilirannya berdedikasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakatnya. Muara dari kegiatan pengembangan ilmu yang ditekuni bukan hanya stok pengetahuan yang “lebih banyak” dan “lebih baik”, melainkan juga kapasitas mengatasi masalah-masalah sosial.

Sungguhpun demikian, Purwo (2011) mengingatkan ilmu sosial transformatif bukanlah ilmu tentang ketrampilan (vokasi). Watak transformatif ilmu sosial bukan ditentukan oleh ketrampilan teknis, melainkan ditentukan oleh komitmennya untuk mewujudkan realitas baru sesuai dengan yang diteorikannya. Pengembangan ilmu sosial transformatif mensyaratkan kepiawaian dalam tiga dimensi filsafat ilmu, yakni: *ontologi*, *epistemologi* dan

aksiologi. Pencanggihan di tiga dimensi ini perlu dilakukan dalam kebulatan. Artinya sisi epistemologis dan sisi aksiologis harus mendapatkan perhatian yang serius. Watak *transformatif* perlu didasari dengan kejelasan pilihan epistemologis. Oleh karena itu, dalam pengembangan ilmu sosial transformatif, keberadaan metode keilmuan yang mengedepankan obyektivitas tidak harus ditolak, namun harus disadari kenaifannya. Kemudian dicarikan cara untuk mengkompensasi keperluannya untuk transformatif. Watak transformatif juga ditentukan oleh pilihan aksiologis-nya. Ilmu sosial dikembangkan bukan sekedar akumulasi teori, melainkan juga untuk memperbaiki relasi sosial yang terjalin. Dan akhirnya, menghasilkan realitas sosial yang di nilai jauh lebih baik.

Jika dalam kajian ini penulis menekankan pentingnya kesadaran politik (*political consciouness*) para ilmuwan dan penyesuaian paradigmatik guna menuju ilmu sosial transformatif, Purwo memberikan poin penting yang sifatnya komplementatif, bahwa model pembelajaran juga menjadi faktor yang menentukan. Terkait hal ini, Purwo (2011) menjelaskan sebagai lembaga pengembangan ilmu, universitas memegang tanggungjawab moral untuk menjamin komunitas keilmuannya memiliki kapasitas tinggi dalam menyerap dan mengembangkan ilmu. Yang diperlukan bukan hanya pembelajaran pada diri masing-masing ilmuwan, namun juga komunitas ilmuwan itu sendiri. Pada tingkat inilah universitas di Indonesia sepertinya masih bermasalah. Boleh jadi, komunitas ilmuwan sosial di negri ini, menurut Purwo, mengalami sindrom kesulitan belajar dalam kebersamaan (*collective learning difficulty*), kalau bukan ketidakmampuan belajar dalam kebersamaan (*collective learning dissability*). Universitas tegasnya bisa menghasilkan sarjana, master, doktor yang baik, namun belum tentu memiliki kecanggihan dalam hal pembelajaran demi menghasilkan temuan-temuan baru. Contoh sederhana dari *collective learning dissability* ini adalah ironi ilmuwan politik.

Dalam menggeluti ilmu politik, mereka kehilangan visi politik, yaitu; *tidak mengitung dampak politik dari akumulasi ilmu itu sendiri*. Oleh karenanya, jika pengembangan ilmu tidak disertai dengan kejelasan “visi politik” (penulis menyebutnya *political Consciousness*), ilmuwan sebetulnya hanya partisipan dari suatu sistem informasi. Purwo (2011) mengutip hasil studi Carlile (2004) tentang sistem informasi yang dilakukan dalam hubungan antar bangsa guna mengidentifikasi adanya tiga derajat *learning organization*, yakni: 1) sintaktis; 2) semantik; dan (3) transformatif. Ketiganya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Dalam derajat *sintaktis*, perhatian utama adalah ketepatan menyampaikan informasi dalam proses pembelajaran. Mereka hanya mentransfer ilmu dan memproses informasi secara apa adanya. Komunitas yang terlibat tidak hirau persoalan metodologis. Belajar pada dasarnya adalah hanya untuk *meniru dan meniru*. Obsesi mereka adalah penguasaan ontologis dalam bidang ilmunya. Tataran pembelajaran *semantik* lebih berani menafsir atau memahami makna tersirat di balik fenomena tertentu. Proses menafsir memang beresiko salah, namun juga berpotensi menghasilkan pengetahuan baru berkat kepiawaian metodologi keilmuan. Sedangkan pembelajaran *transformatif* ditandai oleh kemampuan mengambil manfaat berdasarkan kebutuhan yang jelas dan pada saat yang sama paham, fasih dalam menghayati dan menerapkan metodologi yang tersedia. Berangkat dari kesadaran konteks dan pemahaman akan berbagai peluang yang terbuka, mereka terus menerus terlibat dalam upaya memajukan ilmu pengetahuan. Model pembelajaran yang diterapkan oleh komunitas ilmuwan inilah, yang menurut Purwo berperan besar memengaruhi corak ilmu sosial yang dikembangkan-hasilkan.

Jadi jika di-*review* kembali, penulis menilai problem utama pengembangan ilmu sosial di Indonesia adalah lemahnya strategi

“politik pengembangan ilmu” karena lemahnya “kesadaran politik” para ilmuwan atas aktivitas keilmuan yang dilakukannya (*“political unconsciousness”*). Hal tersebut terjadi karena “efek-efek panoptikal” sebagaimana telah dipaparkan. Akhirnya ilmu sosial berkembang pesat namun dibarengi tanpa visi, arah, dan tujuan yang jelas. Ilmu politik gagal mengemban peran transformatif yang melekat pada dirinya (apolitis). Alternatif pemecahan versi penulis adalah dengan melakukan “politisasi ilmu” untuk menumbuhkan kesadaran politik (*“political consciousness”*) ilmuwan. Kendala metodologis yang muncul karena upaya politisasi ini dijawab dengan pemikiran Feyerabend mengenai “anarki epistemologi” dan *“anything goes”*. Eventuali, ketika kesadaran ini telah berkembang sedemikian rupa, paradigma kritis disodorkan sebagai kerangka paradigmatis aktivitas keilmuan ke depan karena spirit kritis, emansipatif, dan transformatif yang dimilikinya. Sepakat dengan Purwo Santoso, penulis juga menganggap bahwa “model pembelajaran transformatif” juga diperlukan karena aktivitas keilmuan tak hanya dilakukan orang per orang namun utamanya melalui *collective-learning* [:]

BAB II

MEMPERSOALKAN ILMU SOSIAL INDONESIA YANG *AMERICAN-MINDED*

Widya Priyahita*

***Exordium*⁴⁴: Mensikapi Ilmu yang “Asing”**

Sebagai sebuah sistem pengetahuan, universitas di Indonesia tergolong institusi yang masih muda. Namun demikian, secara cepat universitas berhasil menggantikan dominasi institusi keilmuan berbasis lokal yang lebih dahulu eksis (misalkan pesantren). Universitas merepresentasikan tidak hanya komitmen negeri ini pada modernitas, tetapi juga diskontinuitas dari tradisi pembelajaran yang ada dalam masyarakat. Pun menghadirkan seperangkat pengetahuan yang berbeda dengan pemahaman orang awam. Tak mengherankan jika universitas di Indonesia seringkali dituduh ‘asing’, ‘terasing’, dan atau bahkan ‘mengasingkan’ masyarakat dari konteks-kultur yang melatari.

* Peneliti PPKK, Fisipol, Universitas Gadjah Mada.

⁴⁴ *Exordium* berasal dari Bahasa Latin yakni *exordiri* atau permulaan, dalam bahasa Inggris secara spesifik kata ini diartikan sebagai suatu permulaan dari diskursus (Concise Oxford English Dictionary, 2004, dalam Juru, 2013).

Dalam pengembangannya kemudian, universitas sebagai model adopsi yang tidak indigen ini, membutuhkan *role-model* dari negara-negara maju. Terjalinlah relasi patronistik diantara keduanya yang menimbulkan efek ketergantungan. Hal ini masih harus diperparah oleh kenyataan globalisasi, kemajuan teknologi informasi, dan masifnya industrialisasi penerbitan yang dikembangkan negara-negara maju. Akibatnya arus lalu-lintas pengetahuan bergerak menjadi sangat agresif: cepat, mudah, dan murah, namun tanpa menanggalkan coraknya yang cenderung satu arah (*one way distribution*). Kondisi demikian menyebabkan posisi awal hingga kini pengembangan keilmuan di mayoritas negara pascakolonial, seperti Indonesia, cenderung “mencari ke luar” (*outward looking*) daripada secara induktif menggali khasanah yang dimilikinya (indigen). Tak menghehrankan jika banyak ilmuwan lalu gagal dalam menarik *gists* (inti sari/visi kebenaran ilmiah) dari kandungan teori yang dipelajarinya. Dalam bahasa yang lebih tajam, produksi keilmuan tidak mengemuka. Yang nyata adalah aktivitas konsumsi sebatas *taken for granted*.

Tentu ini problematik. Teori-teori yang dikembangkan dalam konteks yang berbeda tersebut pada akhirnya terbukti gagal menjawab kebutuhan masyarakat. Ia bersama klaim universalitas yang dibawanya lalu digugat dan dipertanyakan ulang. Dalam tulisan ini penulis secara khusus akan mempersoalkan corak ilmu sosial di Indonesia yang cenderung *American Minded*⁴⁵. Penulis berupaya menjawab dua pertanyaan terpenting, yakni: mengapa dan bagaimana hal tersebut terjadi? Pada titik ini penting untuk melacak asal-mula pengembangan studi Indonesia. Di sanalah batu fondasi ilmu sosial kita hari ini diletakkan.

⁴⁵ Pada uraiannya kemudian, *American Minded* dimaknai secara longgar bersinggungan pula dengan *Westernism*.

Awalnya adalah indologi. Yaitu kajian tentang masyarakat di Kepulauan Hindia-Belanda, yang dicetuskan oleh komunitas keilmuan Eropa modern. Dalam perjalanannya, indologi ini dipengaruhi dan mempengaruhi pembentukan negara kolonial Hindia-Belanda. Alih-alih menjadi cermin realitas sosial, penelitian-penelitian para indolog justru ambil bagian dalam membentuk Indonesia pada masa kolonial dan seterusnya. Dengan begitu, dinamika indologi hanya bisa kita pahami dalam bingkai kekuasaan kolonial.⁴⁶ Ilmu telah menjadi rezim kebenaran yang mendisiplinkan masyarakat. Konsepsi atas apa yang baik, benar,

⁴⁶ Imperialisme dan kolonialisme merupakan sebuah konsep krusial yang digunakan di berbagai disiplin. Kedua pengertian ini berjaln kelindan. Kesepakatan umum mengatakan bahwa kolonialisme sesungguhnya tidak lain merupakan ekspresi imperialism. Ketika mendiskripsikan bentuk imperialism Eropa awal abad Sembilan belas, imperialism cenderung digunakan minimal dalam empat cara berbeda: 1) imperialism sebagai ekspansi ekonomi; 2) imperialism sebagai penundukan *others*; 3) imperialism sebagai sebuah gagasan atau semangat beserta berbagai macam penjawantahannya; 4) imperialism sebagai satu bidang pengetahuan diskursif. Penggunaan istilah tersebut tidak mesti bertentangan satu sama lain; justru dilihat sebagai analisis yang memfokuskan pada berbagai lapisan imperialism yang berbeda-beda. Awalnya istilah tersebut dipakai sejarawan untuk menjelaskan serangkaian perkembangan arah ekspansi perekonomian Bangsa Eropa. Dalam pembatasan ini, imperialism terkait dengan satu kronologi peristiwa penemuan, penaklukan, eksploitasi, distribusi, dan perampasan. Pemaknaan *kedua*, lebih menitik beratkan pandangan pada penundukan dan penaklukan bangsa-bangsa terjajah. Sedangkan interpretasi *ketiga*, merefleksikan pandangan yang berasal dari Eropa; serta *keempat* dimunculkan oleh para penulis yang memahami imperialism dan kolonialisme berdasarkan pada keanggotaan serta pengalaman hidup mereka dalam masyarakat terjajah, atau berdasarkan kepentingan mereka dalam memahami imperialism dari perspektif konteks local. (dalam Smith, 2005: 5)

bernilai, agung, maupun sebaliknya, dikonstruksi dalam bentuk pengetahuan. Sebagai teks, pengetahuan lantas bukan hanya soal menginformasikan (*to inform*), melukiskan (*to describe*), menjelaskan (*to explain*), dan menyampaikan (*to deliver*), tapi juga sekaligus mencipta (*to invent*). Teks memberi batasan pengertian dan kemudian berhilir pada pertimbangan bagi formasi kekuasaan. Dengan kata lain produksi pengetahuan berjalan paralel dengan produksi atas kuasa. “Suka tidak suka, mau tidak mau”, apa dan bagaimana diskursus atas Indonesia turut dijelaskan sekaligus dicipta oleh teks-teks pengetahuan semacam itu. Dan Barat, Rezim Kolonial, dalam teks dan praktik keseharian, secara dominatif memposisikan Indonesia sebagai yang terpinggir, inferior, warga kelas tiga, tunduk, lemah -tertaktluk. Di samping itu, kehadiran lembaga pendidikan tinggi di era kolonial lebih merupakan wadah mencetak tenaga-tenaga adminstratur *ketimbang* fungsinya yang populer dalam adagium *universitas magistrorum et scholarium*. Dimana aktivitas ilmiah dihidupi.

Selepas dekolonisasi masif terjadi, kondisi politik di level global mengalami kontestasi ideologi yang sukses membuat dunia bipolar dalam situasi perang dingin. Amerika sebagai satu di antara dua superpower dunia, melakukan pergeseran kebijakan politik internasional dari *hard power* menuju *soft power*. Dan setali tiga uang; dalam rangka, mengampanyekan *communisto phobia*, membangun imperium bisnis trans-nasional, sekaligus pemasaran *american value*, mereka memainkan politik hegemoni. Kampus dijadikan batu loncatan. Amerika dengan jeli, mengambil alih peran indolog Belanda yang tersingkir pasca mewabahnya virus anti-kolonial. Fenomena ini tak hanya berlaku di Indonesia, melainkan hampir di seluruh negara poskolonial. Supremasi keilmuan, yang bermuara pada upaya-upaya patronase, selanjutnya dilakukan dengan cara membangun studi kawasan. Salah satunya adalah studi

Asia Tenggara. Hal ini akan dielaborasi lebih lanjut pada bagian-bagian berikutnya.

Dengan demikian, membaca periode awal kemerdekaan Indonesia adalah upaya membaca faktor-faktor yang membentuk ilmu sosial kita hari ini. Di sana ada persoalan “objektifikasi Indonesia” yang jernih dijelaskan oleh orientalisme Said (1978) dan poskolonial. Di sana juga ada masalah hegemoni, kuasa ilmu atas ilmu, dimana konsepsi *soft power ala* J Nye Jr, berhasil merejuvenasi ilmu sebagai instrumen kuasa. Melalui kerja-kerja demikian, diharapkan ilmu politik dapat berkembang dinamis karena oleh para peminatnya kemapanan terus dikorek, digugat, disangkal, diafirmasi, dan dibongkar-pasang secara kontinum.

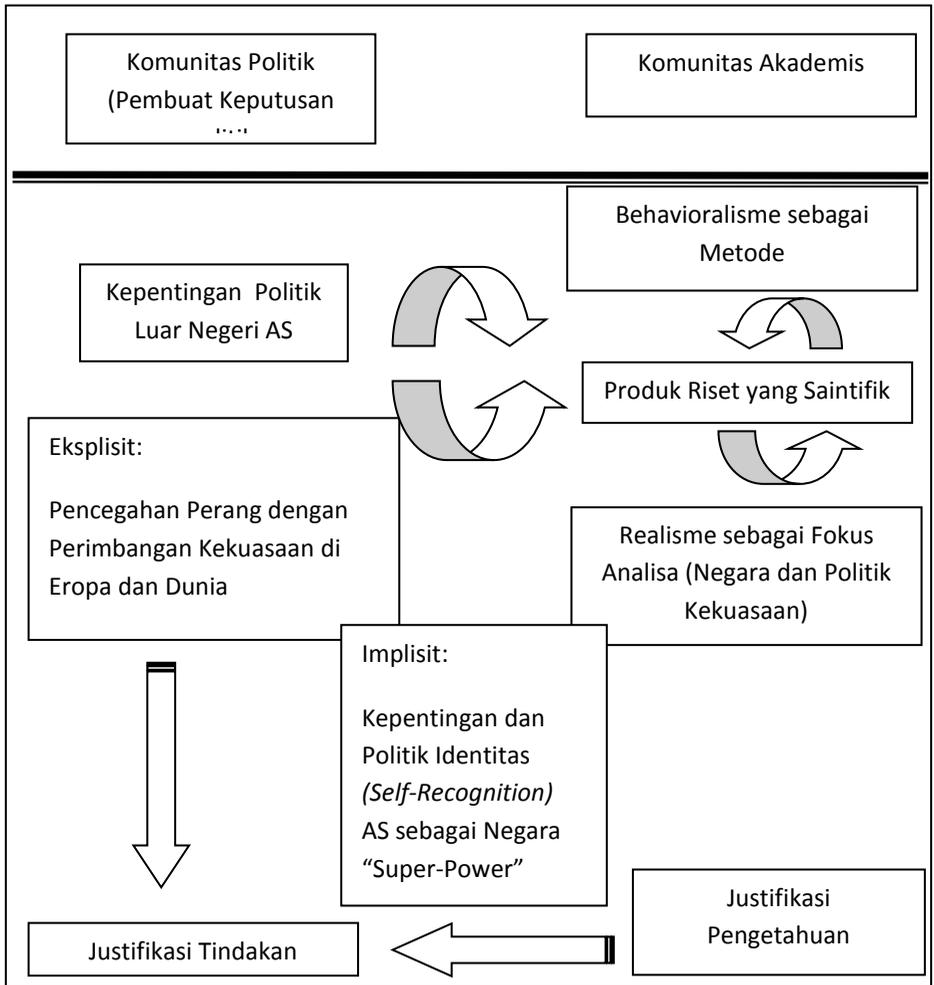
Mengupas (Awal) Hegemoni Amerika: Dari *Hard Power* Menuju *Soft Power*

Hegemoni Amerika berkembang setelah Perang Dunia (PD) II berakhir. Untuk membaca konstelasi politik internasional pasca II dari sudut pandang akademik, peneliti akan menyitir tulisan Shaumul Hadi (2008: 61-75). Secara spesifik yang dimaksud adalah disiplin Hubungan Internasional bagian dari rumpun ilmu politik. Penjelasan ini menarik karena telaah-telaah yang muncul ke permukaan kebanyakan didominasi oleh babaran realitas ekonomi-politik –tidak melihatnya sebagai implikasi dari perdebatan teoritik keilmuan. Meningkatnya pengaruh realisme dalam kajian hubungan internasional boleh jadi secara umum dapat dilihat sebagai suatu respon terhadap kegagalan idealisme-liberal dalam menjelaskan anomali peristiwa di sekitar 1930-an, yang akhirnya memicu PD II. Hadi menilai, para idealis-liberal mengalami salah tafsir atas harapan dan esensi politik bangsa Eropa di tahun itu. Prediksi atas terbangunnya perdamaian, demokratisasi, modernisasi, pasca PD I hanyalah utopia dan merupakan

pemahaman yang bias pemenang. Bukan dari perspektif negara-negara kalah (oposan).

Dalam bahasa Carr yang dicuplik Hadi, para idealis-liberal telah memungkirkan peta politik dan perimbangan kekuasaan di Eropa yang justru tampil dalam keadaan yang *menyolok* antara “Yang Punya (*The Have*)” dan yang “Tidak Punya (*The Have Not*)”. Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat (AS) merupakan pihak “yang punya”, dalam artian kekuasaan besar yang berorientasi pada pelanggaran *status quo*. Sedangkan Jerman, Italia, Jepang, adalah pihak “yang tidak punya”. Jadi, sudah sewajarnya, menurut kaum realis, jika “yang tidak punya”, akan coba memperbaiki keseimbangan internasional melalui penggunaan kekuatan fisik (*hard power*). Oleh karena itulah, politik pembagian kekuasaan pasca Konferensi Perdamaian Paris 1919, ternyata menyisakan duri dalam daging (salah satunya Jerman) yang lama-kelamaan membusuk dan pecah di PD II.

Jelaslah dengan demikian, di mata realis kesalahan terburuk yang menghinggapi para idealis-liberal adalah mereka berangkat dari harapan semu atas indahnya inter-relasi negara di dunia, padahal dalam kenyataan politik internasional, politik condong bercorak “politik kekuasaan” dengan orientasi “kepentingan nasional”. Pada titik inilah pemahaman realis unggul terkait relevansi dan kontekstualitasnya. Sebagai imbas, secara cepat realisme menjadi pendekatan *mainstream* yang mempengaruhi cara pandang para diplomat, pembuat keputusan, serta ilmuwan politik. Berikut adalah elemen dasar yang dikandung realisme: 1) pengedepanan kepentingan nasional (*national interest*); 2) peningkatan kekuatan (*power maximisation*); dan 3) keseimbangan kekuasaan (*balance of power*).



Tabel. 2.1 Justifikasi Tindakan/Pengetahuan (Teori sebagai Praktik)

dalam Politik Luar negeri AS Pasca Perang Dunia ke-2
(dalam Hadi, 2008: 74)

Kaitannya dengan posisi dan peran AS, para ilmuwan politik (realis) jamak menilai, perimbangan kekuasaan mutlak

diperlukan; karenanya harus ada suatu kekuatan tertentu (di luar Eropa) yang dapat mendorong penciptaan stabilitas. AS yang pada awalnya, di kurun waktu antara PD I dan PD II, menerapkan politik isolasionisme oleh karena dasar perbedaan geografis, ideologis, dan kebudayaan dengan negara lainnya di dunia, akhirnya pun dengan segera didorong dalam kancah perang tersebut. Pendeknya, campur tangan tangan AS dalam PD II di Eropa, dan kemudian belahan dunia lainnya (karena faktor eskalasi kekuatan Jepang di Asia Timur Raya), dapat dinilai dalam kerangka ini.⁴⁷

Dimulailah eksplorasi keilmuan oleh para intelektual untuk mencari format baru dalam mewujudkan ambisi AS sebagai super-power baru. Adalah Joseph Nye Jr, akademisi Harvard, tokoh yang dengan getol mempopulerkan konsep *soft power* dalam diskursus hubungan internasional.⁴⁸ *Soft power* hadir sebagai tawaran atas kebijakan politik luar negeri AS untuk mempertahankan dan mengembangkan supremasi kekuasaan global. *Soft power* dianggap relevan dan kontekstual sejalan dengan semangat perdamaian, nir kekerasan, antikolonial, serta situasi bipolar pasca PD II. Walaupun konsep ini berkembang secara sistematis di tahun-tahun 1980-an, namun pada dasarnya embrio konsep ini telah mengemuka dan tercermin dalam kebijakan-kebijakan politik luar negeri AS lepas

⁴⁷ Selain argumen yang telah dipapar, dorongan AS untuk melibatkan diri dalam perang juga merupakan konsekuensi logis dari peran para intelektual-imigran Eropa yang melakukan eksodus. AS dianggap memberikan iklim intelektual yang nyaman dibandingkan dengan iklim intelektual Eropa yang dilanda krmerican Powerisis, fasisme, dsb.

⁴⁸ Konsep ini dituangkan dalam sejumlah karyanya berikut: buku *Bound to Lead: The Changing Nature of American Power*; buku, *Soft Power: The Means to Success in Worlds Politics*; buku, *The Powers to Lead*; paper, *Notes for a Soft Power Research Agenda*; paper, *Soft Power, Hard Power, and Leadership*; paper, *The Information Revolution and American Soft Power*, dsb.

tahun 1950, bahkan juga di negara lain pada waktu yang lebih lampau. Secara sederhana *soft power* sendiri dapat didefinisikan *the power of persuasion through ideas, cultures, and policies* (Nye, 2002). Secara lebih detil sebagai berikut:

“Soft power is the ability to obtain what one wants through co-option and attraction. It can be contrasted with ‘hard power’, that is the use of coercion and payment. Soft power can be wielded not just by states, but by all actors in international politics, such as NGOs or international institutions. The idea of attraction as a form of power dates back to ancient Chinese philosophers such as Laozi in the 7th century BC. The primary currencies of soft power are an actor’s values, culture, policies and institutions—and the extent to which these “primary currencies”, as Nye calls them, are able to attract or repel other actors to “want what you want.”

In any discussion of power, it is important to distinguish behavior (affecting others to obtain the preferred outcomes) from the resources that may (or may not) produce those outcomes. Sometimes people or countries with more power resources are not able to get the outcomes they wish. Power is a relationship between an agent and a subject of power, and that relationship will vary with different situations. Meaningful statements about power must always specify the context in which the resources may (or may not) be converted into behavior.

Soft power is not merely non-traditional forces such as cultural and commercial goods, as this confuses the resources that may produce behavior with the behavior itself – what Steven Lukes calls the “vehicle fallacy.” Neither is it the case that all non-military actions are forms of soft power,

as certain non-military actions, such as economic sanctions, are clearly intended to coerce and are thus a form of hard power.

That said, military force can sometimes contribute to soft power. Dictators like Adolf Hitler and Joseph Stalin cultivated myths of invincibility and inevitability to structure expectations and attract others to join them. A well run military can be a source of attraction, and military to military cooperation and training programs, for example, can establish transnational networks that enhance a country's soft power. Napoleon I's image as a Great General and military hero arguably attracted much of the foreign aristocracy to him. The impressive job of the American military in providing humanitarian relief after the Indian Ocean tsunami and the South Asian earthquake in 2005 helped restore the attractiveness of the United States. Of course, misuse of military resources can also undercut soft power. The Soviet Union had a great deal of soft power in the years after World War II, but they destroyed it by the way they used their hard power against Hungary and Czechoslovakia, just as American military actions in the Middle East undercut their Soft Power.

Tabel 2.2. Soft dan Hard Power (Jr Nye, 2006)

<i>Type of Power</i>	<i>Behavior</i>	<i>Sources</i>	<i>Example</i>
<i>Soft</i>	<i>Attract and Co-Opt</i>	<i>Inherent Qualitiies Coomunication</i>	<i>Charisma Persuasion</i>
<i>Hard</i>	<i>Threaten and</i>	<i>Threats, Intimidation,</i>	<i>Hire, Fire, Demote,</i>

	<i>Induce</i>	<i>Payments, Rewards</i>	<i>Promotions, Compensation</i>
--	---------------	------------------------------	-------------------------------------

Konsep ini pada perjalanannya berhasil memberi warna dominan atas kebijakan politik internasional berbagai negara di dunia, tak hanya AS, walaupun tanpa meniadakan strategi *hard power* yang penuh kepentingan. Sebagaimana lazim diketahui bahwa industri perang suatu negara adalah satu sumber keuangan terpenting. Dan dalam logika industri, profit dapat mengalir bila proses produksi belangsung lancar karena permintaan yang tinggi atau setidaknya konstan. Pada titik ini, selain sebagai strategi kuasa, perang juga perlu dipahami dari perspektif ekonomi. Dengan demikian, *soft power* hadir tidak berarti menyingkirkan eksistensi *hard-power*, namun justru sebagai pelengkap (komplementer) atau strategi alternatif.

- Dekolonisasi dan Perang Dingin:
Gonjang-Ganjing Politik Global dan Pengaruhnya bagi Indonesia

Indonesia berpenduduk 100 juta orang dengan kekayaan sumber daya alam yang mungkin lebih besar daripada negara asia yang lain. Tidak masuk akal untuk mengucilkan sekelompok besar orang yang duduk di atas sumberdaya alam ini, kecuali memang ada alasan yang amat kuat –John F. Kennedy (dalam Archer 2006: 225)

Indonesia adalah sebuah negara yang terlahir pasca perang dunia kedua. Pasca itulah terjadi perang lanjutan di antara dua negara pemenang. Perang ini dikenal dengan nama perang dingin yang diwakili oleh Amerika Serikat dengan ideologi liberalnya dan Uni Soviet dengan ideologi komunisnya. Perang dingin kemudian berlanjut kepada perang memperebutkan

pengaruh dan hegemoni di negara-negara lain. Baik Amerika maupun Soviet saling bersaing mencari sekutu di berbagai belahan dunia. Selain karena ideologi Amerika dan Soviet yang saling bertentangan, keduanya juga memiliki kekuatan ekonomi-militer yang tak tertandingi oleh negara mana pun.

Sebagai sebuah negara yang baru merdeka, Indonesia juga menjadi lahan rebutan diantara Amerika dan Soviet. Posisi Indonesia terbilang strategis. *Pertama*, dari sisi demografis, Indonesia adalah satu dari lima negara berpenduduk terbesar di dunia. *Kedua*, melimpahnya sumber daya alam. Dan ketiga, Indonesia merupakan negara pasca-kolonial dengan pengaruh yang besar. Indonesia menjadi salah satu pelopor berdirinya Konferensi Asia Afrika (KAA), Gerakan Non Blok (GNB). dan belakngan organisasi regional negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). Melihat kemenangan rezim komunis di China dan tumbuhnya komunis di Korea, Amerika mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mencegah semakin meluasnya paham komunis diseluruh dunia, termasuk di Indonesia.

- Setali Tiga Uang: Ganyang Komunis, Investasi Bisnis, Supremasi Militer, dan Pemasaran *American Value*

Akhir Perang Dunia II menyaksikan Amerika Serikat sebagai satu dari dua negara paling kuat di muka bumi. Kekuatan ekonomi Amerika tidak tertandingi, seperti halnya kekuatan nuklirnya. Amerika serikat pasca Perang Dingin, sebagai negara pemenang, nampak mencari posisi baru yang tepat untuk mengelola kemenangannya dalam jangka panjang. Bila dicermati, ada benang merah politik luar negeri yang sama yang menjadi ciri pokok sejak usainya Perang Dunia II. Seluruh Presiden Amerika, sejak dari Truman, Eisenhower, Kenedy, Lyndon Johnson, Nixon, Gerard Ford, Carter, Reagan, Bush Sr., Clinton sampai Bush Jr., ingin agar Amerika Serikat menjadi pemimpin dunia, baik dalam politik

maupun ekonomi. Baik pada masa Perang Dingin, masa *détente* (peredaan ketegangan) sampai sekarang, intisari dari seluruh politik luar negeri Amerika di bawah para presiden dari Partai Republik maupun dari Partai Demokrat sama saja, yakni berusaha memegang hegemoni dan supremasi dunia. Hegemoni dan supremasi itu dimaksudkan berlaku di bidang ekonomi, politik, teknologi dan militer. Bila dilihat dari kelahirannya, lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*), Bank Dunia, IMF dan WTO sejak semula dirancang untuk melindungi kepentingan ekonomi jangka panjang Amerika dan sekutunya-sekutunya.

Menjelang berakhirnya Perang Dunia II, Amerika dan negara-negara sekutu mengadakan perundingan di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat. Rangkaian Kesepakatan Breetton woods itu pada akhir 1945 melahirkan IBRD yang kemudian menjadi Bank Dunia (*World Bank*) dan IMF (*International Monetary Fund*). Sedangkan WTO (*World Trade Organization*) yang lahir pada 1995 merupakan pengganti GATT (*General Agreement on Tarrif and Trade*) yang dibentuk pada 1947. Pada masa kepemimpinan Clinton (1993-2001) Tata Dunia Baru itu tidak sering dibicarakan. Namun pada masa itulah sebuah *cabal* atau komplotan yang terdiri dari sejumlah intelektual, wartawan, dan politisi Amerika mengembangkan sebuah impian Pax American. Dalam istilah akademik maupun jurnalistik kumpulan tokoh yang mendambakan Pax Americana itu disebut sebagai kaum *neocons* atau kaum neokonservatisme.

Pada intinya kaum *noecons* itu meyakini perlunya supremasi militer yang tidak terkejar oleh Negara manapun juga. Amerika “ditakdirkan” menjadi penjaga stabilitas internasional. Konsep kesimbangan kekuata/kekuasaan (*balance of power*). Konsep *détente* (peredaan ketegangan), dan konsep keseimbangan

terror (*balance of terror*) seperti dipraktikkan pada masa Perang Dingin dianggap sudah usang. *Defense Planing Guidance* diatas pada intinya berisi: belanja pertahanan Amerika harus diperbesar; tidak boleh ada pesaing kekuatan militer Amerika di kawasan manapun; serangan preventif dan preemptif boleh dilakukan bila dinilai dapat memenuhi kepentingan global Amerika. Satu usulan yang *over-ambisius* adalah hak Amerika untuk melakukan intervensi ke setiap konflik dimana saja di bola bumi ini, walaupun tidak berkaitan dengan kepentingan Amerika, namun mungkin berkaitan dengan kepentingan sekutu-sekutunya atau demi “memelihara” stabilitas internasional. Tentu DPG tidak menyebutkan bahwa serangan Preemptif/preventif terhadap suatu negara atau suatu wilayah serta intervensi global Amerika itu sesungguhnya untuk melindungi, memperluas dan menjamin kepentingan ekonomi amerika. Termasuk untuk mengontrol minyak dan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara-negara berkembang. (Rais, 2008; 55-62)

- Meneliti adalah (Upaya) Menguasai (?):
Di Balik Pengembangan Studi Kawasan di Amerika

Studi politik Indonesia merdeka secara jelas merupakan perkembangan pasca-Perang Dunia II. Indonesia adalah salah satu negara baru pasca-Perang Dunia II, dan studi politiknya dipengaruhi oleh serangkaian faktor yang secara khas berkaitan dengan masa pasca-Perang Dunia tersebut. Dalam pengertian politik internasional, Indonesia memperoleh kemerdekaan pada masa-masa awal Perang Dingin. Antara tahun 1945-1975 kebanyakan imperium Eropa di Afrika dan Asia telah jatuh. Negara-negara merdeka baru ini pun kemudian menjadi arena kontestasi bipolaritas ideologi antara AS dan Soviet. Dalam konteks ini, Pemerintahan AS melakukan investasi penting dalam program-program studi kawasan untuk mendukung status barunya sebagai

hegemon global. Bantuan militer dan non militer digulirkan pemerintah AS yang difokuskan pada Dunia Ketiga. Itulah era di mana studi kawasan mulai tumbuh dan berkembang serta turut andil dalam membentuk konteks dan substansi konsepsi Amerika tentang berbagai kawasan termasuk “Indonesia”.

Perang Dunia II memiliki dampak yang besar bagi kebijakan luar negeri AS. Peristiwa tersebut menggiring sejarah ke periode keterlibatan massif AS dalam urusan internasional, melampaui belahan dunia Barat. Lebih spesifik lagi, AS menyadari bahwa kepentingan sosial, ekonomi, dan politiknya bergantung pada dinamika Dunia Ketiga yang seakan-akan bagian dari dinamika politik dalam negerinya sendiri. Ketidakstabilan di negara-negara Dunia Ketiga dianggap sebagai akar dari permasalahan internasional yang dapat menghambat keberlangsungan kepentingan Amerika dan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan. Hal ini berjalan seiring dengan upaya-upaya untuk mempengaruhi Dunia Ketiga, sebagaimana diungkapkan Girling (1980: 15, dalam Samuel, 2010: 100).

“Letupan-letupan revolusi dan ketakutan terhadapnya telah menguasai kebijakan Amerika terhadap Dunia Ketiga selama lebih dari seperempat abad. Baik fakta maupun ketakutan bercampur aduk dalam keyakinan bahwa pemberontakan ‘pribumi’ dan aksi massa di kota—kota, maupun revolusi yang jelas-jelas dipimpin oleh komunis, dapat dipicu pertama-tama justru oleh ‘komunisme internasional’ –dibanding oleh Moskow atau Peking—melalui suatu gelombang revolusi terhadap suatu Negara Dunia Ketiga lainnya. Hal ini dilihat sebagai ancaman ‘universal’ terhadap keamanan Amerika sendiri; karenanya hal ini membutuhkan respons yang serius”

Perguliran dari Indologi menjadi kajian Indonesia perlu dipahami dalam bingkai dinamika kebijakan internasional AS ini. Semenjak akhir Perang Dunia II, perguruan-perguruan tinggi Amerika mulai mengambil peran secara massif dalam pembangunan masyarakat-masyarakat diluar AS (khususnya Negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang baru merdeka). Pemerintah AS menyediakan dukungan politik dan finansial.

Pemerintahan Presiden Harry Truman, dengan sederet program bantuan luar negrinya, merupakan penanda datangnya era keterlibatan AS di seluruh belahan dunia. Menurut Beers, pemerintahan Truman mendorong perguruan-perguruan tinggi Amerika untuk berkembang. Perguruan tinggi yang awalnya hanya mengadakan program pertukaran internasional berskala kecil didorong untuk menjadi pelaku proyek-proyek mancanegara berskala besar. Skema kerja sama ini juga digunakan oleh perguruan tinggi Amerika dan pemeritah AS untuk memperoleh data-data tangan pertama tentang negar-negara di luar AS. Dalam hal ini, terlihat keserupaan di antara kajian wilayah di AS dengan studi Oriental Eropa. Pada kedua hal tersebut Negara memiliki andil yang besar. Signifikasi pusat Indologi di Belanda merosot setelah lengsernya kekuasaan kolonial Belanda, sementara *Cornell Indonesian Project* dan pusat studi sejenis mendapatkan momentum seiring perubahan focus politik di AS ke Indochina (yakni, dana riset direlokasi untuk mempelajari kehidupan politik di Indochina) dan Asia Tenggara.

Pendirian pusat-pusat kajian wilayah merupakan fenomena yang berkembang diantara perguruan tinggi Amerika pada 1950an. Sedari awal, kalangan militer AS memegang peranan kunci.⁴⁹ Menurut pihak militer AS, pendirian pusat kajian wilayah

⁴⁹ Perlu ditekankan bahwa kolaborasi di antara ilmuwan sosial Amerika dengan angkatan bersenjata AS bermula pada saat Perang Dunia II: terjadi

dapat mengakomodasi kepentingannya. Maka melalui *Specialized Training Programs*, militer AS mempromosikan pendirian program-program kajian wilayah di perguruan tinggi Amerika untuk menghasilkan pakar dalam bahasa kebudayaan beragam masyarakat di dunia. Sebagaimana yang diamati Lambert (1989), militer mendanai proyek kajian studi wilayah dan membantu pendirian sekitar 600 kajian wilayah dan pusat bahasa di perguruan tinggi Amerika. Banyak di antara para spesialis jebolan program ini lantas direkrut menjadi tenaga intelijen oleh *Office of Strategic Service* (yang kemudian dikenal dengan nama *Central Intelligence Agency* [CIA]). Pendirian pusat kajian Indonesia juga tak lepas dari kerangka politik ini. Ketika Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 1945,

“nasionalisasi” ilmu sosial. Di kemudian hari muncul perlawanan-perlawanan terhadap kolaborasi semacam ini. Pada mulanya, banyak ilmuwan Amerika yang tidak menolak kerja sama di antarany dunia keilmuan dengan militer. Hal ini berlanjut dan dibangun di atas pola kolaborasi yang dirampungkan pada masa perang. selama Perang Dunia II, banyak sosiolog, antropolog, pakar politik, dan ilmuwan social Amerika lainnya direkrut untuk bekerja sebagai peneliti dalam Departemen Perang. Selain itu, setelah kembali ke dunia akademik selepas perang, kebanyakan dari para peneliti ini memegang posisi kunci dan memainkan peranan inti dalam dunia akademik. Harvard Social Relations Department, contohnya, didirikan oleh Clyde Kluckhohn, Henry Murray, Samuel Stouffer, dan lain-lain. Ketiganya bekerja untuk militer selama Perang Dunia II. Fenomena yang sama juga terlihat dari keterlibatan Presiden American Sociological Association dalam penelitian militer: pada 1967, tujuh dari antara yang pernah menjabat presiden ASA terlibat aktif dalam penelitian militer. Akan tetapi, sejak 1960-an gagasan tentang bekerja sama dengan militer dikritik secara serius. Saat itu bertumbuh kecenderungan untuk menentang kolaborasi seperti itu. Banyak ilmuwan yang menjadi kritis terhadap kebijakan luar negeri AS. Hal ini sebagian menyebabkan sejumlah pakar wilayah menjaga jarak dari Departemen Pertahanan. (dalam Samuel, 2010: 103-104)

pemerintah AS nyaris tak memiliki pengalaman atau pengetahuantentang Indonesia, ataupun tentang Negara-negara selatan dan Asian Tenggara lainnya. Pengetahuan AS berfokus pada Jepang dan gerakan Pan-Asia yang dipimpinnya, serta dekolonialisai di Asia. Namun demikian situasi segera berubah. AS tak hanya berupaya untuk memahami belahan dunia Timur, Selatan, dan Asia Tenggara, tetapi belahan-belahan dunia inipun segera bergulir menjadi medan panas berlangsungnya perang dingin. Cina, Korea, India, dan Negara-negara besar Asia Tenggara mendapatkan perhatian yang luar biasa dalam kebijakan luar negeri AS. Ketika Truman meninggalkan kursi kepresidenan pada tahun 1953, kebijakan luar negeri telah mendapatkan prioritas yang penting dalam dunia politik AS. Pola kebijakan isolasionisme telah mati, dan dimata AS medan internasional memiliki arti yang sama dengan medan domestik. Dunia telah terangkai menjadi sebuah oposisi bipolar diantara dunia barat “yang bebas” *vis-à-vis* komunisme. Asia-secara khusus Asia Tenggara—pun menjadi fokus utama dalam kepentingan Amerika.

Southwood dan Flanagan menegaskan bahwa Indonesia telah menjadi bagian sentral dari pemikiran strategis Amerika tentang Asia Tenggara sejak berakhirnya Perang Dunia II dan bahwa Indonesia menjadi tonggak dominasi Amerika atas ‘wilayah Asia-Pasifik’. Bahkan Presiden Richard Nixon sendiri mengatakan bahwa Indonesia adalah mutiara dalam tahta Asia Tenggara. Sebagaimana pengamatan Mark Berger dalam konteks kajian Amerika Latin, kelompok radikal hanya memiliki pilihan untuk membangkitkan wacana ‘yang bertentangan’ dengan mengadopsi bahasa dan kategori wacana yang ingin mereka bongkar. Berada dalam ‘jaringan berbagai lembaga, organisasi, dan struktur yang luas dan kompleks’, wacana-wacana yang bersifat oposisional pun bisa menjadi ‘pelengkap untuk menjaga hegemoni Amerika’.

Di antara tema-tema yang paling umum diambil dalam penelitian Indonesianis Amerika adalah demokratisasi, “Indonesia sebagai entitas politik”, nasionalisme, pluralisme, pembangunan kebangsaan, dan komunisme. Contoh yang menarik dan tepat untuk menggambarkan keadaan ini adalah penelitian Hindley, *The Communist Party of Indonesia*. Penelitian ini diselesaikan ketika Donald Hindley berada di Brandeis University (Massachusetts) pada 1963. Buku ini menganalisa dinamika PKI di Indonesia pada periode 1951-1963 berdasarkan data-data yang rinci tentang hubungan diantara PKI dengan pemerintah Indonesia. Meskipun penelitian Hindley terletak pada kasus Indonesia, analisisnya menyerupai kecurigaan Amerika yang berkembang pada saat itu tentang ekspansi komunisme. Rusia dan Cina dipandang tengah gencar-gencarnya memperluas pengaruh mereka di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Di sini Hindley juga mempercayai bahwa partai-partai komunis cenderung bermunculan di negara tertinggal ketimbang pada masyarakat dengan system kapitalis yang lebih mapan.

Dalam konteks keterlibatan Amerika dalam persoalan Indonesia, para Indonesianis sering kali sangat kritis terhadap motif dan kebijakan pemerintah Amerika. Namun mereka jarang mengeksplorasi hubungan antara hegemoni global Amerika dengan produksi pengetahuan akademik yang menopang hegemoni itu. Sementara eksperimentasi dengan politik demokrasi liberal terus dilakukan di Asia Tenggara selama 1950an, AS dan para ilmuwan politik didikan AS terus setia dengan wacana dan kebijakan pembangunan ekonomi, kemajuan, dan demokrasi. Studi politik Indonesia lebih merupakan kompleksitas relasi diskursif dan institusional daripada serangkaian teks yang otonom. Studi tersebut memerlukan sebuah rezim kebenaran di mana bobot otoritasnya juga ditentukan oleh berbagai aturan, regulasi, dan konvensi ilmu-ilmu sosial, selain oleh pengalaman personal

akademisi bersangkutan. (dalam Samuel, 2010: 100-106; Philpott, 2003: 75-82)

- Patronase - Dari dan Menuju Kampus:
Cara Amerika Membangun Supremasi Keilmuan

Kolonialisme, rasisme, dan imperialisme kultural tidak hanya berlangsung dalam masyarakat, namun berlangsung juga di dalam gerbang universitas –Cherryl Smith dalam Smith, 2005:

34

Proklamasi kemerdekaan 1945 menandai era baru dalam pembangunan Indonesia. Posisi-posisi dalam pemerintahan yang ditinggalkan lowong oleh Belanda diisi oleh para politisi dan angkatan bersenjata Republik Indonesia. Tahun 1949 Indonesia kemudian memperoleh pengakuan internasional dari AS, Australia, dan lainnya terutama negara-negara Asia-Afrika. Ketika pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, peran Belanda dalam perekonomian pun secara perlahan meredup. Begitu juga istilah “Indolog” Belanda berangsur-angsur kehilangan popularitasnya digantikan oleh “Indonesianis” AS. Hal ini secara khusus dikarenakan keterlibatan Amerika dalam perkembangan Indonesia. Para ilmuwan Amerika mengambil andil dalam membentuk konsepsi tentang Indonesia. Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cornell University, dan Yale University memfasilitasi keterlibatan para ilmuwan Amerika dalam skala yang besar. Tiga universitas ini mendirikan pusat studi Indonesia pertama di antara perguruan-perguruan tinggi Amerika. Di MIT, penelitian tentang Indonesia dilakukan di *Massachusetts Institute of technology Centre for International Studies*, yang di dalamnya terdapat *Indonesia Project* dan *Tim Lapangan Indonesia*, dengan bantuan finansial dari Ford Foundation. Benjamin Higgins mengepalai *Indonesian Project* dan Rufus Hendon menjadi ketua

Tim Lapangan Indonesia. Namun kedua kelompok ini memiliki pikiran yang sama tentang perkembangan ekonomi dan politik Indonesia.

Pusat Studi Indoensia di Yale juga muncul dari konteks yang sama. Namun apa yang menjadi fokus mereka pada umumnya adalah sejarah Indonesia. Pusat studi lainnya adalah *Cornell Modern Indonesian Project* yang didirikan oleh George McT Kahin di 1950an. Dekade ini merupakan era ketika AS menggantikan peran Eropa sebagai pusat-pusat kajian wilayah.⁵⁰ Pendirian *Cornell Indonesian Modern Project* amat terdorong oleh upaya untuk memahami negara-negara baru merdeka di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dan persis dengan kajian wilayah, program pusat, atau lembaga lainnya yang didirikan di AS pada saat itu, Cornell Project didanai oleh pemerintah AS dan badan-badan lainnya yang memiliki kepentingan membendung pengaruh komunisme dalam kerangka bipolaritas perang dingin.

Pusat-pusat studi Indonesia dalam perjalanannya juga menghasilkan Indonesianis non-Amerika dan membantu merampungkan pusat-pusat serupa di luar negeri, seperti Australia. Pusat studi Indonesia di Monash didirikan oleh John Legge dengan nama *Center for Southeast Asian Studies* pada tahun 1964. Hingga awal 1970an pusat studi ini menjaga hubungan yang dekat dengan *Cornell Indonesian Project* sehingga pusat studi di Cornell tersebut kerap dianggap sebagai cetak biru pusat studi di Australia ini. Pusat-pusat studi Indonesia di Monash dan perguruan tinggi di Australis lainnya telah memainkan peranan yang penting dalam menggali konsepsi tentang Indonesia. Hal ini terkait dengan fakta Australia dan Indonesia berada di wilayah geografis yang sama,

⁵⁰ Karena problem politik yang terjadi di daratan Eropa, pada era ini universitas-universitas di AS memperoleh keuntungan atas eksodus yang dilakukan oleh tenaga akademik Eropa ke pusat-pusat studi mereka.

sementara karakter ekonomi, politik dan kultural mereka tampak begitu berbeda.

Hal lain yang penting dalam pendirian pusat studi Indonesia di AS adalah kebijakan mendidik sejumlah sosok berpotensi di Indonesia menjadi ilmuwan sosial, seperti Selo Sumardjan, Mely G Tan, dan Miriam Budiardjo. Para ilmuwan Indonesia ini kemudian membangun jaringan dengan para Indonesianis asing. Sementara sejumlah peneliti Amerika bertumbuh selama perang dunia ke II hingga pertengahan 1970an, jumlah Indolog Belanda merosot. Peran dari Hurgronje, Boeke, Beruger, dan para indolog lainnya digantikan oleh para peneliti Amerika seperti George McT Kahin, Donald E Willmott, Clifford gertz, Hidred Geertz, Robert Jay, dan AC Dewey. Para indonesianis Australia juga bergabung dengan Amerika. Dan keseluruhan proses ini tidak pernah terlepas dari tiga pusat studi Indonesia di Amerika yang telah dipaparkan. Para peneliti Belanda sendiri tak dapat menikmati apa yang dinikmati peneliti AS pada 1950-1960an. Hal ini utamanya dikarenakan sikap pemerintah Republik yang tidak bersahabat terhadap Belanda dan kemerosotan minat yang luar biasa terhadap Indonesia di Belanda.

Konteks lain yang mendorong masifnya pendanaan proyek "memahami Indonesia" yang dilakukan AS tersebut juga dipengaruhi konflik di Korea, Malaysia, dan Vietnam yang semakin meresahkan. Karenanya, terdapat dukungan yang kuat bagi ilmuwan AS yang bersedia berpartisipasi langsung dalam proses perkembangan ekonomi di Indonesia. Beberapa dari mereka bahkan terlibat langsung dalam permusan kebijakan pemerintah Indonesia. Benjamin Higgins, misalnya, ditugaskan untuk bekerja di Biro Perencanaan Nasional untuk Pembangunan Ekonomi. Contoh lainnya adalah pendirian *Kentucky Contract Team (the Kenteam)* yang meneliti Indonesia dari akhir 1957 hingga berakhir di awal

1966. Tugasnya adalah mengembangkan Institute Pertanian Bogor (IPB) dalam aspek teknis maupun sosial tentang penerapan ilmu pertanian, seperti agronomi, kehutanan, dan sosiologi pedesaan. Keterlibatan ini hanyalah sebagian kecil dari keterlibatan dunia keilmuan Amerika pada 1950an dalam berbagai dimensi kehidupan sebuah negara baru merdeka. (dalam Samuel, 2010: 81-88)

Ada Uang di Balik Ilmu: Mengurai Peran Korporasi dalam “(Modern) Indonesian Project”

Dalam dunia ilmu sosial, istilah korporatokrasi belum digunakan secara meluas dan relative baru. Adalah John Perkins, dalam bukunya *Confessions of an Economic Hit Man* (2004), yang menggunakannya untuk menunjukkan bahwa dalam rangka membangun imperium global, maka berbagai korporasi besar, bank, dan pemerintahan bergabung menyatukan kekuatan financial dan politiknya untuk memaksa masyarakat dunia mengikuti kehendak mereka.

“Istilah itu begitu saja datang bertengger di pikiran saya: korporatokrasi. Saya tidak yakin apakah saya sudah pernah mendengarnya atau saya menciptakanya, tetapi istilah itu nampak sangat cocok untuk menggambarkan elite baru yang telah berketetapan untuk mencoba menguasai planet bumi”.
(A word came to my mind: corporatocracy. I was not sure whether I had heard it before or had just invented it, but it seemed to describe perfectly the new elite who had made up their minds to attempt to rule the planet).

Di Indonesia sendiri, istilah tersebut mulai dikenal empat tahun kemudian setelah Amien Rais mengulasnya dalam buku,

Agenda-Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia!. Sesungguhnya istilah korporatokrasi dapat digunakan untuk menunjukkan betapa korporasi atau perusahaan besar memang dalam kenyataannya dapat mendikte, bahkan kadang-kadang membeli pemerintahan untuk meloloskan keinginan mereka. Kalau pemerintahan yang dikuasai oleh kaum aristocrat (bangsawan) disebut sebagai aristokrasi, oleh plutokrat (orang kaya) disebut sebagai plutokrasi, oleh kleptokrat (maling, preman) disebut sebagai kleptokrasi, maka sebuah pemerintahan yang dikendalikan oleh korporatokrat (pemilik korporasi besar) boleh juga dinamakan sebagai korporatokrasi.

Dalam bukunya tersebut, Rais (2008: 81-85) coba mendeskripsikan korporatokrasi lebih lanjut. Ia dianggap sebagai system atau mesin kekuasaan yang bertujuan untuk mengontrol ekonomi dan politik global yang memiliki (setidaknya) tujuh unsur, yaitu: 1) korporasi-korporasi besar; 2) kekuatan politik pemerintahan tertentu, terutama Amerika dan kakingtangannya; 3) perbankan internasional; 4) kekuatan militer; 5) media massa; 6) kaum intelektual yang dikooptasi; dan terakhir, 7) yang tidak kalah penting elite nasional negara-negara berkembang yang bermental inlander, komprador atau pelayan. Korporasi yang dimaksudkan di sini adalah korporasi “besar”, karena korporasi-korporasi kecil pada umumnya tidak memiliki ambisi untuk menguras kekayaan bumi dan membangun sistem atau mesin kekuasaan untuk menciptakan imperium global. David Korten (*Ibid.*) melukiskan betapa menakutkan langkah-langkah korporasi besar itu untuk melakukan kolonisasi planet bumi:

Ketika korporasi-korporasi (besar) memperoleh kekuasaan kelembagaan yang bersifat otonom dan makin terasingkan dari masyarakat dan tempatnya, kepentingan korporasi dan kepentingan kemanusiaan semakin menganga berbeda. Kini

kita merasa seolah-olah diserbu oleh makhluk-makhluk aneh yang bermaksud menduduki planet bumi kita, mereduksi kita menjadi sekedar budak sahaya, dan mengucilkan kita sebanyak-banyaknya.

Pada umunya korporasi besar dihinggapi penyakit *pathology of profit* atau penyakit mencari untung secara membabi buta. Tujuan mutlak korporasi adalah mencari keuntungan maksimal dengan biaya minimal dan waktu minimal. Semua cara untuk mendapatkan keuntungan dapat ditempuh. Yang premier adalah keuntungan, yang lainnya sekunder. Proses rekrutmen, pelatihan, administrasi, advertensi, akomodasi, produksi, penggudangan, *profit-sharing* dan lain-lain dibenarkan lewat segala cara, asal tujuan mutlak dapat dicapai (*Ibid.*). Tepat pada titik inilah, kita bisa coba memahami kepentingan di balik “kucuran dana” dalam jumlah besar oleh sejumlah korporasi besar dalam proyek-proyek pendidikan di Indonesia; entah itu upaya membangun Modern Indonesia Project, Pemberaian beasiswa, pengembangan penelitian, dan sebagainya. Jalinan kepentingan antara negara maju dan korporasi berhasil menjadikan negara-negara berkembang sebagai target penguasaannya di bidang ekonomi-politik.

Mempersoalkan Proses Rancang Bangun Pelembagaan Pengembangan Ilmu Politik di Indonesia

Salah satu karangan penting terkait hal ini ditulis oleh David Ransome, *The Berkeley Mafia* (1970), yang diulas oleh Bruce Glassburner, *Politik Ekonomi dan Pemerintahan Orde Baru*, dalam Arndt [(ed), 1987]. Menurut Ransome dikutip Glassburner, Kepala Perwakilan Ford Foundation di Jakarta tahun 1950-an, Michael Harris, “dituduh” telah berusaha mengarahkan pelajaran ekonomi di universitas-universitas Indonesia kepada pemikiran Barat

ortodoks, sebagai suatu usaha mencegah “kekiri-kirian”, khususnya “Soekarnoisme”. Alat yang dipakai berupa bantuan (*grant*) Ford Foundation (Rockerfeller Foundation, dan Fulbright) dalam jumlah besar kepada Indonesia, yang diatur universitas-universitas Amerika, untuk studi lanjut di Amerika maupun membiayai tim Amerika yang menjadi penasihat dalam kurikulum dan yang berhubungan dengan itu, atau mengajar di Indonesia.

Tujuan utama Ransome dengan karangannya adalah menyalahkan keterlibatan University of California (Berkeley) dan Ford Foundation dalam upaya pembersihan berdarah dan penghapusan Partai Komunis Indonesia (PKI), serta yang terpenting adalah asosiasi intelektual ini dimaksudkan untuk penerapan ideologi ekonomi komprador (*comprador economy ideology*) dan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kepentingan Amerika. Di luar Berkeley, catat Philpott dalam tulisan *Uang dan Kekuasaan: Yayasan-Yayasan swasta yang Didanai oleh Kapitalis* (2005), ada juga keterlibatan kuat dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) dan Cornell University. Bahkan di Cornell, Ford Foundation, juga mendanai pendirian *Modern Indonesia Project*, suatu program studi Indonesia yang paling berpengaruh selama empat puluh tahun terakhir. Dalam perjalanannya, jumlah donor semakin besar dan semakin beragam latar geografis, bidang, kepentingan, ideologi, dan karakteristik lainnya (menyebut sejumlah contoh: dari Eropa Barat termasuk Skandinavia, Eropa Timur, Asia Timur, Timur Tengah, dan Australia).

Dilema “Politik Pemberian Beasiswa”

If you want to invest in the short term, grow rice. If you want to invest in medium term, plant a tree. If you want to invest in the long run, educate people –Chinese proverb [dalam Nugroho (a)]

Menyangkut penyingkapan kepentingan di balik pemberian beasiswa, peneliti tertarik untuk mencuplik tulisan Agung Nugroho (a) bertajuk *Politik Beasiswa Australia*. Dalam tulisannya tersebut, Nugroho menyampaikan setidaknya ada tiga faktor yang patut diduga menjadi pendorong sebuah negara memberikan bantuan pendidikan dalam bentuk beasiswa. *Pertama* yakni politik etis. Tidak hanya Van de Venter dan Abraham van Kuyper yang seorang pendeta di parlemen Belanda, banyak tokoh di negara-negara “imperialis” lain pun berpendapat bahwa rakyat di negara jajahan sudah sewajarnya mendapatkan bantuan kemanusiaan sebagai bentuk politik etis atas jajahan yang dideritaya bertahun-tahun.⁵¹

Kedua, familiarisasi. Salah satu *treatment* menghadapi sebuah negara yang dianggap berpotensi memberikan ancaman adalah justru dengan cara membangun ikatan psikologis melalui jalinan persahabatan dengannya. Nugroho mengurai, cara menimbulkan ikatan ini bermacam-macam. Mulai dari yang natural⁵² sampai yang sistematis. Penerima beasiswa diposisikan sebagai agen kultural yang akan menjembatani *gab* kedua negara. Untuk memuluskan ide tersebut dilakukanlah penganugerahan

⁵¹ Munculnya Bartolome de las Casas yang meminta pemerintah Spanyol menghentikan perbudakan terhadap orang Indian di Amerika Latin adalah contoh lain bahwa dalam masyarakat kolonialis pun selalu ada semangat untuk merekonstruksi apresiasi terhadap nilai-nilai kemanusiaan, balas budi, dan minta maaf.

⁵² Melalui interaksi yang terjalin antara penerima beasiswa dengan warga di negara *host*. Bukan tidak mungkin di antara mereka kemudian terajut persahabatan bahkan untaian kasih. Di luar itu, pengalaman tinggal di negara *host*, juga akan menimbulkan kedekatan emosional bahkan loyalitas ganda. Merupakan hal yang jamak terjadi, seorang penerima beasiswa menganggap *host* sebagai tanah air kedua.

prestise. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah negara-negara pemberi beasiswa mengganjar scholar dengan universitas-universitas terbaik di negaranya. Di Jepang, Nugroho menggambarkan, masuk Tokyo Daigaku (Todai) University adalah jaminan awal masuk menjadi anggota cabinet –karenanya tak ayal jika cukup banyak anak muda Jepang *harakiri* karena gagal masuk ke sana.

Ketiga, kontrapestrasi strategis. Pemerintah negara *host* berkepentingan membangun jaringan. Dari sekian ratus *scholar* yang dibiayai untuk meraih gelar master atau doctor di negaranya, pastinya ada sekian orang yang akan menduduki posisi dan jabatan strategis. Karenanya kemudian, seleksi, kandidasi, atau kualifikasi sangat diperlukan dalam proses rekrutmen. Tidak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan dapat menjalani program pendidikan dengan hasil yang memuaskan; namun utamanya adalah sebagai mekanisme penyaringan actor-aktor potensial. Terkait hal ini kita dapat berkaca kepada AS yang hingga kini masih getol memberikan beasiswa USaid dalam skema Fullbright atau Ford Foundation. ‘Mafia Berkeley’ yang secara legendaris kita kenal terdiri dari J.B. Sumarlin dan Ali Wardhana cs, adalah bukti investasi AS dalam bentuk SDM Indonesia terdidik yang sudah mengembalikan ‘hasil’ kepada negeri itu melalui banyak akses ekonomi dan politik. Keberhasilan AS inilah yang kemudian disinyalir diikuti oleh AUSaid (Australia), Monbusho (Jepang), Chevening (Inggris), DAAD (Jerman), STuned (Belanda), dan masih banyak lagi.

Efek dari berbagai strategi hegemoni keilmuan ini dapat kita lacak misalnya dalam kurikulum pengajaran ilmu sosial di pendidikan tinggi; betapa teori-teori Amerika yang positivistik (teori sistem, teori modernisasi, teori perilaku politik, teori

perbandingan politik) telah, sedang, dan masih menjadi *mainstream* hingga kini.

Refleksi Konseptual: Dari Orientalisme menuju Poskolonialisme – Upaya Memahami “Objektifikasi Indonesia” dan Efeknya Kini

Hidup kita adalah kutipan dari hidup orang Barat; suara kita adalah kumandang Eropa; kita ini yang seharusnya seorang intelek tidak boleh lebih daripada sebuah tas penuh keterangan-keterangan; dalam jiwa kita ada kekosongan, hingga kita tidak sanggup untuk meresapkan apa-apa yang indah dan bernilai. –Ki Hajar Dewantara dalam Nugroho, 2007: 4

Apabila seseorang memiliki, mengerti, dan mengetahui yang lain, ia tidak akan menjadi yang lain. Kepemilikan, pengetahuan, dan pengertian adalah sinonim dari kekuasaan –Levinas, 1989 dalam Philpott, 2003: 17

Untuk memulai ulasan, peneliti akan menyitir tulisan pengantar Majalah Tegal Boto (2003: 6) yang bernas menyangkut relasi Timur dan Barat. Perdebatan relasi di antara dua kutub tersebut akan digunakan sebagai *frame analysis* untuk melihat relasi keilmuan Indonesia (mewakili Timur) dan Amerika (mewakili Barat). Abad ini adalah abad-nya peradaban Barat; sosok yang mengklaim diri sebagai representasi atas kemajuan. Dengan slogan “peradaban, pemberadaban”, Barat melancarkan seabrek proyek ambisius berbungkus “humanitas”. Di antaranya yakni rasionalisme, modernisme, sekularisme, demokrasi, dan “-isme-

isme” yang lain. Tak hanya itu, sebagai jalan kemudian ilmu pengetahuan dicetak, narasi-narasi besar filsafat dibentuk, otoritas atas teks diperkukuh keberadaannya, sehingga lahir kemudian superioritas. Barat sebagai Sang Superior, memegang otoritas makna dan kuasa wacana. Para pengkaji postrukturalisme percaya, dunia ini bukan hanya galaksi teks namun juga wacana, yang berjaln kelindan dengan kekuasaan. Sebuah kekuasaan yang tidak bisa semata-mata direduksi dalam konteks politik, ekonomi, control ideology, dan sosial yang dikaitkan begitu saja dengan apa yang dinamakan proses “pemaknaan, kemaknaan”. Di sinilah *power is practiced* dengan mediasi wacana. Foucault adalah guru mumpuni masalah wacana. Ia memandang pusat aktivitas manusia adalah wacana, yang terbentang sebagai lautan makna yang luas dan bukan *common text* yang universal. Meniru sang mentor, Nietzsche, Foucault menyatakan bahwa pengetahuan melahirkan kekuasaan dan sebaliknya kekuasaan juga melahirkan pengetahuan. Adorno, tokoh paradigm kritis, menimpali, “*the demand for intellectual honesty is its dishonest*”. Dengan begitu, apa yang benar dan salahpun tergantung citra otoritas kekuasaan intelektual, politis, dan ideology saat itu.

Tepat pada poin tersebut, orientalisme⁵³ muncul sebagai ilmu yang dituding menjadi juru bicara dan kepanjangan kolonialisme –imperialisme Eropa. Masih menyitir Tegaloboto (*Ibid.*), redaktur dengan jernih mengupas, setidaknya orientalisme telah memfungsikan diri sebagai alat hegemoni dalam bungkus-bungkus keilmiahan dan objektivitas ilmu. Orientalisme memainkan peran sebagai distributor “realitas-realitas” etis, estetis, ekonomi, politik, sejarah, budaya, sosial, dan tentunya

⁵³ Dalam kasus Indonesia, orientalisme mewujud dalam bentuk indologi (era kolonial) dan studi Indonesia atau *Indonesian studies* (pada era pasca PD II).

ideologis untuk kepentingan Barat. Hingga Barat dengan segala klaim superioritasnya menempati posisi epistemologis sebagai pemberadab, penyelamat, penyempurna Liyan mereka, Timur. Dengan logika oposisi biner, Barat memaksakan relasinya dengan Timur dalam wajah superior-inferior, pusat-pinggiran, ndominan-sub-ordinat. Disinilah orientalisme perlu dikritik keras telah menjebakkan diri dalam yang “*real*” dan “*imagined*” tentang Timur.

Namun demikian, setiap kekuasaan melahirkan perlawanan. Munculah poskolonialisme, ilmu yang menurut Jyotsna G. Singh (*Ibid.*) menentang sejarah “universal” kaum humanis liberal, “.. *poskolonial studies is a counter-diciplinary practice, analyzing literary texts, among other cultural forms, at the level of specific historical and discursive struggles by which they are shaped.*” Poskolonialisme menjadi ilmu yang membongkar segala narasi yang menjadi embrio jahat imperialism dan kolonialisme Barat. Seperti Said, Bhaba, Spivak, Ahmad, Jyotsna *cum suis* banyak membedah ide-ide kolonialisme yang terkandung dalam teks-teks sastra, ilmu pengetahuan. Perlu dipahami kolonialisme tidaklah berakhir (begitu saja) dengan berakhirnya pendudukan kolonial. Jadi, gagasan tentang “dampak kolonial” memiliki makna ganda: yang inklusif baik mengenai peristiwa historis dari pertemuan kolonial maupun perpisahannya. Ada gejala-gejala merugikan “masa lalu kolonial” dan “masa kini poskolonial” (Gandhi, 2001: 24). Bagi Simon During, poskolonialisme itu “*regarded as the need, in nations or groups which had been victims of imperialism, to achieve an identity uncontaminated by universalist or Eurocentric concept and images.*” During menegaskan lagi kehendak poskolonialisme itu tidak lebih kehendak atas identitas yang begitu penting bagi *decolonized communities* (*Ibid.*). Ironisnya harus kita sadar-akui bahwa kesadaran subyek poskolonial itu, layaknya imaji identitas; karena rekonstruksi sejarah dan penemuan identitas kolonial itu tidak lebih cetakan dari lensa mata Barat. Lahirlah elit-

elit pribumi sebagai makelar identitas berbanding lurus kesadaran negeri kolonial. Ilmuwan jelas masuk salah satu diantara yang determinan; walaupun bukan berarti tidak ada sama-sekali semacam *counter-culture*. Yang berkembang kemudian fenomena hibridasi, yakni menurut Pratt (*Ibid.*), semacam transkulturasi, dimana kelompok marginal atau subordinat itu membentuk dan memilih sebuah bentuk budaya baru yang materinya diambil dari budaya dominan.

Meskipun sangat keras melakukan kritik, penulis mengambil posisi bahwa, poskolonial tidak dimaksudkan untuk memperuncing sentimen yang berujung “anti Barat”. Sepakat dengan poskolonialis Hommi Bhabha, pendekatan ini nuasanya lebih condong *self critic* dan *therapeutic*. Bukan apologetic. Indonesia sebagaimana Timur yang mengalami objektivikasi dengan ragam moda secara terus-menerus nyaris tanpa jeda *-ad invinitum*, di bongkar untuk kemudian dibangun kembali; direkonstruksi secara mandiri.

Membongkar Epistemologi Barat dan Kepentingan di Balikny

Satu poin vital yang ingin disampaikan oleh poskolonial adalah bahwa narasi sejarah pada dasarnya hanyalah konstruksional. Ia dibentuk, diproduksi, dan direproduksi terus-menerus oleh penguasa bahkan juga objek kuasa yang terjebak dalam wacana yang meng-objektivikasi dirinya. Lionell Gosman (dalam Majalah Tegalboto, 2003: 10) bahkan menyebutkan narasi sejarah tak lebih dari narasi fiksional yang seringkali enggan diakui oleh para sejarawan. Makna yang terkandung di dalamnya lebih merupakan efek dari rancangan naratif ketimbang deduksi fakta-fakta (Shelley Walia, *Ibid.*). Dalam simulacra sejarah inilah, makna dimanipulasi, *dipreteli*, dipalsukan, dan dilebih-lebihkan dari realitas. Simulakra oleh Gilles Deleuze dijelaskan sebagai tanda

atau symbol yang dibangun bukan oleh keserupaan atau kesamaan, tetapi ketidaksamaan, penyimpangan, atau perversi dari bentuk asli atau dari realitas. Bagi Jean Baudrillard, simulacra adalah mesin yang memproduksi segala hal yang palsu menyimpang dari rujukan dengan menciptakan tanda dan makna sebagai topeng, tabir, kamuflase, atau fatamorgana. Seperti disebutkan oleh Yasraf amir Piliang, kekuatan symbol lebih dikerahkan dalam rangka membangun citra, membentuk opini public, mengubah persepsi, mengendalikan kesadaran massa, sembari mengarahkan ke dalam preferensi-preferensi meski segalanya tak lebih dari iring-iringan simulacra belaka. (*Ibid.*: 10-11)

Barat sadar betul bahwa kekuasaan tanpa pengetahuan tak ada apa-apanya. Maka diciptalah berbagai instrument-instrumen baik itu narasi sejarah, teori, metode, aliran pemikiran, dll, yang sanggup memelihara dan melanggengkan kekuasaannya. Cek misalnya tulisan Alan J. Bishop, *Western mathematics: The Secret Weapon of Cultural Imperialism* [dalam Ashcroft, Griffiths, et all (ed), 2001], yang mempersoalkan Matematika Barat. Baginya, metode matematika Eropa akan bergesekan dan berdampak besar pada budaya pribumi. Matematika yang digunakan secara langsung dalam pengaplikasian berbagai konsep dan teknik, atau secara tak langsung melalui ilmu objektivikasi yang dijadikan nilai inti, matematika Barat. Demikian pun dengan bahasa. Melalui media perdagangan, administrasi, dan edukasi, simbolisasi dan struktur bahasa Barat, ini dipaksakan pada budaya pribumi. Akibatnya kita pun nyaris tak mengenal lagi, administrasi pemerintahan tradisional *a la leluhur*, seperti pemerintahan nagari di Sumatera Barat. (Majalah tegalboto, *Ibid.*: 11)

Dalam waktu yang sama, kekuasaan dikonstruksikan dan mendominasi untuk mengetahui. Jadi seperti kata Foucault, pengetahuan melahirkan kekuasaan, yang selanjutnya tak mungkin

dilaksanakan tanpa adanya pengetahuan. Penerapan kekuasaan dan pengetahuan itu melahirkan wacana yang menciptakan keyakinan dan menentukan segala yang dianggap ‘alami’ dan ‘normal’; dan tetap tegak dalam pilar bangunan ‘keilmiahan’, yang direproduksi oleh Barat (*Ibid.*: 11). Sebagai akibat kemudian, terjajah menjadi korban epistemology kolonial. Budaya koloni tidak memiliki sedikitpun ruang untuk merepresentasikan dirinya. Budayanya hanya menjadi budaya pinggiran, tak berkelas, dan dianggap tak beradab. Apa yang memungkinkan kontinuitas kekuasaan Barat tak lain disebabkan oleh adanya konstruksi wacana-wacana yang dioperasikan melalui logika –mengikuti istilah Ferdinand de Saussure–*oposisi biner*. Yakni, ketika makna muncul sebagai hasil dari keterkaitan antara proses kesamaan dan perbedaan. Makna dibuat dengan membagi dua dalam beberapa kategori yang saling tergantung: budaya/alam, laki-laki/perempuan, hitam/putih, baik/buruk, kita/mereka, Barat/Timur. Karena konstruksi logika biner ini diciptakan oleh Barat sendiri, tak pelak, stereotype buruk ditujukan bagi Bangsa Non-Barat. Semisal, jika rakyat terjajah itu irasional, maka Orang-Orang Eropa itu rasional.⁵⁴ *Alhasil*, ketika system ini masuk dalam kamar-kamar sosial, maka ia membentuk dualitas masyarakat yang saling menindas. Begitulah kolonialisme, perlu dipahami, tak hanya menjadi wahana bagi pengembangan teknologi-teknologi Barat, tetapi juga berarti usaha “pendayagunaan” gagasan, ide, kepentingan Barat ke negara-negara Non Barat demi memenuhi mesin-mesin hasrat kekuasaannya. (*Ibid.*)

⁵⁴ Perumpamaan yang lain, jika yang pertama tidak beradab, sensual, dan malas, maka Eropa adalah peradaban itu sendiri, dengan nafsu seksual yang terkendalidan etik dominannya adalah kerja keras. Dan jika, Timur itu sttatis, Eropa dilihat berkembang dan selalu progresif. Atau Timur itu feminine, sedangkan Barat maskulin. (*Ibid.*: 14)

Post Scriptum: Dekolonisasi (Metodologi) dan Upaya Menuju Ilmu Sosial yang Kontekstual

Kini Barat sepakat dengan kami, bahwa ada banyak jalan menuju kebenaran, selain jalan Aristotelian, logika Thomistis, atau dialektika Hegelian. Tetapi, ilmu-ilmu sosial dan humaniora itu sendiri haruslah didekolonisasikan (terlebih dahulu –pen) –Engelbert Mveng dalam Wallerstein (1997: 86)

Dengan meleburkan rasa dan emosinya dalam kertas kerja yang ia buat, poskolonialis Smith menulis (2005: xv): cara-cara penelitian ilmiah yang dilakukan para peneliti dan intelektual barat merupakan penyumbang dampak negative kolonialisme, menciptakan sejarah, serta realitas yang mengubur eksistensi *other*. Para peneliti dan intelektual Barat berasumsi mengetahui segala hal tentang bangsa terjajah hanya dari perjumpaan sesaat dengan salah seorang bangsa terjajah. Dan yang membuat tersengat lagi, tukas Smith, Barat mengklaim kepemilikan cara-cara bangsa terjajah dalam mengetahui tamsil bangsanya, lalu pada saat bersamaan menampik orang-orang yang menciptakan dan mengembangkan gagasan-gagasannya, bahkan mengetahui bahwa itu adalah miliknya. Lebih dari itu, Barat menolak kemungkinan bangsa terjajah bisa menciptakan budaya dan *nation* sendiri. Praktik-praktik yang berhubungan dengan abad silam –bahkan abad-abad sebelumnya– tetap dipergunakan untuk menyangkal validitas klaim bangsa terjajah atas eksistensi, tanah, wilayah, maupun hak menentukan nasib sendiri (*self-determination*), melestarikan bahasa dan berbagai bentuk pengetahuan cultural, kekayaan alam, dan system kehidupan dalam lingkungan bangsa terjajah.

Cara pandang imperialism tersebut diabadikan melalui infiltrasi pengetahuan: menghimpun penduduk bangsa terjajah, mengklasifikasikan, dan merepresentasikan dengan segala macam cara Barat, lalu lewat kaca mata Barat dikembalikan lagi kepada Bangsa terjajah. Edward Said menyebut proses ini sebagai wacana barat tentang 'yang Lain' (*Other*), yang didukung oleh institusi, penghargaan akademik, kosa kata, perumpamaan, doktrin bahkan juga birokrasi kolonial dan gaya kolonial. Menurut Said proses ini berlangsung antara lain disebabkan oleh pertukaran timbal balik yang simultan antara konstruksi sekolah (*scholarly construction*) dan konstruksi imajinatif terhadap ide-ide tentang Timur (*Orient*). Konstruksi sekolah di mata Said, ditopang oleh sebuah institusi korporasi yang mengeluarkan pernyataan tentang Timur dengan mengotori berbagai pandangan dan mendeskripsikannya lewat ajaran untuk menetapkan dan menguasai. (Smith, 2005: xvi-xvii)

Dekolonisasi hadir sebagai kebutuhan dunia keilmuan Bangsa Koloni untuk melakukan dekonstruksi kesarjanaan Barat; lebih jauh lagi untuk "memerdekakan diri". Dalam bukunya yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, *Dekolonisasi Metodologi*, Smith (2005: 10) dengan antusias berujar, bahwa penggarapan ulang terus-menerus dampak imperialism dan kolonialisme merupakan aspek penting politik cultural bangsa terjajah yang akhirnya membentuk basis bahasa kritik.⁵⁵ Smith

⁵⁵ Dalam kritik ini ada dua aliran besar. Yang pertama berpegang pada gagasan tentang otentisitas, waktu di mana bangsa terjajah masih utuh. Saat itu bangsa terjajah mempunyai otoritas absolute atas kehidupannya; mereka lahir dan besar dalam semesta yang sepenuhnya diciptakan sendiri. Adapun aliran yang kedua, bahasa kritik yang menegaskan bahwa mereka memiliki analisis, kenapa mereka bisa dijajah, apa makna dari hal itu terkait dengan masa lalu mereka dan apa pula makna bagi masa kini dan masa depan mereka. Kedua aliran tersebut saling beririsan, namun yang paling signifikan dalam wacana bangsa terjajah adalah solusi yang diajukan itu

menandakan, sejarah yang diceritakan dari perspektif penjajah perlu diurai kembali.⁵⁶ Sejarah merupakan aspek vital dari dekolonisasi; sebab dari sanalah kesadaran atas (pos)kolonialitas bermula. Sejarah adalah arena perebutan makna dan kuasa; karenanya diperlukan perebutan sejarah. Inilah proyek dekolonisasi yang dimaksudkan; sebuah proyek rekonstruksi sejarah. Dengan demikian, realitas objektif diyakini ke-naif-annya. Meminjam bahasa Purwo Santoso (2011), sejarah tidak dibiarkan bicara “apa adanya”, namun disadari “ada apa-apanya”.

Jika kita kaitkan dengan pemikiran orientalisme-nya Said, salah satu poin terpentingnya adalah kekuasaan tidak bersifat univocal dan tidak hanya mewujudkan sebagai pembatasan dan pemaksaan. Philpott (2003: 22) mengutip Said, “Inti pendapat saya adalah bahwa kita bisa memahami secara lebih baik kekuatan dan daya tahan berbagai system hegemonic, seperti budaya, ketika kita menyadari bahwa pemaksaan internal mereka atas para penulis dan pemikir bersifat produktif, tidak secara sepihak menghambat”. Di sanalah ruang untuk melakukan pembongkaran terletak. Sebuah kajian yang bertahan menjadi pengetahuan dan kemudian dianggap sebagai suatu ‘kebenaran’, sebetulnya semata merupakan

merupakan kombinasi dari masa sebelumnya, *jaman penjajahan*, dan masa sebelum itu, *jaman pra penjajahan*. Dekolonisasi merangkum kedua gagasan tersebut.

⁵⁶ Smith coba mengikhtisarkan bagaimana sejarah berkumpul di sekitar rangkaian ide: 1) ide bahwa sejarah adalah wacana totalitas; 2) ide tentang adanya suatu sejarah universal; 3) ide bahwa sejarah adalah sebuah kronologi besar; 4) ide bahwa sejarah adalah soal perkembangan; 5) ide bahwa sejarah adalah tentang subyek manusia yang mengaktualisasikan diri; 6) ide bahwa sejarah dapat dituturkan dalam satu narasi koheren; 7) ide bahwa sebagai sebuah disiplin sejarah itu polos; 8) ide bahwa sejarah dikonstruksikan di seputar kategori biner; 9) ide bahwa sejarah itu patriarkal. (Simth, 2005: 20-24)

efek dari sebuah praktik diskursif; konstruksi sosial; yang tanpa sadar terus kita produksi dan reproduksi tanpa jeda (Philpott, 2000: v-vi). Teks lantas bukan hanya soal menginformasikan (*to inform*), melukiskan (*to describe*), menjelaskan (*to explain*), dan menyampaikan (*to deliver*), tapi juga mencipta (*to invent*). Teks memberi batasan pengertian dan kemudian berhilir pada pertimbangan bagi formasi kekuasaan. Pun bukanlah titik akhir apalagi suatu kemestian dalam lintasan sejarah. Inilah perlunya membaca ulang (secara kritis), guna meruntuhkan kebenaran yang dianggap final tersebut, untuk kemudian memunculkan kebenaran baru versi subjek yang selama ini diobjektivikasi. Dalam bahasa Foucault, ini adalah bagian dari upaya teknologi diri (teknik-teknik penguasaan diri/*techniques of the self*). Yaitu upaya subyek untuk mengaktivasi dirinya.⁵⁷

Kontekstualisasi Ilmu

Pada titik ini, setelah dekolonisasi metodologi diinisiasi-kembangkan lebih lanjut, agenda selanjutnya adalah upaya indigenisasi ilmu sosial. Semacam upaya pengembangan sistem nilai dan pengetahuan lokal untuk dijadikan alternatif paradigma ilmu sosial yang lebih kontekstual. Baik sifatnya bagian dari genealogi pengetahuan berbasis lokal yang hendak diilmiahkan; sekaligus, indigenisasi sebagai bagian dari kontekstualisasi ilmu-ilmu sosial yang berkembang kini dalam berhadapan dengan material dan semantik lokal. Dengan demikian orientasi pengembangan ilmu tak hanya menyangkut relevansi ilmiah namun juga relevansi sosial. Yang utama tak lagi persoalan benar-

⁵⁷ Dekolonisasi metodologi sendiri bagi peneliti lebih merupakan sebuah pendekatan serupa dengan poskolonialisme hanya saja lebih menitik focus ke masalah ontology dan epistemologi ilmu, ketimbang satu instrumen metodologis yang operasional.

salah (*right or wrong/correct or incorrect*) semata. Tetapi lebih dari itu adalah kompatibilitas atau kecocokan ('compatibility/suitability'); bahkan lebih jauh lagi mengenai 'kegunaan atau ketunagunaan' (*'usefulness or useless'*). Karenanya lalu pendekatan spasio-temporal (kontekstual) menjadi relevan dikembangkan.

Di Indonesia, gaung ilmu sosial kontekstual sebenarnya tidak benar-benar baru. Kemunculannya merupakan bagian dari gerbong *alternative discourse* atas 'pembangunanisme', yang lambat laun terbukti gagal memenuhi ambisinya. Ia hadir dalam dalam *frame* yang dinami ilmu sosial transformatif.⁵⁸ Satu yang menarik, ilmu sosial transformatif awalnya lebih berkembang di ranah gerakan masyarakat sipil, seperti pada komunitas LSM/NGO, daripada di komunitas akademik (kampus). Spiritnya yang kritis, emansipatorik, dan transformatif sering dijadikan sandaran konseptual strategi aksi mereka –selain dalam rangka refleksi sekaligus memperoleh legitimasi ilmiah.⁵⁹ Di antara teoretisi yang

⁵⁸ Ilmu dalam perspektif Aristoteles tak mengabdikan pada pihak lain. Ilmu digeluti umat manusia demi ilmu itu sendiri. Sebagai kritik tajam kemudian dikenallah ucapan, "*primun vivere, deinde philosophari*" berjuanglah terlebih dahulu, baru boleh berfilsafat. Ilmu hadir untuk kepentingan umat manusia. Sehingga dengan tesis inilah, sebuah ilmu memiliki dasar tujuan.

⁵⁹ Sebagaimana disampaikan Fakih (2003: 6), berbagai teori sosial, ekonomi, politik, dan budaya lahir tidak saja dalam rangka pertarungan memberi makna terhadap suatu realitas sosial, tetapi juga berimplikasi pada perubahan sosial karena pada dasarnya perubahan sosial dibangun di atas pemahaman teoritik dan suatu teori sangat berpengaruh dalam membentuk suatu program aksi di lapangan. Berangkat dari pemahaman ini, maka tak heran jika teori yang bersifat transformative, relative cepat berkembang di kalangan aktivis sosial.

sering dikutip adalah: Habermas⁶⁰, Paulo Freire⁶¹, Ivan Illich⁶², Gustavo Guiterez⁶³ (dengan pedagogi emansipatorik dan teologi pembebasannya)⁶⁴.

Sejumlah ilmuwan Indonesia sendiri terlibat dalam pengarusutamaan penerapan ilmu sosial transformatif ini. Menyebut beberapa nama diantaranya adalah: Muslim abudrrahman, Hidayat Nataatmadja (menggunakan terma “ilmu humanika”); Arief Budiman (“ilmu sosial yang kontekstual”);

⁶⁰ Habermas secara sederhana membagi ilmu-ilmu sosial menjadi tiga paradig: *instrumental knowledge* (positivism), paradig interpretative (dengan dasar filasafatnya fenomenologi dan hermeneutic), serta paradig kritik (*critical/emansipatory knowledge*). Paradigma yang disebutkan terakhir itulah yang memberikan legitimasi terhadap ilmu sosial pembebasan, yang tadinya dianggap ‘tidak ilmiah’ tersebut. (Fakih, 2003: 23-28)

⁶¹ Tugas teori sosial menurut Freire adalah melakukan apa yang disebutnya sebagai *conscientizacao* atau proses penyadaran terhadap system dan struktur yang menindas, yakni suatu system dan struktur “dehumanisasi” yang membunuh kemanusiaan. Pemikiran Freire sangat dipengaruhi oleh konsep hegemoni Gramsci. Terkiat dnegan penggolongan kesadaran manusia, Freire menyebutny ada tiga: kesadaran magis (*magical consciousness*), kesadaran naïf (*naival consciounees*), dan kesadaran kritis (*critical consciousness*). (Fakih, 2003: 29-31)

⁶² Hampir sama dengan Freire sebageian tulisannya mem,bahas problem pendidikan yang sifatnya dehumanisasi. Illich menganggap sekolah adalah candu masyarakat.

⁶³ Gustavo Guiterez (1973) merupakan salah satu tokoh teologi pembebasan. Ia mmerbitkan deskripsi atas terma tersebut merupakan suatu “refleksi teologi yang lahir dari ungkapan dan pengalaman sert usaha bersama untuk menghapus situasi ketidakadilan dan untuk membangun sutau masyarkat yang berbeda yang lebih bebas dan lebih manusiawi”. (dalam fakih, 2003: 177-178)

⁶⁴ Tentu di luar nama-nama yang disebutkan masih banyak teoritis lain yang tak kalah memebrikan pengaruh.

Francis Wahono (Tahun 80-an, Ia dikenal getol mempopulerkan “teologi pembebasan”); kemudian, Mubyarto (“ilmu sosial yang membumi”); Kuntowijoyo (“ilmu sosial profetik”); dan, Mansour Fakih (melalui buku-bukunya yang mengeksplor paradigma kritis). Masing-masing konsep memiliki tekanan yang berbeda namun sama-sama mengusung spirit emansipatif yang perlu dikembangkan lebih lanjut [:]

BAB III

PENDEKATAN POLITIK KLASIK DALAM ILMU POLITIK

Muhtar Haboddin[®]

Jika interpretasi mengharuskan kita melihat ilmu politik sebagai suatu keseluruhan, suatu corpus pemikiran, interpretasi juga merupakan suatu cara untuk memecah-mecahkan agar berbagai bagiannya dapat ditangani. Hasilnya diharapkan merupakan suatu perspektif yang lebih manusiawi untuk mendampingi perspektif ilmiah. Syaratnya adalah sedikit kecerdasan, kesabaran yang lebih besar, dan terutama sekali, suatu sentuhan humor.

-David Apter *Pengantar Analisa Politik* ;1988; 524-

Perkembangan ilmu pengetahuan diwarnai oleh dua arus pemikiran besar yang saling berdebat. Perdebatan itu terjadi cukup lama dengan mengedepankan pertanyaan apakah ilmu pengetahuan berkembang secara kumulatif atau secara revolusioner? Sebuah pertanyaan penting yang senantiasa

[®] Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Univ Brawijaya, Malang

menguras pikiran para ahli filsafat ilmu, sosiologi ilmu pengetahuan dan para peminat filsafat politik. Para ahli inilah yang bergumul tanpa henti, mencari dan memeriksa karya-karya klasik, dokumen, arsip atau bahkan membongkar pemikiran-pemikiran masa lalu yang pernah dominan dalam kurung waktu tertentu. Hasil akhir dari pencarian dan pergumulan mereka mengenai perkembangan ilmu, ternyata tidak saling menyapa satu sama lain dalam artian positif melainkan saling bersaing menurut versi masing-masing.

Mohtar Mas'ood dalam bukunya *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, secara jeli menulis dan memberi penilaian dua perdebatan itu dengan menampilkan pemikir dan sekaligus filsuf kelahiran Wina, Karl Popper (1902-1994). Bagi Popper, ilmu pengetahuan itu berkembang secara rasional dan kumulatif, yaitu melalui proses falsifikasi dan penemuan baru. Dalam proses ini teori-teori dalam bidang keilmuan yang bersangkutan terus menerus dihadapkan pada tes falsifikasi dan semakin banyak teori-teorinya yang lulus tes falsifikasi semakin maju ilmu tersebut. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit teori-teori yang lulus tes falsifikasi, tidak dianut. Dengan demikian, keputusan seorang ilmuwan untuk mendukung atau menolak suatu teori yang didasarkan pertimbangan objektif, yaitu apakah teori ilmu lulus atau tidak⁶⁵.

Pendapat Popper tersebut, senapas dengan gagasan George Ritzer dan Douglas Goodman. Dalam bukunya yang berjudul *Teori Sosiologi Modern*, Ia menulis sebagai berikut:

menurut pandangan orang awam dan kebanyakan ilmuwan mengatakan bahwa kemajuan ilmu terjadi secara kumulatif,

⁶⁵ Mohtar Mas'ood. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm.11.

setiap tahap kemajuan tanpa terelakkan di bangun di atas seluruh kemajuan yang telah dicapai sebelumnya. Ilmu yang mencapai tingkat kemajuan yang sekarang melalui kenaikan atau tambahan pengetahuan yang terjadi secara terus-menerus. Demikianlah ilmu pengetahuan mengalami kemajuan ketingkat yang lebih tinggi⁶⁶.

Pandangan Karl Popper, George Ritzer dan Douglas Goodman yang melihat perkembangan ilmu dengan cara kumulatif, ditentang habis oleh Thomas Kuhn, sang penulis buku legendaris *The Structure of Scientific Revolutions* (1962). Kuhn menentang konsep yang menyatakan perkembangan ilmu pengetahuan terjadi secara kumulatif. Menurutnya pandangan demikian itu mitos yang disebarkan-luaskan oleh buku-buku teks sebelumnya yang selalu *vested interest* untuk menampilkan citra yang masuk akal tentang bidang studi mereka. Lebih lanjut, Kuhn, mengatakan kenyataan sejarah tidak mendukung konsepsi Popper itu. Pandangan Kuhnian menunjukkan bahwa ilmu lebih banyak berkembang melalui 'kesepakatan' para ilmuwannya. Apakah teori diterima atau ditolak ternyata bukan ditentukan semata-mata oleh pertimbangan rasional, yaitu kekuatan logikanya, tetapi lebih banyak ditentukan oleh pertimbangan irrasional, yaitu kesepakatan dalam komunitas ilmuwannya.⁶⁷

Sanggahan Kuhn terhadap Popper mengenai perkembangan ilmu pengetahuan patut diberi tiga catatan penting. *Pertama*, dari perdebatan mereka, kita bisa mengetahui

⁶⁶ George Ritzer dan Douglas Goodman *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. A-12; Lihat pula George Ritzer *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 4; Ian Crain. *Teori-Teori Sosial Modern*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada), 1994.

⁶⁷ Mohtar Maos'ed., *op.cit.* hlm.11.

perkembangan ilmu pengetahuan dari dua sisi yang berbeda dan saling berlawanan/bertentangan. *Kedua*, perbedaan cara pandang menunjukkan bahwa latar belakang keilmuan sang tokoh berpengaruh secara signifikan dalam melihat persoalan. Kuhn menjelaskan ilmu pengetahuan dengan pemahaman ilmu alam, empirik. Sementara Popper lebih menekankan filsafat ilmu, dan normatif. *Ketiga*, cara berpikir Kuhn berangkat dari 'fakta' sementara Popper berangkat 'teori'. Atau meminjam istilah Mohtar Mas'ood, Kuhn sangat percaya pada '**penelitian dahulu baru teori**' sedangkan Popper malah sebaliknya yakni '**teori dahulu baru penelitian**'.

Dari dua model cara berpikir di atas menunjukkan bahwa kerangka pikir Popper yang mengedepankan 'teori dahulu baru penelitian' yang dianut oleh pemikir pendekatan ilmu politik klasik. Penganut pemikir klasik sangat mementingkan teori ketimbang data; berpikir deduktif; studinya sangat normatif dengan memusatkan pertanyaan yang bersifat *das sollen* (apa yang seharusnya). Sebagai ilustrasi pendekatan politik klasik bergerak dari idealis ke empirik. Dan, Plato merupakan ilmuwan yang konsistensi menggunakan pendekatan normatif dalam uraiannya mengenai negara yang ideal.⁶⁸

Tulisan ini ingin membedah metodologi pendekatan politik klasik dengan menampilkan beberapa bagian. Mulai dari teori dahulu-baru penelitian, berpikir deduktif dan normatif, apa yang menjadi objek kajiannya, lalu ditutup dengan implementasi pendekatan klasik di Indonesia.

⁶⁸ A. Hoogerwerg *Politikologi*, (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm.22.

Teori Dulu-Baru Penelitian.

Pendekatan klasik merupakan warisan pemikiran dari Eropa. Salah satu ciri khas dari pemikiran Eropa adalah orientasi teoritiknya yang sangat kuat. Karl Popper adalah penganut teoritik yang sangat kuat dan menekankan cara kerja keilmuwan yang mendahulukan teori baru penelitian. Karl Popper, sebagaimana dikutip Mohtar Mas'ued menyatakan bahwa cara paling efektif untuk memajukan pengetahuan saintifik adalah melalui pengembangan gagasan dan percobaan untuk menolak gagasan itu melalui penelitian empirik. Ia tidak percaya bahwa penelitian empirik yang sistematis bisa menimbulkan teoritisasi. Penelitian tidak bisa menimbulkan gagasan baru dan tidak bisa berfungsi sebagai metode logis untuk membentuk teori. Menurut penganut aliran ini, teori hanya bisa diciptakan melalui intuisi dan renungan mendalam. Dalam proses ini kita mula-mula hanya melakukan abstraksi pikiran dan berusaha membuat 'gambar' yang sejelas mungkin dalam pikiran kita dan berusaha menarik sebanyak mungkin kesimpulan atau konsekuensi dari gambar yang kita buat. Sementara kita sedang dalam proses membuat gambar itu kita tidak berpikir kaitan empirik antara gambar itu dengan dunia nyata, baru sesudah gambar itu cukup jelas, kita mengujinya dengan fakta empirik⁶⁹.

⁶⁹ Mohtar Mas'ued., *op.cit.* hlm.82. Karl Popper adalah pengecam yang paling lantang suaranya terhadap peneliti yang mendahulukan penelitian dulu baru teori. Dalam penelitian hal ini biasa disebut dengan metode induktif. Akar dari persoalan induktif terdapat dalam pernyataan David Hume bahwa tidaklah mungkin untuk membenarkan suatu dalil/teori melalui eksperimen, oleh karena hal itu '*transcends experiens*'. Lebih lanjut baca J Vredendregt. *Pengantar Metodologi Untuk Ilmu-Ilmu Empiris*, (Jakarta: Gramedia, 1985). Khusus Bab.1.

Pandangan di atas didukung Kennet Waltz. Waltz mengatakan, tidak mungkin melakukan penelitian dengan strategi induktif, karena tanpa teori kita tidak mungkin tahu dimana mau memulainya, data apa yang akan dicari, dan sebagainya. Tanpa suatu teori yang jelas, tidak mungkin dilakukan pengujian dengan sempurna dan banyak waktu akan terbuang percuma. Korelasi bukanlah teknik yang baik untuk membuat teori yang eksplanatoris, korelasi adalah teknik deskriptif. Pengetahuan hubungan internasional' tidak akan bisa dihasilkan hanya dengan mengakumulasi informasi sebanyak-banyaknya⁷⁰.

Komentar Waltz tidak hanya melanjutkan tradisi Popper. Tetapi Waltz tengah mengembangkan pemahaman 'teori dulu baru penelitian' dalam studi hubungan internasional. Sedangkan dalam studi ilmu politik muncul gagasan yang mengejutkan sebagaimana ditulis Fred N Kerlinger dalam *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Ia mengomentari para penganut teori dulu baru penelitian dengan mengatakan:

para pemikir klasik biasanya dijuluki sebagai ilmuwan yang kerjanya berpikir, memintal teori-teori rumit; dan menghabiskan banyak waktunya di menara gading yang terpencil dari dunia beserta masalah-masalahnya. Ilmuwan adalah teoritis yang tidak praktis, kendati pemikiran dan teorinya sesekali membuahahkan hasil yang mengandung makna praktis⁷¹.

Penilaian Kerlinger tentu saja ada benarnya. Karena itu, para ilmuwan klasik terus berbenah diri sembari memperbaiki metode risetnya. Salah satu karya yang berpegang pada teori dulu-

⁷⁰ *Ibid.* hlm.83.

⁷¹ Fred N. Kerlinger. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, (Jogyakarta, UGM Press, 1990), hlm.11

penelitian kemudian ditulis David dan Chava Nachmias dalam *Research Methods in the Social Sciences* (1981). David dan Chava Nachmias sebagaimana dikutip Mohtar Mas'ood menggambarkan strategi 'teori dahulu-penelitian kemudian' dalam tahap-tahap berikut:

*Pertama, perumusan suatu teori atau metode yang eksplisit. Kedua, pemilihan suatu proposisi yang muncul dan teori atau model untuk diteliti secara empirik. Ketiga, pembuatan rancangan penelitian untuk menguji proposisi. Keempat, kalau proposisi yang dideduksi dari teori itu didukung oleh data empiris, maka teori atau penelitian (seperti disain penelitian, pengukuran, dan sebagainya) harus diubah, dan kita harus kembali ke tahap ke-2. Kelima, kalau proposisi itu ditolak, kita cari proposisi lain untuk diuji atau kita coba perbaiki*⁷²

Penjelasan yang memposisikan teori dulu-kemudian penelitian berangkat dari pemaknaan yang mendasari bahwa teori merupakan jantung dari penjelasan ilmiah dan otomatis menjadi sentral dalam penelitian ilmiah. Sifat abstrak yang dimiliki teori membuatnya tidak mungkin dibuktikan kebenarannya, namun diuji kegunaannya. Sebab kebenaran teori menurut bahasa Riswandha Imawan adalah 'kebenaran logikanya'.

Berpikir Deduktif dan Normatif

Selain mendahulukan teori, pendekatan klasik juga terkenal dengan metode berpikir yang sangat deduktif dan normatif. Cara berpikir deduktif dan normatif merupakan bagian yang tak

⁷² Mohtar Mas'ood., *op.cit.* hlm.82. Periksa pula Suwarsono dan Alvin Y So Perubahan Sosial dan Pembangunan, (Jakarta: LP3ES, 2006). khusus Bab 1.

terpisahkan dari ilmu politik klasik itu sendiri. Berbagai ilmuwan politik membenarkan hal ini. Sebut saja namanya Ronald H. Chilcote dalam *Teori Perbandingan Politik* (2003); Riswandha Imawan dalam *Metode Penelitian Ilmu Politik* (2000); Hoogerwerf dalam *Politikologi* (1985); Mohtar Mas'oe'd dalam *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (1994); Ichlasul Amal dan Budi Winarno dalam *Metodologi Ilmu Politik* (tanpa tahun); dan Mary Grisez Kweit dan Robert W Kweit dalam *Konsep dan Metode Analisa Politik* (1986).

Dalam pendekatan politik klasik nalar deduktif bekerja mengutip pendapat Ronald H Chilcote dengan:

analisa deduktif yang menyertakan kasus-kasus khusus di bawah hukum penjelasan yang universal. Analisa bergerak dari yang umum menuju yang khusus, dan deduktif mengisyaratkan bahwa kesimpulan satu fakta akan dijelaskan melalui sebuah generalisasi. Dengan demikian, sebuah kejadian hanya dapat dijelaskan dalam hubungan dengan sebuah hukum umum yang baku atau generalisasi empiris. Hukum atau generalisasi seperti ini dideduksi dari kelompok generalisasi atau teori yang lebih tinggi, dan kesemuanya secara logika dipegang bersama-sama. Selain itu, para ilmuwan sosial maupun para filsuf keilmuwan biasanya mendasarkan penjelasan-penjelasan mereka pada penjelasan deduktif⁷³.

Penggalan kutipan Chilcote terasa terlalu panjang dalam memaknai bagaimana nalar deduktif itu bekerja dalam suatu mekanisme penelitian. Tanpa mengurangi bobot keilmiahannya penulis menampilkan logika dedutif secara ringkas, padat dan

⁷³ Ronald H. Chilcote *Teori Perbandingan Politik*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 85.

penuh makna sebagaimana dikemukakan Riswandha Imawan. Menurut Riswandha:

pendekatan klasik berangkat dari logika deduktif. Dimana peneliti mulai dengan seperangkat teori, menjabarkannya ke dalam seperangkat variabel, pengumpulan data, lalu menguji apakah data yang terkumpul itu menyokong atau tidak teori yang dipakai. Jadi, pendekatan ini menitikberatkan pada proses theory justification, menguji apakah satu teori dapat atau berguna menjelaskan satu fenomena⁷⁴.

Pengujian teori sangat penting dilakukan. Sebab sebagaimana dikatakan Popper kemajuan keilmuan hanya bisa dicapai melalui proses perumusan hipotesa dari teori, pengujian hipotesa itu, dan berdasar hasil pengujian itu dilakukan perumusan kembali atau penolakan atas hipotesa itu⁷⁵. Sementara Daniel Dhakidae mengatakan ilmu pengetahuan hanya bisa berkembang bila suatu penemuan ditolak lantas dicari gantinya. Ilmu hanya bisa berkembang kalau suatu penemuan diterima dan dipakai sampai suatu saat ia lekang terkuras zaman, dan hilang kemampuannya menjelaskan soal. Karena itu sikap—tolak –terima rasional oleh *the scientific community* adalah pangkal gerak kemajuan di dalam kultur keilmuan⁷⁶. Pemahaman ini diperkuat lagi oleh pemikiran yang mengatakan bahwa pengetahuan yang dibangun melalui

⁷⁴ Riswandha Imawan, 'Metode Penelitian Ilmu Politik' Diktat, 2000. hlm. 1

⁷⁵ Mohtar Mas'ood., *op.cit.* hlm.84.

⁷⁶ Daniel Dhakidae 'Spes dan Secercah Harapan' dalam Vedi Hadiz Politik, *Budaya dan Perubahan Sosial*. (Jakarta: Gramedia dan Yayasan Spes, 1992). hlm.xvi.

pendekatan deduktif yang didasarkan pada logika formal dan matematik, harus dapat diuji dan dibuktikan secara empirik⁷⁷.

Nalar deduktif sebagaimana disebutkan di atas berbarengan dengan nalar normatif dalam pendekatan politik klasik. Jika nalar deduktif menitikberatkan pada proses *theory justification*, menguji apakah satu teori dapat atau berguna menjelaskan satu fenomena. Maka nalar normatif memusatkan pada apa yang seharusnya yang menjadi tujuan dalam ilmu politik. Karena itu, nalar normatif bisa dibaca dan dipelajari hasil karya para tokoh-tokoh pemikir mulai dari Thucydides, Hugo Grotius, Immanuel Kant, Niccolo Machiavelli, Thomas Hobbes, Karl Marx, Plato, Leo Straus, Eric Voegelin dan sebagainya

Dalam *Teori Perbandingan Politik*, Ronald H Chilcote mengatakan bahwa nalar normatif:

'merupakan pendekatan pavorit bagi ilmuwan politik yang perhatian utamanya adalah tentang sejarah gagasan-gagasan politik dan sosiologi ilmu pengetahuan. Pendekatan normatif merupakan kecenderungan klasik yang sudah digunakan sejak ilmu politik masih menyatu dengan filsafat. Pendekatan ini meneliti nilai-nilai kebudayaan dalam masyarakat yang dianggap baik. Ia juga menelaah norma dalam bentuk aturan-aturan kehidupan atau seperangkat prinsip tentang hak dan kewajiban yang membimbing kita mempraktekkan nilai-nilai. Analisis normatif mencoba meningkatkan observasi empirik kasar atas berbagai peristiwa, dan mencari makna-makna yang lebih dalam dengan mengaitkan nilai-nilai masyarakat yang diamati.

⁷⁷ Yusuf Hadi Miarso 'Landasan Berpikir dan Pengembangan Teori dalam Penelitian Kuantitatif'. Jurnal Pendidikan Penabur No.05/Th-IV/Desember 2005. hlm.66.

*Analisis normatif menggunakan masyarakat secara keseluruhan sebagai unit analisisnya, dan terkadang mereka mengasumsikan bahwa perubahan dalam masyarakat merupakan konsekuensi dari suatu proses dialektika antara nilai-nilai dan gagasan yang saling bertentangan*⁷⁸.

Kalimat yang bernada: analisis normatif menggunakan masyarakat secara keseluruhan sebagai unit analisisnya menunjukkan kesamaan dengan nalar deduktif. Yakni kecenderungannya berpikir secara global. Kendati demikian, nalar normatif bergerak lebih maju dalam artian berusaha keluar dari perdebatan tentang pengujian teoritik, lalu mencari nilai-nilai moral dan politik dengan mencoba membumikan penyelidikan teorinya.

Bahwa nilai-nilai moral dan politik dimana diperoleh? Tidak menjadi soal. Karena nilai-nilai moral dan politik kebanyakan disediakan oleh dunia sekelilingnya. Dalam hubungannya dengan spektrum tujuan-tujuan moral dan politik yang luas, teoritis lebih menyerupai seorang 'organisor' dari pada seorang 'pencipta'⁷⁹. Lepas dari apakah teoritis normatif sebagai seorang 'organisor' ataupun 'pencipta'. Yang jelas, ada juga pengamat mengatakan bahwa disebut sebagai nalar normatif karena kesimpulan-kesimpulan yang diberikannya tentang bagaimana pemerintah harus dibuat baik dan dilaksanakan.

Penjelasan nalar normatif yang berkuat pada persoalan nilai-nilai moral dan politik adalah warisan pemikiran filsafat politik dari dulu hingga sekarang tetap relevan untuk dibicarakan dalam konteks pemikiran politik klasik. Pemikiran politik klasik

⁷⁸ Ronald H. Chilcote., op.cit . hlm. 27.

⁷⁹ Ichlasul Amal dan Budi Winarno. *Metodologi Ilmu Politik* , (Jogyakarta, PAU-UGM, (tanpa tahun)., hlm. 107.

tidak pernah usang dibicarakan karena pertanyaan yang diajukan oleh pemikirnya sangat filosofis dan kontekstual, mengutip pendapat Mary Grisez Kweit dan Robert W Kweit, yang mengatakan bahwa;

'ilmu perbandingan politik terus menaruh perhatian dalam hal membandingkan struktur, fungsi dan hubungan di berbagai negara. Hubungan internasional memusatkan perhatian pada masalah tradisional tentang cara bagaimana negara berinteraksi. Ia menelaah seperti perang damai, sistem internasional yang saling tergantung dan kebijakan luar negeri. Pelajaran hukum ketatanegaraan juga menunjukkan perhatian pada dasar-dasar hukum pemerintah seperti proses perundang-undangan yang merupakan turunan dari perhatian awal untuk meneliti secara mendalam struktur dan berfungsinya lembaga-lembaga tersebut'⁸⁰

Pandangan pemikiran politik klasik semacam ini dikritik oleh John Dewey. Kritik Dewey menarik untuk disimak karena ia mengatakan bahwa pemusatan perhatian pada deduktif dan normatif tentang bagaimana timbulnya negara, bukan tentang apa konsekuensi negara dan akibatnya sekarang. Secara signifikan, perhatian para ilmuwan bergeser pada konsekuensi negara, dan mereka menemukan bahwa kebanyakan dari mereka sangat tidak puas akan efek-efek lembaga yang telah dideskripsikan sedemikian mendetail oleh pendekatan klasik ini⁸¹.

⁸⁰ Mary Grisez Kweit dan Robert W Kweit *Konsep dan Metode Analisa Politik*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986). hal. 19.

⁸¹ *Ibid.*, hlm.13.

Objek Kajian Pendekatan Klasik

Dimensi yang bernalar normatif dan deduktif sedikit telah disinggung. Karena itu bagian ini mencoba melakukan penajaman konsepsi pendekatan klasik ketika dijadikan pisau analitis dalam memotret objek persoalan. Pertanyaan-pertanyaan yang berbau filosofis yang ditopang dengan nilai-nilai, norma dan fakta sulit dipisahkan. Mengapa demikian? Karena dalam pendekatan klasik nilai dan fakta saling terkait. Selain itu, fokus kajiannya juga bergerak pada struktur-struktur formal (institusi dan pemerintah).

Perhatiannya pada lembaga-lembaga formal nampak dalam komentar Miriam Budiardjo dalam *Demokrasi di Indonesia*. Ia menulis:

'seandainya pendekatan klasik ingin mempelajari parlemen maka yang dibahas adalah wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya seperti yang tertuang dalam naskah resmi (Undang-undang dasar, UU, atau peraturan tata tertibnya; hubungannya formalnya dengan lembaga eksekutif; struktur organisasi atau hasil kerjanya (berapa Undang-undang yang telah dihasilkan)⁸².

Pandangan Miriam paralel dengan Mary Grisez Kweit dan Robert W Kweitz, yang mengatakan bahwa sebagai besar studi menelaah struktur legal yang formal dan proses pemerintahan secara terperinci. Sumber data studi ini adalah catatan-catatan tertulis seperti statuta konstitusi. Dengan pertanyaan pertanyaan apakah pemerintah berstruktur dan berfungsi sebagaimana

⁸² Miriam Budiardjo. *Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta, Gramedia, 1999), hlm.57.

ditunjukkan oleh dokumen tertulis. Karena itu, Somit dan Tanehaus berkata periode ini cenderung legalistik, deskriptif dan formalistik⁸³.

Baik Miriam Budiardjo maupun Mary Grisez Kweit dan Robert W Kweitz sama-sama saling menguatkan. Ketiga ilmuwan ini melihat pendekatan klasik dalam kaca mata struktur kelembagaan dengan berpijak pada kajian konstitusi. S.P. Varma dalam *Teori Politik Modern*, secara panjang lebar menguraikan terjadinya perubahan dalam pendekatan klasik. Lebih jelasnya simak kutipan berikut:

'penekanan pada awalnya struktur-struktur formal, secara berlahan-lahan mulai membuka jalan bagi penelitian-penelitian yang terarah secara fungsional. Suatu perhatian yang lebih besar kini juga tengah diberikan kepada pengaruh aktivitas berbagai organisasi non-pemerintah dan kelompok-kelompok sosial terhadap aktivitas pemerintah. Ruang lingkup ilmu politik tidak lagi terbatas pada filsafat politik dan deskripsi kelembagaan. Kini terdapat suatu kecenderungan yang lebih besar dalam meneliti lembaga-lembaga dan organisasi. Juga terdapat penekanan yang semakin besar kepada apa yang digambarkan sebagai peneliti terhadap suatu sistem dalam keadaan beraksi, terhadap cara-cara kerjanya, sebagaimana juga kepada sumber-sumber serta urutan-urutan resmi suatu pemerintahan. Dengan penekanan yang baru, generalisasi yang baru serta pengertian-pengertian yang semakin kritis tentang cara kerja suatu pemerintahan, yang akan membawa kita kepada rasa tidak puas terhadap perangkat konseptual dan teknik dari ilmu politik yang ada, serta menekankan kebutuhan akan adanya kerangka konseptual

⁸³ Mary Grisez Kweit dan Robert W Kweitz., op. cit. hlm.12; Ronald Chilte.op.cit. hlm. 78; Miriam Budiardjo, op.cit. hlm. 58.

*dan peralatan teknis baru untuk meneliti tentang cara kerja dari suatu pemerintahan*⁸⁴.

Kutipan panjang ini sengaja penulis hadirkan kepada sidang pembaca. Sebab dengan cara ini kita bisa mengetahui bahwa usaha pembaharuan objek kajian pendekatan klasik telah diusahakan. Pembentukan tidak hanya terjadi pada level objek tetapi juga merambah pada konseptualisasi hingga teknik penelitian. Tujuannya tak lain adalah supaya bisa menjelaskan model dan struktur kelembagaan lebih canggih.

Sekalipun sudah terjadi penambahan dan perluasan ruang lingkup cakupannya sebagaimana dijelaskan Varma. Namun, tetap saja ada hal penting yang terlupakan yakni pertanyaan normatif-filosofis di seputar usaha mereka mencari esensi ide-ide politik seperti keadilan dan kebaikan; mempetimbangkan apa itu pemerintah yang baik, apa itu kedaulatan, apa yang merupakan kewajiban negara terhadap negara dan sebaliknya kewajiban negara terhadap warga negara.

Pertanyaan-pertanyaan ini lahir bersamaan dengan pendekatan politik klasik. Karena itu, menghadirkan pertanyaan itu bukan berarti membangkitkan romantisme masa lalu. Sama sekali tidak. Tetapi itulah *blue print* pendekatan klasik. *Blue print* ini harus memuaskan kepada pemikir, disamping menyakinkan para pembacanya.

Implementasi Pendekatan Klasik di Indonesia.

Jika pertanyaan yang diajukan apakah masih relevan pendekatan politik klasik di Indonesia? Maka jawabnya tentu saja

⁸⁴ S.P. Varma. *Teori Politik Modern*, Jakarta, (Rajawali Press, 1995), hlm. 9-10.

iya. Mengapa, karena ada banyak studi maupun laporan media massa menunjukkan kuatnya pendekatan klasik yang berorientasi pada pengkajian struktur maupun fungsi lembaga-lembaga formal. Misalnya, Miriam Budiarmo dan Ibrahim Ambong *Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia* (1995); Dahlan Thaib dan Ni'matul Huda *Pemilu dan Lembaga Perwakilan dalam Ketatanegaraan Indonesia* (1992); Tiem s2 Plod *Reaktualisasi Fungsi Legislatif* (2006); dan Bivitri Susanti dkk *Struktur DPR yang Merespon Peran dan Fungsi Lembaga Perwakilan*. Menurut Bivitri Susanti dkk Ada dua hal yang dibahas dalam kajian. *Pertama*, struktur pembagian kerja. *Kedua*, struktur pengambilan keputusan. Pilihan dua hal ini didasarkan pada keberadaan DPR sebagai lembaga politik dalam struktur ketatanegaraan dan sebagai lembaga legislatif dengan fungsi-fungsi. Yang menarik dari temuan Bivitri dkk adalah sebagai berikut:

*'struktur DPR, baik struktur dalam hal pembagian kerja maupun pengambilan keputusan, seharusnya didasarkan pada peran dan fungsi DPR sebagai lembaga politik. Oleh karena itu, beberapa konsep mengenai keberadaan alat kelengkapan seperti Baleg dengan perannya yang baru serta keberadaan pimpinan alat kelengkapan harus ditinjau kembali.'*⁸⁵

Peninjauan kembali seharusnya bukan secara parsial yakni keberadaan Baleg dan alat kelengkapan tetapi juga mengenai struktur pembagian kerja maupun pengambilan keputusan DPR secara keseluruhan. Hal ini dimungkinkan karena pada tataran implementasi DPR tidak bisa menjalankan fungsi yang melekat

⁸⁵ Bivitri Susanti dkk 'Struktur DPR yang Merespon Peran dan Fungsi Lembaga Perwakilan', Draft Laporan 23 November 2005. hlm. 45.

pada dirinya sebagaimana diatur dalam UU. No.22/2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Ketidakkampuan DPR dalam menjalankan fungsinya nampak dalam laporan beberapa media massa. Kompas misalnya secara tegas menulis kurang optimalnya fungsi pengawasan dan legislasi DPR. Fungsi pengawasan tumpul. Selama satu tahun ini tidak ada pengawasan yang serius dilakukan DPR. Selain tumpulnya fungsi pengawasan, DPR juga terkesan lamban dalam menjalankan fungsi legislasinya. Hal ini terlihat dari tidak optimalnya proses pembuatan Undang-undang yang berhasil diselesaikan⁸⁶. Sementara pada akhir bulan Desember tahun 2006 Kompas menyebutkan adanya kecenderungan ketidakpuasan masyarakat terhadap kemampuan DPR menjalankan fungsi kontrolnya terhadap pemerintah dari 70,2 menjadi 79,2 persen. Sedangkan keraguan akan kemampuan DPR mengeluarkan Undang-undang juga meningkat dari 66 menjadi 71,5 persen⁸⁷.

Lebih lanjut Litbang Kompas melalui jajak pendapatnya 25-26 Oktober 2005 terungkap tingginya responden yang berpendapat bahwa kinerja DPR buruk. Yaitu, 83% dari 887 responden di 10 kota besar. Angka ini mningkat dari 78% pada September 2005, 58% pada bulan Juli 2005, 56% pada Januari 2005, dan 59% pada Desember 2004.

Bila dikaji lebih lanjut, memang banyak masalah dalam DPR yang menyebabkan buruknya kinerja mereka. Dan salah satunya masalah mendasar yang perlu disoroti adalah struktur DPR. Penelitian *Pusat Studi Hukum dan Kebijakan* mengenai kinerja

⁸⁶ Kompas, 2 Januari 2007; 'DPR Ideal Menawarkan Gagasan' Kompas, 12/11/2005; News Letter FITRA, edisi 2/Tahun 1/2002.

⁸⁷ Kompas, 18/12/2006; bandingkan Stephen Sherlock 'Proses Legislatif di Parlemen Indoensia: Isu, Permasalahan dan Rekomendasi, (Jakarta: Friedrich Nauman Stiftung), 2005.

legislasi DPR periode 1999-2004 yang menyoroti dua masalah yang harus diperhatikan legislatif mendatang, yaitu, *pertama*, pembagian peran komisi dan baleg; *kedua*, perbaikan prosedur⁸⁸. Sebagai contoh, penggunaan prosedur RUU inisiatif tidak lagi memerlukan dukungan dari sekurang-kurangnya dua fraksi dengan jumlah pendukung minimal 20 orang. Hal yang sama juga bisa digunakan dalam penggunaan hak meminta keterangan atau interpelasi dengan penyederhanaan prosedur. Hak ini dapat dipakai jika pembicaraan dalam rapat kerja dengan pemerintah kurang efektif atau mengalami *deadlock* seperti yang sering terjadi. Sekalipun rapat kerja sudah jauh lebih efektif daripada DPR yang lalu, akan tetapi suatu interpelasi akan menjadikan sistem politik lebih transparan dan dengan demikian masalah *accountability* dan pengawasan terus menerus terhadap pemerintah dapat ditingkatkan.

Apa yang penulis tampilkan, sekali lagi menunjukkan betapa kuatnya kajian politik klasik di tanah air. Sorotannya yang tajam pada fungsi dan struktur lembaga DPR menjadi bukti bahwa peminat kajian politik klasik cukup diminati. Inilah realitas yang ada dan tengah berlangsung dalam peta dan cakrawala pemikiran di Indonesia.

Penutup

Patut untuk dicatat bahwa pendekatan klasik mempunyai sumbangsih dan mewarnai khazanah perkembangan ilmu politik. Cara berpikirnya yang dimulai dengan teori lebih dahulu merupakan salah satu ciri khas pendekatan ini. Ilmuwan seperti Karl Popper, Kennet Waltz dan David dan Chava Nachmias adalah representasi dari pendekatan ini.

⁸⁸ Bivitri Susanti dkk., op.cit.

Ketika ilmuwan telah memilih salah satu perspektif, mereka cenderung untuk mengembangkan pola pikir tertentu, dan berpendapat bahwa teori tersebut merupakan teori yang terbaik. Akibatnya, ilmuwan sosial cenderung untuk tidak menghargai teori yang lain, dan tidak jarang melakukan kritik tajam.⁸⁹ ***

⁸⁹ Periksa pula Suwarsono dan Alvin Y So *Perubahan Sosial dan Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. 1

BAB IV

DARI TRADISIONALIS KE BEHAVIORALIS

Muhtar Haboddin*

PENGANTAR

Ibrahim Ambong dalam *Memahami Pendekatan Tingkah Politik* menyebutkan bahwa perkembangan ilmu politik terutama di Amerika Serikat, telah melalui empat tahap. Empat tahapan ini dapat dilihat dari berbagai sudut pembagian. Beberapa ahli politik melihat pembagian itu dari sudut metode-metode atau pendekatan-pendekatan yang muncul ketika membuat periodisasi. Empat tahap perkembangan ilmu politik adalah: tahap formal (legal); tahap tradisional; tahap *behavioral* dan tahap *post-behavioral*⁹⁰. Pada tahun 2006 I Ketut Putra Erawan kembali

* Dosen Ilmu Pemerintahan, FISIP-Brawijaya dan Koordinator Kelompok Studi Ilmu Pemerintahan Transformatif.

⁹⁰ Ibrahim Ambong 'Memahami Pendekatan Tingkah Politik' Jurnal Ilmu Politik, No.13/1993. hlm.20; terdapat pendapat yang beragam mengenai pemetaan pendekatan politik. Membagi empat pendekatan yakni (1). tradisional (yuridis dan institusional); 2). Pendekatan perilaku; 3) pendekatan psca perilaku; 4). Pendekatan Neo Marxis. Miriam Budiarjo, *Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta, Gramedia, 1999), hlm. 57. David After. *Pengantar Analisa Politik*, Jakarta, LP3ES, 1985, hlm.13. Membagi

menyebutkan empat pendekatan ilmu politik *Ala* Amerika Serikat yakni pendekatan klasik; pendekatan *behavioral*; pendekatan *post-behavioral* dan *After the post-behavioralisme*⁹¹.

Baik Ambong maupun I Ketut Putra Erawan sama membagi empat pendekatan politik. Meskipun sama-sama menghasilkan empat pendekatan politik, namun caranya sangat berbeda dalam membuat kategorisasi. Pendekatan Ambong sebenarnya bisa disempitkan menjadi tiga pendekatan saja dalam ilmu politik. Dengan asumsi bahwa pendekatan formal dan tradisional digabungkan menjadi satu dengan nama pendekatan klasik ditambah pendekatan *behavioral* dan pendekatan *post-behavioral*. Dengan melihat hasil pemetaan yang tawarkan I Ketut Putra Erawan jauh lebih maju ketimbang Ambong. Terlepas dari keunggulan I Ketut Putra Erawan dan ketertinggalan Ambong dalam mengikuti trend perkembangan ilmu politik. Namun satu hal

pendekatan politik menjadi enam.1). Filsafat Politik; 2). Paham Kelembagaan;3). Paham Tingkah laku; 4). Paham Kemajemukan ; 5) Paham Struktural; 6) Paham Perkembangan. Riswandha Imawan ‘Sistem Sosial, Sistem Politik dan Sistem Administrasi Negara’ membagi tiga keluarga besar pendekatan politik; 1). Tradisional; 2). Tingkah laku, dan 3). Pilihan Rasional. Sementara, Pratikno dalam artikelnya ‘Melacak Ruang Kajian Pemerintahan dalam Ilmu Politik: Sebuah Riset Awal’, membagi enam pendekatan ilmu politik yakni (1). Pendekatan Normatif atau Filsafat Politik. 2). Pendekatan kelembagaan formal negara. 3). Pendekatan perilaku. 4). Pendekatan teori negara. 5). Pendekatan Diskursus dan, 6). Pendekatan feminisme. Jurnal Transformasi, Vol. 1. No.1 September 2003. hlm. 17-19. Selanjutnya David Marsh and Gerry Stoker dalam *Theory and Methods in Political Science (2002)*, menyebutkan tujuh pendekatan ilmu politik yakni, Pendekatan Tingkah Laku, 2). Pendekatan Pilihan Rasional. 3). Pendekatan kelembagaan. 4). Pendekatan Feminisme. 5). Pendekatan Interpretasi. 6). Pendekatan Marxisme dan, 7). Pendekatan Normatif.

⁹¹ I Ketut Putra Erawan, Materi Perkuliahan ‘Skoep dan Metodologi Ilmu Politik’ Tahun Ajaran 2006/2007.

yang pasti yakni kita bisa belajar dari temuan-temuan mereka. Karena saya yakin bahwa setiap pendekatan politik lahir dari proses dan pergumulan intelektual yang cukup panjang, melelahkan dan penuh dengan pencarian pendekatan yang terbaik dalam ilmu politik. Pendekatan yang baik dalam ilmu politik adalah pendekatan yang selalu dipertanyakan, digugat, digoyahkan, bahkan diruntuhkan karena terlanjur hegemonik dan nyaris tak memberi tempat bagi lahirnya ide-ide baru. Dalam konteks inilah pendekatan behavioralisme ingin dibicarakan

Gambaran pendekatan behavioralisme bisa dilacak dalam sejarah kemunculan dan perkembangannya dalam ilmu politik. Kemunculan behavioralisme tidak hanya membawa inovasi/perbaikan terhadap pendekatan tradisional. Tetapi juga ingin berbeda dalam hal metode yang digunakan, aliran pemikiran yang dianut, objek yang dijadikan kajian, basis pengetahuan serta preferensi ilmiah lainnya. Dengan kata lain, semangat perbedaan yang dia bawa merupakan pukulan yang akan berdampak merugikan para pendukung pendekatan tradisional serta juga menjadi awal dari sebuah kehancurannya.

Mengapa kehancuran? Karena kehancuran merupakan bahasa provokatif yang pantas dialamatkan kepada para pendukung pendekatan tradisional. Yang pada perkembangan selanjutnya terjadi penjungkirbalikkan paradigmatik sebagaimana terlihat dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1

Perbandingan Tradisional versus Behavioralisme

Dari Tradisionalis	Ke Behavioralis
Mengaitkan antara fakta dan nilai;	Pemisahan fakta dan nilai
Penilaian segi filsafat	Penelitian empirik
Kualitatif	Kuantitatif
Menekankan aspek histories-yuridis	Menekankan sosiologis-psikologi
Anti positivis	Positivis
Fokusnya struktur formal	Fokus pada struktur formal dan fungsi informal
Menguraikan	Menjelaskan
Etnosentrik: fagus pada Negara demokratis di Eropa	Etnosentrik; khususnya pada model Anglo-Amerika

Diolah dari, Miriam Budiarjo, *Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta, Gramedia, 1999), hlm.65; A Hoogerworf *Politikologi*, (Jakarta: Erlangga, 1985) hlm. 27; Ibrahim Ambong 'Memahami Pendekatan Tingkah Politik' *Jurnal Ilmu Politik*, No.13/1993. hlm.25.

Penjungkirbalikkan paradigma dari tradisional ke behavioralis tidak berjalan secara akumulatif sebagaimana dipahami oleh ilmuwan melainkan terjadi secara revolusi

meminjam bahasa Thomas Kuhn⁹². Dikatakan revolusi mengutip pendapat Afan Gaffar;

karena dianggap mampu menolak dan menjungkirbalikkan semua metode dan prosedur kerja dalam ilmu politik yang sudah lama diyakini oleh kalangan ilmuwan politik pada masa itu. Kaum behavioralisme percaya bahwa ilmu politik sudah mampu menjadi ilmu yang normal sebagaimana ilmu-ilmu lainnya sehingga ilmu politik dapat disejajarkan dengan ilmu alamiah. Dengan revolusi behavioralisme maka ilmu politik memiliki paradigma sebagaimana dipersyaratkan oleh sebuah ilmu normal. Dan apabila anomali ini telah berhasil menolak sebuah teori yang sudah demikian dominannya, maka kemudian terjadilah revolusi pengetahuan sebagaimana biasanya terjadi dalam ilmu-ilmu alamiah⁹³.

Sebenarnya Afan menjelaskan kerangka pikir Kuhn dalam konteks ilmu politik. Model kerangka pikir Kuhn dikenal sebagai berikut:

Paradigma → NormaScience → Anomali → Krisis → Revolusi → Paradigma⁹⁴

⁹² George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta,Rajawali,1985), hlm.4.

⁹³ Afan Gaffar 'Dari Negara Ke Negara Perubahan Paradigmna dalam Ilmu Politik' dalam Sukandirrumidi dkk (peny) *Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*, (Jogyakarta: UGM Press, 2004), hlm. 383.

⁹⁴ George Ritzes dan Douglas Goodman *Teori Sosialogi Modern*, (Jakarta; Prenada Media,2004),

PERALIHAN DARI TRADISIONALIS KE BEHAVIORALISME

Pergeseran paradigma dari tradisional ke behavioralis bukanlah tanpa pergolakan. Mengingat pendekatan tradisional menurut sejarahnya pernah mendominasi sebagian besar pemikiran politik hingga pada selesainya PD ke-2. Dominasi pendekatan tradisional cukup besar pengaruhnya karena pendekatan ini disokong oleh ilmuwan pemikir seperti Leo Strauss, Eric Voegelin, John Hallowell dan Russell Kick⁹⁵.

Kebesaran sang tokoh dan pengaruh kuat pendekatan tradisional tak bisa tertandingi lagi oleh pendekatan apapun. Logika ini dibenarkan Ambong dengan mengatakan bahwa pendekatan behavioralis yang sudah lahir pada tahun 1920-an hingga tahun 1949 belum tampak jelas, dalam arti apakah pendekatan ini mampu menjadi kenyataan untuk menggantikan pendekatan behaviorism⁹⁶.

Sekalipun ketidakjelasan masih menghantui para pemikir behavioralis. Namun rangkaian kritik dan respon dari kaum behavioralisme sebagai akibat dari ketidakmampuan pendekatan tradisional dalam menangkap realitas yang berkembang dalam masyarakat kian genjar. Hal ini, diamini oleh Mary Greisez Kweit dan Robert W Kweit dalam bukunya *Konsep dan Metode Analisis Politik*. Mary dan Robert menyebutkan dua persoalan mendasar yang tengah dihadapi oleh penganut pendekatan politik tradisional.

Pertama, selama periode Perang Dunia ke-2 telah mulai ada reaksi terhadap aspek-aspek legal pemerintahan. Pada masa itu ada beberapa kekuatan intelektual yang cenderung mendorong ilmu politik menjauh dari studi yang semata-

⁹⁵ A Hoogerworf *Politikologi*, (Jakarta: Erlangga,1985), hlm. 26

⁹⁶ Ibrahim Ambong., op.cit. hlm. 22.

*mata legalistik-normatif maupun teori dari teori murni normatif dan deduktif yang menjadi pusat perhatian disiplin pada abad ke-19. Kedua, kekuatan pragmatisme yang sangat berpengaruh sangat kuat dalam ilmu politik. Pragmatisme yang menitikberatkan bahwa ide-ide dan tindakan-tindakan hanya dapat di evaluasi melalui hasilnya, bukan melalui logikanya, konsistensinya dan seterusnya*⁹⁷.

Apa yang disampaikan oleh Mary Greisez Kweit dan Robert W Kweit, disambut dengan hangat oleh Miriam Budiarjo. Bagi Miriam, tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal karena tidak banyak memberikan informasi mengenai proses politik yang sebenarnya. Bahkan lebih bermanfaat jika mempelajari manusia serta perilaku politiknya. Kalau pun membahas lembaga formal negara, lembaga itu cenderung hanya dipandang sebagai kerangka bagi berperannya individu⁹⁸.

Mencermati sejumlah kritik terhadap pendekatan tradisional sudah barang tentu berimplikasi pada pudarnya pengaruh yang dimilikinya. Ketidakmampuannya menjawab fenomena politik yang berkembang menunjukkan bahwa pendekatan ini semakin merosot wibawanya. Kemerosotan semacam ini sangat dimungkinkan karena perkembangan fenomena jauh lebih cepat dibandingkan dengan usaha kaum intelektual menjelaskannya. Dengan kata lain, terlalu banyak gejala yang menarik, tetapi kaum intelektual pendekatan tradisional tidak mampu menjelaskannya⁹⁹.

⁹⁷ Mary Greisez Kweit dan Robert W Kweit *Konsep dan Metode Analisis Politik*. (Jakarta: Bina Aksara, 1986). hlm. 13.

⁹⁸ Miriam Budiarjo, *Demokrasi di Indoensia*, (Jakarta, Gramedia, 1999).hlm.62.

⁹⁹ Riswandha Imawan dan Ichasul Amal 'Status Mutakhir Ilmu Politik dan Upaya Membangun Martabat Manusia' dalam Sofian Effendi, Sjahri Sairin

Dari sinilah nampak limitasi pendekatan tradisional yang ditanggapi Artur Benley dengan suara keras dalam mengecam ilmu politik tradisional, yang dianggapnya mandul, terlalu formalistis dan statis karena tidak memberikan penekanan yang memadai kepada peneliti-peneliti tentang proses—suatu konsep yang sejak itu telah diserap ke dalam ilmu politik yang bersifat behavioral¹⁰⁰.

Kemampuan menyerap para ilmuwan behavioral semacam itu digenapi pula dengan kepandaian para ilmuwan politik berada di bawah pengaruh dan teladan ilmu alam dimana mereka mulai bisa membuat metode-metode yang bersifat kuantitatif dan lebih dari sekedar metode-metode yang bersifat kualitatif. Hal ini membuat mereka mampu menguraikan masalah-masalah yang mereka hadapi secara lebih lengkap, serta memecahkannya dengan penafsiran secara lebih akurat¹⁰¹. Tetapi juga, diarahkan menciptakan teori eksplanasi dan prediksi. Yaitu teori yang bisa menjelaskan dan meramalkan.

Pendekatan behavioral juga secara terang-terangan menyerukan suatu pendekatan yang lebih empirik yang sistematis, termasuk perluasan skema-skema yang bersifat klasifikasi, konseptualisasi pada beragam singkat abstraksi, penyusunan hipotesis dan pengujian hipotesis melalui data empirik¹⁰²

dan Alwi Dahlan (ed) *Membangun Martabat Manusia*, (Jogyakarta, UGM Press, 1996), hlm.455.

¹⁰⁰ Seperti legislatif, proses yudikatif, proses pembuatan keputusan, proses politik dan seterusnya S.P.Varma *Teori Politik Modern*. (Jakarta: Rajawali Press), 1995. hlm.18

¹⁰¹ S.P.Varma., *ibid.*hlm. 16.

¹⁰² Ronald Chilcote, *Teori Perbandingan Politik* (Jakarta: Rajawali Grapindo Persada, 2003), hlm. 79.

APAKAH BEHAVIORALISME ITU?

Sekalipun istilah behaviorisme pertama kali digunakan oleh Frank Kent lewat bukunya *Political Behavioral, the Heretofore Unwritten Laws Customs, and the Principle of Politics as Practised in the Unite States*. Namun pada perkembangannya behaviorisme yang diambil dari ilmu psikologi dipahami untuk membantu menjelaskan semua referensi yang berbaur data subjektif, seperti tujuan-tujuan, keinginan-keinginan, emosi maupun ide-ide dari penelitian yang dipandang ilmiah. Dengan kata lain, tujuan riset behaviorisme adalah untuk menjelaskan ‘mengapa’ orang bertingkah laku politik seperti tampak pada tingkahnya, dan mengapa, sebagian akibatnya proses-proses dan sistem-sistem politik berjalan seperti yang mereka kerjakan¹⁰³.

Perlu pula ditambahkan bahwa behaviorisme tidak hanya menyangkut tindakan-tindakan politik yang diobservasi tetapi juga persepsi, motivasi dan komponen tingkah laku lainnya yang menunjukkan identitas politik, tuntutan-tuntutan dan harapan-harapan seseorang atau sekelompok orang serta sistem-sistem kepercayaan politikanya dan tujuan-tujuannya. Meminjam istilah David Easton, inilah keutamaan dari pendekatan behaviorisme¹⁰⁴.

Ungkapan Easton tentu saja penuh makna. Karena sumbangsih terbesar Easton terhadap behaviorisme termuat dalam bukunya *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik*¹⁰⁵. Easton mengungkapkan dengan panjang lebar tentang apa yang menjadi dasar kerja dan keyakinan dari kalangan behaviorism, antara lain:

¹⁰³ Ibrahim Ambong., op.cit. hlm 23.

¹⁰⁴ Ibrahim Ambong., ibid., hlm.23.

¹⁰⁵ David Easton *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik*, (Jakarta, Bina Aksara, 1984), hlm. 9-10; Ambong, ibid, hlm. 24; Miriam Budiarmo, op.cit. hlm. 61-61.

1. **Regulasi.** Ada hal-hal yang muncul secara teratur dari perilaku politik pola manusia yang dapat ditemukan. Dan hal itu dapat diekspresikan dalam bentuk generalisasi ataupun teori dengan variable (esplanatory and predictive) yang jelas;
2. **Verification.** Validitasi dari generalisasi dan teoritisasi tersebut secara prinsip haruslah dapat diuji apakah sesuai dengan perilaku politik sehari-hari;
3. **Techniques.** Cara-cara dan mekanisme bagaimana memperoleh data janganlah diterima begitu saja. Metode tersebut umumnya diperbaiki, dan divaliditasi sehingga diperoleh metode yang tangguh untuk melakukan pengamatan, pencatatan dan analisis dari perilaku politik;
4. **Quantification.** Ketepatan di dalam mencatat data dan menjelaskan tentang temuan-temuan memerlukan pengukuran dan kuantifikasi. Akan tetapi hal itu bukanlah semata-mata dilakukan demi kuantifikasi. Dalam hal ini kuantifikasi diperlukan apabila memungkinkan dan dengan dasar objektivitas yang ada;
5. **Values.** Evaluasi etis dan analisis empirik melibatkan dua proposisi yang berbeda dan secara analitik perlu dipisahkan. Namun demikian, ilmuwan tidak dilarang untuk mengajukan proposisi baik secara tersendiri atau merupakan kombinasi dari keduanya, sepanjang hal itu dilakukan dengan baner;
6. **Systematization.** Penelitian harus dilaksanakan secara sistematis. Teori dan penelitian merupakan dua hal yang saling kait ,mengkait yang merupakan satu kesatuan dari ilmu pengetahuan. Penelitian tanpa dituntun oleh teori

maka bersifat trivial, sementara teori tidak didukung oleh data tidak ada gunanya;

7. Pure Science. Aplikasi ilmu sama pentingnya dengan pemahaman tentang teori karena keduanya merupakan bagian dari kegiatan ilmu pengetahuan. Akan tetapi memahami dan memberikan eksplanasi perilaku politik secara logis mendahului usaha untuk memanfaatkan ilmu tersebut guna menyelesaikan masalah yang praktis dalam masyarakat;
8. Integration. Karena ilmu sosial berurusan dengan keseluruhan dari kehidupan manusia maka ilmu politik tidak hanya mengindahkan temuan dari ilmu-ilmu lainnya, kecuali kalau hal itu mengganggu proses penelitian dan temuannya. Pengakuan atas hal ini menempatkan kembali ilmu politik pada posisinya seperti sediakala sehingga menempatkan ilmu politik sejajar dengan ilmu-ilmu lainnya

Delapan dasar kerja dan keyakinan memperkaya pendekatan ini sehingga dalam usahanya mengumpulkan data sangat maju pesat. Para ilmuwan behavioralis begitu antusias mempelajari banyak aspek yang semula tidak tertangkap dalam pengamatan mereka. Bahkan analisisnya pun bergeser dari lembaga ke manusia atau pelaku (aktor), dari struktur ke proses. Para penganut pendekatan ini tidak hanya mempelajari lembaga-lembaga, tetapi juga manusia-manusia dalam lembaga itu, bagaimana mereka menjalankan tugasnya, dan bagaimana mereka memandang perilaku mereka sendiri. Dalam rangka itu, pula muncul penelitian mengenai rekrutmen politik, kepemimpinan, masalah perwakilan, sosialisasi politik dan seterusnya¹⁰⁶.

¹⁰⁶ Miriam Budiarjo, op.cit. hlm. 62.

Keberhasilan behavioralisme sebagai sebuah paradigma bersamaan dengan munculnya beberapa gejala lain di Amerika Serikat yang sangat menopang dan kondusif bagi perkembangan ilmu politik itu sendiri. Adapun gejala tersebut menurut Afan Gaffar adalah. *Pertama*, munculnya kecenderungan untuk melakukan *reseach survey* dalam rangka pengumpulan pendapat umum tentang sesuatu hal, terutama yang menyangkut Pemilihan Presiden, Anggota Senat, Pemilihan Gubernur dan isu-isu tertentu yang sangat strategis bagi masyarakat Amerika. *Kedua*, yang ikut menopang bagi perkembangannya behavioralisme tersebut adalah dimanfaatkannya kemajuan teknologi modern, terutama telepon dan komputer. Hal yang *ketiga* yang ikut memberikan andil bagi munculnya revolusi behavioralisme adalah komitmen dari berbagai pihak, seperti kalangan swasta dan pemerintah Amerika menyediakan dana yang diperlukan untuk penelitian. Lembaga-lembaga pilantripos seperti *Ford Foundation*, *Rockefeller Foundation* dan lain-lannya dari kalangan swasta dan *Fulbright* dari Kongres Amerika memainkan peranan yang sangat besar dalam menyediakan dana¹⁰⁷.

IMPLIKASI SERTA KRITIK YANG MENYERTAINYA

Perkembangan pendekatan behavioralis semakin pesat seiring dengan pencapaian statusnya sebagai suatu pendekatan dalam studi politik. Ada banyak tokoh yang terkenal dibidang ini. Sebutlah nama penganut behavioralis, seperti, V.O Key, David B Trauman, Gabriel Almond, Robert Dahl, Laswell, Herbert A Simon, David Easton dan Hans Morgenthau¹⁰⁸ tidak hanya itu. Pamor pendekatan behavioralism semakin berkibar dijagat peta

¹⁰⁷ Afan Gaffar op.cit. hal. 387.

¹⁰⁸ Ibrahim Ambong., op.cit. hlm 21

pemikiran politik dengan banyak para kaum behavioralis yang menempati posisi kunci dalam *American Political Science Association* (APSA), seperti David Trauman (1964), Gabriel Almond (1965-1966) dan Robert Dahl (1966-1967).

Posisi semacam itu tidak hanya memberikan keuntungan. Tetapi juga ada yang menjulukinya dengan sebutan era yang dipandang oleh sebagian ahli politik sebagai salah satu revolusi di bidang studi politik yang mempunyai implikasi yang cukup besar. Afan Gaffar secara tegas mengatakan bahwa behaviorisme mampu membawa perubahan yang besar dan sangat radikal terhadap ilmu politik. adapun beberapa implikasi yang dimunculkan oleh behaviorisme terhadap ilmu politik adalah;

Pertama, perbendaharaan istilah politik berkembang dengan pesat. Istilah-istilah seperti input-komversi-output merupakan sesuatu yang menarik dan baru bagi ilmuwan politik pada tahun 1950-an, demikian juga dengan demand-support-interest aggregation, interest articulation, political socialization, political communication, political recruitment, rule making, rule application, rule adjudication, system analisis, system theory dan seterusnya;

Kedua, sejumlah teori baru berhasil dikembangkan. Sebagai contoh yang sangat konkrit adalah *theory of the political system* yang dikemukakan oleh David Easton, dan juga Gabriel Almond. Demikian pula teori-teori yang menyangkut elemen sistem politik seperti misalnya, sosialisasi politik, komunikasi politik, kelompok kepentingan, dan sebagainya. Belum lagi yang menyangkut teori tentang teori perilaku politik secara individual maupun kelompok;

Ketiga, penyempurnaan metodologi. Dengan behaviorisme kalangan ilmuwan politik semakin memiliki kepercayaan diri yang sangat kuat dengan mencoba mengembangkan metodologi yang

lebih canggih. Pengukuran-pengukuran yang merupakan salah satu syarat mutlak bagi kuantifikasi semakin disempurnakan dengan menggunakan metode kerja dari ilmu-ilmu lainnya;

Keempat, ilmu politik mengalami perkembangan dengan pesat. Ilmu politik yang pada mulanya masih merupakan gejala Amerika dan Eropa kemudian berkembang masih dengan pesat melawati batas kedua benua tersebut. Di beberapa Universitas Asia, Afrika dan Amerika Latin muncul pengkajian ilmu politik yang dilakukan dengan cara yang sistematis dan dengan penelitian yang sangat luas¹⁰⁹.

Selain Afan, Meriam juga mencatat betapa besar sumbangsih pendekatan behavioralis terhadap perkembangan studi ilmu perbandingan politik di Amerika Serikat.

Sebesar apa pun dampak dan sumbangan yang diberikan behaviorisme terhadap perkembangan ilmu politik bukan berarti tanpa kritik. Sejumlah kalangan ilmuwan politik sendiri menyodorkan keberatan terhadap pendekatan behaviorisme itu sendiri. Somit dan Tannehaus (1967) mengidentifikasi beberapa keberatan-keberatannya tersebut, antara lain:

1. ilmu politik tidak dapat, dan tidak akan dapat menjadi sains dalam artian yang sebenarnya;
2. perilaku manusia yang nampak hanya memperlihatkan sebagian dari gejala. Orang-orang anti behaviorisme percaya bahwa bagia yang terbesar dari kehidupan manusia adalah yang tidak tampak;
3. apapun manfaat dari kuantifikasi, akan tetapi kuantifikasi itu tidak akan mencapai hasil yang sesungguhnya;

¹⁰⁹ Afan Gaffar., *op.cit.* hlm. 387-388.

4. memang benar bahwa setiap penelitian harus didukung oleh teori. Akan tetapi kalangan behavioralis di dalam kenyataan teori dan konsep yang mereka gunakan jauh melebihi perkembangan data itu sendiri;
5. di dalam banyak hal sejumlah persoalan politik melibatkan masalah moral dan etika. Dengan demikian, persoalan bahwa ilmu politik haruslah bebas nilai sangat sulit untuk dapat di pertanggungjawabkan;
6. pendekatan yang bersifat interdisipliner memang sangat diperlukan. Akan tetapi hendaknya diperhatikan bahwa jangan sampai karena pendekatan yang seperti itu maka mengakibatkan setiap disiplin akan kehilangan identitas dan jati dirinya¹¹⁰.

Keberatan semacam itu terus bermunculan, dari berbagai pihak, yaitu dari kaum tradisional, dari para *post behavioralis* dan dari para neo Marxis. Ilmuwan tradisional menyerang behaviorisme dengan argumen bahwa behaviorisme terlalu steriel, karena menolak untuk memasukkan nilai-nilai dan norma-norma dalam penelitian. Mereka tidak berusaha mencari jawaban atas pertanyaan yang mengandung nilai, semisal apakah sistem politik demokrasi baik atau tidak? Juga lontaran kritik bahwa pendekatan behavioralis tidak mempunyai relevansi politik dan buta terhadap masalah-masalah sosial¹¹¹.

Lebih lanjut disebutkan bahwa pendekatan behavioralis juga menimbulkan kecaman atas tindakannya yang memisahkan antara ilmu politik dengan filsafat politik; bahwa ia mengingkari kemungkinan suatu ilmu politik praktis; bahwa ia menggantikan bahasa politik yang biasa dengan suatu kamus teknis; dan bahwa ia

¹¹⁰ Afan Gaffar, *Ibid.* hlm. 488-389.

¹¹¹ Miriam Budiarjo, *op.cit.* hlm.65.

mempunyai kriteria untuk hal-hal yang eksak, tetapi tidak untuk relevansi¹¹².

Sekalipun behaviorisme banyak diujungi kritik karena limitasi yang melekat pada dirinya. Bagi Afan tidak jadi soal. Pasalnya pendekatan behaviorisme telah mampu mewujudkan sebuah sejarah baru dalam ilmu politik dengan prestasi yang sangat mengagumkan dan sampai sekarang pun juga masih belum bisa dilepaskan dari jejaknya dalam ilmu politik.

Behaviorisme sebagai sebuah pendekatan telah berhasil mengundang segenap perhatian para ilmuwan sosial dan politik serta khalayak ramai. Baik yang mendukung maupun menolaknya. Sebab ilmu pengetahuan hanya bisa hidup bila suatu penemuan ditolak, lantas dicari gantinya. Ilmu hanya bisa dikembangkan kalau suatu penemuan diterima dan dipakai sampai suatu saat ia lekang terkuras zaman, dan hilang kemampuannya menjelaskan fenomena. Karena itu, sikap—tolak—terima rasional oleh 'the scientific community' adalah suatu gerak maju di dalam kultur keilmuan suatu bangsa¹¹³.

¹¹² A Hoogerworf., op.cit. hlm. 26. Serangan terus berlanjut terhadap pendekatan Behavioralis dengan mengatakan: (1) Bahwa ilmu politik sangat kompleks, untuk memungkinkan konstruksi generalisasi ilmiah yang mengindikasikan penyebab dan akibat; (2) mereka menyatakan bahwa manusia bertindak atas dasar kemauan bebas, dan karenanya tidaklah mungkin untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab perilaku itu; (3). Mereka menunjukkan fakta bahwa manusia berperilaku berbeda bila mereka itu mengetahui akan menjadi pusat studi, oleh karena itu apa yang diobservasi oleh ilmuwan tidaklah nyata-nyata merupakan cerminan yang akurat dari perilaku manusia; Mary Greisez Kweit dan Robert W Kweit, op.cit. hlm. 17.

¹¹³ Vedi Haiz Politik, *Budaya dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Gramedia dan Yayasan SPES, 1992), hlm. vi.

BAGAIMANA DI INDONESIA?

Jika Afan mengatakan bahwa behavioralisme telah berhasil melintasi benua dan pengaruhnya terlihat di sejumlah Universitas yang dibarengi dengan munculnya sejumlah pusat kajian atau mata kuliah yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran behavioralisme tentu saja ada benarnya. Jejak behavioralisme semacam ini mulai terasa di Indonesia setelah banyak sarjana-sarjana ilmu politik yang belajar di luar negeri terutama di Amerika Serikat kembali ke tanah air dengan membawa banyak literatur¹¹⁴ yang tidak lagi bersifat yuridis tetapi sangat behavioralis.

Nuansa yang bersemangatkan behavioralistik sebagaimana diutarakan di atas sangat baik direkam oleh Alfian dalam bukunya *Ilmu Politik di Indonesia*. Ia menulis dengan memulai kata:

Sebagaimana dapat dilihat, ada banyak mata kuliah sangat dipengaruhi oleh mereka dengan berusaha untuk menerapkan pendekatan-pendekatan sosiologis pada studi ilmu politik, dan sampai derajat tertentu juga menghadirkan pendekatan psikologis. Di kalangan sarjana ilmu politik, kedua pendekatan itu sangat empirik dan sangat diminati oleh para ilmuwan politik yang ingin belajar pada studi tingkah laku politik¹¹⁵.

Pada level yang lebih praksis, argumen Alfian bisa ditelusuri secara empirik melalui kurikulum pendidikan perguruan tinggi yang tersebar di bumi Indonesia. Hampir semua perguruan tinggi negeri maupun swasta yang memiliki fakultas ilmu sosial

¹¹⁴ Alfian dan Hidayat Mukmin (ed) *Perkembangan Ilmu Politik di Indonesia serta Peranannya dalam Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*, (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 5,

¹¹⁵ Alfian dalam bukunya *Ilmu Politik di Indonesia*. (Jogyakarta: UGM Press, 1982), hlm.34.

dan ilmu politik secara jelas membuat matakuliah yang berbau behaviorisme, misalnya Sistem Sosial Indonesia, Sistem Politik Indonesia. Pemilu dan Kepartaian, Perilaku Memilih, Metode Kuantitatif dan seterusnya. Kesemuanya ini merupakan pelebagaan paham behaviorisme di tanah air.

Pelebagaan matakuliah yang berbau behaviorisme di universitas bisa juga dibaca sebagai bagian dari keberhasilan para ilmuwan Amerika dalam mendidikan sarjana-sarjana politik Indonesia. Tak bisa dipungkiri meningkatnya pangaruh ahli-hali ilmu politik Amerika mencapai sekitar 75% sampai 80% dari seluruh dunia ahli politik yang ada di dunia. Karena itu, menarik untuk dikedepankan pengaruh ilmuwan Amerika terhadap sarjana politik Indonesia dengan bersandar pada basis argumentasi Riswandha Imawan. Riswandha mengatakan:

bila saya berhadapan dengan kesenjangan antara teori dan fakta maka saya akan lebih mempercayai fakta daripada teori. Asumsinya ada dua. Pertama, saya tidak percaya bahwa sesuatu bisa terjadi tanpa ada sebab-sebab awalnya. Segala sesuatu pasti ada penyebabnya. Karena itu, untuk dapat membangun satu model penjelasan yang memadai, pengamatan terhadap fakta yang muncul setiap saat harus dilakukan. Kedua, politik dimainkan oleh tingkah laku individu yang pada akhirnya mempengaruhi pembentukan satu politik¹¹⁶.

Penjelasan Riswandha menunjukkan bahwa betapa dalamnya pengaruh behaviorisme dalam pembentukan intelektual di dunia kampus. Penyebaran ide-ide ataupun gagasan lewat kampus sangat efektif pengaruhnya dan semakin kokoh

¹¹⁶ Riswandha Imawan, *Membedah Politik Orde Baru*, (Jogyakarta; Pustaka Pelajar), 1997. hlm.viii.

fondasi sekaligus sangat banyak penganutnya. Keyakinan dan kepercayaan bersama atas keunggulan pendekatan behavioralisme dalam komunitas ilmuwan tak bisa diragukan lagi. Keyakinan semacam inilah yang membuat Afan berkomentar dengan mengatakan bahwa bagi orang yang pernah menyaksikan bagaimana ilmu politik tahun 1960-an dan tahun 1970-an tentu saja harus mengakui dengan sejujurnya bahwa behavioralisme telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan ilmu politik¹¹⁷ termasuk di Indonesia***.

¹¹⁷ Afan Gaffar., op.cit. . hlm. 389.

BAB V

BEHAVIORALISME DAN TRADISI ‘SCIENTIFIC’ DALAM ILMU POLITIK

Ahmad Husni Mubarak*

Topik pemberitaan media massa nasional maupun lokal akhir-akhir ini banyak diwarnai oleh hasil-hasil *survey* politik dan *polling* lembaga-lembaga riset. Penggunaan metode *survey* dan *polling* dalam melihat persepsi masyarakat terhadap figur atau fenomena politik tertentu adalah ciri utama semakin menggejala dan populernya pendekatan behaviorisme dalam melihat dan memprediksi fenomena politik. Bahkan, metode perhitungan cepat (*quick count*) dan *exit pool* sebagai bentuk kekinian pendekatan behaviorisme dalam melihat tingkat dukungan politik menjadi tren setiap momentum pemilihan umum.

Ciri utama pendekatan ini adalah melihat perilaku individu yang bisa teramati dengan mata telanjang dan kemudian mengambil kesimpulan umum (*generalisasi*) dari sampel yang diambil. Dalam ranah keilmuan, generalisasi sampel yang dilakukan kaum behavioralis sering mendapat kritikan tajam khususnya dari mazhab post-behavioralis dan kritis. Namun,

* Dosen Institut Agama Islam Hamzanwari-Anaji, Lombok Timur

terlepas dari kritikan-kritikan tersebut pendekatan behavioralisme telah memberi warna dalam pendekatan-pendekatan ilmu politik terhadap fenomena politik.

Hadirnya pendekatan behavioralisme menjadi salah satu pendekatan utama dalam ilmu politik dewasa ini, membuat pilihan instrumentasi dan pendekatan dalam penelitian politik lebih beragam. Tulisan di bawah ini akan mencoba mengupas pendekatan behavioralisme yang -jika dilihat dari fenomena politik akhir-akhir ini ditanah air- cenderung semakin menguat dan populer. Sebelum menyelami behavioralisme lebih dalam, tulisan ini akan dimulai dari sejarah singkat kemunculan “paradigma” dalam ilmu pengetahuan dan merebaknya wabah positivisme di kalangan ilmuwan sosial menjelang abad XX yang berimbas pada muncul dan berkembangnya pendekatan behavioralisme dalam ilmu politik.

Behavioralisme: Anak Kandung *Positivism*

❖ *Apa Itu Paradigma?*

Muncul dan berkembangnya behavioralisme menjadi pendekatan yang mandiri dalam ilmu politik tidak bisa dilepaskan dari perkembangan ‘revolusi ilmu-ilmu sosial’ dari pendekatan tradisionalistik ke pendekatan positivistik, khususnya menjelang awal abad ke-20. Munculnya Thomas Kuhn dengan konsep paradigma sebagai basis normal tidaknya sebuah “ilmu” menjadi pemicu lahirnya perubahan besar-besaran, terutama *frame* pemikiran, dalam ilmu politik. *The Structure of Scientific Revolutions* menghangatkan kembali perdebatan abadi antara kalangan positivis dan anti positivis, dan seketika menjadi kitab suci para ilmuwan untuk mengukur kesahihan sebuah ilmu, apakah

sebuah “pengetahuan” bisa disebut sebagai “ilmu” (*normal science*) jika ia tidak memiliki paradigma sendiri atau sebaliknya.

Dalam *The Structure of Scientific Revolutions*, Thomas Kuhn tidak secara eksplisit mendeskripsikan paradigma. Thomas Kuhn mengkonsepsikan paradigma sebagai seperangkat keyakinan mendasar yang memandu tindakan-tindakan kita, baik tindakan sehari-hari maupun dalam penyelidikan ilmiah. Sejalan dengan itu Guba (1990) mengartikan paradigma sebagai “*a set of assumptions and beliefs concerning*”. Singkatnya paradigma adalah sebuah cara pandang atau *world view* atau *dhominant theory* yang tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya, karena masyarakat pendukung paradigma tersebut telah memiliki keyakinan dan kepercayaan akan kebenaran paradigma itu.

Hadirnya paradigma kemudian memberi peluang terjadinya penyimpangan (*anomali*) terhadap pemikiran atau paradigma yang telah mapan. Apabila sebuah paradigma baru tersebut mampu menolak atau menjungkirbalikkan paradigma yang telah mapan kemudian paradigma baru tersebut menjadi *dominant paradigm (dominant theory)* maka saat itulah terjadi revolusi ilmu pengetahuan, dan itu artinya ilmu tersebut mengalami perkembangan atau kemajuan (Kuhn:2002). Paradigma menjadi seperangkat keyakinan dasar dalam mengungkapkan hakikat kebenaran ilmu yang sebenarnya dan bagaimana cara untuk mendapatkannya (Salim, 2001 : 34).

Hadirnya paradigma dalam suatu cabang ilmu berdampak tidak hanya pada ranah metodologis ilmu itu, namaun juga menyentuh dimensi-dimensi filosofis ilmu pengetahuan. Perkembangan dan pengakuan eksistensi sebuah paradigma di tentukan oleh empat dimensi filosofis, yaitu dimensi ontologis, dimensi epistemologis, dimensi axiologis dan dimensi metodologis (Salim, 2001 : 34-35). Dimensi-dimensi ini menjadi tiang

penyangga bagi eksistensi ilmu itu sendiri (Siswomihardjo, 2003 : 12-13), yang meliputi :

- a) Dimensi ontologis. Dimensi ini meliputi apa hakikat ilmu itu, apa hakikat kebenaran dan kenyataan yang inheren dengan pengetahuan ilmiah, yang tidak terlepas dari persepsi filsafat tentang apa dan bagaimana 'ada' itu. Dimensi ini bergerak pada jawaban atas pertanyaan *apa sesungguhnya realitas dari sesuatu yang dapat diketahui ?* atau *apa sebenarnya hakikat realitas ?*. Singkatnya, dimensi ontologis melihat dan mempertanyakan sesuatu yang nyata (*what is the nature of reality*).
- b) Dimensi epistemologis. Dimensi ini melihat hakikat hubungan antara peneliti dengan obyek yang diteliti. *Apakah sebenarnya hakikat hubungan peneliti dengan obyek yang ditemukan ? Apakah peneliti memiliki jarak dan nilai netralitas terhadap obyek penelitiannya ?*
- c) Dimensi axiologis, meliputi nilai-nilai (*values*) yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan. Dalam dimensi ini titik permasalahannya adalah peran nilai-nilai dalam suatu kegiatan penelitian.
- d) Dimensi metodologis. Seorang peneliti harus menentukan metode atau cara yang digunakan dalam menemukan suatu kebenaran.

Setiap ilmu yang normal harus memiliki keempat dimensi filosofis tersebut, karena keempat dimensi itulah yang akan membedakannya dengan paradigma ilmu yang lain. Keempat dimensi ini diturunkan dari paradigma yang digunakan seorang peneliti ketika melihat, memahamai dan mencari kebenaran sebuah obyek penelitian. Sejauhmana konsistensi penggunaan dan jawaban mendasar atas pertanyaan keempat dimensi filosofis itu

akan menunjukkan posisi paradigma yang digunakan peneliti dan pada akhirnya menentukan letak pemikiran dan keilmuan seorang peneliti.

Namun, harus diakui penerapan paradigma secara ketat dalam ilmu sosial, seperti yang diasumsikan Kuhn terjadi dalam ilmu alam, menjadi cukup rumit. Hal ini karena obyek-obyek penelitian dalam ilmu politik adalah manusia dan fenomena sosial politik yang memiliki karakteristik berbeda dan dibatasi ruang dan waktu. Manusia bukanlah obyek yang bergerak dan berinteraksi karena keniscayaan hukum kausalitas alamiah *perse*, seperti halnya benda-benda alam. Oleh karena itu, penafsiran paradigma dalam ilmu-ilmu sosial hendaknya tidak lepas dari dunia kehidupan sosial itu sendiri, sebab disini peneliti tidak bisa berfikir lepas dari dunia kehidupan sosial itu, seperti yang bisa dilakukan dalam wilayah ilmu-ilmu alam (Hardiman : 2003).

❖ ***Dari Tradisi Tradisionalisme ke Positivisme***

Perkembangan ilmu politik melewati rentang waktu panjang, bahkan berakar jauh pada pemikiran-pemikiran klasik era Yunani kuno yang dikenal dengan *tradisi athenian*. Namun, menjelang abad ke XX terjadi 'kegoncangan paradigma' yang luar biasa, tidak hanya di internal ilmu politik tetapi juga ilmu-ilmu sosial lainnya. Kegoncangan paradigma ilmu sosial di picu oleh tulisan Auguste Comte *The Course of Positive Philosophy* yang menguraikan garis besar prinsip-prinsip positivisme yang masih dipakai hingga saat ini. Perkembangan pendekatan behavioralisme dalam ilmu politik dewasa ini kemudian tidak bisa dilepaskan dari 'kegoncangan paradigma' dalam ilmu sosial tersebut. Untuk itu, sebelum masuk lebih jauh pada apa itu behavioralisme dan konsekuensinya terhadap ilmu politik, pemaparan kelahiran dan hakikat positivisme menjadi keharusan, sebagai ibu kandung behavioralisme dalam ilmu politik.

Seperti tertulis diatas, kegoncangan paradigma ilmu sosial di picu oleh kegelisahan akan keberhasilan pendekatan-pendekatan ilmu alam yang sukses menjelaskan gejala-gejala alamiah dalam bentuk teori yang *aplicable* tanpa batasan ruang dan waktu. Maka, para ilmuwan sosial menyakini hal yang sama akan terjadi jika prinsip-prinsip ilmu alam diterapkan secara penuh dalam fenomena sosial. Pandangan filosofis inilah yang kemudian melahirkan logika positivisme dalam ilmu sosial. Selain Comte, Ernst Mach, dan para filsuf di Vienna Circle di pertengahan tahun 1920-an, Alfred Ayer dan Carl Hempel adalah tokoh-tokoh yang mempopulerkan positivisme.¹¹⁸ Logika positivisme, yaitu sebuah model epistemologi yang didalam langkah-langkah progresinya menempuh jalan melalui observasi, eksperimentasi dan komparasi, sebagaimana diterapkan dalam ilmu alam. Singkatnya, positivisme mengadopsi prinsip-prinsip kerja dari ilmu alam, sehingga masyarakat dan kehidupan sosialnya harus diandaikan sebagaimana layaknya benda dan fenomena alam. Maka dari itu, pengandaian-pengandaian dasar dari ilmu alam harus dipahami.¹¹⁹

Pertama, peneliti harus mengambil jarak dengan obyek yang diteliti. Proses dan fenomena sosial harus dianggap sebagai obyek belaka, layaknya proses dan fenomena alamiah. *Kedua*, adanya distansi penuh, dimana peneliti harus menghadapi obyek penelitiannya sebagai 'fakta netral', data yang lepas dari unsur-unsur subyektifitasnya. *Ketiga*, Peneliti dapat memanipulasi obyek dalam eksperimen untuk menemukan pengetahuan menurut model

¹¹⁸ Untuk lebih jelasnya lihat David Marsh and Gerry Stoker (eds.). 2002. *Theory and Methods in Political Science (second edition)*. New York: Palgrave Macmillan. Lihat juga F. Budi Hardiman. 2003. *Melampaui Positivisme dan Modernitas: Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*. Yogyakarta: Kanisius. dan Agus Salim. 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana

¹¹⁹ Budi Hardiman. *Op. Cit.* hal 22.

sebab akibat. *Keempat*, hasil manipulasi adalah sebuah pengetahuan tentang hukum-hukum yang pasti (niscaya). *Kelima*, teori yang dihasilkan merupakan sebuah pengetahuan yang bebas dari kepentingan (*value free*), yang dapat diterapkan secara instrumental dan universal. Prinsip-prinsip ini kemudian menjadi pedoman dasar aliran positivis dalam penelitian sosial, hanya saja obyeknya bukan lagi fenomena alam melainkan realitas sosial.

Di samping itu, positivisme mewajibkan tiga kategori statemen teoritik dasar, yaitu¹²⁰: *pertama*, sebuah pernyataan teoritik harus bersifat tautologis. Artinya, pernyataan teoritik yang diajukan harus memiliki makna spesifik dan tunggal terhadap fenomena yang diteliti atau konsep. *Kedua*, bersifat empiris, dimana pernyataan harus dapat diuji melalui observasi yang teratur untuk melihat apakah pernyataan itu benar atau salah. *Ketiga*, pernyataan yang tidak masuk pada dua kategori sebelumnya tidak memiliki makna analitik. Singkatnya, positivis melihat bahwa analisa harus berbasiskan pada data yang bersifat tautologis dan empirik, sehingga ranah metafisika, teologi, estetika, filsafat, dan sebagainya dianggap tidak menjadi wilayah kerja positivis karena bersifat abstrak.¹²¹

Dengan penerapan prinsip-prinsip ilmu alam dan prinsip kerja yang ketat, ilmu-ilmu sosial yang dihasilkan diharapkan mampu menjadi gambaran tentang realitas sosial yang bebas nilai (*value free*), yakni bebas dari interpretasi subyektif oleh penelitiannya. Dengan prinsip itu, setiap peneliti, sepanjang memenuhi prosedur-prosedur positivis tersebut, akan menghasilkan pengetahuan yang netral, *aplicable* tanpa dibatasi ruang dan waktu karena bersifat instrumental dan universal. Bersama dengan itu, positivisme melahirkan konsekuensi

¹²⁰ David Marsh and Gerry Stoker (eds.). *op. cit.* hal. 46.

¹²¹ *Ibid.* 46.

metodologis, dimana metode-metode kuantitatif menjadi instrumen tunggal yang sah dalam melakukan penelitian. Sehingga, dengan kuantifikasi data itu, ilmu-ilmu sosial berharap mampu meramalkan dan mengendalikan proses sosial, sesuai dengan semboyan Auguste Comte *savoir pour prevoir*.¹²²

Behavioralisme : Revolusi atau *Movement* dalam Ilmu Politik ?

Seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya, kemunculan dan perkembangan behaviorisme dalam ilmu politik tidak lepas dari semakin populernya pendekatan positivis di kalangan ilmuwan sosial. Maka, ilmuwan politik mengikuti arus historis mainstream paradigma ilmu sosial itu dengan mengadopsinya dalam pendekatan ilmu politik. Adalah Charles E. Merriem yang menanam benih-benih Mazhab Behaviorisme. Merriem beranggapan bahwa pendekatan *Historical Comparative* yang digunakan oleh kaum Tradisional tidak mampu menjadikan ilmu politik menjadi “ilmu” yang sebenarnya.

Hal ini karena ilmuwan politik tradisional terlalu mengabaikan faktor-faktor psikologis, sosial dan ekonomi dalam kehidupan manusia, lebih banyak bersifat spekulatif dan tidak mampu melakukan prediksi dan eksplanasi.¹²³ Karena itu, Ia menganjurkan dilakukannya rekonstruksi metodologi agar dapat mencapai hasil yang baik dalam teori dan praktek¹²⁴. Munculnya pemikiran ini, tidak lepas dari wabah positivisme yang pada masa itu mulai di aplikasikan secara penuh dalam ilmu-ilmu sosial lain, diluar ilmu politik.

¹²² Budi Hardiman. *op. cit.* 23.

¹²³ Affan Gaffar. *Dari Negara ke Negara: Perubahan Paradigma Dalam Ilmu Politik*. Hal. 23

¹²⁴ *Ibid.* Hal 19

Ketika itu pula Meriem menyadari kemungkinan munculnya *Psikologi Politik* sebagai sebuah cara untuk mengetahui lebih dalam tentang fenomena-fenomena politik yang terjadi. Untuk keperluan itu, ilmu politik harus meminjam metode kerja ilmu psikologi dan statistika agar ilmu politik dapat menjadi ilmu yang sebenarnya.¹²⁵ Ide Charles E. Meriem ini mendapat dukungan dari kalangan ilmuwan politik muda saat itu, diantaranya: Goerge G.E. Catlin dan William Bennet Munro.

Catlin percaya bahwa ilmu politik dapat dipelajari secara ilmiah, sehingga ilmu politik akan mampu melakukan prediksi. Karena itu ilmu politik harus meminjam tata kerja ilmu ekonomi. Sementara Munro sangat yakin bahwa ilmu politik akan mampu menemukan fundamental laws dari perilaku politik, untuk itu, ilmu politik harus membebaskan dirinya dari afiliasi dengan ilmu filsafat dan sosiologi, dan menoleh ke cara kerja ilmu fisika.¹²⁶ Tentu saja gerakan Charles E. Meriem ini mendapat tantangan yang sangat kuat dari ilmuwan politik lainnya, terutama William Y. Elliot, Edward S. Corwin, Luther Gullick dan Charles A. Beard. Akan tetapi pemanfaatan metode-metode empiris dan kuantitatif tampaknya sangat sulit dibendung lagi dalam ilmu politik.¹²⁷

Menjelang Perang Dunia II terjadi dislokasi sosial di Eropa yang ditandai dengan terjadinya emigrasi besar-besaran, terutama

¹²⁵ *Ibid.* hal. 23. Seperti dijelaskan di sebelumnya, banyak penolakan terhadap eksistensi ilmu politik sebagai ilmu yang mandiri, Karena pendekatan *historical comparative* yang digunakan tidak mampu memprediksi gejala-gejala politik di masa mendatang.

¹²⁶ *Ibid.* Hal. 23-24.

¹²⁷ Dibandingkan dengan Sosiologi, ilmu politik terlambat mengakomodasi nilai-nilai positivisme dalam metodologi ilmu politik, yang memulainya sejak masa Auguste Comte dengan karya monumentalnya *The Course of Positive Philosophy* (1830-1842) yang terdiri dari enam jilid. Agus Salim. *Op. Cit.* Hal. 39

warga Jerman, ke Amerika Serikat. Sementara di dunia keilmuan terjadi pemanfaatan metode-metode empiris, kuantitatif dan teknologi baru, komputer. Walaupun terdapat penggunaan teknik serta pergeseran dari deskripsi yang bersifat impresionistik ke arah deskripsi faktual yang rinci, ilmu politik masih berjalan melalui jalur tradisional. Karena metode-metode baru tersebut hanya dipakai guna memungkinkan adanya suatu deskripsi dan analisa yang lebih tepat terhadap paradigma-paradigma politik yang masih berlaku dan bertahan. Hasil maksimum periode ini adalah digunakannya “analisa isi (*content analysis*)” oleh Harold Lasswell, serta adanya perhatian serius pada teori psiko-analisa, yang dianggap sebagai penghubung antara kaum behaviorisme awal dan kemudian.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II dorongan akan penggunaan metode yang benar-benar empiris dan kuantitatif menguat kembali. Sejumlah penulis seperti Harold Lasswell, Gabriel Almond, Robert Dahl, David Easton, Karl W. Deutsch, dan lain-lain mengembangkan banyak pola teoritis dan rancangan penelitian serta mencoba membangun apa yang mereka sebut *teori empiris* atau *kausal*.¹²⁸ Pada awal 1950-an pendekatan sistemik, teori pembuatan keputusan, pemusatan perhatian pada komunikasi serta pembaharuan teoritis yang lain timbul. Analisa kasus secara sistemik, analisa isi, survey-survey, eksperimen, kumpulan analisa statistik, model-model kausalitas, dan sejumlah peralatan penelitian lainnya semakin besar digunakan oleh para ilmuwan behavioralis.

¹²⁸ S.P. Varma. *Op. Cit.* Hal. 88

Apakah yang sebenarnya menjadi dasar keyakinan kaum behavioralis?. Albert Somit & W. Tannenhaus mengidentifikasikannya sebagai berikut¹²⁹ :

1. Ilmu politik pada akhirnya akan mampu menjadi sains yang sebenarnya yang mampu melakukan prediksi dan eksplanasi.
2. Ilmu politik haruslah memusatkan perhatiannya pada hal-hal atau gejala-gejala yang secara actual dapat diamati, yaitu apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan oleh individu.
3. data semestinya diproses secara kuantitatif dan “temuan” haruslah didasarkan atas kuantifikasi.
4. Penelitian seharusnya berorientasi kepada teori dan diarahkan oleh teori.
5. Ilmu politik haruslah mendukung “penelitian murni”, karena bagaimanapun juga penelitian sejenis ini yang mendahului penelitian yang aplikatif.
6. Benar tidaknya nilai-nilai tertentu, seperti demokrasi, persamaan, dan kebebasan tidak dapat diuji karena hal itu melewati batas kajian ilmiah.
7. Ilmu politik haruslah menjadi lebih interdisiplinary.
8. Ilmu politik harus terus-menerus sadar dan kritis akan methodologinya.

Sementara David Easton,¹³⁰ salah satu pendiri behaviorisme menjelaskan lebih detail tentang dasar kerja dan keyakinan dari kalangan behavioralis, yaitu :

¹²⁹ Sebagaimana dikutip dalam Affan Gaffar. *Op. Cit.* Hal 30

1. *Regularities*. Ada hal-hal yang muncul secara teratur dari perilaku politik manusia yang dapat kita temukan. Dan hal itu dapat kita ekspresikan dalam bentuk generalisasi ataupun teori dengan variable eksplanatory dan predictive yang jelas.
2. *Verification*. Validitas dari generalisasi dan teoritisasi tersebut secara prinsip haruslah dapat diuji apakah sesuai dengan perilaku politik sehari-hari-hari.
3. *Techniques*. Cara-cara dan mekanisme bagaimana memperoleh data janganlah diterima begitu saja. Metode tersebut umumnya bersifat problematik dan oleh karena itu harus dicek diperbaiki, divalidasi sehingga diperoleh metode yang tangguh untuk melakukan pengamatan, pencatatan, dan analisa dari perilaku politik.
4. *Quantification*. Ketetapan didalam mencatat data dan penjelasan tentang temuan-temuan memerlukan pengukuran dan kuantifikasi. Akan tetapi hal itu bukanlah semata-mata dilakukan demi kuantifikasi. Dalam hal ini kuantifikasi diperlukan apabila memungkinkan dan dengan dasar obyektifitas yang ada.
5. *Values*. Evaluasi etis dan analisa empirik melibatkan dua proposisi yang berbeda. dan secara analitik perlu dipisahkan. Namun demikian, ilmuwan politik tidak dilarang untuk mengajukan proposisi baik secara tersendiri atau merupakan kombinasi dari keduanya, sepanjang hal itu dilakukan dengan benar.
6. *Systematization*. Penelitian harus dilaksanakan secara sistematis. Teori dan penelitian merupakan dua hal yang saling kait mengkait yang merupakan satu kesatuan dari ilmu

¹³⁰ David Easton. *Contemporary Political Theory Series*. 1965. Printice Hall, NJ. Hal. 7 dalam Affan Gaffar. *Ibid*. Hal. 30.

pengetahuan. Penelitian tanpa dituntun oleh teori maka bersifat trival, sementara teori yang tidak didukung oleh data tidak ada gunanya.

7. *Pure Science*. Aplikasi ilmu sama pentingnya dengan pemahaman tentang teori karena keduanya merupakan bagian dari kegiatan ilmu pengetahuan. Akan tetapi memahami dan memberikan eksplanasi perilaku politik secara logis mendahului usaha untuk memanfaatkan ilmu tersebut guna menyelesaikan masalah yang praktis dalam masyarakat.
8. *Integration*. Karena ilmu sosial berurusan dengan keseluruhan dari kehidupan manusia maka ilmu politik tidak dapat menghindari dari temuan ilmu-ilmu lainnya, kecuali kalau hal itu mengganggu proses penelitian dan temuannya. Pengakuan atas hal ini menempatkan kembali ilmu politik pada posisinya seperti sediakala sehingga menempatkan ilmu politik sejajar dengan ilmu-ilmu lainnya.

Keberhasilan behaviorisme menjadi paradigma dan menjadi salah satu mazhab dalam ilmu politik tidak terlepas dari gejala-gejala lain di Amerika Serikat yang sangat menguntungkan kaum behavioralis,¹³¹ yaitu: *Pertama*, munculnya kecenderungan untuk melakukan riset survey dalam rangka pengumpulan pendapat umum tentang suatu hal, terutama mengenai pemilihan presiden, gubernur, serta isu-isu sensitive bagi Amerika. *Kedua*, Dimanfaatkannya teknologi modern, terutama telephone dan computer. Dengan telephone survey dapat dilakukan dengan cepat dan dapat menjangkau responden dari berbagai kalangan masyarakat. Sementara komputer mampu menganalisis data dengan cepat dan akurat. *Ketiga*, adanya komitmen dari berbagai pihak, baik swasta maupun pemerintah untuk menyediakan dana

¹³¹ Affan Gaffar. *Op. Cit.* Hal. 31-32.

penelitian. *Keempat*, munculnya media massa, terutama media massa sosial dan politik (jurnal, laporan penelitian dan sebagainya) sebagai implikasi dari berdirinya lembaga-lembaga bantuan keuangan tersebut (*foundations*) sehingga hasil-hasil penelitian dapat diketahui oleh masyarakat luas.

Akibat dari perkembangan teknik matematis, analisa variasi, dan strategi kuantifikasi yang meluas, menyebabkan ilmuwan-ilmuwan behavioralis “agak” melupakan teori-teori yang ada. Akibatnya pada tahun 1960-an ketika pertikaian antar kaum tradisional dan behavioralis mulai mereda, justru terjadi perpecahan didalam tubuh kaum behavioralis sendiri. Kaum behavioralis terpecah dalam dua aliran, yakni **Behavioralis Teoritis** (*Theoretical Behavioralis*) yang terus membuat jaringan teori tanpa dikendalikan oleh penemuan-penemuan substantive, dan **Behavioralis Positif** (*Positive Behavioralis*), yang asyik dengan metode-metode sehingga mengabaikan teori dan ilmu politik itu sendiri.¹³²

Pertikaian yang terjadi antara dua kelompok tersebut semakin keras, bahkan melebihi apa yang terjadi antara kaum tradisional dan behavioralis dekade sebelumnya. Diakhir 1960-an kaum behavioralis teoritis mengecam kaum behavioralis positif, karena dianggap hanya tertarik terutama pada perilaku manusia dalam sifat-sifatnyanya yang umum dan biasa, mengabaikan kegunaan dan validitas cerita-cerita impresionis dari suatu fenomena, memaksakan penggunaan model-model procrustean terhadap suatu realita, sehingga mereka sendiri terpedaya dengan relevansi dari penelitian-penelitian mereka, membuat-buat logat khusus yang menghalangi komunikasi dan replikasi serta membuat karangan yang berbelit-belit dan tumpul, dan tidak mampu

¹³² S. P. Varma. *Op. Cit.* Hal. 89.

memanfaatkan rekomendasi kebijaksanaan dan sebagainya.¹³³ Bagi Haans & Becker pertikaian ini justru membuktikan kegagalan kaum behavioral untuk berbuat sesuai dengan metodologi mereka sendiri¹³⁴.

Kontribusi Behavioralisme Terhadap Ilmu Politik

Revolusi behavioralisme membawa perubahan luar biasa dalam dunia ilmu politik, baik dalam metodologi, teori, maupun dalam pengembangan dan penyempurnaan teknik-teknik dan alat-alat penelitian. S.P. Varma¹³⁵ membagi sumbangan behavioralisme dalam dua bidang, *pembentukan teori* dan *teknik-teknik penelitian*. Dalam bidang pembentukan teori, kaum behavioralis mampu mengembangkan pendekatan-pendekatan dan teori baru dengan sempurna, seperti pembuatan keputusan (*decision making*), teori permainan (*game theory*), model lapangan (*field model*), dan lain-lain. Sumbangan terbesar behavioralisme dalam bidang ini adalah teori pemungutan suara (*voting behaviour*), yang berpengaruh besar dalam penelitian terhadap prilaku.

Dalam bidang teknik-teknik penelitian behavioralisme berhasil mengembangkan teknik analisis isi, analisa kasus, wawancara dan pengamatan, dan statistik. Perbaikan besar dalam bidang ini terjadi dalam hal penelitian sample (*sample survey*), yang merupakan instrumen dasar penelitian-penelitian sosial dengan sendirinya, serta mendorong tercapainya serangkaian hasil, tidak hanya dalam pengembangan teknik-teknik tambahan bahkan dalam hal pembentukan teori-teori yang bersifat menjelaskan.

¹³³ *Ibid.* Hal 89-90.

¹³⁴ S.P. Varma *Ibid.* Hal. 90.

¹³⁵ S.P. Varma. *Ibid.* Hal. 90-91

Sementara menurut Affan Gaffar¹³⁶ sumbangan behavioralisme terhadap ilmu politik antara lain:

1. *Perbendaharaan istilah ilmu politik berkembang dengan pesat.* Kaum behavioralis memperkenalkan istilah-istilah baru yang sebelumnya tidak dikenal oleh kalangan ilmuwan politik, seperti *Input-Konversi-Output* diperkenalkan tahun 1950-an, *demand, support, interest aggregation, interest articulation, political socialization, political communication, political recruitment, rule making, rule application, rule adjudication, system analysis, system theory*, dan lain-lainnya kemudian menjadi istilah standar dalam ilmu politik.
2. *Sejumlah teori baru berhasil dikembangkan.* Penelitian-penelitian yang dikembangkan oleh kalangan behavioralis berhasil mengembangkan sejumlah teori-teori baru. David Easton misalnya, berhasil mengembangkan *teori system analysis, teori cybernetic, teori civic culture, dan teori of voting*. Sementara Gabriel Almond dan Sidney Verba berhasil mengembangkan teori pembangunan politik (*political development*).
3. *Penyempurnaan Metodologi.* Pemanfaatan teori-teori ilmu eksak oleh kalangan behavioralis dalam melakukan penelitian, terutama matematika dan statistik, mampu mengembangkan apa yang disebut *polytometric* sebagaimana *econometric* yang dikembangkan oleh ilmu ekonomi.
4. *Ilmu Politik mengalami perkembangan pesat.* Ilmu politik yang pada awalnya terkonsentrasi di Amerika dan Eropa berkembang dengan pesat melewati batas kedua benua itu. Sekarang ini ilmu politik tidak hanya diajarkan di Universitas-

¹³⁶ Affan Gaffar. *Op. Cit.* Hal.33-34.

universitas Amerika dan Eropa, tetapi juga di Universitas-universitas Asia, Afrika, Australia dan Amerika Latin.

Berbagai sumbangan pendekatan behaviorisme telah memberi warna baru bagi perkembangan ilmu politik, terutama dalam peng-adopsi-an teknik dan cara kerja ilmu statistik dalam kajian ilmu politik. Penggunaan teknik-teknik statistika ini juga mampu mempercepat analisa terhadap fenomena politik yang terjadi dalam bentuk yang singkat, padat dan lugas. Perkembangan yang luar biasa dari behaviorisme ini secara langsung berdampak pula terhadap penggunaan metode kuantitatif, sebagai teknik penelitian dalam ilmu politik. Terlepas dari perdebatan didalamnya, peng-adopsi-an teknik-teknik statistika dan cara kerja kuantitatif sangat kontributif dalam mempercepat dan mempermudah pemahaman dan analisa masalah-masalah politik yang sedang terjadi.

Kritik dan Masa Depan Behaviorisme

Perkembangan Behaviorisme ternyata tidak lepas dari kritik. Behaviouralisme mendapat banyak kritik dari kaum tradisional dan post-behaviouralis. Walaupun sama-sama mengkritisi, ada perbedaan di antara keduanya. Tradisionalisme menolak validitas pendekatan yang menekankan pada perilaku dan selalu mengulang kembali keyakinannya terhadap tradisi klasik ilmu politik, sedangkan post-behaviouralis menerima apa-apa yang telah dicapai pada era behaviorisme tapi berusaha mendorong ilmu politik lebih jauh lagi ke arah cakrawala baru.

Post-behaviouralis lebih berorientasi ke depan (*future oriented*), berusaha mendorong ilmu politik ke arah baru dan berusaha melengkapi yang telah dicapai pada arah yang baru dan berusaha melengkapi yang telah dicapai di masa lalu daripada

menolaknyanya. Bagi penganut post-behaviouralis, ini adalah revolusi sejati, bukan sekedar reaksi; suatu kejadian, bukan pemeliharaan; suatu reformasi, bukan kontra reformasi; suatu gerakan dan kecenderungan intelektual. Albert Somit dan William Tannenhaus¹³⁷ mengidentifikasi keberatan- keberatan tersebut, antara lain:

1. Ilmu politik tidak dapat dan tidak akan dapat menjadi sains dalam arti yang sebenarnya. Karena ilmu politik berbeda dengan ilmu - ilmu lainnya yang mampu melakukan eksperimentasi. Terlampau banyak variabel yang harus dikontrol ketika orang harus menjelaskan gejala politik.
2. Perilaku manusia yang tampak hanya memeplihatkan sebagian dari gejala. Individu yang satu dapat memperlihatkan perilaku yang berbeda tentang hal yang sama. Guna memahami apa yang dimaksudkan oleh mereka, maka kita harus mengungkapkan pula apa yang tidak tampak. Kalangan anti behavioralisme percaya bahwa bagian yang terbesar dari kehidupan manusia adalah yang tidak tampak.
3. Apapun manfaat dari kuantifikasi, namun kuantifikasi itu tidak akan mencapai hasil yang sesungguhnya. Kuantifikasi mempersyaratkan konsep yang sangat dapat dipercaya dan pengukuran yang sangat canggih. Akan tetapi sejumlah gejala sosial dan politik tidak dapat dikuantifikasi.
4. Memang benar bahwa setiap penelitian harus didukung oleh teori. Akan tetapi, kalangan behavioralis di dalam kenyataannya teori dan konsep yang mereka gunakan jauh melebihi perkembangan data itu sendiri. Di lain pihak, ketika bicara tentang perlunya sebuah teori yang besar, di dalam

¹³⁷ Dalam Affan Gaffar. *Ibid.* Hal.35-37

kenyataannya teori yang muncul pada tingkat menengah saja belum tentu dapat diterima oleh semua pihak di dalam ilmu politik. Ilmu politik sangat berhasil mengembangkan konsep, akan tetapi tidak semuanya dapat di operasionalisasikan.

5. Dalam banyak hal, sejumlah persoalan politik melibatkan masalah moral dan etika. Oleh karena itu, ilmu politik juga memiliki tradisi untuk mempertanyakan sesuatu hal atas dasar nilai moral dan etika tersebut, apakah sesuatu hal itu benar atau salah. Dengan demikian, persoalan bahwa ilmu politik haruslah bebas nilai sangat sulit untuk dipertanggungjawabkan.
6. Pendekatan yang bersifat interdisiplin memang sangat diperlukan. Akan tetapi, hendaknya diperhatikan bahwa jangan sampai karena pendekatan yang seperti itu maka mengakibatkan setiap disiplin akan kehilangan identitas dan jati dirinya.

Kritik yang dilontarkan kalangan post-behavioralis memberi stimulus baru bagi kalangan behavioralis meningkatkan akurasi prediksi dan mengembangkan teori-teori baru yang lebih operatif dan applicable. Disamping itu, penggunaan data-data statistik yang semakin banyak digunakan dalam berbagai analisa masalah sosial politik maupun ekonomi politik menjadi pertanda penyebaran pendekatan behavioralisme yang semakin massiv dan penting.

Apa yang terjadi dewasa ini memberi gambaran bahwa pendekatan behavioralisme mampu beradaptasi dengan berbagai kritikan yang dilontarkan. Behavioralisme mampu menepis anggapan para kritikus bahwa behavioralisme hanyalah sebuah *move* atau gerakan dalam ilmu politik. Berbagai kontribusi teoritik dan instrumentasi riset politik menjadi sumbangan yang sangat

berarti dan penting dari behaviorisme dalam khazanah perkembangan ilmu politik dewasa ini.

Catatan Akhir

Sejarah kelahiran dan perkembangan behaviorisme memang tidak bisa di lepaskan dari fenomena keilmuan pada periode awal abad ke-20 akibat dari perkembangan ilmu sosial yang lain, khususnya ekonomi, psikologi dan sosiologi. Perang Dunia kedua yang diikuti dengan eksodus ilmuwan politik Jerman ke Amerika Serikat turut mempercepat perkembangan behaviorisme. Seperti telah dijelaskan diatas, bahwa bagaimanapun juga behaviorisme tidak bisa dilepaskan dari massifikasi perkembangan positivisme pada bidang ilmu sosial lainnya, yang menjadi akar behaviorisme dalam ilmu politik.

Keinginan kuat dari para ilmuwan politik untuk menghasilkan instrumen eksplanasi dan prediksi yang akurat dan tepat layaknya ilmu-ilmu sosial lainnya menjadi karakteristik dasar dari perkembangan behaviorisme. Meskipun kemudian behaviorisme (baca: positivisme) mendapat banyak kritikan, khususnya dari kalangan ilmuwan mazhab kritis, toh perkembangan behaviorisme tidak terbendung. Patut di catat bahwa faktor kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadi faktor penting yang turut mempengaruhi perkembangan pendekatan ini. Tidak saja dalam perkembangan penyebarannya tetapi juga pada variasi teori dan metode pencarian data. Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa teori-teori kritis hanya mampu menunjukkan kelemahan pendekatan behaviorisme tetapi tidak mampu memberi solusi dalam melakukan prediksi, layaknya pendekatan behaviorisme.

Dalam konteks Indonesia, pemilu 2004 menjadi tonggak penting perkembangan metode-metode behaviorisme dalam analisa politik. Metode Survey dan Quick Count -dua diantara sekian banyak metode yang berakar pada behaviorisme- menjadi populer. Terlepas dari perdebatan ontologis ilmu, behaviorisme telah membuktikan dirinya mampu menjadi instrumen utama melihat, menganalisa dan memprediksi fenomena politik di Tanah Air, setidaknya terbaca telanjang di media massa saat ini.***

BAB VI

BEHAVIORALISME DAN PARA PENANTANGNYA

Tunjung Sulaksono*

Pendahuluan

Berbicara tentang behaviorisme, maka tidak bisa tidak, kita juga harus berbicara tentang perkembangan ilmu politik di Amerika, tempat di mana pendekatan tersebut lahir. Sampai saat ini pun, behaviorisme masih merupakan orientasi dominan dalam ilmu politik kontemporer di Amerika, meskipun sebelum kebangkitan behaviorisme pada dekade 1930-an, ilmu politik telah didominasi oleh berbagai pendekatan yang berbeda, yang berbasis pada sejarah politik, studi terhadap konstitusi dan prosedur legalistik, dan struktur legal dari berbagai macam institusi seperti halnya legislatif, eksekutif, maupun lembaga peradilan.

Jika kita simak perkembangan awal disiplin ilmu ini di Amerika, terutama di di perempat terakhir abad ke 19, maka terlihat bahwa fokus kajian ilmu politik di negara tersebut adalah pada negara dan lembaga-lembaga negara. Penempatan studi

* Dosen Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah, Jogjakarta

tentang negara dan lembaga-lembaga negara sebagai fokus kajian ini banyak dipengaruhi oleh pengalaman ilmuwan-ilmuwan Amerika yang belajar di universitas-universitas di Jerman yang memang mengajarkan ilmu politik sebagai *Staatswissenschaft* (ilmu tentang negara) dalam konsep yang tertata dan terstruktur. Itulah mengapa pada awalnya ilmu politik di Amerika juga bernuansa formalistik dan institusional¹³⁸. Namun demikian, semua upaya tersebut dilakukan untuk mendapatkan sebuah cabang ilmu yang otonom dari sejarah dan filsafat moral, dua cabang ilmu yang di banyak negara dianggap sebagai orangtua kandung ilmu politik.

Pada masa itu, banyak ilmuwan merasa bahwa ilmu politik belum memiliki metode ilmiah yang mapan, yang seharusnya dimiliki oleh suatu cabang ilmu yang mandiri. Selain itu, banyak pola-pola ulangan (*recurrent patterns*) dalam proses politik yang belum banyak digunakan untuk menganalisis fenomena sosial dan politik agar temuan-temuan yang didapatkan dapat digeneralisasi secara luas. Oleh karena itu diharapkan ilmu politik memiliki cara-cara baru untuk meneliti gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa politik secara lebih sistematis, bersandarkan pengalaman-pengalaman empiris dan dengan menggunakan kerangka teoritis yang terperinci dan ketat¹³⁹.

Upaya dari para ilmuwan untuk mendapatkan ilmu yang mandiri, sistematis dan reliabel ini pada puncaknya terjadi pasca Perang Dunia II. Sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap perkembangan ilmu politik yang dianggap stagnan tersebut pada akhirnya memunculkan gerakan behaviorisme yang

¹³⁸ Political Science, Encyclopedia Britannica, Retrieved March 25, 2004, from Encyclopedia Britannica Premium Service, <http://www.britannica.com/eb/article?eu=117541>

¹³⁹ Miriam Budiardjo. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.hal. 4.

mengupayakan agar mutu ilmu politik dapat meningkat dan mendapat kemajuan pesat sebagaimana yang telah diraih oleh ilmu-ilmu lain yang telah lebih dahulu mapan. Yang kemudian dilakukan oleh pendukung gerakan behavioralisme ini (kaum behavioralis) adalah meminjam berbagai pendekatan terutama statistik dan metode kuantitatif, hingga akhirnya ilmu politik dapat mencapai kemajuan yang pesat dan mendominasi ilmu politik di Amerika Serikat.

Menurut seorang mantan ketua *American Political Science Association*, salah satu asosiasi ilmu politik palng terkemuka di Amerika, pendekatan behavioralisme dapat menuju pada puncak dominasi setidaknya karena enam hal, yaitu: inspirasi dari *Chicago School*, imigrasi sejumlah besar ilmuwan Eropa (terutama Jerman) dengan latarbelakang sosiologi Eropa ke Amerika pada dekade 30-an, gerakan beberapa ilmuwan politik ke dalam posisi administratif dan politik selama Perang Dunia II, pengaruh dukungan berbagai yayasan dalam mendorong berbagai riset dalam perilaku politik, meningkatnya perkembangan metode survey dalam beberapa studi politik misalnya dalam hal perilaku pemilih, serta terakhir adalah hasil kerja dari *Social Science Research Council* yang pimpinannya bersimpati terhadap pokok-pokok pikiran behavioralisme¹⁴⁰.

Namun dalam perjalanannya untuk menjadi alairan dominan dalam kerajaan ilmu politik di Amerika, ditemui banyak tantangan dari beberapa tradisi keilmuan yang berbeda yang mencoba mendongkel behavioralisme dari singgasananya. Tulisan ini akan berupaya mengupas alasan-alasan yang berada di balik ketidakpuasan yang muncul dan juga konsekuensi-konsekuensinya. Hal itu akan menunjukkan bagaimana dan mengapa kelemahan dan kegagalan analisis behavioralisme telah menciptakan ruangan lain bagi kebangkitan pendekatan-pendekatan baru atau gerakan-

¹⁴⁰ Political Science, Encyclopedia Britannica. *ibid*.

gerakan ideologis baru dalam ilmu politik. Paradigma-paradigma baru tersebut antara lain *post-behavioralisme*, *post modernisme*, dan *perestroika-glasnots*. Sebagai kesimpulan, akan terlihat bahwa pendekatan ini masih tetap dominan dalam ilmu politik di Amerika Serikat meskipun ada banyak usaha yang dilakukan ilmuwan dengan latarbelakanga tradisi keilmuan yang lain untuk mengganti kedudukannya tersebut.

Behavioralisme: Kemunculan dan Prinsip-Prinsip Keilmuannya

Munculnya gerakan kaum behavioralis di Amerika ini dipicu oleh adanya ketidakpuasan di antara sekelompok ilmuwan politik yang merasa bahwa pendekatan-pendekatan sebelumnya di dalam ilmu politik tidak menyediakan ilmu pengetahuan yang cukup reliabel atau dapat diandalkan. Menurut para ilmuwan tersebut, ilmu yang reliabel hanya dapat didapatkan melalui studi terhadap perilaku yang dapat diobservasi dan dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah¹⁴¹. Di bawah pradigma baru ini, penggunaan metode ilmiah akan memuaskan semua persyaratan ilmiah yang pernah diajukan oleh Karl Popper, yaitu: *testability*, *falsifiability*, *neutrality*, dan *tentativity*¹⁴².

¹⁴¹ Alan Isaak. 1985. *Scope and Methods of Political Science: An Introduction to the Methodology of Political Inquiry*. Homewood, Ill.: Dorsey Press, 1985.

¹⁴² Testability adalah suatu kondisi di mana suatu test secara objektif dan feasibel dapat didesain untuk menentukan apakah suatu persyaratan terpenuhi atau tidak. Dalam defnisi ini hipotesis dapat diuji melawan data empirik. Falsifiability bermakna bahwa pengetahuan ilmiah bersifat rentan dan dapat salah. Dalam konsep Neutrality, subjek harus tidak terlibat dalam mempelajari objek studinya. Terakhir, istilah tentatif berasumsi bahwa

Semangat dan pilar-pilar behavioralisme ini terkristalisasi dalam serangkaian prinsip yang menjadi dasar berfikir dan bertindak dari para pendukungnya, yang kemudian disebut sebagai *Behavioralism Creed* (Kredo Behavioralisme). Prinsip yang diyakini dalam kredo tersebut adalah: (1) Ilmu politik pada akhirnya akan menjadi ilmu pengetahuan yang memiliki kemampuan untuk memprediksi dan menjelaskan; (2) Ilmu politik harus berkonsentrasi pada fenomena-fenomena politik yang dapat diobservasi, yaitu apa yang sudah dilakukan atau dikatakan; (3) Data harus dikuantifikasikan dan temuan harus berdasar atas data yang dapat dikuantitatifkan; (4) Riset harus berorientasi pada teori dan diarahkan oleh teori; (5) Ilmu politik harus jujur dan tidak memihak baik dalam menjalankan riset yang murni maupun dalam rangka mencari solusi atas problem sosial; (6) Kebenaran atau kesalahan nilai (demokrasi, kesetaraan, kebebasan, dsb) tidak dapat dijustifikasi dengan ilmu dan berada di luar jangkauan penilaian ilmu; (7) Ilmuwan politik harus bersifat lebih interdisipliner; dan (8) Ilmu politik harus lebih memiliki kesadaran diri dan selalu bersikap kritis terhadap metodologinya¹⁴³.

Akibat dari ekspansi behavioralisme ini, pengaruh kuat dari ilmu ekonomi serta asumsi-asumsi individual, dan mungkin juga menguatnya ketidakpuasan terhadap kapasitas *explanatory* (menjelaskan) yang lemah dari pendekatan-pendekatan sebelumnya, beberapa ilmuwan politik mulai berusaha

setiap teori adalah tidak sempurna dan perangkat yang sifatnya berubah-ubah, dan sebagai konsekuensinya, dia dapat digantikan oleh teori lain. Lihat dalam Ricci, David. 1984. *The tragedy of political science: politics, scholarship, and democracy*. New Haven: Yale University Press.

¹⁴³ Albert Somit and Joseph Tanenhaus. 1967. *The Development of American Political Science*, Boston: Allyn and Bacon pp. 177-179.

menjelaskan fenomena sosial dan politik melalui pendekatan-pendekatan metodologis yang dikembangkan dalam ilmu ekonomi, seperti ekonometri, *rational choice* dan *game theory*.

Generasi baru ilmuwan politik ini menganggap behavioralisme dan metodenya lebih menarik karena dua alasan. *Pertama*, ilmuwan politik merancang metode untuk menjauhkan mereka dari filsafat politik normatif. Mereka mencapai tujuan ini dengan menggunakan ungkapan: “*best means*” untuk menjelaskan perilaku aktor dalam mengejar suatu tujuan akhir. *Kedua*, para ilmuwan ini menemukan suatu cara yang cukup powerful untuk menjawab generalisasi dalam hal perilaku aktor¹⁴⁴.

Selanjutnya, untuk mencapai tujuan ini, pada dasarnya para behavioralis mengembangkan dua pendekatan metodologis yang berbeda dalam rangka membuat generalisasi. *Pertama*, para ilmuwan ini mengimplementasikan secara eksetensif penggunaan teknik-teknik ekonometri dan statistik. Dengan mendekomposisi dunia ke dalam bidang yang disederhanakan (*workable chunks*), para behavioralis berupaya untuk mengkonstruksi struktur logis yang mengkoneksikan dan menghubungkan variabel-variabel untuk menjelaskan fenomena tertentu. Tujuan akhir mereka adalah untuk mengukur dan mengkalkulasikan derajat kausalitas yang ada di antara dua atau lebih variabel. Hal ini membuat mereka mampu mengkonfirmasi atau menolak (menyangkal) hipotesa-hipotesa terhadap perilaku aktor-aktor atau institusi-institusi¹⁴⁵.

¹⁴⁴ Aldo F. Ponce, *The Behavioralist Empire and its Enemies: a Comparative Study of Successes and Dissatisfactions in American Political Science*, Department of Economics, University of Connecticut, aldo.ponce@uconn.edu.

¹⁴⁵ Alan Isaak, *op.cit.*

Pendekatan *kedua*, yang seringkali disebut *rational choice*, berdasar pada asumsi rasionalitas, yang melihat aktor sebagai *utility-maximizers*. Pada kondisi ini, manusia atau aktor politik akan berbuat sesuatu yang menurut rasionalitasnya paling memberikan keuntungan, atau minimal, memberikan resiko yang paling kecil. Pendekatan ini bersifat individual secara metodologis, meskipun fokusnya bukan pada pilihan individual tetapi pada agregasi pilihan individual¹⁴⁶.

Lewat penggunaan matematika dan teknik deduktif, mereka berupaya mengkonstruksi suatu model yang dapat menjelaskan dan memprediksikan perilaku dan membuat generalisasi atas tipe-tipe fenomena-fenomena politik. Model dengan kekuatan *explanatory* yang lebih kuat akan menggantikan model-model sebelumnya, yang kemudian makin tidak populer karena jangkauan dan kemampuan *explanatory*-nya yang terbatas. Praktik-praktik dan penggunaan yang berulang atas metode tersebut telah menyebabkan para ilmuwan *rational choice* menyempurnakan model, teori, dan prediksi-prediksi mereka¹⁴⁷. Dengan argumen ini, kaum behavioralis menyatakan bahwa

¹⁴⁶ Margaret Levi. 1997. A Model, A Method, and A Map: Rational Choice in Comparative and Historical Analysis. In Mark Lichbach and Alan Zuckerman, (eds), *Comparative Politics. Rationality, Culture, and Structure*. Cambridge: Cambridge University Press.

¹⁴⁷ David Lalman, Joe Oppenheimer, and Piotr Swistak. 199). Formal Rational Choice Theory: A Cumulative Science of Politics. Dalam Ada Finifter, (ed), *Political Science: The State of The Discipline II* (pp. 77-100). Washington DC: APSA.

pengetahuan bersifat kumulatif dan dicapai melalui penggunaan metode-metode ilmiah¹⁴⁸.

Setelah beberapa dekade perkembangannya, pendekatan *rational choice* kemudian mencapai posisi dominan dalam ilmu politik di Amerika Serikat. *Rational choice* telah menguasai berbagai jurnal profesional ilmu politik dan biasanya beberapa kursus matematika juga dipersyaratkan bagi para mahasiswa ilmu politik. Sebagai contohnya, menurut Cohn, penghitungan yang dilakukannya mencatat sekitar 40% tulisan di APSR terkait dengan artikel ber-*genre rational choice* ini¹⁴⁹.

Selanjutnya, melalui dua metodologi ini, yaitu ekonometri dan *rational choice*, behavioralisme telah menjadi paradigma dominan dalam disiplin ilmu politik. Dominasi inilah yang kemudian terus-menerus dipertanyakan oleh ilmuwan-ilmuwan politik lain dari tradisi yang berbeda. Kritik yang dialamatkan pada dominasi behavioralisme ini berfokus pada ketiadaan atau kurangnya tanggungjawab untuk melakukan *political action* (tindakan politik) di antara para ilmuwan politik, kelemahan dalam hal epistemologi dan aspek ideologi behaviorisme, serta pembatasan-pembatasan dalam penjelasan metodologi kaum behavioralis, konsep akumulasi pengetahuan dan kurangnya pluralisme metodologis dalam organisasi ilmu politik terpenting Amerika, yaitu APSA (*American Political Science Association*), terkait dengan dominasi kaum behavioralis.

¹⁴⁸ David Easton 1969. *The New Revolution in Political Science. The American Political Science Review*, 4: pp. 1051-1061. Dalam Aldo F. Ponce. op.cit.

¹⁴⁹ Jonathan Cohn. 1999. Irrational Exuberance. When Did Political Science Forget About Politics? *New Republic*, 17: 25-31.

Tantangan Kaum Post-behavioralis

Alasan pertama ketidakpuasan terhadap behaviorisme datang dari konsep netralitas yang dianggap rigid (kaku) dalam paradigma ini. Selama dekade 1960-an, sekelompok ilmuwan, yang dipimpin oleh David Easton¹⁵⁰ menyerukan aksi yang mempertanyakan relevansi dari disiplin ilmu ini. Gerakan ini kemudian dikenal sebagai *post-behavioralism*. Para ilmuwan ini percaya bahwa dengan dimilikinya pengetahuan, maka harus ada tanggungjawab untuk melakukan suatu aksi. Berdasarkan atas asumsi ini, maka kelompok ini yang dikenal sebagai kaum *post-behavioralist*, mengkritik berpangkutangnya kaum behavioralis dalam menghadapi krisis sosial dan politik yang dialami yang dihadapi dunia internasional selama tahun-tahun tersebut. Gerakan ini mencapai puncaknya pada akhir dekade 60-an ketika pengaruh berlangsungnya Perang Vietnam dan kemajuan-kemajuan teknologi persenjataan dan diskriminasi ras dan melahirkan gejolak-gejolak sosial yang luas¹⁵¹.

Easton dan kelompoknya juga mendeklarasikan ketidakpuasannya atas penggunaan metode pinjaman dari ilmu alam yang dianggap berlebihan. Easton melihat sesuatu yang ironis, bahwa di dalam paradigma behaviorisme, metode dan teknik-teknik tersebut lebih penting daripada substansinya sendiri. Selanjutnya, Easton berargumentasi bahwa jika salah satunya harus dikorbankan, maka lebih penting untuk tetap relevan dan bermakna bagi masalah-masalah sosial kontemporer yang urgen daripada canggih dalam perangkatnya¹⁵².

¹⁵⁰ David Easton 1969. *The New Revolution in Political Science. The American Political Science Review*, 4: 1051-1061.

¹⁵¹ Miriam Budiardjo. *op.cit.*

¹⁵² David Easton. *op.cit.*

Miriam Budiardjo kemudian merangkum dan mengemukakan pokok-pokok pikiran *post-behavioralisme* ini yang antara lain: (1) Dalam usaha mengadakan penelitian yang empiris dan kuantitatif, ilmu politik menjadi terlalu abstrak dan tidak relevan dengan masalah sosial yang dihadapi. Padahal relevansi adalah lebih penting dibanding dengan penelitian yang cermat; (2) Karena penelitian terlalu bersifat abstrak, maka ilmu politik justru kehilangan kontak dengan realitas-realitas sosial. Padahal seharusnya ilmu politik harus melibatkan diri dalam usaha mengatasi krisis-krisis yang dihadapi manusia; (3) Penelitian mengenai nilai-nilai harus merupakan tugas ilmu politik, dan bukannya ditanggalkan; dan (4) Para cendekiawan mempunyai tugas yang sifatnya historis dan unik untuk melibatkan diri dalam usaha-usaha mengatasi masalah sosial yang muncul. Pengetahuan yang dimilikipara ilmuwan membawa konsekuensi berupa tanggungjawab untuk bertindak, terlibat, dan berkomitmen untuk mencari jalan keluar atas krisis yang dihadapi¹⁵³.

Meskipun pokok-pokok pikiran kaum *post-behavioralist* tersebut menurut penilaian penulis sangat luhur dan sudah pada tempatnya, karena mengingatkan semua ilmuwan politik untuk tetap memiliki komitmen dalam menyelesaikan permasalahan sosial dan politik di sekitarnya sebagai tanggung jawab keilmuannya, namun masalah utama dalam yang dihadapi dalam mendiskusikan apa dan bagaimana *post-behavioralism* ini adalah aliran ini tidak dapat didefinisikan sebagai suatu gerakan yang koheren di dunia akademik Amerika.

Sayangnya, selain hanya dari beberapa rujukan yang dihasilkan oleh para penulis dari aliran ini, kita tidak dapat berargumentasi dengan berlandaskan suatu keyakinan yang mencukupi, bahwa gerakan yang disebut sebagai *post-*

¹⁵³ Miriam Budiardjo. Op.cit. hal. 7-8.

behavioralism ini pernah ada dalam disiplin ilmu politik¹⁵⁴. Bahkan *post-behavioralism* sejauh ini hanya dapat dikatakan ada sebagai bagian dari era behavioralisme yang kemudian diikuti oleh suatu era di mana para ilmuwan politik melaksanakan berbagai penelitian dengan berbagai cara yang berbeda dan metodologi yang agak berbeda yang telah mendampingi pendekatan baru ini. Ketiadaan metodologi alternatif dan organisasi profesi yang mampu mengikat kaum post-behavioralis dalam satu wadah yang bersifat kohesif pada akhirnya menghilangkan dampak dari pendekatan baru ini di dalam dunia akademika Amerika. Sehingga meskipun mereka berupaya mengajukan alternatif pendekatan lain, namun behaviorisme tetap kokoh berdiri sebagai pendekatan *mainstream* dalam ilmu politik di Amerika.

Tantangan Kaum Post-Modernis

Mungkin serangan paling berhasil terhadap doktrin behavioralis adalah dengan berfokus pada asumsi dasarnya dan prinsip-prinsip dasarnya: konsep akumulasi pengetahuan, prosedur explanatory dan metodologi serta asumsi epistemologis dan idiologisnya¹⁵⁵.

Pertama, istilah akumulasi pengetahuan sejak dahulu bersifat problematik bagi kaum behavioralis sendiri. Dan mungkin serangan utama atas argumen kaum behavioralis ini datang dari

¹⁵⁴ George J. Graham and George W. Carey. 1972. *The Post-Behavioral Era: Perspectives on Political Science*. New York: David McKay Company, Inc.

¹⁵⁵ Aldo Ponce.*op.cit.*

Thomas Kuhn¹⁵⁶. Kuhn berpendapat bahwa ilmu pengetahuan tidak berkembang dengan cara sepotong demi sepotong. Tetapi perkembangan keilmuan dan perkembangannya terjadi melalui revolusi pengetahuan. Kemudian menurutnya, selama revolusi pengetahuan, para ilmuwan mempersepsikan dunia riset mereka secara berbeda. Sebagai konsekuensinya, sesudah terjadinya revolusi, para ilmuwan berhubungan dengan dunia baru yang berbeda secara total berdasar pada persepsi baru mereka.

Perspektif Kuhn yang relatif revolutif dalam melihat perkembangan ilmu pengetahuan benar-benar nyaris menjangkirkan postulat perkembangan keilmuan dalam paradigma behavioralis, yang mengklaim bahwa pengetahuan terbangun secara evolutif, perlahan-lahan dari akumulasi sepotong-sepotong atas teori dan data yang relevan yang kemudian melengkapi tubuh ilmu pengetahuan. Meskipun teori kumulatif kaum behavioralis jelas kemudian menjadi subjek dari kritik Kuhn, namun ilmu sosial sendiri secara umum menurut Kuhn diindikasikan belum memiliki satu paradigma sama sekali. Ilmu politik, dengan demikian, menurut hitungan Kuhn masih berada dalam tahap *prescientific* (belum memiliki derajat ilmu).

Untuk memperjelas hal ini, Kuhn mendukung teorinya dengan menggunakan istilah persepsi, yang menentukan suatu revolusi keilmuan. Konsep yang sama telah menginspirasi ilmuwan lain dan tradisi-tradisi lain yang mengancam dominasi kaum behavioralis dalam dunia ilmu politik Amerika. Pendekatan ini yang biasanya digolongkan dalam label *post-modernism*, benar-benar berbeda dalam hal epistemologi dan pokok masalahnya yang

¹⁵⁶ Thomas S. Kuhn .1970. *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press.

dipelajarinya¹⁵⁷. Apa yang mereka semua miliki sebagai suatu kesamaan adalah penolakan dan kritisisme mereka terhadap trend (kecenderungan) *scientific* dan objektivitas dalam ilmu politik behavioralis¹⁵⁸.

Cara lain yang mungkin untuk menampilkan fitur yang sama di antara para penganut pendekatan ini adalah melalui ungkapan yang sama-sama berlaku di antara mereka, yaitu: konsep kritik¹⁵⁹. Bagi postmodernisme, terlibat dalam suatu kritik adalah berarti mencari dan mengekspos tekanan-tekanan internal, termarginalisasi, kontradiktif, dan tersembunyi dalam fenomena sosial, politik, dan ekonomi. Dengan mendalami jalan kritik ini, para ilmuwan post-modernis telah mengkritisi banyak postulat dan asumsi yang dibangun kaum behavioralis. Kritik-kritik tersebut berfokus pada aspek epistemologis, metodologis, serta ideologis dari behaviorisme.

Pertama, berfokus pada epistemologi, kaum behavioralis mempertahankan ide netralitas dan objektivitas dalam rangka menghasilkan pengetahuan. Bagaimanapun, mencapai suatu pemisahan yang lengkap antara subjek dan objek

(*the dichotomy subject-object*) telah menjadi tugas yang sulit dilakukan, dan sebagai konsekuensinya hal tersebut menjadi

¹⁵⁷ Romand Coles. 2002. Pluralization and Radical Democracy: Recent Developments in Critical Theory and Post-Modernism. In Ira Katznelson & Helner Milner, eds., *The State of the Discipline III* (pp. 286-312), New York: Norton.

¹⁵⁸ Herbert G. Reid and Ernest Yanarella. 1974. Towards a Post-Modern Theory of American Political Science and Culture: Perspectives from Critical Marxism and Phenomenology. *Cultural Hermeneutics*, 2, pp. 91-166. Dalam Aldo F.*op.cit.*

¹⁵⁹ Aldo F. Ponce. *op.cit.*

dilema bagi kaum behavioralis. Sebaliknya, kaum postmodernis tidak hanya menghilangkan dikotomi antara subjek dan objek, tetapi juga menyatakan bahwa realitas didefinisikan secara *endogenous* oleh persepsi subjek, tidak sebagaimana kaum behavioralis yang menganggap bahwa preferensi dan persepsi subjek sebagai variabel *exogenous*. Inilah yang disebut sebagai struktur preferensi (*structure of preferences*). Dengan demikian, sebagaimana kaum post-behavioralis, kaum postmodernis juga menolak istilah netralitas dan objektivitas, meskipun untuk alasan dan tujuan yang berbeda.

Definisi yang berbeda tentang realitas inilah yang kemudian mengarah pada konsepsi epistemologis pengetahuan yang berbeda. Ketika kaum behavioralis mengejar suatu pengetahuan yang objektif yang nyaris tidak mungkin didapatkan, kaum postmodernis melihat tubuh pengetahuan (dari realitas yang bersifat ganda) yang tergantung pada persepsi ganda dan interpretasi ganda dari subjek. Dengan demikian, postmodernis telah berupaya melepaskan ilmu politik dari kekakuan ala behavioralis untuk menginterpretasikan atau menganalisis fenomena politik. Penolakan kaum postmodernisme untuk menegakkan kriteria untuk menganalisis teori menurut Rosenau berimplikasi terhadap relativisme yang menawarkan interpretasi tanpa batas atas politik¹⁶⁰.

Kedua, secara ideologis, kaum behavioralis adalah pemuja aliran liberalisme Inggris. Sejak awal, kaum liberal menganggap bahwa demokrasi adalah rezim yang paling kompatibel dengan ideologi mereka dan asumsi normatif mereka. Bagaimanapun, presuposisi normatif mereka seringkali memunculkan konflik

¹⁶⁰ Rosenau Pauline. 1990. Once Again into The Fray: International relations confronts the humanities. *Millenium*, 19, pp. 83-110.

dengan ungkapan objektivitas dan netralitas, ketika temuan-temuan ilmiah mereka bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi¹⁶¹. Sehingga, agenda riset kaum behavioralis dan temuan-temuannya telah dikondisikan dan dipengaruhi oleh *framework* liberalisme. Karena asumsi-asumsi normatif ini tidak muncul dalam literatur kaum postmodernis, pendekatan ini mengizinkan para ilmuwannya untuk bekerja tanpa konstrain ini.

Ketiga, Perbedaan yang relevan antara behavioralisme dan postmodernisme tidak hanya berkaitan dengan aspek epistemologis dan ideologis, namun juga dalam aspek metodologisnya. Postmodernisme berasumsi bahwa dunia tidaklah berada dalam suatu suspensi objektif, namun menikmati properti "*meaningfulness*", yang oleh umat manusia manifestasi atas pemaknaan terhadap sesuatu tergantung pada apa yang menurut mereka cocok. Dalam konsep ini *meaning* (makna) hanya dapat dipahami ketika dunia dinilai sebagai akumulasi dari bagian-bagian yang berhubungan dengannya¹⁶². Dengan demikian, metodologi kaum behavioralis dalam mendekomposisi dunia ke dalam *workable chunks* ditantang oleh perspektif postmodernisme.

Sumber lain bagi kritik terhadap metodologi terkait dengan sifat subjek studi dalam disiplin ilmu politik, derajat rekurensi (pengulangan) eksperimen ilmiah dalam disiplin ilmu politik, serta jumlah data empirik. *Pertama*, karena kurangnya perilaku yang *predictable* (dapat diprediksi) dan sistematis dari manusia, maka untuk menggambarkan generalisasi dalam dunia politik menjadi tugas yang sangat sulit untuk dilakukan¹⁶³. *Kedua*, beberapa kritik mengklaim bahwa proposisi yang paling behavioralis justru paling jarang diuji dengan eksperimen ilmiah yang teliti. Justru, mereka

¹⁶¹ Ricci. *op.cit.*

¹⁶² *ibid.*

¹⁶³ Isaak.*op.cit.*

dianalisis hanya berdasar pada argumentasi logis dan terminologis¹⁶⁴. *Ketiga*, dalam beberapa area tertentu dengan derajat perbedaan yang sangat tinggi dalam hal tipe-tipe aktornya, demikian juga perbedaan dalam hal konstrain dan insentif yang ada di antara aktor-aktor tersebut, maka pendekatan *rational choice* dianggap telah gagal untuk membuat generalisasi yang relevan dalam mengaplikasikan asumsi *ceteris paribus*. Di dalam skenario ini, analisis seringkali tidak dapat menjelaskan lebih dari satu kasus tanpa merubah asumsi atau mengadaptasi model bagi kasus yang baru¹⁶⁵.

Terakhir, data menjadi langka bagi model yang diuji jika para peneliti tidak memiliki akses terhadap data itu atau ketika fenomena politik tertentu belum pernah terjadi secara berulang. Semua kelemahan behavioralisme ini beserta kekakuannya dikapitalisasi oleh pendekatan postmodernisme dalam rangka menemukan suatu posisi yang memungkinkan di dalam disiplin ilmu politik.

Kaum behavioralis tidak tinggal diam, dan kemudian menyerang balik argumen-argumen tersebut. Mereka berpendapat bahwa teori kritis berhadapan dengan *black boxes*, di mana tidak ada jalan untuk secara jernih mengidentifikasi hubungan kausalitas antara serangkaian kecil variabel atau aktor-aktor politik¹⁶⁶. Visi postmodernisme dalam melihat realitas telah mengarahkan kaum behavioralis untuk mempertimbangkan pendekatan ini sebagai tidak berguna dan kurang memiliki aplikasi praktis bagi para pembuat kebijakan, atau secara sederhana mengabaikan klaim-klaim kaum postmodernis. Kaum behavioralis berargumen bahwa kaum postmodern tidak memberikan input bagi para pembuat

¹⁶⁴ Ricci. *op.cit.*

¹⁶⁵ Aldo Ponce.*op.cit.*

¹⁶⁶ *ibid.*

kebijakan dan politisi untuk mengimplementasikan kebijakan. Faktanya, karena argumen ini, kaum behavioralis biasanya berpendapat bahwa aliran postmodernisme tidak memberikan sumbangan baik bagi pengetahuan kumulatif maupun dalam memahami relasi praktis yang paling sederhana tentang kausalitas di antara beberapa aktor atau variabel dalam perpolitikan.

Fakta sederhana berikut juga dapat menjelaskan mengapa postmodernisme tidak berhasil dalam mendapatkan berbagai dana penelitian, bahwa konstrain finansial juga memperlihatkan beberapa ketidakmenentuan atas masa depan postmodernisme. Akhirnya, kaum behavioralis berpendapat bahwa bahasa filosofi kaum postmodernis yang rumit, penggunaan jargon-jargon secara ekstensif, dan penyebaran teori postmodernisme yang terbatas dalam berbagai perkuliahan maupun jurnal ilmiah juga memperlemah penyebaran dan praktik-praktiknya¹⁶⁷.

Meskipun aliran postmodernis telah berupaya untuk mengisi celah-celah kelemahan behaviorisme dengan pendekatan-pendekatan epistemologis dan metodologis yang menarik dan beranekaragam, namun sayangnya mereka tidak mampu mengekspansi dan menemukan suatu posisi yang kuat dalam dunia akademik Amerika. Sehingga, ketiadaan pengetahuan yang kumulatif, ketiadaan aplikasi praktis, kekurangan finansial, penggunaan jargon secara berlebihan, dan penyebaran “ajaran” mereka yang terbatas, gagal menggantikan behaviorisme sebagai paradigma dominan dalam ilmu politik¹⁶⁸.

¹⁶⁷ Ricci. *op.cit.*

¹⁶⁸ Aldo Ponce. *op.cit.*

Gerakan *Perestroika-Glasnots*

Ekspresi ketidakpuasan ketiga datang dari gerakan spontan para ilmuwan dalam komunitas ilmu politik sendiri. Kelompok ilmuwan yang dikenal dengan nama *Perestroika-Glasnots* ini telah menantang praktik dan kebijakan APSA. Para ilmuwan yang tergabung dalam gerakan tersebut berpendapat bahwa APSA dan *flagship* jurnalnya, yaitu APSR, telah didominasi dengan visi keilmuan yang sangat sempit, yang mereka anggap justru akan bersifat destruktif bagi profesi ilmuwan politik secara keseluruhan. Visi behavioralisme dari disiplin ilmu politik terkait dengan obsesi penggunaan metode statistik dan pendekatan *rational choice*. Terkait dengan konsekuensi atas penggunaan metode statistik ini, Gregory Kasza menyatakan, penguasaan ilmu politik dengan metode dan desain riset telah memberikan preseden atas kontribusi terhadap pengetahuan tentang politik. Lalu, bagi Kasza dan kawan-kawannya, kepentingan berlebihan atas metode ini menyebabkan banyak studi menjadi tidak menarik¹⁶⁹.

Sebagai respon atas gugatan tersebut, administrasi pusat APSA bersikap cukup simpatik atas keprihatinan sekelompok ilmuwan tersebut atas sempitnya skope APSR. Asosiasi merasa bahwa hal tersebut akan dapat menyebabkan masalah bagi APSA sebagai suatu asosiasi ilmuwan politik¹⁷⁰. Melalui berbagai *channel* yang dimilikinya, APSA telah berupaya menyediakan informasi untuk menjustifikasi berbagai tindakan-tindakan dan langkah-langkah yang dilakukannya. Sebagai contoh, Ada Finifter, seorang mantan editor APSR berpendapat bahwa mayoritas kritik tersebut

¹⁶⁹ Gregory Kasza. 2000. "Technicism" Supplanting Disciplinarity Among Political Scientists. *Political Science and Politics*, 4: 737-738.

¹⁷⁰ Sven Steinmo (2000). *Perestroika/Glasnost and "Taking Back the APSR"*. *The New York Times*, November 4, 2000. dalam Aldo Ponce.op.cit.

tidak terjustifikasi¹⁷¹. Finifter menunjukkan bahwa tiap manuskrip diperiksa melalui serangkaian evaluasi yang sama-sama teliti yang dilakukan oleh sekelompok ilmuwan yang melakukan riset analog. Menurutnya, jumlah reviewer bagi naskah yang diajukan ke APSR sudah sangat banyak. Terakhir, Finifter berargumentasi bahwa para pemrotes biasanya hanya memasukkan sedikit naskah saja dan tidak ada bukti bahwa penerimaan atas naskah mereka lebih rendah dibanding dengan penulis lain¹⁷².

Dalam rangka mendapatkan bukti terbaik atas pengakuan dua kelompok di atas yang berseberangan pendapatnya, perlu dilakukan suatu komparasi antara dua volume APSR sebagai sampel representatif. Ponce kemudian melakukan perbandingan atas dua volume APSR, yaitu terbitan tahun 1996 sebanyak 4 edisi dan dan terbitan tahun 1997 sebanyak 4 edisi. Total keseluruhan artikel yang ada di dalamnya berjumlah 78 buah. Hasil pencermatan atas berbagai tema dalam 78 artikel tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

¹⁷¹ Ada Finifter. (2000). Editor's Notes. *American Political Science Review*, 94, 4, viii-xi.

¹⁷² *ibid.*

Tabel 6. 1. Jumlah artikel tiap bidang dan metodologi

Field / Methodology	Quantitative		Qualitative	Total
	Statistical Methods	Rational choice approach		
American Politics	14	2	7	23
Methodology as a separate field	1	1	2	4
International Relations	2	5	3	10
Political Theory	0	0	7	7
Comparative Politics	20	7	7	34
Total	37	15	26	78
	52			

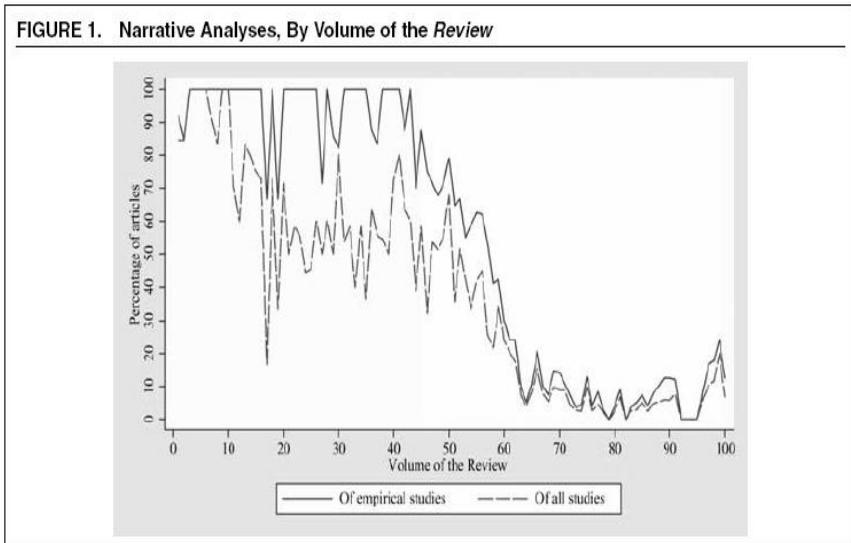
Source: American Political Science Association Review. Volume 96, numbers 1, 2, 3, and 4; and Volume 97, numbers 1,2, 3 and 4

Setelah dilakukan evaluasi terhadap isi dari artikel yang ada di dalam dua volume tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa penemuan sebagai berikut¹⁷³: Dari daftar di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan. *Pertama*, metodologi yang dominan adalah metode kuantitatif (Sekitar 66,6% dari total sampel). Kategori ini termasuk di antaranya adalah termasuk metodologi empirik, yaitu penggunaan ekonometri serta prinsip-prinsip *rational choice*. Penggunaan *rational choice* sendiri hanya mencakup 19,2% dari total sampel. Sementara itu hanya 33,3% di antara artikel dalam dua volume tersebut yang menggunakan metode kualitatif.

¹⁷³ Aldo F. Ponce, op.cit.

Sementara itu, dalam hasil survey terbaru atas APSR yang dilakukan oleh Sigelman pada gambar 6. 1 , mulai dari volume pertama hingga volume ke 100, terlihat bahwa terdapat penurunan yang sangat signifikan atas metode dari pendekatan lain di dalam APSR, Penurunan tersebut terlihat secara drastis pada volume ke 60 hingga 70. Pada gambar tersebut terlihat, bahwa analisis naratif yang sebelum dekade 40-an masih sangat dominan dalam berbagai volume APSR, mulai menurun kuantitasnya hingga hanya mencapai sekitar 5 % per edisi pada volume-volume terakhir.

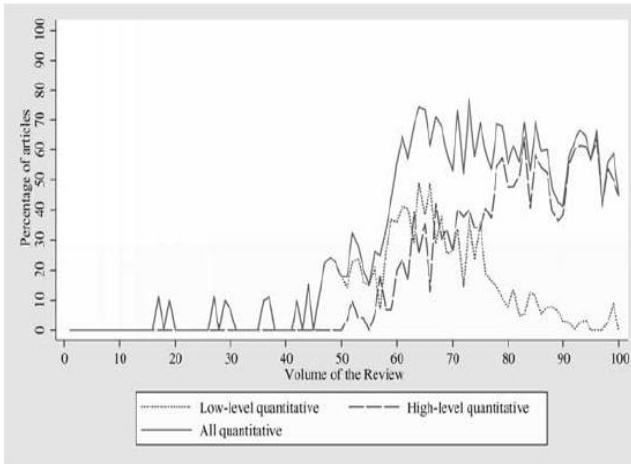
Gambar 6.1. Jumlah Analisa Naratif di tiap Volume



Sumber: Lee Sigelman “The Coevolution of American Political Science and the *American Political Science Review*”, APSR, November 2006, Vol. 100 No. 4 p.468

Gambar 6.2. Jumlah Analisa Kuantitatif di tiap Volume

FIGURE 2. Quantitative Analyses, By Volume of the Review



Sumber: Lee Sigelman “The Coevolution of American Political Science and the *American Political Science Review*”, APSR, November 2006, Vol. 100 No. 4 p.468.

Adapun jika kita lihat pada tabel 6.1 di atas tentang penggunaan metode kuantitatif dalam berbagai artikel yang dimuat dalam APSR, terlihat bahwa grafiknya naik secara sangat tajam pada volume ke 50 hingga 60. Hal itu sekaligus menunjukkan bahwa metode kuantitatif makin mendominasi APSR sebagai jurnal paling prestisius dalam ilmu politik di Amerika.

Fakta-fakta yang tersaji di atas tersebut mengkonfirmasi dan mengafirmasi klaim utama dari pemrotes dari aliran keilmuan di luar behavioralisme yang berpendapat bahwa metodologi dominan dalam APSR adalah metode kuantitatif, adapun sisanya, semua bermuatan positivistik. Terlebih lagi, tidak ada satupun di antara artikel yang ada yang berasal dari perspektif

postmodernisme. Berdasar pada sampel dan fakta ini, salah satu dari ketidakpuasan terhadap APSA mungkin datang dari posisi marginal paradigma postmodernisme dalam jurnal APSR.

Kesimpulan

Tidak dapat disangkal bahwa ketidakpuasan yang sangat besar yang muncul diakibatkan oleh dominasi behavioralisme dalam dunia ilmu politik Amerika. Ketidakpuasan ini juga telah dihasilkan akibat pembatasan-pembatasan analisis kaum behavioralis dalam menyediakan generalisasi dan prediksi yang akurat bagi semua fenomena politik. Asumsi Popperian yang mendasar, tentang netralitas, testabilitas, falsifiabilitas dan tentatuvitas telah menciptakan kekakuan yang menyebabkan para ilmuwan menghindari segala macam intervensi dalam politik dan memanfaatkan secara besar-besaran metode kuantitatif dan model-model *rational choice*, yang sebagai konsekuensinya, kadangkala tidak dapat menjelaskan fenomena politik secara keseluruhan.

Jadi, setiap kekurangan serta keterbatasan epistemologis, metodologis dan ideologis dari behavioralisme atau kombinasi beberapa di antara beberapa keterbatasan tersebut dapat menjadi faktor penjelas dari kebangkitan paradigma-paradigma lain, pendekatan lain, atau gerakan akademik lain yang berupaya menggantikan kedudukan behavioralisme sebagai paradigma yang dominan dalam ilmu politik. Selama behavioralisme dan metodologi ilmiahnya seperti ekonometrik dan *rational choice* tidak dapat diandalkan untuk mengatasi semua kelemahan dan keterbatasan metodologi dalam menjelaskan fenomena politik, perspektif-perspektif alternatif tersebut akan tetap hidup dalam ilmu politik dan mencari kesempatan untuk mengambil alih dominasi behavioralisme.

Namun demikian, semua pendekatan yang ada tersebut telah gagal-paling tidak selama ini- dalam menantang posisi dominan behaviorisme. Seperti halnya kekurangan dan keterbatasan behaviorisme, faktor-faktor yang menjelaskan kegagalan metode dan pendekatan-pendekatan alternatif tersebut juga beranekaragam.

Pertama, adalah kurangnya metodologi alternatif yang jelas. Kritik yang dialamatkan kepada kelemahan metodologi behaviorisme tidak diikuti dengan metodologi alternatif lain yang lebih baik dari metodologi yang selama ini dipergunakan oleh aliran behaviorisme. Akibat ketiadaan solusi ini, maka untuk sementara metode kuantitatif masih mendominasi perkembangan ilmu politik di Amerika. Kelemahan *kedua*, adalah ketiadaan kohesi organisasional dalam kasus *post-behavioralism*. Wadah berupa organisasi ini seharusnya dapat mempersatukan penganut aliran post behaviorisme dalam suatu wadah yang dapat memperkenalkan pemikiran-pemikiran mereka secara lebih masif dan sistematis.

Kelemahan *ketiga*, adalah kegagalan pendekatan-pendekatan alternatif tersebut dalam memenuhi tuntutan pasar dan pemerintah Amerika. Kelemahan *keempat*, dan ini bisa jadi merupakan akibat dari kelemahan ketiga, adalah konstrain finansial, di mana aliran keilmuan di luar behaviorisme kurang mendapat aliran dana yang mencukupi untuk mengembangkan jati diri mereka lewat serangkaian riset. *Kelima*, penggunaan jargon profesional secara berlebihan, dan *keenam*, adalah penyebaran yang terbatas dari pemikiran-pemikiran tersebut dalam jurnal atau media lain yang menjadi representasi profesionalisme ilmu politik. Setiap kelemahan atau kombinasi di antara mereka dapat menjelaskan usaha-usaha gagal dari

perspektif yang berbeda tersebut untuk menggantikan behavioralisme sebagai paradigma yang dominan.

Selanjutnya, bagaimana kita dapat menjelaskan mengapa behavioralisme dapat lebih sukses daripada para penantanginya dalam ilmu politik Amerika? Untuk menjawab pertanyaan ini suatu analisis komparatif antara apa yang dimiliki behavioralisme dan apa yang tidak dimiliki aliran yang lain mungkin dapat memberikan hasil yang menarik. Setelah menentukan semua kelemahan dalam setiap perspektif dari Behavioralisme hingga ke Postmodernisme, pertanyaan lain yang relevan dalam suatu *framework* komparatif antara dua variabel tersebut adalah karakteristik mana yang ada dalam behavioralisme dan mana yang tidak ada dalam perspektif maupun gerakan lainnya?

Pertama, behavioralisme mempergunakan serangkaian metode yang didesain untuk merespon kepentingan pasar dan pemerintah. Melalui penggunaan ekonometrik dan perangkatnya, konsep rasionalitas dan model yang dipergunakan, kaum behavioralis mampu memprediksikan dan menjelaskan fenomena politik secara lebih sukses daripada paradigma lainnya. Keunggulan komparatif ini selanjutnya menyebabkan kaum behavioralis mendapat pendanaan dan hibah bagi riset-riset mereka yang mana kemudian menciptakan insentif tambahan bagi ilmuwan-ilmuwan yang lain untuk melakukan penelitian dengan metode serupa.

Faktor *kedua* terletak pada ikatan organisasi yang terorganisir dan terkelola dengan baik. *Network* kaum behavioralis terkoneksi dengan baik dan semua bagian-bagiannya “berbahasa” Popperian yang sama. Ekspresi maksimum dari kesamaan ini adalah kontrol total atas organisasi akademik dalam disiplin ilmu politik, yaitu APSA (*American Political Science Association*) dan jurnal mereka, APSR (*American Political Science*

Review). Selama pendekatan-pendekatan lain tersebut tidak mampu mengungguli kesuksesan kaum behavioralis dalam memenuhi dua persyaratan tersebut, maka behaviorisme akan meneruskan kejayaannya dalam ilmu politik Amerika.***

BAB VII

PENDEKATAN POSTRUKTURAL DALAM STUDI ILMU POLITIK

Yanuardi*

Pilihan terhadap pendekatan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh ilmuan politik ketika akan melakukan analisis terhadap suatu fenomena politik yang terdapat di dalam masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Vernon van Dyke, Pendekatan adalah suatu kriteria untuk menyeleksi masalah atau data yang relevan¹. Hal ini berarti pilihan terhadap pendekatan akan menentukan kriteria penyeleksian masalah serta data akan diambil dan yang akan diabaikan ketika akan melakukan analisis politik..

Pada awalnya pendekatan dalam studi ilmu politik hanya didominasi oleh pendekatan tradisional yang mempunyai fokus analisa berupa institusi atau aturan main formal didalam sebuah lembaga negara. Fokus analisis yang terbatas ini menyebabkan studi ilmu politik menjadi statis. Perubahan besar dalam studi ilmu politik terjadi ketika munculnya pendekatan behavioral. Pendekatan yang mengambil prinsip-prinsip ilmiah dari ilmu alam

* Dosen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Yogyakarta

atau disebut juga pendekatan yang positivistik ini telah menyebabkan terjadinya Revolusi dalam pendekatan dalam studi ilmu politik. Meskipun demikian pendekatan ini mendapatkan tantangan dari kalangan yang menolak pendekatan tersebut, terutama dari kalangan anti positivistik. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan untuk menghadapi problem yang terkait dengan politik, ditambah lagi dengan dinamika antara kalangan positivistik dan anti positivistik, maka pendekatan dalam kajian ilmu politik juga mengalami perkembangan terus menerus.

Tulisan ini akan mencoba menguraikan salah satu dari pendekatan dalam ilmu politik yang menolak pendekatan positivistik, yaitu pendekatan poststruktural. Pendekatan ini menganalisis suatu fenomena politik dengan menempatkan wacana sebagai fokus pengamatan. Dalam menguraikan pendekatan ini, penulis akan mengawali dengan menguraikan posisi pendekatan poststruktural diantara pendekatan-pendekatan ilmu politik yang lain. Selanjutnya, untuk memahami ide dan konteks yang melatarbelakangi pendekatan poststruktural penulis akan menguraikan ide dan konteks yang melatar belakangi kemunculan pendekatan poststruktural dan pada bagian akhirnya akan diuraikan tentang proses melakukan pengamatan dengan menggunakan pendekatan poststruktural.

Posisi Pendekatan poststruktural diantara pendekatan ilmu politik

Dalam memposisikan pendekatan poststruktural penulis akan menggunakan pemetaan pendekatan-pendekatan dalam ilmu politik yang dilakukan oleh Gary Stoker dan David Mars. Dalam buku yang berjudul *Theory and Methods Political Science* mereka membagi pendekatan dalam ilmu politik kedalam beberapa bagian,

yaitu pendekatan *Behavioral*, *rational choice*, *Institutionalism*, *feminism*, *Interpretative theory*, *Marxism*, *Normative theory*².

Dalam pemetaan ini, mereka berdua memposisikan pendekatan postruktural merupakan variasi dari pendekatan Interpretatif, selain dari pendekatan *hermeneutic* dan *etnology*. Pendekatan *interpretative* adalah pendekatan studi politik yang berfokus pada makna-makna yang membentuk aksi dan kelembagaan dan cara dimana makna-makna tersebut bekerja. Pendekatan postruktural merupakan pendekatan paling akhir yang menyusul setelah pendekatan *hermeneutic* dan *etnology* yang mampu bertahan ketika pendekatan yang bersifat positivistik-terutama *behavioral* dan *rational choice*- mendominasi studi-studi politik. Menurut Stoker dan Mars kehadiran pendekatan postruktural tidak terlalu mendapat dukungan dari variasi pendekatan interpretatif yang lain. Meskipun demikian, kemunculan pendekatan ini telah menjadi tantangan berat bagi pendekatan *behavoirolist* dan *rational choice theory* yang selalu mengasumsikan fenomena politik adalah fenomena yang dapat dijelaskan dengan pendekatan yang berparadigma positifis³.

Perbedaan pendekatan postruktural dengan pendekatan ilmu politik lain adalah bila pendekatan behavioral berupa fokus pada perilaku aktor, pendekatan institusional berfokus pada aturan kelembagaan, *Rational choice theory* pada preferensi-preferensi individu ketika melakukan langkah tindakan politik, pendekatan marxis fokus mengamati relasi antar kelas-kelas sosial yang ada didalam masyarakat, maka pendekatan postruktural lebih memfokuskan kajian kepada pengaruh budaya dominan terhadap pembentukan struktur politik. Dalam hal ini pendekatan ini akan mengamati pengaruh budaya dominan dengan cara mengamati wacana dominan didalam setiap relasi-relasi sosial yang hadir di dalam masyarakat..

Sedang bila dibandingkan dengan pendekatan interpretatif lain yaitu *hermeneutic* dan *etnologi* adalah bila pendekatan Hermeneutik berupaya memahami teks dan aksi politik dengan mengeksplorasi tradisi, sejarah dan perilaku, sedang pendekatan *Etnology* berupaya mendeskripsikan secara mendalam suatu teks atau aksi suatu kelompok masyarakat dengan berada pada posisi pihak ketiga yang sifatnya mengkonstruksi dengan interpretasi pengamat. Pendekatan *etnologi* bersifat mikroskopis⁴. Maka pendekatan poststruktural lebih berupaya memahami upaya dari rejim kekuasaan dan pengetahuan dalam mengkonstruksi individu dan keyakinan kelompok agar dapat mematuhi wacana-wacana yang telah diproduksi dan disebar oleh rejim pengetahuan dan kekuasaan.

Ide dan konteks kemunculan poststruktural

Pendekatan Poststruktural dalam studi politik adalah pendekatan yang terpengaruh ide-ide filsafat poststruktural dan posmodernisme. Pemikir-ide ini antara lain Jacques Derrida (1976), Michel Foucault (1977,1986), Jacques Lacan, Jean Francois Lyotard (1984), Richard Rorty (1980), Hayden White (1973,1987). Para pemikir-pemikiri filsafat poststruktural telah memberikan kritik tajam terhadap pengetahuan yang berbasiskan pada filsafat empirisme dan rasionalisme yang menjadi basis terciptanya peradaban moderen. Kedua cara berpikir ini telah melahirkan paradigma berpikir yang positivistik, yang memandang realitas sosial secara dualistik, yaitu keberadaan subjek dan objek. Pendekatan ini telah melahirkan klaim kebenaran objektif yang diperoleh melalui proses ilmiah. .

Para pencetus ide poststruktural dan posmodernisme tidak sepakat terhadap ide pemisahan subjek dan objek, sebagaimana yang dilakukan oleh penganut paradigma positivistik. Bagi mereka,

Subjek dan objek adalah dua buah realitas yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa yang ada dalam suatu realitas sosial adalah intersubjektifitas. Hal ini berarti, klaim objektif yang disampaikan oleh penganut positivistik dalam memandang realitas dunia tidak dapat diterima⁵. Bagi penganut ide poststruktural, klaim kebenaran objektif tidak dapat dilepaskan dari kepentingan rejim kekuasaan untuk melakukan kontrol.

Untuk memahami lebih lanjut tentang ide poststruktural, berikut ini akan uraikan salah satu ide perintis ide-ide poststruktural, yaitu Michel Foucault. Menurut Foucault, kekuasaanlah yang melakukan produksi maupun reproduksi pengetahuan yang menghasilkan wacana, dan dapat mengkonstruksi realitas sosial. Oleh karena itu, klaim kebenaran objektif tidak dapat terlepas dari kepentingan rejim pengetahuan dan kekuasaan. Menurut Foucault, pengetahuan tidak berada di luar kekuasaan. Baginya, kekuasaanlah yang menentukan pengetahuan dalam arti yang bekerja menetapkan mekanisme dan patokan yang memungkinkan untuk membedakan proposisi benar atau salah; menetapkan teknik dan prosedur dalam mencapai kebenaran di atas; menetapkan status bagi mereka yang ditugasi untuk mengatakan hal-hal yang dianggap benar.

Cara pandang yang melekatkan pengetahuan dengan kekuasaan telah menyebabkan pendekatan ini memandang kekuasaan dengan cara yang berbeda dari cara pandangan ilmuwan politik sebelumnya. Bagi Foucault kekuasaan bukanlah terdapat pada kemampuan untuk menguasai sarana-sarana pemaksa seperti kekuatan senjata, otoritas yang diperoleh dari posisi sosial dan jabatan, ataupun penguasaan terhadap sumberdaya material yang membuat orang patuh karena tidak dapat berkata tidak bila dipaksa dengan kekuasaan. Baginya kekuasaan seperti ini adalah

kekuasaan represif yang bersifat negatif, sempit dan picik⁶. Hal ini karena kekuasaan seperti ini tidak dapat benar-benar menuntun orang mematuhiya. Kekuasaan terletak pada kemampuan untuk memproduksi ataupun mereproduksi wacana dengan membentuk pengetahuan yang dapat menentukan benar dan salah⁷. Kekuasaan seperti ini bersifat produktif, karena mampu melahirkan kepatuhan melalui penerimaan terhadap pengetahuan yang dibentuk dan wacana yang diproduksi.

Dengan cara pandang baru terhadap kekuasaan, ide ini memandang kekuasaan pada spektrum yang lebih luas, tidak hanya pada wilayah kekuasaan negara. Sebab, bila orang menggambarkan fenomena kekuasaan sebagai sebuah ketergantungan kepada aparat negara, maka berarti telah menempatkan kekuasaan dengan cara negatif. Aparat negara tidak dapat menutupi jaringan kekuasaan yang aktual. Lebih jauh lagi negara hanya dapat beroperasi di atas dasar sesuatu yang lain, yakni di atas jaringan-jaringan kekuasaan yang telah ada⁸. Kekuasaan hadir pada setiap hubungan sosial yang ada. Dalam relasi-relasi sosial tersebut terdapat rangkaian jaringan kekuasaan -relasi kekuasaan yang jamak- yang mengontrol tubuh, seksualitas, keluarga, hubungan kekerabatan, pengetahuan teknologi dan seterusnya⁹.

Ide ini memahami wacana bukanlah sebagai medium netral di luar subyek penyebar wacana. Pemegang kekuasaan memproduksi wacana di bawah kondisi dan kepentingan tertentu untuk meraih kontrol. Dengan demikian peran bahasa sebagai alat wacana menjadi penting. Bahasa dapat dianggap sebagai *representasi* yang berperan penting dalam membentuk jenis-jenis subyek tertentu, tema-tema wacana tertentu, maupun strategi-strategi didalamnya. Bahasa dalam suatu wacana menjadi *representasi*, karena wacana tersusun dalam sebuah tatanan bahasa yang masuk akal. Tatanan ini disebut dengan *struktur discursif*¹⁰.

Struktur inilah yang membentuk cara seseorang mempersepsikan suatu objek. Struktur diskursif yang berbeda dapat membuat sebuah objek yang sama, dipersepsikan secara berbeda. Perbedaan cara pandang ini dapat melahirkan pemahaman yang berbeda dan akan melahirkan aksi yang berbeda pula.

Pendekatan postruktural dalam studi ilmu politik

Sebagaimana diuraikan diatas ide postruktural mempunyai cara pandang terhadap kekuasaan yang berbeda dengan cara pandang kekuasaan sebelumnya. Tidak seperti kajian politik lain yang memahami kekuasaan sebagai sarana melakukan kontrol dengan memunculkan ketundukan dan kepatuhan dengan cara yang represif dan tidak produktif, sebaliknya pendekatan postruktural menawarkan cara baru memahami kekuasaan, yaitu sarana untuk melakukan kontrol dengan menimbulkan ketundukan dan kepatuhan dengan cara yang persuasif dan produktif. Adapun cara yang dilakukan kekuasaan dalam cara pandang pendekatan postruktural untuk memunculkan kepatuhan dan ketundukan dengan melalui penciptaan pengetahuan dan produksi wacana yang disebarakan melalui jaring-jaring kekuasaan yang dibentuk. Pendekatan postruktural juga memahami kekuasaan dalam spektrum yang lebih luas. Kekuasaan tidak hanya dipahami sebagai kekuasaan negara, melainkan kekuasaan yang hadir pada setiap hubungan sosial yang ada didalam setiap relasi manusia. Kekuasaan pada posisi ini muncul dalam bentuk wacana.

Cara baru dalam memahami kekuasaan ini telah memberikan inspirasi bagi ilmuan politik untuk memahami realitas politik. Inspirasi baru berupa pentingnya mengamati produksi, penyebaran dan interaksi antara wacana - wacana yang dipahami tidak dapat terlepas dari kekuasaan. Inspirasi lainnya adalah politik dapat hadir dalam lingkup yang lebih luas , bukan hanya dalam

ruang lingkup negara. Inspirasi baru dari ide-ide postruktural inilah yang mempengaruhi kemunculan pendekatan postruktural dalam studi politik.

Dalam studi politik pendekatan postruktural mempunyai beberapa kelebihan bila dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan ilmu politik yang lain, baik dengan pendekatan yang bersifat positivistik maupun yang bukan. Kelebihan pendekatan ini antara lain: Perhatian pendekatan ini terhadap wacana menyebabkan pendekatan ini akan memberikan bekal bagi pengamat politik untuk mampu memahami wacana-wacana dominan atau yang distilahkan drzek dengan *software*¹¹ yang hadir dibalik kemunculan aturan-aturan main kelembagaan dan perilaku aktor. Bahkan dalam kontek ini, pengamat yang melakukan analisa politik akan dapat membongkar kepentingan agen-agen kekuasaan yang hadir dibalik produksi dan reproduksi wacana. Dengan, membongkar kepentingan dari agen-agen kekuasaan, maka studi politik dapat ikut terlibat aktif untuk mengangkat wacana-wacana yang ditindas oleh wacana yang dominan. Dengan demikian, hasil dari studi politik tidak terlalu mepedulikan klaim objektif sebagaimana yang diklaim oleh pendekatan positivistik, malahan hasil studi ini dapat terlibat dalam membangun sebuah tatanan politik yang lebih adil dan setara dengan upaya untuk mengangkat wacana-wacana yang ditindas oleh wacana yang dominan.

Dengan memandang kekuasaan adalah mekanisme kontrol yang menimbulkan kepatuhan bersifat produktif, maka penganut pendekatan ini akan fokus mengkaji proses-proses produksi atau direproduksi wacana, penyebaran wacana dan proses penerimaan wacana dalam setiap hubungan sosial. Dalam mengamati hubungan sosial tersebut, penganut pendekatan ini harus dapat menemukan wacana yang mendominasi pada setiap hubungan-

hubungan sosial yang hadir. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengamati wacana yang mampu melahirkan kepatuhan dalam bentuk kemampuan mendisiplinkan dan menghukum seorang ataupun masyarakat melalui penciptaan kriteria, prosedur dan juga norma.

Pendekatan ini memandang wacana sebagai kumpulan pengetahuan yang tidak bebas nilai dan kepentingan. Oleh karena itu, dalam melakukan pengamatan terhadap wacana yang dominan maka pengamat politik yang menggunakan pendekatan postruktural harus dapat mengungkapkan kepentingan dan nilai dari rejim kekuasaan yang menyampaikan atau menyebarkan wacana. Contohnya: Arturo escobar dalam bukunya *encounter developemntalisme* berupaya membongkar kepentingan dan nilai yang hadir dibalik produksi pengetahuan *developmentalisme* yang disebarkan oleh negara-negara maju ke-negara dunia dunia ketiga¹².

Inspirasi baru dari pendekatan postruktural telah mempengaruhi banyak studi politik, seperti studi politik tentang demokrasi dan kebijakan. Perhatian pendekatan postruktural terhadap wacana menyebabkan pendekatan ini mengamati ide-ide sehingga akan lebih memperhatikan substansi. Perhatian terhadap wacana ini telah mempengaruhi munculnya ide demokrasi yang deliberative. Ide ini lebih memperhatikan demokrasi dengan cara pandang yang substantif, ide merupakan antitesa dari cara pandang demokrasi dengan kriteria prosedural.

Dalam studi kebijakan, pendekatan postruktural juga memppunyai pengaruh yang kuat. Perhatian terhadap wacana sebagai representasi dari kekuasaan telah dapat memberikan insiprasi bagi analis kebijakan untuk memahami kebijakan dari sudut pandang substansi. Pendekatan ini dapat mengkaitan antara wacana dominan dan kebijakan publik, sehingga analis akan dapat

mengetahui substansi sebuah kebijakan. Cara yang dilakukan kebijakan ini untuk mengetahui wacana yang dominan adalah dengan memfokuskan kajiannya pada interaksi antar wacana yang mempengaruhi proses keluarnya kebijakan. Dengan demikian, kebijakan yang ditetapkan oleh otoritas kekuasaan tidak dianggap sebuah kebijakan yang statis, tetapi lahir dari pengaruh wacana dominan yang dapat mempengaruhi kebijakan, sekaligus memahami wacana-wacana yang dipinggirkan oleh wacana yang dominan.

Strategi Penerapan Pendekatan Postruktural dalam Studi Politik

Sebagai bagian pendekatan dalam ilmu politik, pendekatan postruktural juga mempunyai langkah-langkah dalam melakukan analisa politik. Dalam memahami kajian politik dengan pendekatan postruktural Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menganalisis dengan pendekatan postruktural adalah sebagai berikut, , *Pertama*, Pengumpulan data dan menemukan wacana yang dominan yang terdapat didalam sebuah teks, baik tertulis maupun tidak tertulis yang ada didalam masyarakat. Kajian ini dapat dikatakan juga kajian pada tahap mikro. Teks tersebut dapat berupa hasil percakapan, berita atau artikel di media, pidato pejabat, dan dapat juga berupa teks-teks kebijakan.

Ketika berupaya mengungkapkan wacana-wacana yang dominan didalam teks, beserta kepentingan dan nilai dari kekuasaan, pendekatan postruktural dapat memanfaatkan disiplin-disiplin ilmu lain, terutama bahasa, dalam melakukan analisis terhadap fenomena politik. Dukungan ilmu bahasa diperlukan, sebab ketika pendekatan ini berupaya menemukan wacana yang dominan yang terdapat didalam sebuah teks, pendekatan ini harus dapat mengungkapkan struktur bahasa yang

terdapat didalam teks tertulis dan maupun teks yang tidak tertulis. Melalui bantuan ilmu bahasa maka teks-teks yang dianalisis akan mampu mengungkapkan wacana dominan yang terdapat didalam sebuah teks baik tertulis maupun tidak tertulis. Karena wacana tersusun dalam sebuah tatanan bahasa yang masuk akal yang dapat disebut dengan *struktur discursif*. Maka dalam melakukan pengamatan in, kemampuan menginterpretasikan sebuah teks melauai *penemuan struktur discursif* dapat menjadi penunjang. Dari kemampuan menginterpretasikan teks, maka akan ditemukan ukuran dan kriteria yang diciptakan oleh agen kekuasaan seperti: baik atau buruk, benar salah, moderen atau tidak moderen, maju dan tertinggal, beriman dan tidak beriman, ilmiah dan tidak ilmiah. Selain itu didalam wacana juga terdapat juga terkandung prosedur-prosedur untuk menormalkan kriteria yang tidak normal. Contohnya penciptaan ukuran dan kriteria yang terkandung di dalam wacana *developmentalisme*. Dalam pengetahuan ini, agen kekuasaan menciptakan kriteria negara maju dan negara tertinggal dan juga tahap-tahap yang perlu dilakukan oleh negara tertinggal untuk mencapai kondisi normal yang diukur dari capaian yang diperoleh negara yang didefinisikan sebagai negara maju.

Kedua, setelah mengetahui wacana yang mendominasi teks, maka pengamat politik perlu mengamati kepentingan dari agen kekuasaan yang ada dibalik diproduksinya wacana tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut pengamat politik dapat memperolehnya dengan cara menelusuri proses terciptanya dan tersebarnya wacana tersebut. Proses penelusuran tersebut akan mempermudah pengamat politik dapat menemukan agen-agen kekuasaan yang menyebarkan teks tersebut. Dengan mengetahui agen-agen kekuasaan tersebut akan diketahui posisi sosial dari agen-agen kekuasaan. Setelah mengetahui agen-agen tersebut beserta posisi sosialnya maka akan dapat diamati kepentingan yang diperoleh

dari agen-agen kekuasaan ketika memproduksi wacana tersebut dan dampak wacana terhadap agen yang mengkonsumsi wacana tersebut. Keuntungan yang dapat diamati dapat berupa keuntungan politik maupun keuntungan ekonomi. Untuk memahami keuntungan tersebut pengamat perlu memahami konteks sosial, politik dan ekonomi yang mendasari para agen-agen kekuasaan memproduksi dan menyebarkan wacana tersebut.

Misalnya ketika mengamati kemunculan Pengetahuan *developmentalime* yang menjadi wacana dominan setelah perang dunia kedua. Analisis politik dapat menelusuri pengetahuan yang diproduksi dan direproduksi oleh dan disebarkan oleh lembaga-lembaga internasional yang didominasi oleh negara yang dikatakan maju. Dengan menentukan kriteria tertinggal, maka keuntungan yang dapat diperoleh adalah: a) lembaga internasional seperti Bank dunia, *International Monetary Fund* (IMF) dapat memberikan tawaran hutang luar negeri kepada negara-negara yang telah dicap sebagai negara yang tertinggal untuk memperoleh modal membangun negara sesuai dengan kriteria dan prosedur negara-negara maju. b) keuntungan ekonom politik yang dapat diperoleh oleh negara-negara maju adalah dapat meningkatkan pengaruhnya terhadap negara-negara yang diwacanakan sebagai negara terbelakang atau miskin untuk mengontrol tindakan politik dan ekonomi dengan negara tersebut. c) dalam jangka panjang dominansi wacana ini telah dapat menimbulkan ketergantungan negara-negara yang dikriteriakan miskin dan tertinggal terhadap negara-negara maju. Dengan kata lain wacana ini dapat melanjutkan kontrol negara maju untuk mengeksploitasi negara-negara tersebut.

Ketiga, setelah menemukan kepentingan agen-agen kekuasaan dibalik penyebaran wacana, analisis politik juga perlu mengamati proses produksi dan penyebaran wacana tersebut. Dalam hal ini analisis politik dapat mengungkapkan strategi-strategi

yang dilakukan oleh agen-agen kekuasaan untuk menyebarkan wacana yang biasanya dengan menanankan kekuasaan dengan cara persuasif dan produktif. Misalnya dengan mengamati kemampuan agen-agen kekuasaan dalam membangun dan memanfaatkan jaringan yang dapat digunakan untuk menyebarkan wacana. Jaringan yang diamati dapat berupa lembaga seperti lembaga keuangan, lembaga politik, lembaga sosial, lembaga penelitian dan termasuk lembaga-lembaga pendidikan seperti Universitas.

Keempat, dalam kajian lebih lanjut, analisis politik dengan pendekatan poststruktural dapat juga mengamati proses wacana tersebut diterima dan dipraktikkan oleh penerima wacana. Dalam mengamati hal ini dapat diamati proses interaksi antara penyebar wacana dan penerima wacana. Pengamat politik dapat mengamati wacana-wacana yang dianut oleh masyarakat sebelum hadirnya wacana baru yang mendominasi wacana mereka. Selanjutnya analisis politik dapat pula mengamati proses interaksi antara penganut masing-masing wacana. Hasil pengamatan ini dapat menemukan proses yang dapat menghasilkan tersingkirkan wacana-wacana yang sebelumnya dianut oleh masyarakat. Selanjutnya pengamat dapat mengungkapkan kondisi apa yang terjadi terhadap masyarakat tersebut setelah menerima dan mempraktikkan wacana baru yang mendominasi mereka. Misalnya penerimaan masyarakat terhadap ide modernisasi dalam pertanian dalam bentuk intensifikasi pertanian, ternyata telah mengakibatkan masyarakat petani dinegara dunia ketiga mengalami ketergantungan terhadap bibit dan pupuk. Ketergantungan ini terjadi karena pengetahuan lokal yang dimiliki oleh petani seperti berupa pengetahuan mengenai teknik pengolahan pertanian dan pembenihan bibit yang berbasis pada pengetahuan lokal yang telah dipelajari mereka secara turun temurun telah mengalami penyingkiran. Akibat ketregantungan ini petani harus mengeluarkan biaya yang tinggi ketika ingin mendapatkan pupuk dan bibit. Bahkan, penerapan

pengetahuan moderen ini telah menyebabkan lahan-lahan pertanian petani mengalami penurunan tingkat kesuburan secara terus menerus.

Penutup

Dari uraian mengenai pendekatan postruktural diatas kita telah menemukan bahwa pendekatan postruktural yang merupakan variasi dari pendekatan interpretatif merupakan pendekatan yang menolak ide-ide positivistik. Pendekatan postruktural lahir dari pengaruh ide-ide postruktural yang dikembangkan oleh pemilir-pemikir postruktural dan posmodernisme yang menolak ide-ide positivistik.

Pendekatan postruktural mendapatkan inspirasi dari ide-ide filsafat postruktural. Ide ini berupa sebuah cara baru dalam memahami kekuasaan. Kekuasaan dalam pendekatan ini dipahami sebagai sebuah cara kontrol untuk mendapatkan ketundukan dan kepatuhan melalui cara-cara yang bersifat produktif. Kekuasaan juga dipandang dalam sebuah spektrum yang lebih luas, bukan hanya kekuasaan yang terkait dengan negara, tetapi juga dipahami dalam sebuah spektrum yang lebih luas. Kekuasaan dipandang hadir dalam setiap relasi sosial yang ada didalam masyarakat.

Dengan cara pandang baru terhadap kekuasaan, pendekatan ini juga telah memberikan sebuah cara pandang baru dalam memahami politik. misalnya dalam memahami demokrasi dan kebijakan publik. Fokus kajian terhadap wacana yang terkait dengan kekuasaan dalam pendekatan ini telah mempengaruhi teori demokrasi. Terutama menekankan cara pandang demokrasi yang substantif. Dalam memahami proses kebijakan pendekatan ini juga telah membantu pengamat untuk mengamati proses kebijakan

dengan cara memahami wacana-wacana yang dominan yang hadir dibalik terumusnya sebuah kebijakan yang dikeluarkan pejabat publik.***

BAB VIII

RATIONAL CHOICE THEORY DALAM ILMU POLITIK: KRITIK DAN PERKEMBANGANNYA

Longgina Novadona Bayo^{*}

Choice is deliberate desire (Aristoteles)

Bagi banyak kalangan ilmuwan politik, *Rational Choice Theory* (RCT) lebih dilihat sebagai sebuah perangkat analisis (*tools*) dibandingkan sebagai sebuah pendekatan dalam ilmu politik (Ward 2002:65). Karena menyediakan seperangkat analisa dalam mencoba untuk menjelaskan berbagai fenome sosial politik di masyarakat, RCT sebenarnya terbilang mapan dalam diskursus ilmu politik. Akan tetapi bukan berarti RCT tidak menuai kritik dari berbagai kalangan ilmuwan. Sebaliknya justru oleh beberapa ilmuwan, RCT dinilai telah gagal secara empirik dalam menjelaskan fenomena politik dewasa ini karena karakternya yang cenderung mengagungkan aspirasi universalisme (Green dan Shapiro 1994, Gandhi 2006). Akan tetapi, apakah RCT telah gagal dalam menjelaskan fenomena politik kontemporer? Tulisan ini mencoba

^{*} Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

untuk melacak berbagai kontroversi dalam perdebatan implementasi RCT, termasuk kritik dan bagaimana arah perkembangan RCT dalam belantara ilmu politik.

Apakah rational choice theory ?

Rational Choice Theory menemukan akarnya pada karya Aristoteles bahwa “*rationality is seen as an instrument for achieving ends which are not themselves determined by reason*” (Allingham 2006:xi). Bagi Aristoteles, pilihan merupakan hasil dari pertimbangan. Sedangkan pertimbangan itu sendiri lebih difokuskan pada instrumen/alat daripada tujuan, dan tujuan lebih ditentukan oleh harapan-harapan. Harapan akan berkaitan dengan tujuan, sedangkan *choice* terkait pada *means*. Dengan demikian, menurut Aristoteles *choice* merupakan hasrat yang menemukan penalaran logisnya guna pencapaian tujuan. Dengan segala keterbatasan pengetahuannya individu akan memilih guna mencapai tujuannya. Dengan kata lain, *choice* merupakan hasrat yang perlu dipertimbangkan dengan hati-hati dan tidak tergesa-gesa (*choice is deliberate desire*). Premis dari Aristoteles inilah yang selanjutnya menginspirasi para RCT *teorists* dalam mengembangkan RCT.

Sebagai sebuah disiplin ilmu, kemunculan dan perkembangan RCT tidak dapat dipisahkan dari revolusi ilmu pengetahuan behavioralisme dalam jagad ilmu politik di Amerika Serikat. Namun, berbeda dengan behavioralist yang meminjam metodologinya dari sosiologi, pendekatan ini meminjam metodologi dari ilmu ekonomi (Ward 2002:65). Asumsi fundamental yang dibangun oleh RCT ini didasarkan pada keyakinan bahwa *homo economicus* sama dengan *homo politicus* sehingga RCT ini menolak bahwa gagasan bahwa aktivitas ekonomi dan politik dapat dipisahkan (Gandhi 2006).

Keyakinan itu diturunkan dari salah seorang pionir yang berjasa dalam mengembangkan RCT, yakni Anthony Downs, yang memakai prinsip-prinsip ekonomi untuk menjelaskan fenomena politik. Dalam bukunya *An Economic Theory of Democracy*, Downs menjelaskan bahwa pijakan bagi RCT didasarkan pada rumus bahwa perilaku politik seseorang didasarkan pada *self-interest* (Downs 1957:22). Downs berusaha untuk memperlihatkan bahwa patokan perilaku rasional individu untuk mewujudkan sebuah pemerintahan yang demokratis sama halnya dengan bagaimana teori ekonomi yang menjelaskan bahwa ekonomi bisa menyediakan patokan yang rasional bagi konsumen dan produsen.

Lalu dimana letak rasional tersebut? Downs menjelaskan bahwa tidak ada alasan yang *apriori* untuk mengira tindakan seseorang adalah rasional, tetapi dia menegaskan bahwa manusia adalah rasional jika kita memprediksi dan menganalisa tindakan mereka (Downs 1957:4). Downs percaya akan rasionalitas konsumen yang berakar pada teori ekonomi klasik sehingga bagi Downs rasionalitas bukan terletak pada "*rational goals*", melainkan pada "*rational means*" untuk mencapai tujuan, yakni *efficient means*, "*maximizing output for given input, or minimizing input for a given output*" (Downs 1967:5). Singkatnya, individu diasumsikan rasional untuk bisa memutuskan pilihan politiknya dengan segala kapasitas nalar yang dimilikinya sebagaimana seorang konsumen yang dengan segala rasionalitasnya mampu memilih produk mana yang cocok baginya. Sehingga teori ini meyakini bahwa dengan kapasitas rasionalitasnya tersebut, perilaku manusia memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan resiko. Dengan demikian perilaku individu dalam konteks politik dapat dijelaskan dan diprediksi, dan sebenarnya dapat direkayasa.

Setidaknya ada empat asumsi dasar yang mengikuti RCT ini: metodologi individualisme; semua tindakan memiliki tujuan,

dapat diukur dan pasti; outcome yang sempurna; serta kemampuan untuk menentukan seluruh pilihan (Ordeshook 1986 in Gandhi 2006). Berbasiskan asumsi-asumsi tersebut mereka mengembangkan RCT. Bentuk mainstream dari rational choice berasumsi bahwa individu memiliki segala hal yang disebut kapasitas untuk bertindak rasional dan mampu melakukan ranking terhadap kompleksnya pilihan yang dihadapinya. Misalnya, individu bisa menyimpulkan bahwa A lebih baik dari B. Juga, individu bisa menerangkan jika A lebih baik dari B dan B lebih baik dari C, maka A lebih baik dari C. Dalam RCT ini nampak aplikasi logika matematika untuk merangkai asumsi-asumsi yang dibangun. RCT ini menggunakan pendekatan deductive-nomological dalam penjelasannya (Ward 2002:69). RCT mengklaim preferensi, kepercayaan, dan strategi yang menguntungkan sebagai alasan mengapa individu mengambil tindakan tertentu. Dengan kata lain, fenomena sosial dipandang oleh RCT theorists sebagai hasil gabungan dari pilihan-pilihan individu, bahwa fenomena sosial harus dibangun diatas kepercayaan, strategi, dan preferensi-preferensi individu. Inilah yang disebut dengan metodologi individualisme.

Perkembangan *rational choice theory*: setting

Dalam banyak literatur yang membicarakan Rational Choice Theory, diskusi tentang RCT biasanya berfokus pada dua hal berikut ini: RCT sebagai sebuah eksplorasi dari apa itu artinya menjadi rasional atau RCT sebagai sebuah deskripsi bagaimana manusia berperilaku (Allingham 2006:xii). Dalam perkembangan RCT kemudian, pilihan yang dibuat oleh individu tersebut dilatarbelakangi oleh setting yang berbeda, yang mengkondisikan individu untuk membuat keputusan. Berdasarkan alur

perkembangan teori ini, setidaknya ada lima setting teori dan aplikasi RCT.

Pertama, RCT dalam setting *pure choice*, yakni memilih dalam keadaan yang penuh kepastian. Yang meletakkan dasar perkembangan bagi *pure choice* ini adalah Samuelson melalui bukunya *Foundations of Economic Analysis* (1947). *Pure choice* ini membayangkan bahwa menu yang disediakan terdiri dari pilihan-pilihan yang sudah pasti dan jelas. Sebuah pilihan dikatakan rasional jika dan hanya jika pilihan tersebut mampu memaksimalkan faedah yang akan didapat. Sedangkan memilih secara rasional sama dengan memaksimalkan manfaat. Akan tetapi perlu kehati-hatian dalam menginterpretasikan pilihan tersebut. Misalnya, anda memilih X daripada Y jika hanya pilihan yang tersedia adalah X dan Y. Dan, anda berasumsi bahwa akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dari X daripada Y ketika anda memilih X daripada Y. Contoh tersebut menggambarkan bahwa manfaat diperoleh sebagai akibat dari memilih, dan bukannya memilih dari manfaat-manfaat (Allingham 2006:4).

Kedua, memilih dalam keadaan yang penuh ketidakpastian. Artinya, individu membuat pilihan dimana menu yang disediakan terdiri dari pilihan-pilihan yang tidak tetap atau tidak pasti. Bagaimana individu membuat keputusan dalam keadaan konflik dan penuh ketidakpastian (Paul Whiteley in Buchanan, 1978:153). Intinya, pilihan-pilihan yang disediakan dalam keadaan penuh ketidakpastian merupakan spekulasi. Oleh karena itu, preferensi melalui spekulasi-spekulasi itu disebut rasional jika dan hanya jika mereka mempunyai properti guna mencapai manfaat yang diharapkan (Allingham 2006:6). Peletak dasar bagi perkembangan *choice under uncertainty* ini adalah von Neumann dan Morgenstern dalam bukunya *Theory of Games and Economic Behaviour* (1944).

Ketiga, *strategic choice*. *Strategic choice* ini mengasumsikan bahwa masing-masing individu mengetahui pilihan yang akan diambil oleh individu yang lain sehingga outcome yang diharapkan akan sangat tergantung pada apa yang menjadi pilihan yang lain. Yang meletakkan dasar bagi *strategic choice* adalah Nash dalam artikelnya yang berjudul “Non-cooperative games” pada tahun 1951. Untuk memilih dalam setting ini, diperlukan konsep *common knowledge* karena mengasumsikan masing-masing pihak menetapkan manfaat-manfaat yang penting menjadi outcome-nya. Oleh karena itu, *strategic choice* didefinisikan sebagai tindakan-tindakan dimana masing-masing bisa memilih hasil outcome tersebut, dan manfaat-manfaat yang telah ditetapkan kepadanya. Dan, tindakan yang rasional dijustifikasi oleh serangkaian argumen yang masuk akal sebagai responnya (Allingham 2006:7).

Keempat, *social choice*, dimana sekelompok orang harus memilih secara kolektif. Yang dimaksud kelompok adalah gabungan dari sedikitnya tiga orang yang memilih secara kolektif dari menu pilihan yang sudah pasti. Semua individu yang didalam kelompok tersebut diasumsikan rasional sehingga mampu merangking pilihan-pilihan yang disediakan. Cara dimana pilihan-pilihan tersebut dipertimbangkan untuk kemudian ditentukan sebagai pilihan kelompok disebut sebagai *constitution for the group* (Allingham 2006: 10). Peletak dasar bagi *social choice* ini adalah Arrow melalui bukunya *Social Choice and Individual Values* (1951).

Kelima, *bounded rationality*, dimana pilihan harus dibuat dengan segala keterbatasan akses terhadap informasi maupun kapasitas pengetahuan. Namun, hingga saat ini masih belum ada (atau mungkin tidak akan pernah ada) kesatuan teori tentang *bounded rationality*. Oleh karena itu yang menjadi pekerjaan rumah ke depan bagi para *teorist RCT* adalah

mengembangkan konsep definisi akan apa itu yang disebut sebagai 'rasional' dalam sebuah situasi dimana kalkulasi dan analisis sangat terbatas dan *costly*. Mereka sepakat bahwa *bounded rationality* bukan merupakan bentuk lain dari *utility maximization*. Sehingga jika *maximizing utility* sama dengan berperilaku rasional, maka RCT mencapai jalan buntu (Allingham 2006:14) karena tidak mampu memberikan penjelasan tentang *bounded rationality*. Mengapa? Karena bagaimana mungkin seseorang bisa mencapai tahap atau berpikir untuk memaksimalkan manfaat yang akan diperoleh dari pilihan yang akan diambilnya jika dia tidak memiliki kapasitas untuk mengakses informasi akan tawaran yang diberikan oleh berbagai macam pilihan.

Melihat perkembangan setting yang dibangun oleh RCT diatas untuk tetap mengembangkan teorinya dan secara khusus untuk terus menyediakan perangkat analisis, maka tidak bisa dipungkiri RCT menempati posisi yang dominan dalam disiplin ilmunya dan tidak berlebihan dikatakan jika RCT ini terbilang mapan dalam disiplin ilmu politik. Setidaknya ada beberapa argumentasi mengapa para pendukung RCT ini mengklaim pendekatan mereka dominan dalam ilmu politik. Pertama, mereka berargumentasi bahwa RCT merupakan teori yang paling *available*, dan satu-satunya kemajuan yang pernah dibuat oleh ilmu politik. Kedua, mereka juga mengklaim bahwa RCT memungkinkan adanya penyatuan teori politik dan ekonomi, sehingga perilaku individu tidak bisa dipisah-pisahkan kedalam wilayah politik dan ekonomi. Ketiga, kekuatan metodologi RCT menyebabkan studi kawasan menjadi usang. Keempat, RCT mempunyai karakter kemampuan prediksi yang kuat sehingga universalisme dalam ilmu politik sangat dimungkinkan (Gandhi 2006).

***Rational choice theory* dalam ilmu politik**

Dikaitkan dengan karakter RCT yang terus ‘memperbaharui’ diri dengan mencoba mengembangkan setting dalam RCT, bagi sebagian ilmuwan politik, dibandingkan dengan pendekatan normatif-tradisional yang merajai disiplin ilmu politik sebelumnya, RCT dianggap mampu memberikan pemahaman dan analisis yang objektif, serta mampu memberikan rekomendasi yang praktis dan general dalam menjelaskan fenomena politik yang terjadi. Pernyataan Hugh Ward (2002:65) bahwa *rational-choice* merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perangkat analisa para ilmuwan politik karena banyak fenomena penting yang bisa dijelaskan, paling tidak secara parsial, dari perspektif ini adalah bukti eksistensi dan penghargaan terhadap RCT.

Persentuhan RCT dalam ilmu politik sendiri diawali dari upaya Anthony Downs – yang notabene merupakan pioner RCT - untuk menerapkan RCT dalam menjelaskan perilaku memilih dan kompetisi partai politik. Asumsinya, individu yang memberikan suara kepada partai politik sangat mengharapkan jika nanti partai yang dipilihnya itu berhasil lolos masuk dalam parlemen, maka diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang memiliki manfaat tertinggi bagi para pendukung partai tersebut. Dalam hal ini partai politik diasumsikan hanya termotivasi oleh hasrat untuk menduduki kursi di legislatif maupun eksekutif, serta untuk perubahan platform kebijakan (Ward 2002:65). Dari Downs inilah kemudian muncul berbagai macam arah untuk mengembangkan RCT.

Dalam ilmu politik, RCT tersebut merujuk pada terminologi seperti *public choice theory*, *positive political sciences*, *rational actor models*, dan *economic approach to politics*. Seringkali antara *rational choice* dan *public choice* digunakan secara tidak tepat dan diperlakukan sebagai sinonim (Friedman 1996:2). Padahal,

keduanya mempunyai titik tekan yang berbeda. Public Choice merujuk pada aplikasi analisis ekonomi dalam pembuatan keputusan politik (publik), sedangkan RCT merujuk pada aplikasi ekonomi pada ranah non-market seperti kehidupan keluarga misalnya. Jika public choice salah atau terbatas untuk diaplikasikan maka RCT mungkin cukup dengan membuktikan kebenaran secara lengkap dan menyeluruh, namun bila RCT gagal maka public choice juga akan ikut gagal bersama RCT. Hal ini menegaskan bahwa RCT memiliki claim yang lebih luas dibandingkan public choice.

Meskipun demikian keduanya berangkat dari pemahaman rasionalitas postulat ekonomi bahwa individu diasumsikan hanya memiliki kecenderungan untuk memuaskan preferensi mereka, tidak peduli apakah pilihan tersebut egoistik atau tidak. Bahwa manusia dipercaya sebagai *rational actor*. Tidaklah mengherankan jika kemudian salah satu premis dari public choice theory mempercayai bahwa manusia pada dasarnya merupakan makhluk yang egois (Dunleavy 1991:3). Jika individu dipercaya hanya memiliki ingin memuaskan hasrat egoisme, maka demikian pula dengan para politisi. Mereka dinilai hanya termotivasi *selfish end* saja dan seolah-olah mengabaikan kelayakan dan peranan dari kebijakan, institusi, dan sistem politik yang ada.

Akibatnya, public choice dinilai terlalu oversimplifikasi karena terlalu menyederhanakan perilaku politik sama dengan perilaku ekonomi yang hanya sebatas didorong oleh *selfinterest*. Asumsi tersebut didukung oleh para ilmuwan public choice seperti James Buchanan dan Gordon Tullock bahwa perilaku *selfish* manusia dalam politik sama dengan perilaku *selfish*-nya dalam ekonomi. Karena kecenderungan para ilmuwan public choice adalah para ilmuwan ekonomi yang memandang manusia sebagai *homo economicus* sebagai *taken for granted*, maka tidak mengherankan jika kemudian mereka melihat teori sebagai *self-*

evident daripada sesuatu yang tidak pasti, bahwa kebenaran adalah jelas, nyata, dan mudah dilihat (Friedman 1996:3).

Menurut Dunleavy, ada empat klaim public choice yang menjadi pijakan untuk mengembangkan public choice theory. Keempat klaim tersebut sama dengan asumsi-asumsi dasar RCT. Pertama, manusia memiliki seperangkat preferensi dimana mereka bisa membuat skala prioritas, dimana akan memudahkan bagi manusia untuk dibandingkannya satu sama lain. Kedua, tatanan preferensi mereka adalah transitive dan konsisten secara logika. Misalnya, seseorang memilih sosialisme daripada liberalisme, dan memilih liberalisme daripada facism, maka dapat diprediksi bahwa mereka pasti memilih sosialisme daripada facism. Ketiga, seseorang dikatakan rasional jika dalam membuat keputusan manusia selalu mencari manfaat yang sebesar-besarnya dan menekan resiko. Keempat, manusia pada dasarnya adalah makhluk yang egois, *selfregarding*, serta bertindak berdasarkan instrumen (Dunleavy 1991:3). Keempat asumsi dasar tersebut digunakan untuk mengembangkan public choice.

Kritik terhadap *rational choice theory*

Sejak tahun 1970, sudah muncul kritik-kritik terhadap RCT. Hal itu didorong oleh dua kecenderungan umum ketika RCT ini diterapkan. Pertama, seluruh tindakan individu tersebut dilakukan secara sengaja. Kedua, bahwa seluruh fenomena sosial dapat diterangkan hanya dengan memperhatikan tindakan individu-individunya (doktrin dari metodologi individualisme). Dengan kata lain, fenomena sosial hanya dilihat sebagai hasil gabungan dari pilihan-pilihan individu, tidak lebih. Karena itu arah kritik dari beberapa kalangan ilmuwan terhadap RCT menyimpulkan bahwa lebih melihat RCT sebagai perangkat analisis daripada sebuah pendekatan. Selanjutnya, karena dipercaya lebih merupakan

sebuah perangkat analisis, dengan sendirinya Rational Choice Theory (RCT) lebih dari sekedar teori. Karena adanya kesamaan dasar dari beberapa variasi RCT itu sendiri, maka penggabungan cara berpikir dari ilmu ekonomi dalam RCT lebih bertujuan untuk mengkritisi implementasi RCT dalam ilmu politik.

Menurut Hugh Ward, ada 4 aspek yang bisa dilihat untuk mengkritisi RCT. Pertama, relevansi RCT terkait dengan *bounded rationality*. Kritik tentang RCT dari sisi ini muncul kuat melalui hasil karya Herbert Simon tentang bounded rationality. Simon berasumsi bahwa dengan informasi yang serba terbatas, dengan waktu yang terbatas, serta dengan kapasitas kognitif yang terbatas pula untuk mengakses informasi, Simon membayangkan individu akan menggunakan *heuristics method* atau penyelesaian masalah dengan *trial-error* untuk membentuk standar operasi prosedur (SOP) sebagai *guide* guna memperoleh hasil yang memuaskan. SOP dan metode *heuristics* tersebut muncul ketika para pemain mengikuti pola metode mereka yang telah sukses sebelumnya dalam menerapkan metode tersebut (Ward 2002:72-73). Dalam ilmu politik sendiri, Ostrom (1997; Ostrom *et.all.* 1994 in Ward 2002:73) membicarakan juga tentang model generasi kedua dari *collective action* yang berdasarkan bounded rationality. Individu dibayangkan mengembangkan range *heuristics* untuk sepakat dengan permasalahan kapan iya dan kapan tidak untuk saling bersimbiosis.

Kritik yang kedua berasal dari kalangan sosiologi. Ilmuwan sosiologi mengklaim bahwa sebagian besar perilaku individu merupakan fungsi dari struktur sosial. Pilihan merupakan khayalan bagi individu-individu, karena itu pendekatan rational choice yang berdasarkan pilihan individu tidak akan membantu (Ward 2002:74). Sebagai contoh, dalam perilaku memilih ilmuwan sosiologi menilai bahwa pendekatan Downsian yang menekankan

posisi individu yang otonom dalam struktur sosial adalah inferior. Bagi kalangan sosiologi, pilihan individu akan sangat dipengaruhi oleh kelas sosial, lokasi geografi, lokasi produksi dan konsumsi, gender, agama, dan pertimbangan-pertimbangan sosial lainnya. Semua variable-variable tersebut saling berkorelasi untuk membentuk *voting behaviour* seseorang. Kebanyakan individu akan mengikuti aturan yang sudah berlaku daripada membuat pilihan-pilihan.

Singkat kata antara RCT dan ilmuwan sosiologi berada pada dua titik ekstrem. RCT terlalu mempercayai rasionalitas individu dan otonomi individu dari struktur sosial, sedangkan para ilmuwan sosiologi terlalu mempercayai bahwa seluruh tindakan-tindakan individu *an sich* ditentukan oleh struktur sosial (Ward 2002:74). Karena kuatnya pendekatan *methodological individualism* dalam RCT, banyak ilmuwan RCT berpendapat bahwa struktur sosial tidak menyediakan elemen dasar penjelasan dalam ilmu sosial. Oleh sebab itu, mereka merasa perlu untuk menjelaskan struktur dengan memakai pendekatan RCT. Pada tataran praksis, sesungguhnya, tidak mungkin bagi RCT untuk meniadakan faktor *taken-as-given* struktur dari apapun aplikasi RCT (Ward 2002:75).

Kritik mendasar ketiga berasal dari kalangan ilmuwan psikologi. Mereka berargumentasi bahwa motif-motif individu harus tidak merefleksikan *self-interest*. Kalangan psikolog percaya bahwa iri hati adalah penting dan itu tidak sesuai dengan *self-concern*; serta bisa mendorong tindakan balas dendam, kejahatan dan tingkah laku rakus yang mungkin sudah eksis sebelumnya dalam diri individu tersebut. Mereka percaya bahwa individu bisa melakukan tindakan negatif itu. Pada dasarnya, kalangan psikolog ini merasa khawatir dengan dieksklusikannya elemen altruisme dari model-model *rational choice* dalam politik. Padahal menurut para psikolog banyak bukti empiris yang

menunjukkan bahwa seringkali individu bertindak mengutamakan kepentingan orang lain dalam kehidupan politik. Artinya, ketika individu bertindak sesuai dengan norma sosial di masyarakat, itu berarti sebenarnya individu telah mengorbankan kepentingan pribadinya (Ward 2002:79). Dengan demikian, secara normatif orientasi rational choice tidak disatukan dengan kepentingan pribadi. Sesungguhnya dalam menjelaskan fenomena politik, RCT hampir selalu menyadari bahwa altruisme adalah penting. Namun, RCT gagal menjelaskan altruisme, dan cenderung menyederhanakan altruisme sebagai sesuatu yang harus dilihat dalam konteks kepentingan pribadi. Posisi mereka seringkali menyiratkan bahwa implementasi RCT harus dibatasi kepada area-area dimana *self-interest* mendominasi.

Kritik yang terakhir berasal dari kalangan ilmuwan politik. Di tahun 1994, RCT mendapatkan tantangan dengan kemunculan buku *Pathologies of Rational Choice Theory: A Critique of Applications in Political Sciences* oleh Donald P. Green dan Ian Shapiro. Buku ini bukan saja *an sich* mengkritik RCT dan public choice, tetapi juga mendiskusikan tentang metodologi dalam ilmu sosial secara umum. Klaim bahwa manusia secara instrumental rasional sebenarnya lebih pasti daripada klaim bahwa manusia adalah *selfish*. Kebanyakan para kontributor dalam buku tertulis sepakat bahwa RCT harus diuji secara empiris daripada hanya diperlakukan sebagai kebenaran. Dengan kata lain, daya aplikasi dari hipotesis RCT terhadap realitas dunia politik harus dibuktikan secara empiris. Diperlukan sebuah ilmu yang empiris. Dengan kata lain, bagi banyak ilmuwan politik RCT dinilai tidak memiliki rekaman empiris yang baik. Hasrat ilmuwan RCT yang cenderung untuk menciptakan model yang universalitas yang applicable bagi semuanya telah membuat pada pendukung RCT mengelak dan mengabaikan data atau bukti yang bertentangan (Ward 2002:82). Sehingga tidak jarang model RCT disebut 'licik' dalam banyak

variable-variablenya, khususnya preferensipreferensi, tidak secara langsung bisa diukur.

Berpijak pada hal tersebut, kritik Green dan Saphiro sebenarnya lebih pada sisi metodologi dari RCT. Ada beberapa '*methodological pathologies*' menurut para ilmuwan politik yang melandasi kritik mereka terhadap RCT. Pertama, apa yang dikenal dengan *post hoc theory development*. Dikatakan demikian karena RCT theorists cenderung untuk melihat data-data empiris terlebih dahulu, baru kemudian mendesain model RCT yang cocok dengan data empiris tersebut. Jika data tidak terkonfirmasi, maka akan diciptakan model baru RCT untuk mendeskripsikan anomali yang terjadi sebagai sesuatu yang 'rasional'. Kedua, RCT diduga merupakan "arbitrary domain restriction". Artinya, disatu sisi RCT ingin memerinci alasan khusus mengapa teori mungkin tidak menjelaskan bagian tertentu dari fenomema. Disisi lain, RCT ingin memberikan kesan bahwa RCT sangat applicable dimanapun RCT diaplikasikan. Ketiga, prediksi-prediksi RCT seringkali hanya secara samar-samar memerinci besarnya efek dari apa yang sedang diprediksinya. Keempat, RCT lebih sering mencari konfirmasi terhadap data daripada membuat pernyataan yang salah terkait hal yang dikajinya.

Singkat kata, aplikasi RCT dalam berbagai skope bidang ilmu pengetahuan secara deskriptif tidak dapat diterima begitu saja. Harus diakui bahwa sebagai perangkat analisis dalam ilmu politik, RCT berkontribusi dalam membantu dalam menerangkan bagaimana struktur muncul dan ditransformasikan. Meski demikian, bagi beberapa ilmuwan politik menilai, RCT sebenarnya telah gagal dalam menjelaskan perilaku politik seseorang, terutama dikaitkan problema collective action secara umum seperti perilaku memilih, persoalan 'free-rider', dan aksi bunuh diri dalam terroisme (Gandhi 2006).

Manusia dengan *collective action*-nya saat ini juga terkadang tidak bisa dipandang sebagai tindakan rasional jika memakai kacamata RCT, seperti maraknya aksi demonstrasi, kerusuhan massal, perlawanan secara langsung terhadap pemerintah, misalnya kasus pendudukan bandara internasional di Thailand dalam rangka menuntut mundur Perdana Menteri Thailand, dan aksi-aksi sejenis. Dewasa ini yang terjadi justru semakin banyak orang yang bergabung dengan berbagai kelompok kepentingan, namun mereka berani mengambil tindakan beresiko tinggi dalam berbagai aksi kolektifnya yang tidak jarang penuh dengan aksi kekerasan. Jika dilihat dari RCT, tindakan mereka tersebut tidak bisa dilihat sebagai tindakan yang rasional baik secara ekonomi maupun formal.

Alasan pokok mengapa RCT dinilai gagal tersebut dikarenakan kesalahan pada sederetan prediksi-prediksinya. Contoh-contoh gejala diatas seperti aksi demontsrasi dengan kekerasan dan aksi terroisme membuktikan bahwa asumsi-asumsi ekonomi yang diaplikasikan pada politik dengan tujuan mensintesa studi ekonomi dan politik ternyata menemui kegagalan. RCT tidak secara memadai memperhitungkan ideologi sebagaimana yang digelisahkan juga oleh para kritikus dari ilmuwan sosiologi terhadap RCT. Anthony Downs mendefinisikan ideologi hanya sebagai "*verbal image of the good society and of the chief means of constructing that society*".

Oleh karena itu, bagi Down, ideologi lebih merupakan sarana untuk kekuasaan, bukan representasi tujuan yang sesungguhnya (Down 1957:96-97 dalam Gandhi 2006). Jika demikian, apakah kepentingan individu mendukung *good society*? Jawabannya tentu saja: tidak, karena ideologi bekerja untuk tujuan yang tidak konkret. Akan tetapi sesungguhnya ideologi memiliki pengaruh yang mendalam terhadap perilaku politik. Misalnya

dalam serangan bunuh diri teroris pada 11 September 2001 lalu yang tentu saja sangat jelas menggambarkan bagaimana ideologi bekerja mempengaruhi perilaku politik seseorang.

Masa depan *rational choice theory*

Bagi para pendukung RCT, tujuan pokok dari pendekatan ini adalah membangun teori guna memahami fenomena empiris politik yang terjadi. Namun, RCT dinilai gagal karena sesungguhnya para pendukung RCT sudah cukup bangga dengan itu semua dan meremehkan ilmuwan yang dalam kaca mata mereka “unscientific”. Pendukung RCT dinilai kurang bisa merealisasikan nilai-nilai RCT. Mereka dilihat condong untuk membangun teori daripada mencari pemahaman tentang realitas politik yang terjadi. Oleh karena itu, untuk menjawab patologi pada RCT tersebut maka yang seharusnya didiskusikan oleh para pendukung RCT bukanlah *self-interest* (kepentingan pribadi), melainkan *self-fulfillment* (pemuahan diri) (Gandhi 2006:7). Artinya, ‘rasionalitas’ harus didefinisikan ulang sebagai *self-fulfillment*.

Jika demikian, apakah dalam ilmu politik tidak membutuhkan kapasitas prediktif? Jika tidak, bagaimana kapasitas prediktif tersebut dikembangkan? Guna menjawab pertanyaan itu, maka tidak *fair* jika menggunakan fondasi essentialist, apakah itu culture maupun rational choice untuk menjelaskan seluruhnya. Jika penjelasan budaya dibuat untuk memperhitungkan segala sesuatu dan berlebihan dalam memberikan penjelasan, maka kemungkinan akan muncul *pathologies of cultural essentialism* (Shapiro 1998:40 dalam Gandhi 2006:7). Oleh karena itu, RCT dalam hal ini mungkin bisa meminjam teori Habermas tentang *Communication Action*, yang menyediakan konsep yang lebih luas dari rasionalitas. Yakni mengakui komunikasi sebagai bentuk strategi dan instrumen rasionalitas, serta fokus pada interaksi sosial daripada hanya

berkat pada individu yang dibayangkan terisolasi dari lingkungan sosial. Dengan kata lain, individu mencapai pemahaman bersama, membentuk ikatan komunal, dan mengkonstruksi identitas kolektif melalui *communicative action* (Miller 1992:222 dalam Gandhi 2006:7). Sementara itu, sebagai sebuah riset program yang aktif, hujatan kritik yang ditujukan kepada RCT mendapatkan respon dari para ilmuwan RCT. Mereka mengembangkan setting RCT dalam situasi *bounded rationality*, dan juga berupaya untuk menjawab tantangan institusi dalam mempengaruhi pembuatan keputusan. Premis RCT bahwa seluruh fenomena sosial merupakan hasil gabungan dari pilihan-pilihan individu kiranya terlalu naif. Pertama, RCT menyadari adanya keterbatasan individu terhadap akses informasi. Artinya ada penyebaran informasi dan komunikasi informasi yang tidak seimbang. Hal itu menunjukkan bahwa RCT sadar dengan adanya *bounded rationality* yang mengikat individu. Dan sebenarnya dalam perkembangan RCT, setting *bounded rationality* sudah digali meskipun masih banyak menyisakan banyak pertanyaan. Kedua, RCT mencoba untuk memperhitungkan *institutional rational choice* sebagai bagian signifikan dari ‘penemuan kembali’ pentingnya institusi dalam ilmu politik (Ward 2002:84). Generasi RCT kontemporer saat ini berusaha mengembangkan *institutional rational choice*, yakni melacak bagaimana aturan institusional bisa menjadi *constrain* bagi tindakan yang rasional dan bagaimana aturan-aturan tersebut lahir. Sebagai contoh, RCT theorists telah mencoba mengaplikasikan *institutional rational choice* dalam pembuatan keputusan/peraturan di tubuh Uni Eropa (lihat Tsebelis dan Garret 1997 dalam Ward 2002:86).

Oleh karena itu, untuk pengembangan RCT ke depan hendaknya para ilmuwan RCT harus memperhitungkan empat hal. Pertama, fungsi *communicative action* dalam mempengaruhi pilihan individu. Kedua, mendefinisikan ulang *self-interest* sebagai

selffulfillment. Ketiga, mengembangkan konsep definisi akan apa itu yang disebut sebagai 'rasional' dalam *bounded rationality*, dalam sebuah situasi dimana kalkulasi dan analisis menjadi sangat *costly* dan terbatas. Keempat, mengembangkan *institutional rational choice*. Namun terlepas dari segala kelemahan RCT, harus diakui bahwa RCT memang mampu menyediakan perangkat analisis dalam menjelaskan fenomena politik***.

BAB IX

RISET PARTISIPATORIS DALAM ILMU PEMERINTAHAN

Muhtar Haboddin^{*}

Tidak menjadi soal betapa pun bodohnya seseorang ada satu hal yang ia ketahui lebih baik daripada orang lain, yaitu sepatunya menjepit kakinya sendiri, dan karena individu yang mengetahuinya sendiri, bahkan walaupun ia buta huruf atau tak tahu banyak dalam segi-segi lain.....setiap individu harus diajak berunding secara aktif, sehingga ia sendiri menjadi suatu bagian dari proses otoritas, dan proses kontrol sosial, yang berbagai kebutuhan dan keinginannya diperhitungkan dalam menentukan kebijakan sosial.

-John Dewey-

Dari hasil pembacaan penulis terbersit sebuah kesan yang menunjukkan bahwa riset partisipatoris berbeda dengan riset konvensional. Dalam riset konvensional peneliti menempatkan diri

^{*} Dosen Ilmu Pemerintahan, Universitas Brawijaya.

mereka sebagai pakar yang berdiri di luar kenyataan sosial yang diteliti, dan memperlakukan warga masyarakat sebagai objek yang pasif. Sementara dalam riset partisipatoris para peneliti menempatkan diri mereka sebagai bagian dari masyarakat yang sedang diteliti dan memandang warga masyarakat sebagai subyek yang mempunyai hak moral untuk kehidupan mereka¹⁷⁴.

Menempatkan diri para peneliti menjadi bagian dari masyarakat yang telitinya dan merubah posisi masyarakat dari objek ke subjek bisa ditafsirkan bahwa sedang terjadi pergeseran paradigmatis dalam bidang penelitian. Tidak hanya itu. Bahkan, dalam riset partisipatoris juga sangat menganjurkan sikap subjektif dalam setiap penelitian sosial, politik dan pemerintahan. Subjektif yang mereka anjurkan adalah

bukanlah subjektifisme yang bersumber pada perasaan, bahwa peneliti lebih tahu dan lebih mampu dari pada mereka yang diteliti; bukan subjektifisme yang lahir dari rasa superioritas pada diri peneliti. Subjektifisme yang mereka anjurkan adalah subjektifisme yang lahir dari rasa kesetiakawanan terhadap anggota masyarakat yang mereka teliti, subjektifisme yang lahir dari 'rasa tepa slira' yang hidup dalam diri peneliti. Dapat juga dikatakan, bahwa subjektifisme yang mereka anjurkan adalah subjektifisme yang lahir dari rasa 'sympathy dan empathy' peneliti terhadap warga yang diteliti¹⁷⁵.

Jadi, dalam pandangan Riset Partisipatoris, peneliti bukanlah seorang yang hanya bekerja dengan kepakaran

¹⁷⁴ Muchtar Buchori, 'Pengantar Terbitan Indonesia', dalam Walter Fernandez dan Rajish Tandon (ed) *Riset Partisipatoris - Riset Pembebasan*, Jakarta, Gramedia, 1993. hlm. x-xi.

¹⁷⁵ Muchtar Buchori, *ibid.*, hlm. xi.

intelektualnya saja, tetapi ia juga adalah manusia yang senantiasa dibimbing dan dituntun oleh hati nuraninya untuk berpihak pada kehidupan masyarakat kecil dan yang terpinggirkan sebagai produk akhir dari keputusan politik.

Muatan kritis yang berbau penyadaran sebagaimana diusung para penggiat Riset Partisipatoris sedikit banyak dipengaruhi pemikir radikal asal Brazil yakni Paolu Freire, seorang pakar pendidikan yang sangat radikal. Keradikalan Paulo Freire terbaca dalam karya *Pendidikan Kaum Tertindas*¹⁷⁶ dan *Politik Pendidikan*¹⁷⁷ sekedar menyebutkan saja.

Sejarah Singkat Riset Partisipatoris

Riset Partisipatoris dipengaruhi oleh Paulo Friere lewat bukunya *Pedogogy of the Oppressed*, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *Pendidikan Kaum Tertindas*. Semangat buku ini diwujudkan dalam riset partisipatoris melalui metode yang menggunakan dialog serta keterlibatan aktif peneliti dalam meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat agar memiliki kekuatan bertindak¹⁷⁸ dalam upaya membebaskan diri mereka dari kemiskinan dan ketertindasan sebagai akibat dari proses pembangunan

Pemahaman semacam ini menjadi menarik untuk melihat kehadiran riset partisipatoris. Menurut beberapa sumber riset partisipatoris lahir pada akhir tahun 1970-an. Kelahirannya dibidani oleh kalangan organisasi non pemerintahan (ornop) yang merupakan tanggapan atas gagalnya pembangunan memenuhi

¹⁷⁶ Paulo Freire *Pendidikan kaum Tertindas* Jakarta, LP3ES, 2000

¹⁷⁷ Paulo Freire *Politik Pendidikan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999.

¹⁷⁸ Robert Chambers, *Memahami Desa Secara Partisipatoris*, Yogyakarta, Kanisius, 1996. hlm. 20; Fernandez dan Tandon, op.cit. hlm. 74

janji-janjinya sebagaimana yang lantang disuarakan di awal pencanangannya. Pembangunan yang semula menjanjikan pembebasan masyarakat di kawasan Asia dan Afrika yang baru saja merdeka, dari keterbelakangan dan kemiskinan menuju kemakmuran, ternyata justru menjerumuskan masyarakat ke dalam lingkaran ketergantungan¹⁷⁹.

Sementara sebagian pengamat dan analis juga memberikan penilaian terhadap kelahiran riset partisipatoris secara beragam. Britha Mikkelsen mengatakan kelahiran riset partisipatoris untuk menjawab kekecewaan sekaligus kritik terhadap asumsi pembangunan sebelumnya¹⁸⁰. Bagi Fernandez dan Tandon, riset partisipatoris merupakan kegiatan yang berarti dalam konteks penilaian kritis terhadap kegiatan pembangunan pemerintah yang dilakukan rakyat¹⁸¹. Selanjut ia mengatakan: *riset partisipatoris merupakan alternatif yang mungkin untuk menyediakan momentum untuk mendesentralisasikan model-model alternatif pembangunan, yaitu pembangunan rakyat dengan partisipasi aktif dari pihak mereka.*¹⁸²

Dengan kata lain, pelibatan masyarakat setempat dalam pemilihan, perencanaan, perancangan, perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek-proyek yang akan mewarnai hidup mereka, sehingga dengan demikian dapatlah dijamin bahwa persepsi setempat, pola sikap dan pola pikir serta nilai-nilai dan pengetahuannya menjadi pedoman dalam pembangunan.

¹⁷⁹ Hari Kusharyono, *Riset Partisipatoris dan Pembangunan*, Fisipol, UGM, 1999. hlm. 70. Skripsi Jurusan Sosiologi, yang tidak dipublikasikan.

¹⁸⁰ Britha Mikkelsen *Metode Riset Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1999. hlm. 72.

¹⁸¹ Fernandez dan Tandon, op.cit. hlm. 139

¹⁸² Fernandez dan Tandon, ibid. hlm. 17.

Penerapan gagasan Freire-an yang berpusat pada peran serta masyarakat-peneliti, nilai lokal masyarakat, pengetahuan yang berbasis kebutuhan masyarakat lokal dalam proses pembangunan sangat subur dikembangkan oleh kalangan ornop dan ilmuwan sosial. Di India misalnya, menggutip Buchari

metodologi riset partisipatoris sudah lama dikembangkan, sebagai reaksi dan koreksi terhadap berbagai kekecewaan yang dialami para peneliti sosial (politik dan pemerintahan) ketika mereka berusaha memahami dan memperbaiki kekurangan yang terdapat dalam masyarakat India melalui penelitian sosial dengan teknik penelitian akademis dan penelitian kebijakan¹⁸³.

Penilaian Buchari senafas dengan pendapat Chambers. Menurut Chambers:

tindakan inovasi dalam riset partisipatoris memang terjadi begitu maju. Bahkan pengalaman India menunjukkan perkembangan pemahaman dalam riset partisipatoris yang patut di contoh dan ditiru. Dan, pada saat yang sama, pertumbuhan dan penyebaran riset partisipatoris berlangsung secara massif dalam skala yang sangat luas karena bersifat internasional.¹⁸⁴

Baik penilaian Buchari maupun Chambers patut dibaca dengan penuh perhatian dan kehati-hatian. Karena keduanya adalah pengamat kritis dalam memberikan penilaian terhadap kemajuan riset partisipatoris, yang sedang berlangsung dengan penuh pesona, tetapi juga diliputi oleh sebuah keterbatasan yang menjadi bagian integral dari riset partisiparis itu sendiri.

¹⁸³ Muchtar Buchari, op.cit. hlm xiii.

¹⁸⁴ Robert Chambers, op.cit. hlm 29.

Pesona dan Keterbatasan

Gambaran riset partisipatoris sebagaimana dijelaskan di atas mestinya dipelajari dan dikembangkan secara massal. Bukan saja dimonopoli para Organisasi non-pemerintahan, tetapi juga oleh para ilmuwan sosial, politik dan pemerintahan. Mengingat kebanyakan riset yang dikembangkan oleh ilmuwan bergerak dari atas ke bawah, sangat akademis, namun tidak mampu membantu masyarakat untuk bertindak. Karena itu, tidak salah dan juga tidak keliru, jika ungkapan yang bernada getir saya tampilkan dengan mengatakan bahwa: pengetahuan ilmuwan cenderung untuk menjadi alat tambahan guna melakukan penindasan. Tidak hanya itu. Lebih parah lagi, hasil risetnya pun banyak menjadi naskah-naskah ilmiah yang tak banyak membantu terjadi perubahan sosial dalam masyarakat.

Sentilan dan kritik semacam ini menjadi penting dikedepankan supaya sang peneliti atau ilmuwan tahu diri bahwa ilmunya tidak banyak memberikan manfaat kepada khalayak. Sembari bertahan pada ilmu yang diyakininya, tetapi juga harus membuka ruang dialog betapa pentingnya belajar pendekatan lain. Belajar tentang riset partisipatoris tidak hanya mengajarkan bagaimana kesederhanaan seorang ilmuwan mempraktekkan ilmunya. Tetapi juga Sang ilmuwan diharuskan melepaskan diri dari kecenderungan memonopoli pengetahuan atas rakyat. Mengapa demikian? Karena cara kerja dari riset partisipatoris berdasarkan prinsip sebagai berikut:

Pertama, menekankan suatu reorientasi antara mereka yang datang dari luar (peneliti/ilmuwan) dan orang dalam (masyarakat setempat) adalah subyek kegiatan pembangunan atau kegiatan penelitian, yaitu proses saling belajar¹⁸⁵; *kedua*, pertukaran

¹⁸⁵ Britha Mikkelsen, op. cit., hlm. 74

informasi dan gagasan diantara masyarakat desa dengan peneliti/ilmuwan, serta diantara peneliti/ilmuwan dengan peneliti/ilmuwan, pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar satu dengan yang lainnya¹⁸⁶;

Ketiga, masyarakat memiliki pengetahuan sendiri yang mesti berbeda dengan pengetahuan para ilmuwan—yang satu ilmu alamiah dan yang satu produk sekolahan—namun pengetahuan tersebut justru merupakan sumber terpenting yang mesti dihargai dalam menyelesaikan masalah-masalah mereka sendiri, apakah untuk meningkat taraf hidup atau membela diri dari kesewang-wenangan pembangunan. Mitos tentang kebodohan atau kesenjangan intelektual masyarakat pinggiran harus ditanggalkan. Masyarakat mempunyai kesadaran terhadap dunia kehidupan yang menjadi sumber pengetahuan mereka;

Keempat, dalam mengupayakan pembebasan dari opresi atas nama pembangunan, para aktivis yang sekaligus juga peneliti berbagi pengetahuan dengan masyarakat. Manakala melakukan penyadaran lewat pendidikan misalnya—tiada lagi jurang pemisah antara yang ahli dan awam. Para peneliti dan masyarakat bersama memaknai realitas sehingga tercipta suatu pengetahuan baru. *Kelima*, ketika bersama memaknai kenyataan agar dapat mencapai refleksi kritis, pemahaman tersebut menyatu dengan konteks sejarah, politik, social, ekonomi dan budaya. Disinilah riset partisipatoris menggunakan metode ‘memahami’ yang sudah menjadi tradisi dalam ilmu-ilmu sosial-kulturalistik;

Keenam, berlainan dengan kegiatan penelitian ilmiah yang semata-mata untuk memuaskan keingintahuan sang ilmuwan atau riset evaluasi-kebijakan yang mendahulukan kepentingan pembuat kebijakan daripada rakyat, riset partisipatoris justru berorientasi

¹⁸⁶ Britha Mikkelsen, *ibid.*, hlm. 77

pada aksi. Aksi pembebasan yang sumbernya adalah refleksi dari proses pemiskinan maupun penindasan atas nama pembangunan¹⁸⁷;

Ketujuh, riset partisipatoris dirancang berdasarkan kesepakatan antara masyarakat dan peneliti. Metode lebih bersifat terbuka dan instrumen penelitian di sesuaikan dengan kondisi masyarakat. Diskusi antara masyarakat dan peneliti terus-menerus dilakukan sembari menganalisis pokok permasalahan yang dihadapi dan berusaha mencari langkah-langkah pemecahan;

Kedelapan, Hasil penelitian tidak hanya bermanfaat bagi si peneliti tetapi juga masyarakat. Perubahan situasi, meningkatnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam memahami dan mengubah serta kemampuan memecahkan masalah mereka atau mengubah situasi kehidupan mereka merupakan hasil yang diharapkan. Pendekatan ini lebih memetingkan pada upaya menggugah dan memberdayakan masyarakat agar mereka mampu memecahkan masalah yang dihadapi dengan kekuatan mereka sendiri dan peneliti hanya bertindak sebagai fasilitator¹⁸⁸;

Delapan prinsip yang dijadikan semangat kerja riset partisipatoris menunjukkan sebuah keterikatan atau kerjasama yang baik antara masyarakat dengan peneliti. Bangunan kerjasama yang setara secara personal dalam berbagi pengetahuan dan mengalami praktis selalu mewarnai seluruh kegiatan riset partisipatoris.

Sekalipun, gambaran riset partisipatoris selalu dipuji dan mengundang decak kagum bukan berarti tanpa celah. Pendekatan yang baik adalah pendekatan yang selalu digugat, dipertanyakan,

¹⁸⁷ Hari Kusharyono op.cit., hlm. 79-80.

¹⁸⁸ Tadjoeeddin Nor Effendi, 'Pengantar' dalam Robert Chambers *Memahami Desa secara Partisipatoris*, Jogyakarta, Kanisius, 1996. hlm.10.

dikritik, lalu dari sana muncul perbaikan. Dalam konteks inilah riset partisipatoris menemukan kekurangannya, diantaranya: *Pertama*, Peneliti maupun fasilitator sering terpaksa pada kegiatan menerapkan teknik riset partisipatoris dan lupa bahwa teknik riset partisipatoris hanya alat di dalam proses pengalihan keterampilan analisis kepada masyarakat;

Kedua, Karena terpaksa pada kegiatan menerapkan teknik per teknik, fasilitator tidak memfasilitasi pembatasan ruang lingkup informasi, tanpa keterhubungan satu dengan yang lain. *Ketiga*, peneliti ataupun fasilitator kadang belum mampu membangun suatu kondisi yang lebih 'dialogis' dan belum terampil untuk memberikan peran semakin besar dan bertahap kepada masyarakat, karena peneliti ataupun fasilitator masih terbiasa dengan pola 'penyuluhan';

Keempat, Fasilitator juga seringkali mengabaikan proses cek silang informasi yang dianggap paling mendasar, agar tingkat kebenarannya dapat dipercaya dan kedalamannya memadai untuk pengembangan rencana selanjutnya¹⁸⁹. *Kelima*, tidak semua orang menerima kegunaan riset partisipatoris. Yang dianggap penting adalah dukungan dari pimpinan dan pemimpin. Hal ini juga berlaku bagi pemerintah dan organisasi pedesaan dengan sikap kersajama dalam kegiatan pembangunan. Kurangnya ketekunan orang-orang kunci dapat membahayakan pelaksanaan riset partisipatoris¹⁹⁰.

¹⁸⁹ Cecep Eka P, 'Metode Pengumpulan Data Kualitatif: PRA' Bahan Penelitian Metode Penelitian Kuantitatif Tingkat Lanjutan, Jakarta, PPKB-LMUI tanggal 21-24-3/2001..

¹⁹⁰ Britha Mikkelsen, op. cit., hlm. 282.

Lalu, Bagaimana Dengan Kita?

Dari penjelasan di atas kita bisa belajar banyak hal, sambil mengoreksi diri dan melihat jejak perjalanan riset yang sudah lama berjalan atau yang dianut begitu mapan para peneliti atau pun ilmuwan sosial di Indonesia. Bagi penulis, riset partisipatoris layak menjadi salah satu pilihan untuk dikembangkan oleh para peneliti maupun ilmuwan politik dan pemerintahan. Alasannya: *pertama*, riset ini bisa membumikan pengetahuan para peneliti ataupun ilmuwan kepada masyarakat. Mengingat, banyak peneliti ataupun ilmuwan sosial yang asyik menjaga jarak dengan masyarakat, tetapi sangat akrab dengan kelompok yang berkuasa. Karena akan mendatangkan imbalan baik material maupun non-material.

Kedua, disinyalir teori dan metodologi yang berada ditangan peneliti ataupun ilmuwan sosial di Indonesia mengalami kemandekkan. Sinyalemen semacam ini dibenarkan Willen Arnoldul Laurens Stakhol, dalam pengukuhan Doktor HC di Universitas Syarif Hidayatullah. Baginya, penelitian sosial dan humaniora sangat tidak memuaskan lagi. Bahkan, nyaris tidak mengembangkan teori dan metodologi¹⁹¹. Sebuah penelitian yang patut direnungi dengan mengedepankan nalar sambil mengadopsi pendekatan lain, yang salah satunya adalah riset partisipatoris.

Kesimpulan

Penulis telah berusaha menguraikan peran dan apa itu riset partisipatoris. Dan, sedikit menyinggung tentang riset konvensional. Sekarang tibalah saatnya penulis untuk memberikan sedikit komentar yang berupa penyimpulan. Yang terpenting dari riset partisipatoris adalah usahanya yang jelas untuk mendukung

¹⁹¹ Kompas, 10 Juli 2006.

pemerataan dan melenyapkan perbedaan antara peneliti dan penduduk. Pemerataan kekuasaan ini mengandaikan bahwa riset tersebut merupakan proses aksi-refleksi-aksi atas interaksi antara orang luar—yang tidak lagi berfungsi sebagai seorang pakar, melainkan sebagai seorang katalisator—dan rakyat setempat.

Dari sini dapat dikatakan bahwa sumber-sumber kritis dari proses itu adalah rakyat yang dapat menyumbangkan gagasan—informasi—pandangan—analisis dan lebih dari semua itu, menyediakan konteks bagi penelitian. Dan, yang tidak kalah pentingnya dari pendekatan ini adalah bahwa kontrol seluruh proses riset dan tindakan itu harus dibagikan oleh peneliti ahli dan rakyat dimana peneliti hanya memainkan peranan pendukung bagi rakyat^{192***}

¹⁹² Fernandez dan Tandon, op.cit. hlm xxix.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salim, 2006. *Bangunan Teori*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Salim, Agus. 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Amal, Ichlasul dan Winarno, Budi. (tt) *Metodologi Ilmu Politik*, Jogyakarta: PAU-UGM.
- Api. 2001. *Panduan Parlemen Indonesia*, Bogor, Grapika Mardi Puanan
- Apter, David. 1977. *Pengantar Analisa Pilitik* . Jakarta: LP3ES.
- Asfar Muh. 'Wanita dan Politik' dalam Liza Hadiz (ed). 2004. *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru*, Jakarta: LP3ES.
- Abdullah, Taufik, 1979. *The Social Sciences in Indonesia: Performance and Perspectives*.
- Abqary, Qusthan. 2009. *Melawan Fasisme Ilmu*. Jakarta: Kelindan.
- Alatas, Syed Farid, 2010. *Diskursus Alternatif dalam Ilmu Sosial Asia: Tanggapan terhadap Eurosentrisme*. Bandung: Mizan Publika.
- Alfian, 1979 (a). *Political Science in Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- _____, 1979 (b). *Ilmu Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____, dan Mukmin, Hidayat (ed), 1985. *Perkembangan Ilmu Politik di Indonesia serta Peranannya dalam Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Rajawali-AIPI.
- Amal, Ichlasul dan Winarno, Budi. *Metodologi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Pusat Studi Sosial Universitas Gadjah Mada.
- Andersen, Akerstrom Niels, 2003. *Discursive Analytical Strategies*. Bristol: The Policy Press.
- Afifi, Irfan, 2004. *Membongkar Selubung Ideologis Kepentingan Imu*. Makalah, Diskusi Mingguan, BPPM Balairung, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Desember 2004.
- Azizah, Nur, 2008. *Peta Pemikiran tentang Perempuan dan Politik. Working Paper*, Program S3, Sekolah Pasca Sarjana, Program Studi ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Tidak diterbitkan.
- Abdullah, Taufik, 1979. *The Social Sciences in Indonesia: Performance and Perspectives*.
- Abqary, Qusthan. 2009. *Melawan Fasisme Ilmu*. Jakarta: Kelindan.
- Arndt, HW (ed), 1987. *Pembangunan dan Pemerataan: Indonesia di Masa Orde Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Ashcroft, Griffiths, et all (ed), 2001. *The Post Colonial Studies Reader*. London and New York: Routledge.
- Budiardjo, Miriam, 1986. *Pendekatan-Pendekatan dalam Ilmu Politik*. Dalam *Jurnal Ilmu Politik*, 1986. Edisi 1. Jakarta: Asosiasi Ilmu Politik Indonesi (AIPI) dengan Gramedia.
- _____, 1989. *Perkembangan Ilmu Politik*. Makalah disampaikan pada upacara "Memasuki Masa Purnabakti di Fakultas Ilmu

- Sosial dan Ilmu Politik”, Universitas Indonesia, 1 April 1989.
- _____, 1998. *Menggapai Kedaulatan untuk Rakyat: 75 Tahun Prof: Miriam Budiardjo*. Bandung: Mizan.
- _____, dan Rauf, Maswardi, 1983. *Perkembangan Ilmu Politik di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____, 1994. *Demokrasi Di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____, 1999. *Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- _____, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Barry, Brian. 1991. *Democracy and Power: Essays in Political Theory 1*. Oxford: Clarendon Press.
- Bourdieu, Pierre, 1995 (a). *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Budiman, Arief. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ballington, Julie ‘Pengantar’ dalam IDEA Internasional, 2002. *Perempuan di Parlemen Bukan Sekedar Jumlah*, Jakarta: IDEA.
- Bary, Norman P., 1995, *An Introduction to Modern Political Theory*, The Macmillan Press LTD, Basingstoke, Hampshire RG21
- Britha Mikkelsen *Metode Riset Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Bevir, Mark (*ed in chief*), 2007. *Encyclopedia of Governance*. London: SAGE Publications.

- Cecep Eka P, 'Metode Pengumpulan Data Kualitatif: PRA' Bahan Penelitian Metode Penelitian Kuantitatif Tingkat Lanjutan, Jakarta, PPKB-LMUI tanggal 21-24-3/2001..
- Chilcote, Ronald H. 2003. *Teori Perbandingan Politik, Penelusuran Paradigma*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Cohn, Jonathan. (1999). Irrational Exuberance. When did political science forget about politics? *New Republic*.
- Crain, Ian. 1994. *Teori-Teori Sosial Modern*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Chamers, AF, 1983. *Apa Itu yang Dinamakan Ilmu?* Jakarta: Hasta Mitra.
- Chomsky, Noam, 2000. *Bahasa dan Pikiran*. Jakarta: Penerbit LOGOS.
- Dhakidae, Daniel, 2003. *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dhakidae, Daniel.1992. 'Spes dan Secercah Harapan' dalam VEDI Hadiz Politik, *Budaya dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Gramedia dan Yayasan Spes.
- Dryzek, John S., 1990, *Discursive Democracy Politics, Policy and Political Science*, Cambridge University Press.
- _____,1997, *Politics of the earth Environmental Discourses*, Oxford University Press
- _____,2000, *Deliberative Democracy and Beyond Liberals, Critics, Contestation*, Oxford University Press
- Darity, Willian A Jr (*ed in chief*), *International Encyclopedia of Social Science. 2nd Edition*. Volume 8. Macmillan Reference USA.

- Easton, David. 1984. *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik*, Jakarta, Bina Aksara.
- Erawan, I Ketut Putra, Materi Perkuliahan 'Skope dan Metodologi Ilmu Politik' Tahun Ajaran 2006/2007.
- Erianto, 2001, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, LKIS, Yogyakarta,
- Escobar, Arturo, 1995, *Encounter Development The Making and Unmaking of the Third World*, Princeton university Press new, New Jersey
- Eriyanto, 2001. *Analisis Wacana*. Yogyakarta: LKIS.
- Fakih, Mansour, 2009. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Federspiel, HM, 1992. *Muslim Intellectual and National Development in Indonesia*. New York: Nova Science Publisher.
- Fisher, Alec, 2001. *Critical Thinking an Introduction*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Foucault, Michel, 1966. *Les mots et les choses. Une archeologie des sciences humaines*. Paris: Gallimard, coll.
- ___, 1979. *Dicipline and Punish: The Bird of the Prison*. New York: Penguin Books.
- ___, 1980. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*. Edited by Colin Gordon. New York: Pantheon Books.
- ___, 1995. *Dicipline and Punish: The Bird of the Prison*. New York: Vintage Books.

- ___, 1997. *Disiplin Tubuh: Bengkel Individu Modern*. [Petrus Sunu Hardiyanta (Penyadur)] Yogyakarta: LKIS.
- ___, 1997. *Sejarah seksualitas: Seks dan Kekuasaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- ___, 2002 (a). *Pengetahuan dan Metode: Karya-karya Penting Michel Foucault*. Yogyakarta: Jalasutra.
- ___, 2002 (b). *Wacana Kuasa/Pengetahuan*. Yogyakarta: Bentang.
- Foucault, Michel ,2007, *Order of Thing : Arkeologi Ilmu-ilmu Kemanusiaan*, (terjemahan), Pustaka Pelajar
- Foucault, Michel ,2002 *Power and Knowledge*, (terjemahan), Bentang budaya Yogyakarta
- Fakih, Mansour ‘Gerakan Perempuan dan Proses Demokratisasi di Indonesia” Jurnal UNISIA No.34/XIX/II/1997.
- Finifter, Ada W (ed). 1983. *Political Science: The State of the Discipline*, Washington D.G. APSA.
- Finifter, Ada, (ed). (1993). *Political Science: The state of the discipline II*. Washington DC: APSA.
- Gaffar, Afan 2004. ‘Dari Negara Ke Negara Perubahan Paradigma dalam Ilmu Politik’ dalam Sukandirrumidi dkk(peny) Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora, Yogyakarta, UGM Press.
- Gaffar, Afan. 2001. *Dari Negara ke Negara: Perubahan Paradigma Dalam Ilmu Politik*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Politik Fisipol UGM Yogyakarta.
- Gaffar, Afan, 2001. *Dari Negara ke Negara Perubahan Paradigma dalam Ilmu Politik*. Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar pada FISIPOL, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

- Goodin, Robert E. & Klingemann, Hans-Dieter (ed.). 1996. *A New Handbook of Political Science*. New York: Oxford University Press.
- Graham, George J. and George W. Carey. (1972). *The post-behavioral era: perspectives on political science*. New York: David McKay Company, Inc.
- Griffiths, Martin 2001. *Lima Puluh Pemikir Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Murai Kencana.
- Gandhi, Leela, 2001. *Teori Poskolonial: Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat*. Yogyakarta: Qalam.
- Haiz, Vedi.1992. *Politik, Budaya dan Perubahan Sosial*, Jakarta, Gramedia dan Yayasan SPES.
- Hajer, Maarten and Wagenar, Hendrik, 2003, *Deliberative Policy Analysis Understanding Governance in the Network Society*, Cambridge university press,
- Hardiman, F. Budi. 2003. *Melampaui Positivisme dan Modernitas, Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hari Kusharyono, *Riset Partisipatoris dan Pembangunan*, Fisipol, UGM, 1999. Skripsi Jurusan Sosiologi, yang tidak dipublikasikan.
- Harrison, Lisa. 2007. *Metode Penelitian Politik*. Bandung: Prenada Media Group.
- Hay, Colin, 2002, *Political Analysis A Critical Introduction*, Palgarve, Houndmills Basingstoke, Hampshire Rg21 and 175 Fifth Avenue New York
- Hoogerwerg. A. 1985. *Politikologi*, Jakarta:Erlangga.

- Habermas, Jurgen, 1990. *Ilmu dan Tegnologi sebagai Ideologi*. Jakarta: LP3ES.
- Hadi, Shaummil. 2008. *Third debate dan Kritik Positivisme Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Jelasutra.
- Hadiz, Vedi R, 1999. *Politik Pembebasan: Teori-Teori Negara Pasca Kolonial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- ___ dan Dhakidae, Daniel (ed), 2006. *Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta: Equinox Publishing Indonesia.
- Hartoko, Dick, 1981. *Golongan cendekiawan, Mereka yang Berumah di Angin: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Gramedia.
- Haight, John F, 2004. *Perjumpaan Sains dan Agama: Dari Konflik Ke Dialog*. Bandung: Mizan berkerjasama dengan CRCS UGM.
- Hidayat, Rachmat, 2004. *Ilmu yang Seksis: Feminisme dan Perlawanan terhadap Teori Sosial Maskulin*. Yogyakarta: Jendela.
- Howard, David, 2000. *Discourse: Concepts in the Social Sciences*. Buckingham: Open University Press.
- Humaidi, 2005. *Kritik Foucault Terhadap Positivisme: Pembacaan Arkeologis dan Genealogis atas Rezim Kuasa*. Tidak diterbitkan.
- Hasan, Fuad, 2001. *Studium Generale*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Imawan Riswandha dan Ichasul Amal. 1996. 'Status Mutakhir Ilmu Politik dan Uapaya Membangun Martabat Manusia' dalam Sofian Effendi, Sjahri Sairin dan Alwi Dahlan (ed) *Membangun Martabat Manusia*, Jogyakarta, UGM Press.
- Imawan, Riswandha. 1997. *Membedah Politik Orde Baru*, Jogyakarta; Pustaka Pelajar.

- Imawan, Riswandha. 2000. 'Metode Penelitian Ilmu Politik' Diklat.
- Isaak, Alan C. 1975. *Scope and Methods of Political Science, An introduction to the methodology of political inquiry*. London: The Dorsey Press.
- Isaak, Alan. (1985). *Scope and methods of political science: an introduction to the methodology of political inquiry*. Homewood, Ill.: Dorsey Press.
- Jorgensen, Marrienne W., Phillips, Louise J., 2007, *Analisis Wacana: Teori dan Metode*, Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Johnson, Paul (1988). *Intellectuals*. Harpercollins.
- Kartodirdjo, Sartono, dkk, 1975. *Sejarah Nasional Indonesia (V)*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Keraf, A Sonny, dan Dua, Michael, 2001. *Ilmu Pengetahuan: Sebuah Tinjauan Filosofis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kerr, C, 1963. *The Uses of The University*. Cambridge: Harvard University Press.
- Khun, Thomas, 1970. *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press.
- _____, 1977. *The Essential Tension: Selected Studies Scientific Tradition and Change*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Kleden, Ignas, 1987. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. Jakarta: LP3ES.
- Kasza, Gregory. (2000). "Technicism" supplanting disciplinarity among political scientists. *Political Science and Politics*.
- Katznelson, Ira and Helner Milner, (eds). (2002). *The State of the Discipline III*, New York: Norton.

- Kavanagh, Dennis. 1983. *Political Science and Political Behaviour*. UK: Goerge Allen & Unwin.
- Kerlinger, Fred N. 1990. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Jogyakarta: UGM Press.
- Kuhn, Thomas S. (1970). *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press.
- Kuhn, Thomas S. 2002 (cet. Ke-4). *The Struktur of Scientific Revolutions*, Bandung: Rosda.
- Kuper, Adam dan Jessica Kuper. 2000. *Ensiklopedia Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Rajawali Press.
- Kweit, Mary Greisez dan Robert W Kweit.1986. *Konsep dan Metode Analisis Politik*. Jakarta, Bina Aksara.
- Lichbach, Mark and Alan Zuckerman, (eds), *Comparative politics. Rationality, culture, and structure*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Liftin, Karen T, 1994, *Ozone Discourses: Science and Politic in Global Environmental Cooperation*, Columbia University Press.
- Losco, Joseph dan Leonard Williams. 2005. *Political Theory*, Jakarta: Rajawali Presindo
- Lovenduski, Joni dan Azza Karam 'Perempuan di Parlemen: Membuat Suatu Perbedaan' dalam IDEA Internasional, 2002. *Perempuan di Parlemen Bukan Sekedar Jumlah*, Jakarta: IDEA.
- Lovenduski, Joni. 2008. *Politik Berparas Perempuan* Jogjakarta: Kanisius.
- Lakatos, Imre, 1970. *Falsification and The Metodology of Scientific Reserach Programmes, dalam Imre Lakatos and Alan*

- Musgrave, Criticism and The Growth of Knowledge.*
Cambridge: Cambridge University Press.
- Latif, Yudi, 2005. *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20.* Bandung: Mizan.
- Lutfi, A Nashih, Tohari, Amin, dan Nugroho, Tarli, 2010. *Pemikiran Agraria Bulaksumur: Telaah Awal atas Pemikiran Sartono Kartodirdjo, Masri Singarimbun, dan Mubyarto.* Yogyakarta: STPN Press dan Bogor: Sajogyo Institute.
- Mahasin, Aswab dan Nashir, Ismet (ed), 1984. *Cedekiawan dan Politik.* Jakarta: LP3ES.
- Malo, Manasse (ed), 1989. *Pengembangan Ilmu Sosial di Indonesia Sampai Dekade' 80an.* Jakarta: Rajawali Press – PAU Ilmu-Ilmu Sosial UI.
- Manheim, Karl. *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik.* Yogyakarta: Kanisius.
- ___, 1936. *'The Sociology of Knowledge', Ideology and Utopia.* London: Routledge dan Kegan Paul.
- Marshall, Paul. 1993. *Language, Symbolism, and Politics.* London: Westview Press.
- MD, Mahfud, dkk (eds), 1999. *Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan.* Yogyakarta: UII Press.
- Marsh, David and Stoker, Gerry (ed.). 2002. *Theory and Methods in Political Science (second edition).* New York: Palgrave Macmillan.
- Mas'oeed, Mohtar. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi,* Jakarta: LP3ES.

- Muchtar Buchori, 'Pengantar Terbitan Indonesia', dalam Walter Fernandez dan Rajish Tandon (ed), 1993. *Riset Partisipatoris - Riset Pembebasan*, Jakarta, Gramedia.
- Nordholt, Nico G Schulte dan Visser, Leontine E (ed), 1997. *Ilmu Sosial di Asia Tenggara: Dari Partikularisme ke Universalisme*. Jakarta: LP3ES.
- Nugroho, Heru. 2012. *Negara, Universitas, dan Banalitas: Sebuah Refleksi Kritis dari Dalam*. Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar pada FISIPOL, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.
- Nugroho, Tarli. 2007. *Dari Karsa ke Filsafat, dari Filsafat ke Ilmu: Hidayat Nataatmadja dan Dekolonisasi Pemikiran*. Kata Pengantar untuk buku Hidayat Nataatmaja, *Melampaui Mitos dan Logos: pemikiran ke Arah Ekonomi Baru*. Yogyakarta: Lanskap.
- _____, (a). *Demokrasi, Kebudayaan, dan Sikap Otonom: Surat kepada Kawan*.
- Outhwaite, William (ed.). 2008. *Kamus Lengkap Pemikiran Sosial Modern*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Parsons, Wayne, 2005, *Public Policy : Pengantar dan Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta: Kencana
- Paulo Freire 2000. *Pendidikan kaum Tertindas* Jakarta, LP3ES.
- _____, , 1999. *Politik Pendidikan*, Jogyakarta, Pustaka Pelajar
- Peluso, Nancy, and Watts Michel (Ed), 2001 *Violent and Environments*, Cornell University Press.
- Political Science, Encyclopedia Britannica, Retrieved March 25, 2004, from Encyclopedia Britannica Premium Service, <http://www.britannica.com/eb/article?eu=117541>

- Ponce, Aldo F., *The Behavioralist Empire and its Enemies: a Comparative Study of Successes and Dissatisfactions in American Political Science*, Department of Economics, University of Connecticut, aldo.ponce@uconn.edu.
- Philpott, Simon, 2003. *Meruntuhkan Indonesia: Politik Postkolonial dan Otoritarianisme*. Yogyakarta: LKIS.
- Popper, Karl, 1987. *The Logic of Scientific Discovery*. London: Unwin Hymann.
- Priyono, AE (ed), 1984. *Krisis Ilmu-Ilmu Sosial dalam Pembangunan di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: PLP2M.
- ___ (ed), 1996. *Kebebasan Cendekiawan: Refleksi Kaum Muda*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Priyahita, Widya, 2012. *Apolitical Politics: Kajian Ilmu dan Kekuasaan di Indonesia*. Skripsi Jurusan Politik dan Pemerintahan, UGM, Yogyakarta.
- Purwanto, Bambang dan Adam, Asvi Warman, 2005. *Menggugat Historiografi Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Rais, Mohammad Amien, 2008. *Agenda-Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia!* Yogyakarta: PPSK Press.
- Rahardjo, Dawam, 1993. *Intelektual, Intelegensia, dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim (Kumpulan Karangan Dawam Rahardjo)*. Bandung: Mizan.
- Russerl, Bertrand, 1992. *Dampak Ilmu Pengetahuan atas Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ramlan, Surbakti, "Perkembangan Mutakhir Ilmu Politik" dalam Meriam Budiarjo dan Tri Nuke P (ed), 1996. *Teori-Teori Politik Dewasa ini*. Rajawali Pres.

- Reid, Herbert G. and Ernest Yanarella. (1974). Towards a Post-Modern Theory of American Political Science and Culture: Perspectives from Critical Marxism and Phenomenology. *Cultural Hermeneutics*.
- Ricci, David. (1984). *The tragedy of political science: politics, scholarship, and democracy*. New Haven: Yale University Press.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas. 2003. *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta, Prenada Media.
- Ritzer, George, 2003, Teori sosial Postmodernisme, (terjemahan), Kreasi wacana.
- Ritzer, George. 1985. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta, Rajawali.
- Robert Chambers, *Memahami Desa Secara Partisipatoris*, Yogyakarta, Kanisius, 1996.
- Rosenau Pauline. (1990). Once again into the fray: International relations confronts the humanities. *Millenium*.
- Santosa, Purwo, 1999, *The Politic of Environmental Policy Making in Indonesia: A Study of State Capacity, 1967-1994*, Department of government London school economics and political science, University of London
- Sherlock, Stephen. 2005. Proses Legislatif di Parlemen Indonesia: Isu, Permasalahan dan Rekomendasi, Jakarta: Friedrich Nauman Stiftung.
- Shimozaki, Kazuo, 1994, *Kiri Islam; Antara Moderisme dan Postmodernisme, Telaah Kritis Atas Pemikiran Hasan Hanafi*, Yogyakarta: LKiS,

- Sigelman, Lee. "The Coevolution of American Political Science and the *American Political Science Review*", APSR, November 2006, Vol. 100 No. 4.
- Soetjipto. Ani Widayani ,2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Jakarta: Kompas
- Somit, Albert and Joseph Tanenhaus (1967) *The Development of American Political Science*. Boston: Allyn and Bacon
- Stoker, Gary, and Mars, David, 1995, *Theory and Methods Political Science*, Palgrave Macmillan.
- Subono, Nur Iman. 2003. *Perempuan dan Partisipasi Politik*. Jakarta: YJP
- Suwarsono dan Alvin Y So. 2006. *Perubahan Sosial dan Pembangunan*, Jakarta: LP3ES.
- Sarup, Madan, 2007. *Postrukturalisme & Posmodernisme: Sebuah pengantar Kritis*. Yogyakarta: Jendela
- Sarup, Madan, 2011. *Postrukturalisme & Posmodernisme*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Schroft, Bill A, at All (eds), 2001. *The Post Colonial Studies Reader*. London and New York: Routledge.
- Smith, Linda Tuhiwai, 2005. *Dekolonisasi Metodologi*. Yogyakarta: Insist Press.
- Soedjatmoko, 1956. *The Role Political Parties in Indonesia*.
- ___, 1984. *Etik dalam Perumusan*.
- Sunardi, ST, 2005. *Tahta Berkaki Tiga: Kepemimpinan Intelektual dan Moral Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Sanata Dharma.

- Suyanto, Bagong, 2012. *Anak Perempuan Yang Dilacurkan: Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Santoso, Purwo, 2011. *Ilmu Sosial Transformatif*. Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar pada FISIPOL, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.
- Santoso, Purwo, 2005. *Potret Ilmu-Ilmu Sosial: Di ambang Involusi*. Makalah Ilmiah, dalam Seminar Nasional “Ancaman Kemacetan Ilmu-Ilmu Sosial dan Tantangan Perubahan ke Depan”, FISIPOL, UGM, Yogyakarta, 25-9-2005.
- Said, Edward, 1978. *Orientalism*. New York: Norton.
- Tadjoeddin Nor Effendi, ‘Pengantar’ dalam Robert Chambers. 1996. *Memahami Desa secara Partisipatoris*, Yogyakarta, Kanisius,.
- Tim Dosen Filsafat Ilmu Fak. Filsafat Ilmu UGM. 2003 (cet. Ke-3). *Filsafat Ilmu Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Liberty.
- UNDP. 2003. *Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: UNDP.
- Varma S.P. 1995. *Teori Politik Modern*. Jakarta, Rajawali Press.
- Vredendregt, J. 1985. *Pengantar Metodologi Untuk Ilmu-Ilmu Empiris*, Jakarta: Gramedia.
- Walter Fernandez dan Rajish Tandon (ed) 1993. *Riset Partisipatoris - Riset Pembebasan*, Jakarta, Gramedia.
- Wallerstein, Immanuel, 1997. *Lintas Batas Ilmu Sosial*. Yogyakarta: LKIS.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy, 2012. *Misykat: Refleksi tentang Islam, Westernisasi, dan Liberalisasi*. Jakarta: INSISTS.

JURNAL DAN KORAN

Bivitri Susanti dkk 'Struktur DPR yang Merespon Peran dan Fungsi Lembaga Perwakilan', Draft Laporan 23 November 2005.

Driyarkara, Th. XXII. No. 4, 1996. *Edisi Problematika Filsafat Ilmu Pengetahuan: Antara Historisitas & Objektivitas; Bebas Nilai & Tanggungjawab Moral; Korespondensi & Koherensi.*

___, Th. XXIII No. 1, 1997. *Edisi Teori Kritis dalam Dialog: Horkheimer, Habermas, Gadamer, Foucault.*

___, Th. XXIII No. 4. 1999.

___, Th. XXV No. 1, 2000. *Edisi Seputar Epistemologi.*

___, Th. XXVII No. 3, 2004. *Edisi Pengetahuan sebagai Budaya.*

___, Th. XXIX No. 2, 2007.

Jurnal Ilmu Politik, 1986. Edisi 1. Jakarta: Asosiasi Ilmu Politik Indonesi (AIPI) dengan Gramedia.

Jurnal Pendidikan Penabur No.05/Th-IV/Desember 2005.

Majalah Tegalboto, 2003. *Kritik Relasi Timur-Barat. Edisi Khusus. Jember: Unit Kegiatan Pers Kampus Mahasiswa Universitas Jember (Unej). November, 2003.*

Majalah Tempo, 2011. Liputan Khusus. *Republik di Mata Indonesianis: Pasang Surut Peran Peneliti Asing dalam Sejarah Indonesia.* Edisi 14-20 November.

Prisma, 1983. Edisi Juni 1983.

___, 1987. Edisi Maret 1987.

Kompas, 2/1/2007; *Kompas*, 12/11/2005; *Kompas*, 18/12/2006; *Kompas*, 10/7/2006.

News Letter FITRA, edisi 2/Tahun 1/2002.

